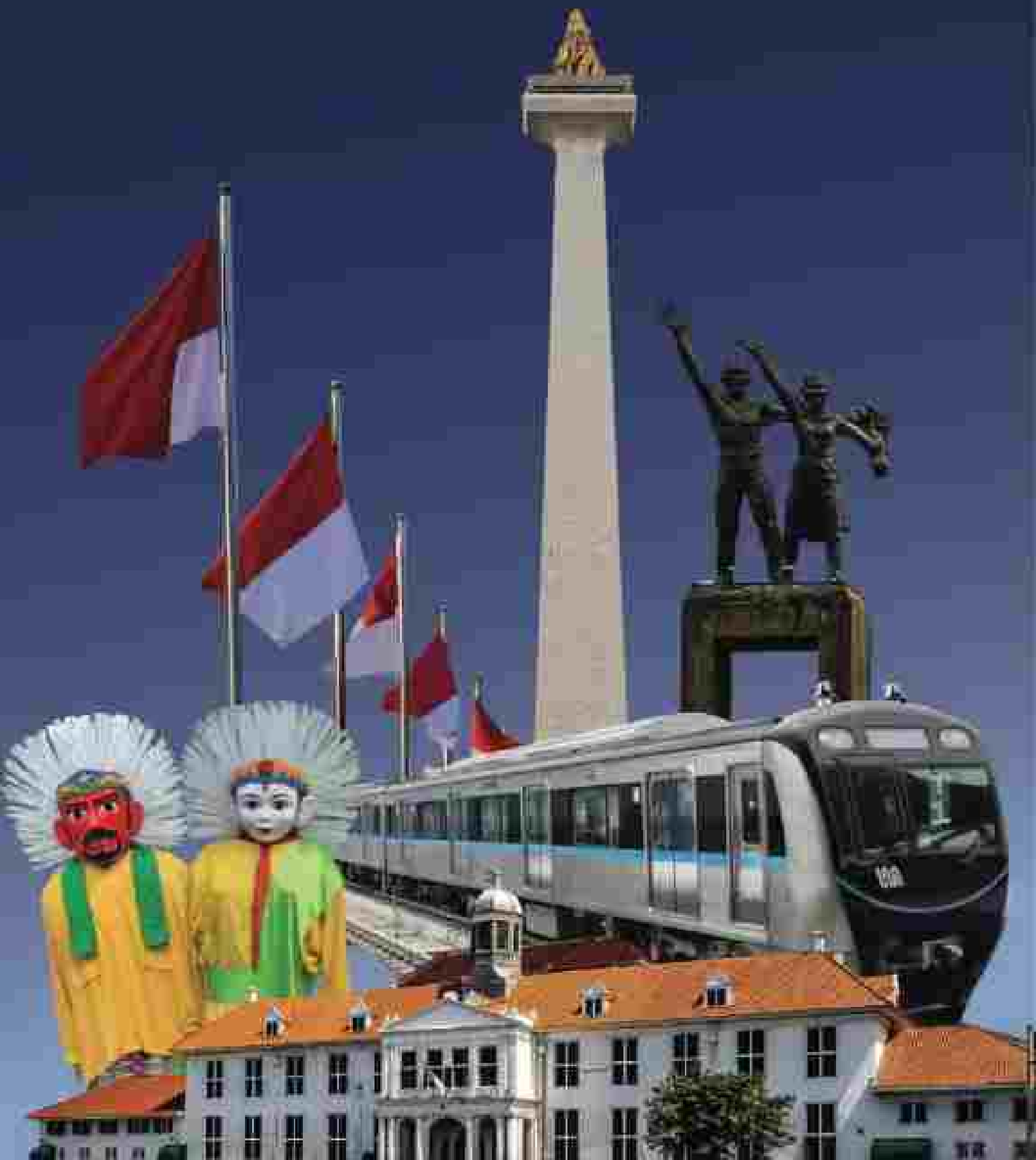
Sukses Jakarta untuk Indonesia

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



SALINAN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, Gubernur perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

(2) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
g. BAB VII PENUTUP

(3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun dan menyempurnakan:

a. rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan

b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2024

PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 51010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197512062002121009

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL I-1
DAFTAR ISI I-2
DAFTAR TABEL I-4
DAFTAR GAMBAR I-10
DAFTAR GRAFIK I-11
DAFTAR SINGKATAN I-12

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-9
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-12
1.4 Maksud dan Tujuan I-14
1.5 Sistematika Penulisan I-15

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah II-2
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Provinsi DKI Jakarta II-2
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta II-13
2.1.3 Potensi Daerah II-22
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-26
2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah II-52
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan I Tahun 2024 ..... II-56
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-92
2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-92
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-94
2.3.3 Urusan Pemerintah Pilihan II-98
2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan II-100
2.4 Inovasi Daerah II-101
2.4.1 Jakarta Innovation Day II-103
2.4.2 Proyek 492 ..... II-104
2.4.3 Gerai Memulai Usaha (Starting Business Corner) II-105
2.4.4 Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) II-107
2.4.5 Aplikasi Mobile Jakarta Satu II-108

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-2
3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global III-2
3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional III-5
3.1.3 Kondisi, Prospek dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah III-9
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-17
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-18
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-24
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-26

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan IV-4
4.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Nasional Tahun 2025 ..... IV-4
4.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-11
4.2 Jakarta dalam Konteks Kota Global IV-19
4.3 Jakarta Rendah Karbon untuk Ketahanan Iklim IV-27
4.4 Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-31
4.4.1 Tantangan Strategis Pembangunan Nasional Tahun 2045-2029 ..... IV-31
4.4.2 Isu Strategis Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-34
4.4.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-55
4.5 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-58
4.5.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-58
4.5.2 Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-63
4.5.3 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... IV-90
4.6 Prioritas Pembangunan Kewilayahan IV-130

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang V-2
5.2 Aspirasi Masyarakat Melalui Reses DPRD V-8
5.2.1 Reses DPRD Tahun 2023 ..... V-8
5.2.2 Reses DPRD Tahun 2024 ..... V-15
5.3 Usulan Langsung Masyarakat V-21
5.4 Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pendanaan) V-24
5.4.1 Rekapitulasi Kerja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah V-24
5.4.2 Rekapitulasi Kerja berdasarkan Perangkat Daerah V-28
5.4.3 Rekapitulasi Kerja berdasarkan Prioritas Nasional (Asta Cita) V-49

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama VI-2
6.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan VI-5
6.3 Sinergitas Pembangunan Daerah VI-26

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ..... II-3
Tabel 2.2 Panjang dan Luas Sungai Menurut Peruntukannya di Provinsi DKI Jakarta II-7
Tabel 2.3 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun BMKG Tahun 2023 ..... II-8
Tabel 2.4 Perubahan Guna Lahan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008 dan 2021 .... II-10
Tabel 2.5 Komposisi Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023 ..... II-12
Tabel 2.6 Komposisi Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Berdasarkan Wilayah Administrasi dan Umur II-12
Tabel 2.7 PDRB Per Kapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023 ..... II-16
Tabel 2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Menurut Dimensi Penyusunannya Tahun 2020–2023 ..... II-18
Tabel 2.9 IPM dan Komponen IPM Kota/Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2023 ..... II-18
Tabel 2.10 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022 ..... II-19
Tabel 2.11 Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022 .... II-20
Tabel 2.12 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2023 ..... II-26
Tabel 2.13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2023 ..... II-27
Tabel 2.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 ..... II-27
Tabel 2.15 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 ..... II-28
Tabel 2.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023 ..... II-29
Tabel 2.17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2023 ..... II-30
Tabel 2.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023 .. II-31
Tabel 2.19 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tahun 2023 ..... II-31
Tabel 2.20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2023 ..... II-32
Tabel 2.21 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2023 .... II-33
Tabel 2.22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023 ..... II-34
Tabel 2.23 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ..... II-34
Tabel 2.24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 ..... II-35
Tabel 2.25 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 ..... II-36
Tabel 2.26 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2023 .. II-36
Tabel 2.27 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ..... II-37
Tabel 2.28 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2023 ..... II-37
Tabel 2.29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2023 ..... II-38
Tabel 2.30 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023 ..... II-39
Tabel 2.31 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2023 ..... II-39
Tabel 2.32 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2023 ..... II-40

Tabel 2.33 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2023 ... II-40
Tabel 2.34 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2023 II-41
Tabel 2.35 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2023 ..... II-41
Tabel 2.36 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 ..... II-42
Tabel 2.37 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2023 ..... II-42
Tabel 2.38 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2023 ..... II-43
Tabel 2.39 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2023 ..... II-44
Tabel 2.40 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 ..... II-44
Tabel 2.41 Target dan Realisasi Indikator Kinerja ngan Tahun 2023 ..... II-45
Tabel 2.42 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2023 . II-45
Tabel 2.43 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Sekretariat Daerah Tahun 2023 ..... II-46
Tabel 2.44 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Sekretariat DPRD Tahun 2023 .... II-47
Tabel 2.45 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Perencanaan Tahun 2023 ... II-47
Tabel 2.46 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Keuangan Tahun 2023 ..... II-48
Tabel 2.47 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Kepegawaian Tahun 2023 ..... II-49
Tabel 2.48 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 ..... II-49
Tabel 2.49 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 ..... II-50
Tabel 2.50 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Inspektorat Daerah Tahun 2023 ..... II-50
Tabel 2.51 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Kota dan Kabupaten Administrasi Tahun 2023 ..... II-51
Tabel 2.52 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ..... II-52
Tabel 2.53 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Provinsi DKI Jakarta Menurut Kompdimas Tahun 2022-2023 (rupiah) II-53
Tabel 2.54 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2023 (rupiah) II-53
Tabel 2.55 Distribusi Pengeluaran Per Kapita Menurut Golongan Pengeluaran dan Indeks Gini di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023 ..... II-54
Tabel 2.56 Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023 ..... II-55
Tabel 2.57 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta sampai Triwulan I Tahun 2024 ..... II-57
Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Global III-3
Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Pengeluaran III-5
Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Lapangan Usaha III-6
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional III-9
Tabel 3.5 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Sisi Pengeluaran III-10
Tabel 3.6 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Sisi Lapangan Usaha III-11
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 s.d Tahun 2025 ..... III-23
Tabel 3.8 Realisasi dan Rencana Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 s.d Tahun 2025 ..... III-25

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 s.d Tahun 2025 ..... III-28
Tabel 3.10 Ringkasan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-204 dan Proyeksi Ringkasan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... III-29
Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-5
Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 1 ..... IV-6
Tabel 4.3 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 2 ..... IV-6
Tabel 4.4 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 3 ..... IV-7
Tabel 4.5 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 4 ..... IV-8
Tabel 4.6 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 5 ..... IV-9
Tabel 4.7 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 6 ..... IV-9
Tabel 4.8 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7 ..... IV-10
Tabel 4.9 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 8 ..... IV-10
Tabel 4.10 Sasaran Pembangunan dan Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-14
Tabel 4.11 Peringkat DKI Jakarta dalam Indeks Kota Global IV-20
Tabel 4.12 Karakteristik Kota Global yang Berdaya Saing IV-20
Tabel 4.13 Gap Kondisi Jakarta dan Kota Global IV-21
Tabel 4.14 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang DKI Jakarta Tahun 2025-2045 ..... IV-25
Tabel 4.15 Target Indikator Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Tahun 2025 ..... IV-30
Tabel 4.16 Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-35
Tabel 4.17 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta IV-56
Tabel 4.18 Kebijakan Umum yang Mendukung Implementasi Prioritas Nasional Tahun 2025 ..... IV-58
Tabel 4.19 *Highlight* Indikasi Interversi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-60
Tabel 4.20 Rumusan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-63
Tabel 4.21 Keterkaitan Dimensi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-65
Tabel 4.22 Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-81
Tabel 4.23 Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta IV-90
Tabel 4.24 Keterkaitan Antara Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-95
Tabel 4.25 Keterkaitan antara Prioritas Nasional Tahun 2025, Parameter Kota Global, dengan Dimensi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Prioritas, dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-98
Tabel 4.26 Sandingan Program Pembangunan Daerah 2025 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Nasional Tahun 2025 IV-117
Tabel 5.1 Rekapitulasi Usulan Awal Fase Rembuk RW hingga Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2024 ..... V-3
Tabel 5.2 Rekapitulasi Usulan Musrenbang Menurut Kategori Waktu Pengakomodasian V-4
Tabel 5.3 Rekapitulasi Usulan Awal Fase Rembuk RW hingga Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2024 ..... V-5
Tabel 5.4 Rekapitulasi Pokok Permasalahan Usulan musrenbang yang Terintegrasi dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 ..... V-6

Tabel 5.3 Rekapitulasi Reses DPRD Menurut Periode Masa Reses Tahun 2023 ..... V-9
Tabel 5.6 Rekapitulasi Reses DPRD Menurut Wilayah Tahun 2023 ..... V-10
Tabel 5.7 Rekapitulasi Reses DPRD Menurut Penyebab usulan Tertolak Tahun 2023 V-11
Tabel 5.8 Rekapitulasi Pokok Permasalahan dan Permohonan Usulan Reses Tahun 2023 yang Terintegrasi dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... V-12
Tabel 5.9 Rekapitulasi Reses DPRD Menurut PD/UKPD Tujuan Tahun 2023 ..... V-14
Tabel 5.10 Rekapitulasi Reses DPRD Masa Reses I Tahun 2024 ..... V-15
Tabel 5.11 Rekapitulasi Reses DPRD masa reses I Menurut Wilayah Tahun 2024 ..... V-16
Tabel 5.12 Rekapitulasi Reses DPRD Menurut Penyebab usulan Tertolak Tahun 2024V-16
Tabel 5.13 Rekapitulasi Pokok Permasalahan dan Permohonan Usulan Reses Tahun 2024 yang Terintegrasi dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... V-17
Tabel 5.14 Rekapitulasi Reses DPRD Menurut PD/UKPD Tujuan Tahun 2024 ..... V-20
Tabel 5.15 Rekapitulasi Usulan Langsung yang Terakomodasi dan Belum Terakomodasi Tahun 2024 ..... V-21
Tabel 5.16 Rekapitulasi Pokok Permasalahan dan Permohonan Usulan Langsung yang Terintegrasi dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... V-22
Tabel 5.17 Penyelenggaraan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .. V-24
Tabel 5.18 Penyelenggaraan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar V-25
Tabel 5.19 Urusan Pemerintahan Pilihan V-26
Tabel 5.20 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan V-26
Tabel 5.21 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan V-26
Tabel 5.22 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan V-27
Tabel 5.23 Unsur Kewilayahan V-27
Tabel 5.24 Unsur Kekhususan V-27
Tabel 5.25 Unsur Pemerintahan Umum V-28
Tabel 5.26 Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 yang Mendukung Asta Cita V-49
Tabel 5.27 Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota V-51
Tabel 5.28 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi V-52
Tabel 5.29 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat V-53
Tabel 5.30 Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif V-53
Tabel 6.1 Target dan Realisasi TW I Tahun 2024 Indikator Kinerja Utama Provinsi DKI Jakarta VI-3
Tabel 6.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan VI-6
Tabel 6.3 Hasil Kesepakatan Pembahasan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah VI-27
Tabel 6.4 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Pendidikan Tahun 2025 ..... VI-29
Tabel 6.5 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Kesehatan Tahun 2025 ..... VI-30
Tabel 6.6 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ..... VI-31
Tabel 6.7 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 ..... VI-32
Tabel 6.8 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025. ..... VI-32

Tabel 6.9 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Sosial Tahun 2025 ..... VI-34
Tabel 6.10 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025 ..... VI-35
Tabel 6.11 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ..... VI-36
Tabel 6.12 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Pangan Tahun 2025 ..... VI-36
Tabel 6.13 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Pertanahan Tahun 2025 ..... VI-37
Tabel 6.14 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025 ..... VI-37
Tabel 6.15 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ..... VI-37
Tabel 6.16 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ..... VI-38
Tabel 6.17 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Perhubungan Tahun 2025 ..... VI-38
Tabel 6.18 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 ..... VI-39
Tabel 6.19 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2025 ..... VI-40
Tabel 6.20 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Penanaman Modal Tahun 2025 ..... VI-41
Tabel 6.21 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 ..... VI-41
Tabel 6.22 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Statistik Tahun 2025 ..... VI-41
Tabel 6.23 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Persandian Tahun 2025 ..... VI-42
Tabel 6.24 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Kebudayaan Tahun 2025 ..... VI-42
Tabel 6.25 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Perpustakaan Tahun 2025 ..... VI-42
Tabel 6.26 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Kearsipan Tahun 2025 ..... VI-43
Tabel 6.27 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ..... VI-43
Tabel 6.28 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Pariwisata Tahun 2025 ..... VI-43
Tabel 6.29 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Pertanian Tahun 2025 ..... VI-44
Tabel 6.30 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Kehutanan Tahun 2025 ..... VI-45
Tabel 6.31 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 ..... VI-45
Tabel 6.32 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Perdagangan Tahun 2025 ..... VI-46
Tabel 6.33 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional VI-46

Tabel 6.34 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Perindustrian Tahun 2025 ..... VI-46
Tabel 6.35 Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ..... VI-47
Tabel 6.36 Pemutakhiran Target Prevalensi Stunting Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dan 2045 ..... VI-48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... I-9
Gambar 1.2 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran I-13
Gambar 2.1 Geografi dan Topografi Provinsi DKI Jakarta II-4
Gambar 2.2 Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur II-5
Gambar 2.3 Peta Wilayah Rawan Bencana Provinsi DKI Jakarta II-5
Gambar 2.4 Peta Tematik Sungai di Provinsi DKI Jakarta II-6
Gambar 2.5 Peta Pembangunan Lahan di Provinsi DKI Jakarta II-11
Gambar 2.6 *Jakarta Future City Hub* II-101
Gambar 2.7 Logo Jakarta Innovation Days Tahun 2023 ..... II-103
Gambar 2.8 Proyek 492 (Waduk Brigif dan Polder Kelapa Gading) II-105
Gambar 2.9 Inovasi Gerai Memulai Usaha II-106
Gambar 2.10 Inovasi PUSPA II-107
Gambar 2.11 Peta Pengendalian Wilayah Skala RT II-108
Gambar 2.12 Sinas Jakarta Satu II-109
Gambar 3.1 Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan I 2024 ..... III-7
Gambar 3.2 Peta Inflasi Daerah Bulan Mei 2024 ..... III-8
Gambar 4.1 Pendekatan Perencanaan Pembangunan IV-2
Gambar 4.2 Kerangka Pikir Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... IV-3
Gambar 4.3 Skema Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 ..... IV-11
Gambar 4.4 Strategi Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi DKI Jakarta IV-28
Gambar 4.5 Kasus Tuberkulosis di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ..... IV-51
Gambar 4.6 Keterhubungan Ruang Lingkup SPBE dengan Ruang Lingkup SDI IV-54
Gambar 5.1 Timeline Kegiatan Musrenbang Tahun 2024 ..... V-3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Kondisi Iklim dan Cuaca DKI Jakarta Tahun 2023... (1) II-9
Grafik 2.2 Kondisi Iklim dan Cuaca DKI Jakarta Tahun 2023... (2) II-9
Grafik 2.3 PDRB Provinsi DKI Jakarta ADHB Tahun 2019 – TW I 2024 (Triliun Rupiah) II-13
Grafik 2.4 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 - TW I 2024 ..... II-14
Grafik 2.5 Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 - Maret 2023 ..... II-15
Grafik 2.6 Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 - 2023 ..... II-16
Grafik 2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 - TW I 2024 ..... II-17
Grafik 2.8 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2023 ..... II-17
Grafik 2.9 Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023 ..... II-20
Grafik 2.10 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 ..... II-21
Grafik 2.11 Indeks Pembangunan Kebudayaan DKI Jakarta Tahun 2018-2022 ..... II-21
Grafik 3.1 Inflasi Global III-4
Grafik 3.2 Prospek Ekonomi Global Jangka Menengah III-4
Grafik 3.3 Inflasi Nasional III-8
Grafik 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta III-10
Grafik 3.5 Inflasi Nasional dan DKI Jakarta III-13
Grafik 3.6 Proyeksi Inflasi DKI Jakarta III-14
Grafik 3.7 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta III-19
Grafik 5.1 Perbandingan Jumlah Usulan Hasil Reses DPRD pada RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025 ..... V-9

DAFTAR SINGKATAN

A

ABK	:	Analisis Beban Kerja
ACI	:	*Asia Competitiveness Institute*
ADB	:	*Asian Development Bank*
Adm.	:	Administrasi
AHH	:	Angka Harapan Hidup
AIIB	:	*Asian Infrastructure Investment Bank*
AKB	:	Adaptasi Kebiasaan Baru
AKB	:	Angka Kematian Bayi
AKI	:	Angka Kematian Ibu
AKIP	:	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
AMH	:	Angka Melek Huruf
AMPK	:	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	:	Aparat Pengawas Internal Pemerintah
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
AVG	:	*Average*

B

Bakesbangpol	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Biro Dikmental	:	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Biro Kesos	:	Biro Kesejahteraan Sosial
Biro KSD	:	Biro Kerja Sama Daerah
Biro ORB	:	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Biro Perken	:	Biro Perekonomian dan Keuangan
Biro PLH	:	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Biro Umum dan ASD	:	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
BKD	:	Badan Kepegawaian Daerah
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BOP	:	Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BP	:	Bukan Pekerja
BPAD	:	Badan Pengelolaan Aset Daerah
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPBUMD	:	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
BPK	:	Badan Pemeriksaan Keuangan
BPKD	:	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
BPPBJ	:	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Perindustrian.
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPS	:	Badan Pengelolaan Sampah
BPSDM	:	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BRIN	:	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah

BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BBC	:	*British Broadcasting Corporation*
BBPP	:	Bantuan Biaya Personal Pendidikan
BMD	:	Barang Milik Daerah
B3	:	Bahan Berbahaya dan Beracun

C

CHSE	:	*Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
CRM	:	Cepat Respon Masyarakat
COVID-19	:	*Coronavirus Disease 2019*

D

DAS	:	Daereh Aliran Sungai
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DBM	:	Dinas Bina Marga
Dinas CKTRP	:	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Dinas Dukcapil	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Gulkarmat	:	Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran
Dinas KPKP	:	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Dinas Parekraf	:	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dinas PMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas PPAPP	:	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Dinas PPKUKM	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas PRKP	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas SDA	:	Dinas Sumber Daya Air
Dinas TATE	:	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Disbud	:	Dinas Kebudayaan
Dishub	:	Dinas Perhubungan
Diskominfotik	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Dispora	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
Dispusip	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Distamhut	:	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup
DPMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DK	:	Daftar Kegiatan
DRPLN-JM	:	Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah
DRPPLN	:	Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri

F

FISIM	:	*Financial Intermediary Services Indirectly Measured*

G

GDP	:	*Gross Domestic Product*
GNPIP	:	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
GRK	:	Gas Rumah Kaca

H

HAM	:	Hak Asasi Manusia
HKEN	:	Hari Besar Keagamaan Nasional

HKI	:	Hak Kekayaan Intelektual
HLS	:	Harapan Lama Sekolah

I

IDP	:	Indeks Dimensi Pendidikan
IDSD	:	Indeks Daya Saing Daerah
IKE	:	Indeks Kondisi Ekonomi
IKK	:	Indeks Keyakinan Konsumen
IKLH	:	Indek Kota Layak Huni
IKLH	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKM	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
IKN	:	Ibu Kota Negara
IKS	:	Indeks Keluarga Sehat
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
Inmendagri	:	Instruksi Menteri Dalam Negeri
IPG	:	Indeks Pembangunan Gender
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPPR	:	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang
IRB	:	Indeks Risiko Bencana
IRB	:	Indeks Reformasi Birokrasi

J

Jakbar	:	Jakarta Barat
JaKi	:	Jakarta Kini
Jakpus	:	Jakarta Pusat
Jaksel	:	Jakarta Selatan
Jaktim	:	Jakarta Timur
Jakut	:	Jakarta Utara
JCC	:	*Jakarta Convention Centre*
JDCN	:	*Jakarta Development Collaboration Network*
JEDI	:	*Jakarta Emerge Dredging Initiative*
JICA	:	*Japan International Cooperation Agency*
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JSDP	:	*Jakarta Sewerage Development Project*

K

Kab.	:	Kabupaten
KASN	:	Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara
KB	:	Keluarga Berencana
Kehati	:	Keanekaragaman Hayati
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KemenPAN-RB	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kep.	:	Keputusan
Kepgub	:	Keputusan Gubernur
Kepmendagri	:	Keputusan Menteri Dalam Negeri
KIA	:	Kartu Identitas Anak
KJP	:	Kartu Jakarta Pintar
KLA	:	Kabupaten/Kota Layak Anak
KLB	:	Koefisien Lantai Bangunan
KOICA	:	*Korean International Cooperation Agency*
KORPRI	:	Korps Pegawai Republik Indonesia
KP	:	Kegiatan Prioritas
KPBU	:	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPSS	:	Ketersediaan Pangan Siap Saji
KRISNA	:	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran

KS	:	Keluarga Sejahtera
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KSPN	:	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KUA	:	Kebijakan Umum Anggaran
K/L	:	Kementerian/Lembaga

L

LMK	:	Lembaga Musyawarah Kelurahan
LKB	:	Lembaga Keuangan Bank
LKBB	:	Lembaga Keuangan Bukan Bank
LLAJ	:	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
LPE	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi
LPP	:	Laju Pertumbuhan Penduduk
LRT	:	*Light Rail Transit*
LU	:	Lapangan Usaha

M

Mendagri	:	Menteri Dalam Negeri
MICE	:	*Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions*
Monev	:	Monitoring Evaluasi
MRT	:	*Mass Rapid Transit*
Musrenbang	:	Musyawarah Perencanaan Pembangunan

N

NTB	:	Nilai Tambah Bruto
NaRu	:	Natal dan Tahun Baru
NCICD	:	*National Capital Integrated Coastal Development*

O

OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
OSS	:	*Online Single Submission*

P

PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
PBIJK	:	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
PBG	:	Persetujuan Bangunan Gedung
PBPU	:	Peserta Bukan Penerima Upah
PD	:	Perangkat Daerah
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemilu	:	Pemilihan Umum
Perda	:	Peraturan Daerah
Pergub	:	Peraturan Gubernur
Perkada	:	Peraturan Kepala Daerah
Permen	:	Peraturan Menteri
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	:	Peraturan Presiden
Pilkada	:	Pemilihan Kepala Daerah
PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PKLUNPKT	:	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga
PKT	:	Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMI	:	*Purchasing Managers Index*
PMKS	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PPAS	:	Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPKM	:	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

PPKS	:	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PPLH	:	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPH	:	Poin Pangan Harapan
PPP	:	Pengeluaran per Kapita Penduduk
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPSU	:	Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
PSU	:	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
ProP	:	Proyek Prioritas
PSK	:	Pekerja Seks Komersial
PSM	:	Pekerja Sosial Masyarakat
PUSPA	:	Pusat Pelayanan Keluarga
PZ	:	Peraturan Zonasi

R

RAD	:	Rencana Aksi Daerah
Rakortek	:	Rapat Koordinasi Teknis
RAN	:	Rencana Aksi Nasional
RAPBD	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RBA	:	*Risk Based Approached*
RDTR	:	Rencana Detail Tata Ruang
Renja	:	Rencana Kerja
Renstra	:	Rencana Strategis
RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RLS	:	Rata-Rata Lama Sekolah
RPD	:	Rencana Pembangunan Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPPLN	:	Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri
RPRKD	:	Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah
RPTRA	:	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
RT	:	Rumah Tangga
RTB	:	Ruang Terbuka Biru
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah

S

SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintah
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
SDG's	:	*Sustainable Development Goals*
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SIPD	:	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SIPJM	:	Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah
SI-RPD	:	Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah
SK	:	Surat Keputusan
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMART	:	*Specific, Measurable, Achievable, Resources Availability, Times*
SOP	:	*Standarad Operating Procedure*

SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPB	:	*Smart Planning Budgeting*
SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPPN	:	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
STBM	:	Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat
SUSENAS	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional

T

TDM	:	*Transportation Demand Management*
THIS	:	Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKD	:	Transfer ke Daerah
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPK	:	Tingkat Penghunian Kamar
TPS	:	Tempat Penampungan Sementara
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPU	:	Tempat Pemakaman Umum
TSLDU	:	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha
TW	:	Triwulan

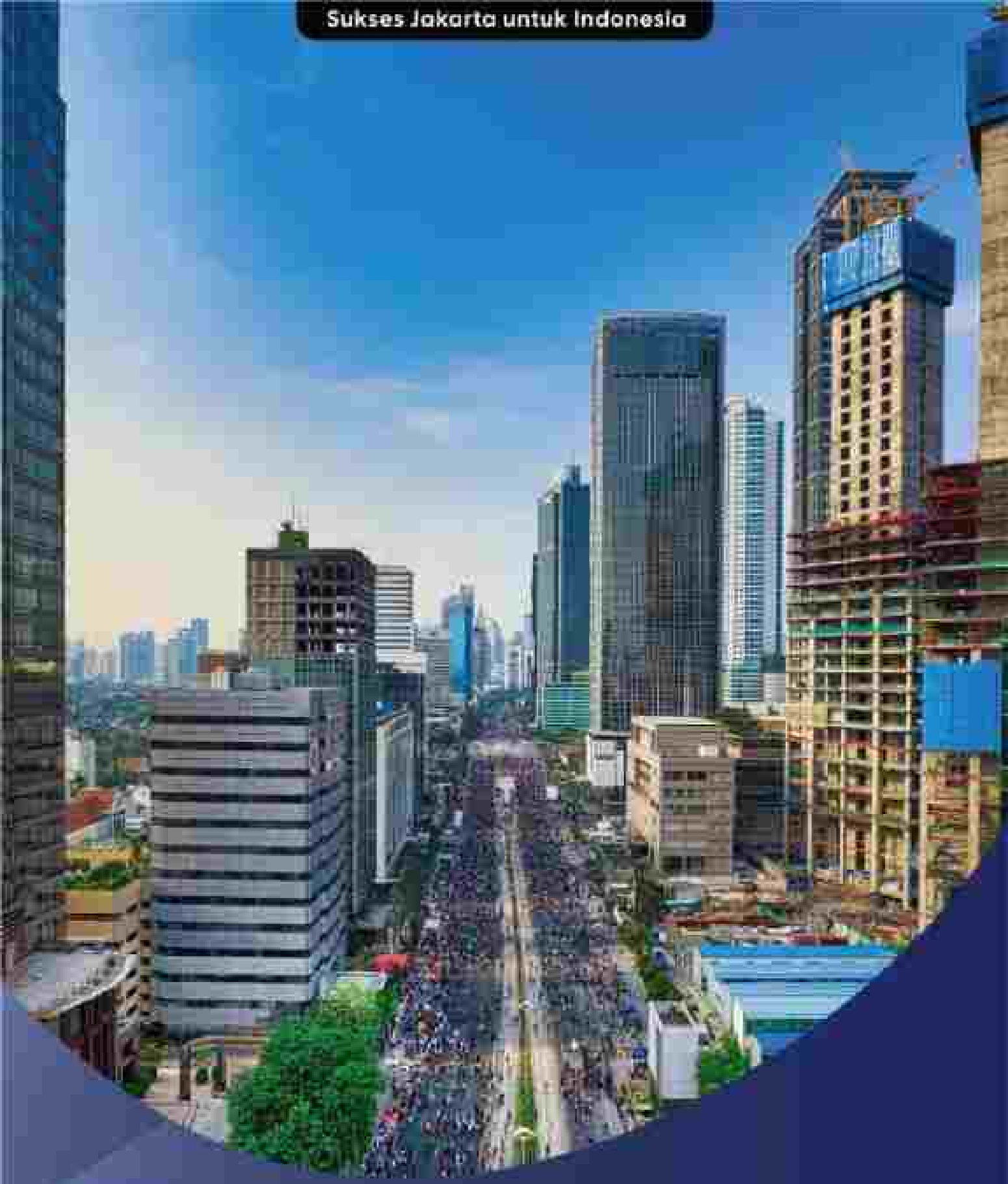
U

UHH	:	Umur Harapan Hidup
UKBM	:	Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
UKPD	:	Unit Kerja Perangkat Daerah
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

W

WB	:	*World Bank*
WHO	:	*World Health Organization*
WTP	:	*World Health Organization*

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan diartikan sebagai pengendalian dan pengaturan dalam bentuk kebijakan serta program yang dilakukan secara sengaja oleh penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu tertentu (Lewis, 1965 dan Jhingan, 1984). Perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang telah melalui berbagai proses pemikiran dan pertimbangan serta penentuan menyeluruh, dibuat secara sistematik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mendefinisikan perencanaan pembangunaa sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan untuk jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilakukan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat maupun Daerah. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan usaha terencana dan sistematis oleh pemerintah sesuai aspirasi masyarakat untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan secara keseluruhan baik langsung maupun tidak langsung yang terbagi ke dalam 3 (tiga) periodisasi waktu (panjang, menengah, tahunan).

Perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, maupun tahunan di Indonesia terlihat dari adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode 1 tahun. Indonesia melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dalam 2 (dua) dekade terakhir, telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestik yang begitu tinggi. Berbagai kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional telah membawa Indonesia menjadi *upper middle income country* di tahun 2019 yang ditandai dengan pesatnya peningkatan pendapatan per kapita, yaitu naik menjadi ±6,5x lipat. Indonesia juga sudah mencapai angka 4,44% untuk tingkat kemiskinan pada Maret 2023 dan 4,83% untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami perbaikan yang cukup baik, yaitu mencapai 83,55% (meningkat 0,94% dibanding tahun 2022) yang diimbangi pula dengan peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) menjadi 73,65 (meningkat 0,45 tahun dibanding tahun 2022) serta menurunnya prevalensi stunting menjadi 21,6% di tahun 2023.

Selanjutnya, sepanjang tahun 2023 pertumbuhan ekonomi nasional juga tetap tumbuh tinggi ditengah ketidakpastian global. Ekonomi nasional pada tahun 2023 tumbuh mencapai 5,05%, meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,31% (c-to-c). Pertumbuhan tersebut menandakan daya tahan dan kinerja perekonomian Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara lain. Inflasi Indonesia juga terkendali di level 2,61% (yoy) per Desember 2023, jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi 2023 yang sebesar 3,6%. Walaupun demikian, masih cukup banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia untuk menjadi negara *high income* (berpendapatan tinggi), menjadi 5 (lima) besar untuk ranking Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia, serta menjadi negara maju di tahun 2045. Terdapat 3 (tiga) tantangan utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, yaitu kondisi geopolitik, akselerasi teknologi dan informasi, serta perubahan iklim. Konflik geopolitik Rusia-Ukraina dianggap sebagai sumber utama ketidakpastian yang akan bertahan dan meningkat dalam jangka menengah-panjang sebagaimana pernyataan Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico bahwa Konflik geopolitik Rusia-Ukraina diperkirakan dapat berlangsung sampai dengan tahun 2030. Konflik tersebut tetap menjadi perhatian Indonesia dikarenakan telah mengakibatkan disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok, sehingga membuat ketersediaan serta harga komoditas pangan berada dalam ketidakpastian. Sebagaimana dikutip dalam laman berita kompas.com, Indonesia telah mengalami kenaikan harga pangan dikarenakan harga pupuk dan gandum yang merupakan bahan pokok tepung terigu semakin meningkat.

Akselerasi teknologi dan informasi dalam industri keuangan, dengan hadirnya *fintech* (*financial technology*), telah memberi ruang lebih besar kepada pelaku ekonomi untuk mengakses sumber keuangan. Namun, di sisi lain, *fintech* juga memiliki risiko yang bersifat asimetris antara pesatnya teknologi dan inovasi digital terhadap kemampuan mengelola risiko yang bila tidak direspons dengan baik dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan kesinambungan pertumbuhan industri keuangan. Selain itu, perubahan iklim juga dapat berdampak signifikan terhadap industri keuangan, baik terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, maupun pertumbuhan ekonomi. Dari sisi stabilitas makroekonomi, perubahan iklim meningkatkan peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem yang dapat mengganggu sisi suplai, terutama produk-produk pangan, sehingga menimbulkan tantangan terhadap pencapaian target inflasi oleh bank sentral. Di samping itu, dampak *transition risk* dari respons kebijakan yang mendukung ekonomi hijau, seperti *carbon tax*, juga berpotensi menambah tekanan terhadap harga barang.

Disamping tantangan di atas dan di tengah disrupsi lingkungan global di sepanjang tahun 2023, baik dari sisi rantai pasok, bencana alam, volatilitas sektor keuangan, serta fragmentasi geo-ekonomi, perekonomian Indonesia ke depan diproyeksikan tetap tangguh. Bank Indonesia memproyeksikan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2024 dan 2025 akan menunjukan ketahanan dan kebangkitan, digambarkan dengan pertumbuhan yang cukup tinggi (4,7 persen sampai 5,5 persen pada 2024 dan meningkat ke 4,8 persen sampai 5,6 persen pada 2025). Proyeksi pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi, yang akan didukung dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemilihan umum (pemilu), serta infrastruktur di ibu kota negara (IKN) baru, selain ekspor dari hilirisasi. Selain pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan akan tetap kuat, inflasi juga diproyeksikan akan tetap terkendali dalam sasaran 1,5 persen hingga 2,5 persen pada tahun 2024 dan 2025. Proyeksi tersebut akan dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan menguatnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Ekonomi dan keuangan digital juga diproyeksikan meningkat pesat, serta transaksi *e-commerce*, perbankan digital, dan uang elektronik akan tumbuh tinggi di tahun 2025.

Keberhasilan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan disrupsi lingkungan global, turut dipengaruhi oleh implementasi dari berbagai rangkaian kebijakan yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen perencanaan, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah (pusat maupun daerah) maupun yang disempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagaimana hasil Sidang Pleno Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2024, Rabu, 24 April 2024 telah ditetapkan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2025-2029. Sebagai perwujudan atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, rumusan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan sintesa dari cita-cita UUD 1945, tujuan Indonesia Emas pada tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045, serta capaian kinerja di sejumlah indikator pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2025-2029 yang disusun berdasarkan fondasi ekonomi, sosial, dan politik.

Ekonomi Pancasila berdasarkan UUD 1945 dijadikan sebagai fondasi perekonomian Indonesia untuk tahun 2025-2029. Ekonomi Pancasila diyakini sebagai paham ekonomi yang mudah mengambil esensi terbaik dari kapitalisme dan sosialisme. Paham ekonomi yang membuka lebar kesempatan berinovasi dengan kebebasan pasar, tetapi juga memperhatikan dan menjamin jaring pengaman sosial (*social safety net*) untuk masyarakat yang paling lemah. Adapun prinsip ekonomi pancasila adalah sebagai berikut:

a. Ekonomi yang religius dan menwujudkan persatuan nasional.
b. Ekonomi yang junjung tinggi kemanusiaan.
c. Ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional
d. Ekonomi yang egaliter (sederajat) dan kerakyatan.
e. Ekonomi yang berkeadilan sosial.

Sedangkan fondasi sosial dan politik Indonesia tahun 2025-2029, diarahkan pada keberlanjutan pembangunan dalam menghadapi tantangan strategis (ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, krisis pangan). Kemudian, visi Indonesia tahun 2025-2029 tersebut akan dicapai melalui 8 (delapan) misi, 17 program prioritas, dan 8 (delapan) program hasil terbaik cepat. Oleh karena itu, kolaborasi dan kerja sama antar pihak menjadi penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan.

Tingkat keberhasilan visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud tidak akan lepas dari dukungan yang diberikan oleh setiap daerah melalui perencanaan kebijakan di setiap periodenya (Panjang, Menengah, Tahunan). Daerah, sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Senada dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 5 yang menganamatkan bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan melalui prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
c. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
d. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
e. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
f. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
g. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources available*), dan memperhatikan fungsi waktu (*time*) (SMART).

Selanjutnya, dalam perencanaan pembangunan daerah terdapat 2 (dua) bentuk pendekatan, yaitu perencanaan yang berorientasi pada proses dan perencanaan yang berorientasi pada substansi (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). 4 (Empat) pendekatan yang harus digunakan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

a. Pendekatan Teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
b. Pendekatan Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
c. Pendekatan Politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
d. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Selain berorientasi pada proses, perencanaan pembangunan daerah juga dilaksanakan dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan yang berorientasi pada substansi, yaitu tematik, holistik, integratif, dan spasial:

a. Pendekatan Tematik, penentuan tema prioritas pembangunan dalam suatu jangka waktu perencanaan.

b. Pendekatan Holistik, bermakna bahwa perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

c. Pendekatan Integratif, upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program pembangunan yang dilihat dari peran kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya serta upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

d. Pendekatan Spasial, penjabaran program pembangunan dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki berbagai dokumen perencanaan, antara lain:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012).
Pada pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Rancangan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018) yang kemudian digantikan oleh Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022).

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan tahunan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Peraturan kepala daerah terakhir terkait RKPD adalah Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang RKPD Tahun 2024.

Dalam penyusunan RKPD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengacu pada tahapan proses penyusunan RKPD sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian, perencanaan untuk tahun 2025 masih merupakan masa transisi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi dimana periodisasi RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 telah berakhir, sedangkan dokumen RPJMD periode berikutnya belum tersedia dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi DKI Jakarta baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 secara serentak.

Mempertimbangkan kondisi di atas serta amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Selain itu, berpedoman pula pada Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, dan kebijakan nasional lainnya untuk tahun 2025. Adapun penjelasan lebih lengkapnya adalah:

a. Mengacu pada RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 memiliki makna bahwa dalam penyusunan dokumen RKPD, diperlukan penyelarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta program Perangkat Daerah tahun 2025 dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPD 2023-2026. Hal tersebut dikarenakan RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari perencanaan jangka menengah daerah.

b. Berpedoman pada RKP Tahun 2025 dan kebijakan nasional lainnya memiliki makna bahwa dalam penyusunan dokumen RKPD, diperlukan adanya penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP Tahun 2025 serta kebijakan nasional lainnya yang dalam dokumen Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 disebut sebagai Agenda Pembangunan (Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi).

Selanjutnya, dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu memperhatikan tantangan global, nasional, maupun tantangan di Provinsi DKI Jakarta itu sendiri yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi penghidupan di Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, ke depan, Indonesia akan dihadapkan pada 3 (tiga) tantangan utama yang dalam hal ini juga perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu kondisi geopolitik (konflik Rusia-Ukraina), akselerasi teknologi dan informasi (sudirnya *fintech*), dan perubahan iklim. Mendasar pada Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 oleh Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 6 (enam) isu strategis wilayah Jawa-Bali yang perlu menjadi perhatian, utamanya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

a. Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan.
b. Masih tingginya kerentanan potensi bencana (banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa , gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa).
c. Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri.
d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian, dikarenakan pertanian di Indonesia dikuasai oleh petani kecil di kawasan pedesaan dengan produk pertanian dan mutu yang bervariasi.
e. Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya *mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
f. Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan *scarring effect* akibat pandemi COVID-19.

Adapun beberapa tantangan kewilayahan di Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Implikasi perpindahan Ibu Kota Negara Baru
Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdampak kepada perubahan status dan kedudukan DKI Jakarta, dimana Jakarta diarahkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota bisnis berskala global (Jakarta sebagai Kota Global).
b. Arus urbanisasi
DKI Jakarta masuk ke dalam 70 kota teratas dunia dengan kepadatan penduduk tertinggi, dan jumlah pendatang ke DKI Jakarta mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu pada 2020 terdapat 113.814 orang, pada 2021 terdapat 139.740 orang dan pada 2022 terdapat 151.752 orang.
c. Aglomerasi
Aglomerasi megalopolis Banten-Jakarta-Jawa Barat diperkirakan akan mencapai 100 juta penduduk di tahun 2045, dan Jakarta akan menjadi pusat aglomerasi megapolitan Jakarta-Bandung.
d. Disrupsi teknologi
Munculnya teknologi baru dapat memiliki dampak yang masif dan berbeda dari sebelumnya, DKI Jakarta perlu beradaptasi dengan cepat agar dapat mengikuti perkembangan teknologi.
e. Daya saing
DKI Jakarta diharapkan dapat memiliki *high value added* dan daya saing yang tinggi, mengingat saat ini DKI Jakarta sudah menjadi bagian dari kota global. Selain itu, masih kurangnya daya tarik iklim investasi dan bisnis bagi perusahaan internasional di DKI Jakarta apabila dibandingkan dengan kota-kota besar di Asia Tenggara.
f. Perubahan Iklim
Dampak dari banjir, polusi udara, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, dan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Hasil evaluasi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di DKI Jakarta terlaksana dengan baik. Hal tersebut didukung oleh data bahwa dalam kurun waktu 15 tahun terakhir capaian indikator makro pembangunan Provinsi DKI Jakarta cenderung membaik, terutama pertumbuhan ekonomi yang konsisten tumbuh di atas rata-rata nasional, PDRB per kapita tumbuh pesat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (kesehatan dan pendidikan), serta angka pengangguran yang terus menurun. Walaupun pada tahun 2020 terjadi outliers pandemi COVID-19 yang menyebabkan performa indikator makro melambat, namun pada tahun 2021 dan 2022 performanya kembali membaik. DKI Jakarta telah berhasil melaksakan pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD terakhir dengan capaian 94% atau predikat sangat tinggi. Keberhasilan tersebut didorong oleh faktor-faktor antara lain: (1) baiknya koordinasi dan kerja sama antarstakeholder; (2) kuatnya kebijakan dan regulasi yang disusun; (3) tingginya komitmen pemerintah daerah; (4) adanya dukungan pendanaan alternatif; serta (5) optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudian dalam menjalankan proses perencanaan pembangunan, beberapa metode pelaksanaan juga dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

a. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan pentahelix, berupa pelibatan secara aktif 5 (lima) *stakeholders* utama, yaitu masyarakat, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan media.
b. Kolaborasi pendanaan pembangunan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun sumber pendanaan lain yang sah.
c. Penerapan *dynamic policymixent* sebagai inovasi penyelenggaraan pemda.
d. Pendekatan spasial dan aspasial melalui 5 (lima) Kota dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi.
e. Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dengan Pemerintah Pusat:
   Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)
   https://krisna.systems/
   Merupakan sistem *e-planning* terintegrasi 3 (tiga) kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN-RB dalam bentuk sistem aplikasi tunggal untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja. Aplikasi tersebut bekerja secara *real-time*, berbasis web, *online*, serta dapat diakses melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. Terdapat 2 (dua) sub sistem KRISNA yang digunakan oleh pemerintah daerah, yaitu KRISNA-DAK (untuk menyusun pengusulan, penilaian, sinkronisasi dan pengalokasian DAK fisik) dan KRISNA-SELARAS (sebagai sistem informasi pendukung dalam pelaksanaan Rakortek Kenbang dan Musrenbangnas).
   Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
   https://sipd-ri.kemendagri.go.id/
   Merupakan sistem informasi Pemerintahan Daerah yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang mencakup Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, dan pemerintahan lainnya yang berfungsi untuk memfasilitasi seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan seluruh Pemerintah Daerah secara *online* dan terintegrasi.
f. Digitalisasi sistem perencanaan meliputi:
   1) ***Smart Planning Budgeting* (SPB) DKI Jakarta**:
      https://apbd.jakarta.go.id/
      Merupakan aplikasi web penyajian data dan analisa yang bersifat terbuka untuk publik dengan *platform* interaktif dan *user-friendly* untuk mengeksplorasi dan lebih mendalami Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aplikasi ini juga menyediakan fitur analisa dan monitoring berupa *dashboard*, pantau belanja, dan pantau aspirasi masyrakat. Sampai dengan saat ini SPB sudah terintegrasi dengan Dinas Dukcapil DKI untuk data Penduduk DKI dan sudah terintegrasi pula dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk data kepegawaian.

2) **e-Musrenbang**
https://musrenbang.jakarta.go.id/
Merupakan aplikasi web untuk penyelenggaraan Musrenbang (forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan). E-Musrenbang akan terkoneksi dengan SPE untuk data terkait indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan digunakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi DKI Jakarta.

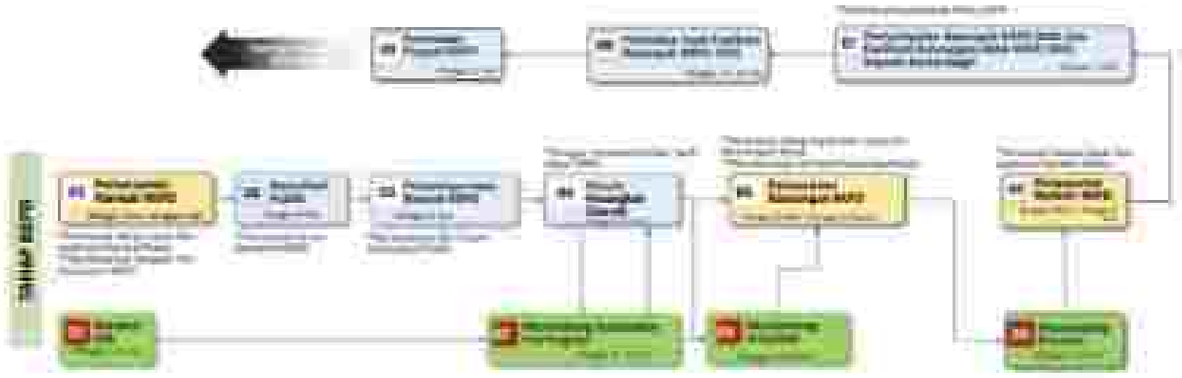
3) **Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah (SI RPD)**
https://rpd.bapedadki.net/
Merupakan aplikasi web untuk menghimpun dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta. SI RPD akan terkoneksi dengan SPE untuk data terkait indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan digunakan dalam proses penyusunan Renja SKPD.

Berdasarkan pendekatan dan metode perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa tahapan forum, yaitu:

a. ***Kick Off Meeting RKP***, forum yang digunakan untuk penyampaian tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta agenda RKP kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. *Kick Off Meeting* RKP tersebut diikuti oleh *Kick Off Meeting* RKPD di tingkat daerah.
b. **Forum Konsultasi Publik**, forum yang digunakan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKPD. Forum konsultasi publik juga merupakan sarana menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan kelinglain masyarakat dengan kebijakan pemda.Forum Konsultasi Publik juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
c. **Forum Perangkat Daerah**, forum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja dengan melibatkan seluruh unit kerja di bawah koordinasinya.
d. **Musrenbang**, merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom up* dikarenakan melibatkan secara aktif masyarakat/*stakeholders*. Musrenbang dijadikan sebagai wadah penajaman, penyelarasan, klarifikasi, kesepakatan, serta pengajuan usulan untuk mendukung arah prioritas pembangunan suatu wilayah.
   1) Musrenbang Kabupaten/Kota, forum yang digunakan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan Kab/Kota yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi.
   2) Musrenbang Provinsi, forum yang digunakan untuk menyepakati prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah
e. **Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang)**, forum yang digunakan untuk melakukan pembahasan dan sinkronisasi target prioritas nasional dengan target daerah dalam rangka mendukung sasaran pembangunan.

Pasca pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional, proses penyusunan dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dilanjutkan dengan penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD. Dokumen rancangan akhir sebagaimana dimaksud ditujukan untuk penajaman dan penetapan daftar rencana program/kegiatan prioritas. Setelah rancangan akhir RKPD tersusun, dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD melalui Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Tahapan dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, 2024 (diolah)

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemberan Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Deerah) (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15. Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lemberr Negara RI Tahun 2021 Nomor 31);

28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
31. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259)
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1988);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

43. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
44. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
45. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201);
46. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 285);
47. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201);
48. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 53012);
49. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013);
50. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Nomor 63003);
51. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);
52. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
53. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258 dan 260 mengamanatkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai bagian dari SPPN. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN juga mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. SPPN dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan. Konsep SPPN hadir dalam perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat:

a. Mengalokasikan sumberdaya pembangunan kedalam kegiatan melalui kelembagaan;
b. Fleksibel dengan horizon perencanaan yang dituangkan, sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang;
c. Memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan ke seluruh masyarakat.

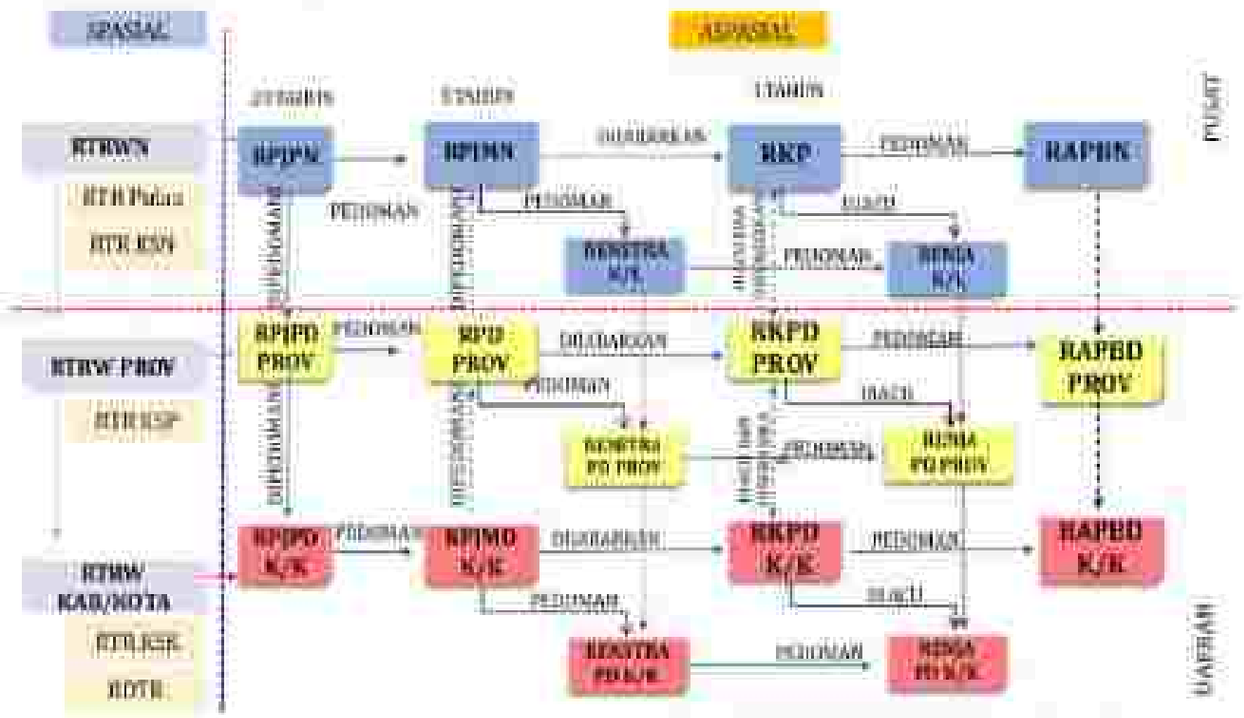
Pada pelaksanaannya, konsep SPPN berjalan beriringan dengan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (*sustainable*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu, Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan membutuhkan proses koordinasi dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi antar dokumen. Proses harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

a. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yakni 20 tahun.
b. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun.
c. Dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan dari adanya keselarasan antar dokumen tersebut, yaitu: (1) terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah; dan (2) menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program dan target pembangunan nasional.

Dari berbagai landasan hukum sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, 3 (tiga) ketentuan yang menjadi dasar hukum utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.2 di bawah dilakukan secara spasial dan aspasial.

Gambar 1.2
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



(Sumber: Kemendagri, 2023)

Secara a-spasial, keterkaitan antar dokumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut:

a. RPJPD Provinsi DKI Jakarta
   Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) terutama terkait visi dan misi Kepala Daerah, arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, serta kinerja/indikator pembangunan daerah. Kinerja/indikator sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kewenangan, karakteristik, inovasi dan pengembangan Provinsi DKI Jakarta guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

b. RPD Provinsi DKI Jakarta
Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah merupakan penjabaran dari dokumen RPD yang merupakan penghubung visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pada RPJPD. Substansi RPD yang menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD meliputi sasaran, arah kebijakan, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

c. Renstra Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD untuk kurun waktu 5 tahun. Adapun selanjutnya dokumen RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (RAPBD) sebelum menjadi APBD.

d. RKP
Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah mengacu serta disesuaikan dengan RKP yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Substansi RKP yang menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD meliputi tema, agenda pembangunan, dan sasaran pengembangan wilayah dalam dokumen RKP.

Keterkaitan antar dokumen tersebut bermakna bahwa dalam mencapai target pembangunan secara nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen RKP dan RPJMN, dukungan dari daerah menjadi hal yang penting. Target-target pembangunan nasional menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun target pembangunan daerah, sehingga target pembangunan nasional dan target pembangunan daerah dapat selaras. Dukungan dari daerah terhadap target-target pembangunan nasional ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan tingkat daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD atau RPD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, hingga Renja Perangkat Daerah.

Selain itu, dokumen-dokumen a-spasial tersebut juga perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial yang berhubungan dengan penataan ruang dan wilayah, antara lain dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta kebijakan dan prioritas pembangunan. Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 berpedoman, serta dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024-2044. Substansi RKPD yang dipedomani dan perlu diperhatikan dari RTRW adalah terkait arah pengembangan wilayah dalam wujud tujuan, sasaran, serta strategi. Selanjutnya, dalam hal keberlanjutan proses perencanaan menuju proses penganggaran, RKPD juga memiliki peran penting lainnya, yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS, RAPBD, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang mana penyusunan KUA-PPAS harus mengacu pada RKPD yang telah ditetapkan. Adapun pada akhir prosesnya, RAPBD akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimaksudkan sebagai:

a. Arah pembangunan tahunan Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025;
b. Pedoman bagi para pemangku kepentingan pembangunan, baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah;
c. Acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing- masing;
d. Instrumen dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD sebagai kendali penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
e. Pedoman dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah di tahun 2025.

Adapun penyusunan dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, memiliki tujuan untuk:

a. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2025;
b. Menyediakan rencana kebijakan pembangunan Daerah tahun 2025;
c. Menyediakan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk 2025;
d. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi pemerintahan;
e. Menjadi landasan dalam finalisasi Renja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
f. Menyediakan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah pada masa transisi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2025;
g. Menyediakan acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran Kebijakan Umum Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen RKPD, sebagaimana diamanatkan dalam bagian C.3 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 7 (tujuh) BAB, yang masing-masing dijabarkan pada poin di bawah:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- 2.1 Kondisi Umum Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
- 2.4 Inovasi Daerah

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- 4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
- 4.2 Jakarta dalam Konteks Kota Global
- 4.3 Jakarta Rendah Karbon untuk Ketahanan Iklim
- 4.4 Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025
- 4.5 Prioritas Pembangunan Tahun 2025
- 4.6 Prioritas Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- 5.1 Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang
- 5.2 Aspirasi Masyarakat Melalui Reses DPRD
- 5.3 Penselahan Usulan Langsung Masyarakat
- 5.4 Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- 6.1 Indikator Kinerja Utama
- 6.2 Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- 6.3 Sinergitas Pembangunan Daerah

BAB VII. PENUTUP
- 7.1 Kesimpulan

Halaman ini sengaja dikosongkan





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kondisi umum Provinsi DKI Jakarta, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan pembangunan daerah di Provinsi DKI Jakarta, serta Inovasi Provinsi DKI Jakarta.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Gambaran kondisi daerah memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana dan sejauh mana pembangunan daerah telah dilaksanakan dan/atau mengidentifikasi unsur-unsur di berbagai bidang yang perlu ditingkatkan atau dioptimalkan di masa mendatang untuk mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Bagian ini akan menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar analisis, rangkuman kondisi wilayah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan sub pembahasan aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah di Provinsi DKI Jakarta. Dalam merumuskan kondisi umum daerah, Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta sudah mempertimbangkan pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Provinsi DKI Jakarta

Analisis pada aspek geografi di Provinsi DKI Jakarta dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai sifat fisik permukaan suatu wilayah seperti karakteristik wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Adapun, gambaran kondisi demografi dilakukan untuk memberikan gambaran terkait statistik populasi manusia seperti struktur, komposisi, dan persebaran penduduk di Provinsi DKI Jakarta dalam periode tahun tertentu.

2.1.1.1 Karakteristik Wilayah

Analisis karakteristik wilayah memberikan gambaran berupa ukuran wilayah Provinsi DKI Jakarta seperti posisi geografis, karakter lingkungan fisik, karakter pemukiman, hingga posisinya terhadap wilayah lain. Karakteristik wilayah menjadi salah satu poin penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan pemahaman mengenai karakteristik wilayah dapat membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan strategi yang tepat untuk perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas, dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah 7.639,83 km² dengan luas daratan sebesar 662,33 km², dan luas lautan sebesar 6.977,5 km². Jakarta Timur dan Jakarta Utara merupakan 2 (dua) wilayah administrasi terbesar di DKI Jakarta dengan luas masing-masing wilayah adalah 188,54 km² dan 147,46 km². Adapun batas-batas wilayah Provinsi DKI Jakarta:

a. **Sebelah Utara**: berbatasan dengan Laut Jawa
b. **Sebelah Barat**: berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang
c. **Sebelah Timur**: berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi
d. **Sebelah Selatan**: berbatasan dengan Kota Depok

Selanjutnya, secara administratif, Provinsi DKI Jakarta terbagi ke dalam 5 (lima) Kota Administratif, 1 (satu) Kabupaten Administratif, dan 44 (empat puluh empat) Kecamatan.

Menurut pembagian wilayah administrasi sebagaimana Tabel 2.1, Kota Jakarta Timur merupakan wilayah terluas dengan persentase luasan mencapai 28,06% dibandingkan luas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Kota Jakarta Utara merupakan wilayah administrasi terluas ke dua dengan persentase luasan 22,30%. Luasnya Kota Jakarta Timur ini menjadi salah satu faktor yang mendukung banyaknya penduduk yang bermukim di wilayah Jakarta Timur, sehingga berdasarkan data yang ada, terdapat banyak fasilitas-fasilitas dari pemerintah yang berada di Jakarta Timur seperti fasilitas kesehatan, olahraga, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan, Kabupaten Kepulauan Seribu adalah wilayah administrasi terkecil di Provinsi DKI Jakarta dengan persentase luasan sebesar 1,62%.

Kemudian, jika dilihat berdasarkan jumlah kecamatan dan kelurahan, Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Timur merupakan wilayah administrasi dengan jumlah kecamatan dan kelurahan terbanyak yaitu masing-masing sebanyak 10 kecamatan dan 65 kelurahan, sedangkan untuk jumlah kecamatan dan kelurahan paling sedikit berada di Kabupaten Kepulauan Seribu dengan 2 (dua) kecamatan dan 6 (enam) kelurahan. Jika melihat dari jumlah RW dan RT, Kota Jakarta Timur juga menjadi wilayah administrasi dengan jumlah RW dan RT terbanyak dengan total mencapai 709 RW dan 7.929 RT. Sedangkan, wilayah dengan jumlah RW dan RT paling sedikit berada di Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu 24 RW dan 127 RT.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Kota/Kabupaten	Luas Wilayah		Jumlah			
		km²	%	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jakarta Pusat	47,90	7,19	8	44	389	4.339
2	Jakarta Utara	147,46	22,20	6	31	454	5.279
3	Jakarta Barat	125	18,90	8	56	586	6.499
4	Jakarta Selatan	144,94	21,92	10	65	579	6.077
5	Jakarta Timur	188,94	28,06	10	65	709	7.929
6	Kepulauan Seribu	10,73	1,62	2	6	24	127
Jumlah		**661,23**	**100**	**44**	**267**	**2.741**	**30.470**

Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2023" (2024); Jakarta Open Data, (2024)

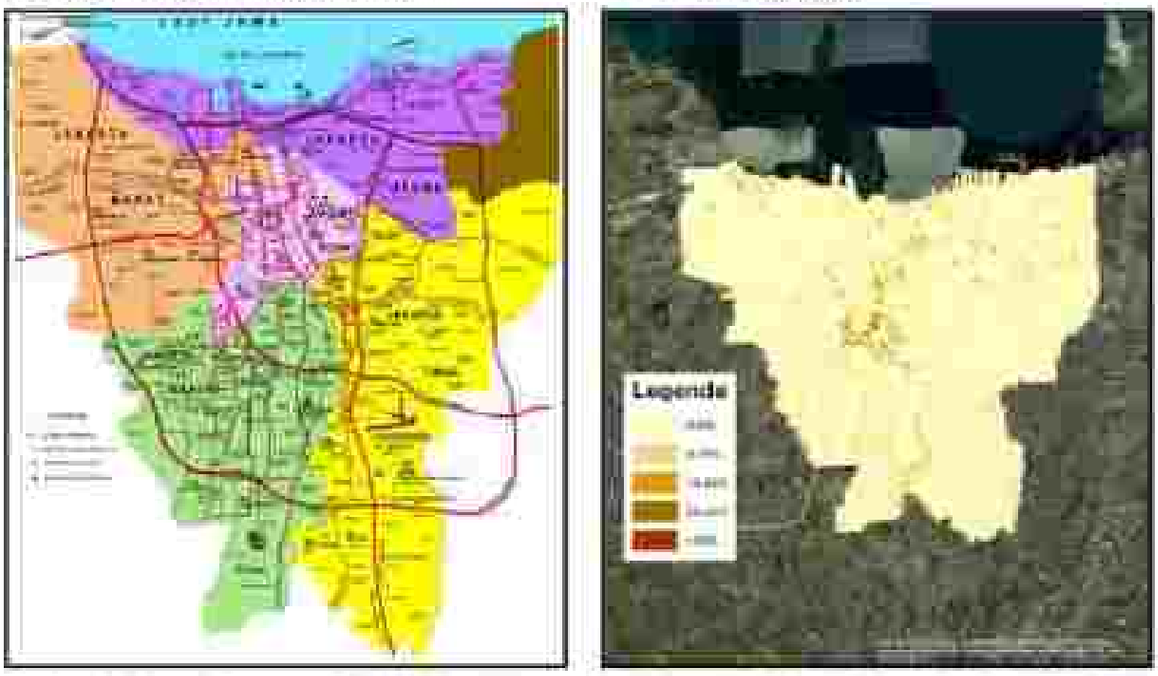
Walaupun secara administratif terbagi ke dalam 5 (lima) Kota Administratif, 1 (satu) Kabupaten Administratif, dan 44 Kecamatan, Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan kawasan pesisir, dengan luas wilayah pesisir sekitar 155 km yang membentang dari Timur ke Barat kurang lebih 35 km, dan menjorok ke darat sekitar 4-10 km. Selain memiliki kawasan pesisir, Provinsi DKI Jakarta juga memiliki 110 pulau yang tersebar di 2 (dua) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pulau-pulau di wilayah tersebut memiliki luas beragam, sebanyak 30% memiliki luas lebih dari 10 Ha, sebanyak 25% memiliki luas antara 5-10 Ha, dan sisanya sebanyak 45% berukuran kurang dari 5 Ha yang memanjang dari utara ke selatan dengan ciri-ciri berpasir putih dan bergosong karang, serta beriklim tropis panas dengan kelembaban berkisar antara 75% – 90%. Dari 110 pulau yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, hanya 11 (sebelas) pulau yang berpenghuni, yaitu Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang Besar, Pulau Pari, Pulau Payung Besar, Pulau Tidung Besar, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan, dan Pulau Sebira.

2.1.1.1.2 Geografi dan Topografi

Provinsi DKI Jakarta secara geografis, terletak di antara 5° 10' 00" LS – 6° 22' 21,5" LS dan 106° 41' 12,5" BT – 106° 55' 24,2" BT dengan ketinggian rata-rata sekitar ±7 meter di atas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan data Statistik Provinsi DKI Jakarta, titik tertinggi daratan di DKI Jakarta berada pada ketinggian 79 meter di atas permukaan laut (mdpl). Selanjutnya, Provinsi DKI Jakarta jika dianalisis dari aspek ketinggian dan kemiringan lahan (Gambar 2.1.B) terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 7 meter di atas permukaan laut. Sedangkan, sekitar 40% wilayah berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang. Dengan kondisi kemiringan lahan tersebut, ditambah dengan 17 sungai yang mengalir di Provinsi DKI Jakarta, menyebabkan kecenderungan wilayah Jakarta semakin rentan tergenang air dan banjir pada musim hujan. Terlebih jika melihat tingginya tingkat perkembangan wilayah, menyebabkan rendahnya resapan air ke dalam tanah yang akan memperbesar ancaman banjir di Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 2.1
Geografi dan Topografi Provinsi DKI Jakarta

A. Peta Wilayah Administrasi **B. Peta Topografi**



Sumber: Indonesia Geospasial (2024), Lampiran Perda Provinsi DKI Jakarta (Bagian I) Tahun 2022, (2024)

2.1.1.1.3 Geologi

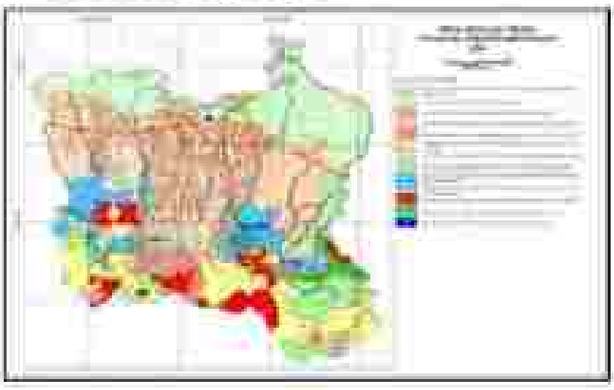
Berdasarkan data Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa, wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan kawasan dataran rendah dan proses geomorfologi yang dominan berkembang adalah sedimentasi. Formasi geologi Jakarta berumur holosen, dicirikan dengan batu endapan permukaan. Secara regional, struktur geologi yang berkembang memperlihatkan adanya tiga arah dominan, yaitu arah Barat Laut–Tenggara Timur Laut– Barat Daya, dan Barat–Timur. Batuan tertua yang tersingkap untuk struktur geologi Provinsi DKI Jakarta adalah Formasi Renggarais (Tmrs) yang berumur Miosen Awal. Formasi ini ditindih secara tidak selaras oleh Formasi Bojongmanik (Tmb) yang berumur Miosen Tengah, sedangkan di bagian timur berkembang Formasi Klapanunggal (Tmk). Formasi ini saling terhubung menjemari dengan Formasi Jatiluhur (Tmj).

Formasi-formasi tersebut di atas ditindih secara tidak selaras oleh Formasi Genteng (Tpg) yang berumur berumur Pliosen Awal. Formasi Genteng ditindih Formasi Serpong (Tpsl) berumur Pliosen Akhir. Formasi Serpong ditindih secara tidak selaras oleh Tufa Banten (QTVt) yang berumur Plio-Plistosen. Tufa Banton ditindih Batuan Gunungapi Muda (Qv) dan Andesit Gunung Sudamanik (Qvas) yang berumur Plistosen. Batuan terobosan yang dijumpai di Lembar ini adalah Basalt Gunung Dago (Tmpk) yang berumur Mio-Pliosen. Endapan termuda permukaan di daerah ini terdiri dari batupasir tufaan dan konglomerat/Kipas Aluvium (Qav), Endapan Pematang Pantai (Qhr) dan Aluvium (Qa), serta di lain tempat tumbuh Batugamping Koral. Adapun gambaran terkait distribusi berbagai jenis batuan, struktur geologi, dan formasi geologi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat dilihat pada peta geologi teknik Kawasan Jabodetabekpunjur Gambar 2.2.A di bawah.

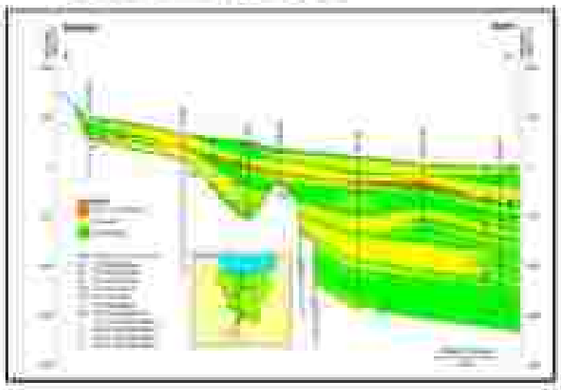
Dari potongan melintang Utara-Selatan Jakarta (Gambar 2.2.B) juga terlihat bahwa Provinsi DKI Jakarta berada pada endapan vulkanik kuarter yang terdiri dari tiga formasi yaitu Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 meter dengan bagian atasnya merupakan batu lempung. Formasi ini didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dan di beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat terutama di daerah Blok M dan Dukuh Atas. Formasi Kaliwangu memiliki kedalaman sangat bervariasi dengan kedalaman bagian utaranya lebih dari 300 meter sedangkan Formasi Parigi mendesak ke atas hingga kedalaman 80 meter. Formasi ini didominasi oleh batu lempung diselang- selingi oleh batupasir.

Gambar 2.2
Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur

A. Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur



B. Potongan Melintang Selatan Utara Jabodetabekpunjur



Sumber: Indonesia Geospasial, Atlas Peta dan Kajian Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2012-2032, Dalam Lampiran RTRWD Tahun 2012-2032, (2024)

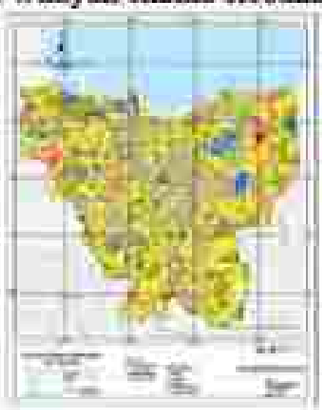
Kondisi karakteristik geologi yang bersifat kompleks menjadikan sebagian wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi dari ancaman bencana alam seperti gempa bumi, kerusuhan sosial, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran gedung dan permukiman, epidemi, serta wabah penyakit. Bencana yang paling sering terjadi adalah kebakaran dan banjir. Selain letak geografis Provinsi DKI Jakarta yang berada di wilayah pesisir yang landai dengan 40% daratan di bawah permukaan laut rata-rata dan dilalui oleh 13 sungai besar, banjir dan genangan air di kota ini juga disebabkan oleh curah hujan lokal yang tinggi, sistem drainase yang belum efektif, berkurangnya daerah resapan air, dan prasarana dan sarana pengendalian banjir yang masih terbatas.

Gambar 2.3
Peta Wilayah Rawan Bencana Provinsi DKI Jakarta

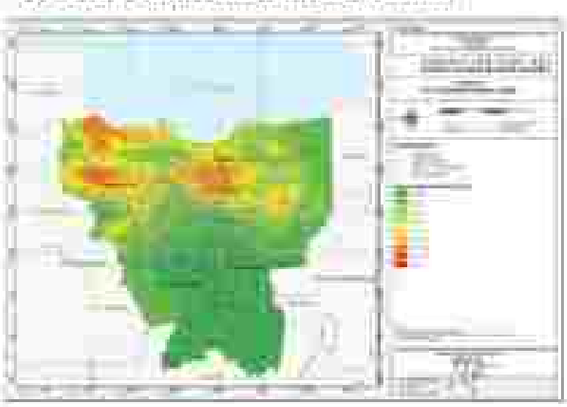
A. Peta Rawan Banjir



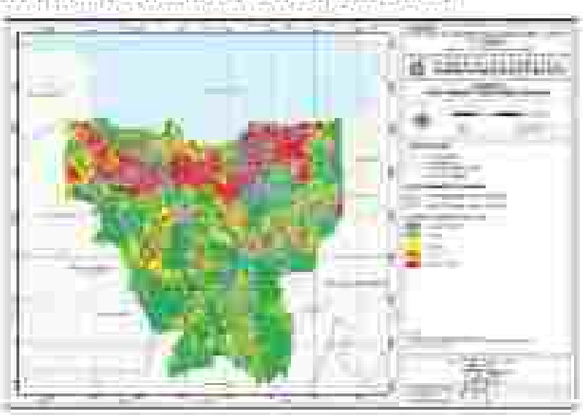
B. Peta Wilayah Risiko Kebakaran



C. Peta Penurunan Muka Tanah



D. Peta Kawasan Rawan Bencana



Sumber: Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030, (2024)

Penurunan muka tanah disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk ekstraksi air tanah yang berlebihan, penurunan yang disebabkan oleh beban bangunan, konsolidasi lapisan tanah alami, dan tekanan tektonik. Beberapa daerah yang mengalami penurunan cukup besar yaitu Cengkareng Barat, Pantai Indah Kapuk, sampai dengan Dadap. Nilai subsidence paling besar terdapat di daerah Muara Baru. Sementara untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan nilai subsidence relatif kecil. Peta penurunan tanah di Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar 2.3.C.

Kebakaran adalah bencana lain yang sering melanda Jakarta. Bencana ini biasanya terjadi di lingkungan padat penduduk dan lingkungan pasar, dan biasanya disebabkan oleh korsleting listrik. Bahaya kebakaran diperkirakan akan terus menjadi ancaman apabila tidak tumbuh kesadaran masyarakat untuk hidup dengan budaya perkotaan. Menurut perkiraan, ada sepuluh sumber gempa di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan wilayah Selat Sunda menjadi wilayah yang memiliki bahaya tertinggi dan berpotensi menghasilkan tragedi besar. Berdasarkan data seismik dari seluruh Indonesia, terdapat celah seismik di bagian selatan barat jawa yang juga mengandung potensi gempa yang berdampak signifikan terhadap Provinsi DKI Jakarta. Celah seismik ini merupakan daerah jalur gempa dengan sedikit gempa dalam jangka waktu yang lama. Dibandingkan dengan Jakarta bagian selatan, Jakarta bagian utara akan lebih rentan terhadap dampak gempa karena kondisi kebatuan atau tanah lunaknya. Gambar 2.3.D menggambarkan daerah rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan peta kawasan rawan bencana gempa bumi Jawa bagian barat, potensi gempa bumi di wilayah DKI Jakarta termasuk kategori tingkat menengah sampai rendah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menyusun peta zonasi gempa Level I – Level II, yaitu sampai dengan peta kondisi kerentanan batuan/tanah dan respon gempa berdasarkan data sekunder.

2.1.1.1.4 Hidrologi

Sesuai Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 716K/40/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan Air Tanah Di Pulau Jawa dan Pulau Madura, Provinsi Daerah Khusus Jakarta berada di Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Jakarta yang merupakan cekungan air tanah lintas provinsi. CAT ini memiliki luas sekitar 1.439 km².

Gambar 2.4
Peta Tematik Sungai di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang, (2024)

Selanjutnya, ketersediaan sumber daya air itu sendiri bergantung pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) berupa wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. DAS berfungsi menampung, menyimpan, dan

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Sampai dengan saat ini, wilayah DKI Jakarta dialiri oleh 17 (tujuh belas) sungai yang bermuara di Laut Jawa dan beberapa sungai kecil serta yang sangat potensial sebagai air permukaan untuk menunjang kehidupan manusia. Sungai Ciliwung menjadi sungai terpanjang dan terluas di DKI Jakarta, sedangkan Kali Grogol menjadi kali atau kanal terpanjang di wilayah DKI Jakarta. 17 (tujuh belas) aliran sungai tersebut digunakan untuk berbagai keperluan seperti air baku air minum, perikanan dan pertanian serta usaha perkotaan lainnya. Dari 17 (tujuh belas) sungai, peruntukan air sungai banyak diarahkan untuk usaha perkotaan. Sedangkan sungai yang diperuntukkan penggunaan airnya untuk air baku air minum sangat minim jumlahnya di DKI Jakarta sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 di bawah. Adapun untuk sumber air utama atau air baku air minum di DKI Jakarta 97% berasal dari air baku luar Jakarta (Waduk Jatiluhur 81%) dan Air Curah Olahan dari Tangerang (16%). Sementara itu, sumber air baku lokal hanya sebesar 3% yang berasal dari Kali Krukut (Citandak) dan Kali Pesanggrahan. Penurunan muka tanah merupakan salah satu penyebab yang memperparah akibat banjir dan genangan. Laju penurunan muka tanah yang diamati bervariasi secara regional dan temporal, tetapi umumnya antara 1 dan 15 cm per tahun.

Tabel 2.2
Panjang dan Luas Sungai/Kanal Menurut Peruntukannya di Provinsi DKI Jakarta

No	Sungai/Kanal	Panjang (m)	Luas (m²)	Peruntukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ciliwung	21.660	515.600	Usaha Perkotaan
2.	Krukut	18.370	266.340	Air Baku Air Minum
3.	Mookervart	8.600	215.000	Air Baku Air Minum
4.	Kali Angke	4.350	175.375	Usaha Perkotaan
5.	Kali Pesanggarahan	11.400	142.500	Perikanan
6.	Kali Grogol	21.600	367.325	Perikanan
7.	Kali Cideng	12.700	291.000	Usaha Perkotaan
8.	Kalibaru Timur	14.250	166.875	Usaha Perkotaan
9.	Ciptnang	9.060	72.480	Usaha Perkotaan
10.	Sunter	21.290	540.900	Usaha Perkotaan
11.	Cakung	18.100	181.000	Usaha Perkotaan
12.	Buaran	8.800	154.000	Usaha Perkotaan
13.	Kalibaru Barat	14.250	166.875	Air Baku Air Minum
14.	Cengkareng Drain	2.950	147.500	Usaha Perkotaan
15.	Jati Kramat	3.270	21.255	Usaha Perkotaan
16.	Ancol	8.650	301.175	Usaha Perkotaan
17.	Banjir Kanal Barat	3.650	155.700	Usaha Perkotaan

Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2024" (2024)

2.1.1.1.5 Klimatologi

Sebagai wilayah yang beriklim tropis, Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kedua musim ini berkaitan erat dengan suhu minimum dan maksimum yang terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2023, menurut Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi DKI Jakarta, suhu udara di Provinsi DKI Jakarta berkisar antara 21,20°C sampai dengan 37,20°C. Rata-rata suhu udara terendah dan tertinggi pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 (sebesar 23,00°C – 35,40°C). Kelembaban udara bervariasi, dari 31,00% sampai dengan 100,00%, begitupun dengan tahun 2022, tingkat kelembaban udara dari 34,00% - 100,00%. Sama halnya dengan kelembaban udara, kecepatan angin (0 – 22,00 knot) dan tekanan udara (999,20 – 1.580,70 mbar) selama tahun 2023 juga bervariasi. Selanjutnya, diketahui pula bahwa Di Stasiun Meteorologi Kemayoran curah hujan tertinggi tercatat yaitu sebesar 1.580,70 mm/ tahun dan hari hujan terbanyak sebanyak 125 hari.

Tabel 2.3
Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun BMKG Tahun 2023

Unsur Iklim	2022	2023	
		Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok	Stasiun Meteorologi Kemayoran
(1)	(2)	(3)	(4)
Suhu Udara (°C)			
Minimum	23,00	21,20	23,20
Rata-Rata	28,47	29,24	29,03
Maksimum	35,40	37,20	36,80
Kelembapan Udara (%)			
Minimum	34,00	33,00	31,00
Rata-Rata	77,21	77,96	74,27
Maksimum	100,00	99,00	100,00
Kecepatan Angin (knot)			
Minimum	0,00	0	0
Rata-Rata	2,36	4,17	2,06
Maksimum	30,00	39,00	22,00
Tekanan Udara (mbar)			
Minimum	1.003,00	999,20	1.001,50
Rata-Rata	1.008,00	1.009,82	1.009,90
Maksimum	1.021,10	1.019,00	1.015,60
Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	2.139,30	1.921,70	1.380,70
Jumlah Hari Hujan (hari)	158,00	124	125
Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (jam)	3,83	6,3	4,6

Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2024", Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2025", (2024)

Sebagaimana Grafik 2.1.A di bawah, suhu rata-rata tahun 2023 di Stasiun Pengamatan Tanjung Priok lebih tinggi dari suhu rata-rata di Stasiun Pengamatan Kemayoran. Suhu rata-rata terendah terjadi pada bulan Februari, yaitu 27,40°C di Stasiun Pengamatan Kemayoran dan 27,60°C di Stasiun Pengamatan Tanjung Priok. Rata-rata suhu udara di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 cenderung fluktuatif hingga mencapai puncaknya pada bulan Oktober yaitu 30,20°C di Stasiun Pengamatan Kemayoran dan 30,40°C di Stasiun Pengamatan Tanjung Priok. Kemudian, untuk tingkat kelembaban udara, pada tahun 2023, tingkat kelembaban udara Provinsi DKI Jakarta mencapai 31,00% - 100,00%.

Rata-rata kelembaban udara tertinggi yang diamati dari Stasiun Kemayoran dan Tanjung Priok terjadi pada bulan Februari masing-masing sebesar 80,90% dan 83,10%. Bulan September merupakan bulan dengan rata-rata kelembaban udara terendah, masing-masing sebesar 67,40% di Stasiun Kemayoran dan 71,40% di Stasiun Tanjung Priok. Tren kelembaban udara di dua stasiun pengamatan yaitu Kemayoran dan Tanjung Priok cenderung sama, yang mana setelah mengalami rata-rata kelembaban tertinggi pada Bulan Februari, baik di Stasiun Kemayoran dan Tanjung Priok tingkat kelembaban mengalami tren fluktuatif sampai dengan Bulan Desember. Kondisi rata-rata suhu udara dan rata-rata kelembaban udara di DKI Jakarta per tahun 2023 sebagaimana laporan BMKG, menjadi salah satu pemicu polusi udara di Provinsi DKI Jakarta. Kondisi tersebut dikarenakan suhu udara yang rendah dan tingkat kelembaban yang tinggi, sehingga menyebabkan polutan pencemar udara terakumulasi di lapisan atmosfer. Kondisi yang demikian perlu menjadi perhatian bersama, baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun masyarakat umum.

Grafik 2.1
Kondisi Iklim dan Cuaca DKI Jakarta Tahun 2023... (1)

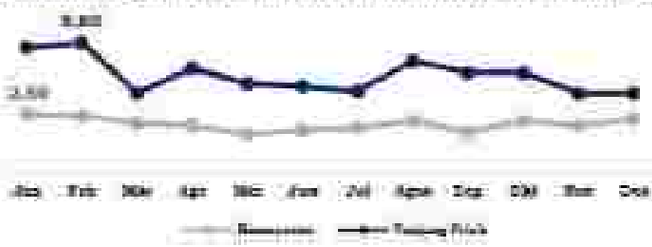
A. Rata-Rata Suhu Udara (°C) Menurut Stasiun Pengamatan



B. Kelembaban Udara (%) Rata-Rata Menurut Stasiun Pengamatan



C. Rata-Rata Kecepatan Angin (meter/detik) Menurut Stasiun Pengamatan



Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2024" (2024)

Selain kondisi suhu udara dan kelembaban udara, tingkat kecepatan angin juga secara langsung dapat memengaruhi cuaca di suatu wilayah. Rata-rata kecepatan angin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 suancapai 1,60 m/detik – 5,60 m/detik. Rata-rata kecepatan angin yang diamati dari Stasiun Tanjung Priok lebih tinggi jika dibandingkan dengan Stasiun Kemayoran. Rata-rata kecepatan angin tertinggi di Stasiun Kemayoran terjadi pada Bulan Januari (2,50 m/detik), sedangkan rata-rata kecepatan angin tertinggi di Stasiun Tanjung Priok terjadi pada Bulan Februari (6,60 m/detik). Adapun, berdasarkan data sebagaimana grafik di atas, selama tahun 2023 tingkat kecepatan angin di Provinsi DKI Jakarta masuk ke dalam kategori normal baik yang diamati di Stasiun Kemayoran maupun Tanjung Priok.

Grafik 2.2
Kondisi Iklim dan Cuaca DKI Jakarta Tahun 2023... (2)

A. Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (jam) Menurut Stasiun Pengamatan



B. Jumlah Curah Hujan (mm/bulan) Menurut Stasiun Pengamatan



Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2024" (2024)

Selanjutnya, sepanjang tahun 2023 rata-rata harian penyinaran matahari berdasarkan pengamatan di Stasiun Tanjung Priok lebih tinggi jika dibandingkan dengan Stasiun Pengamatan Kemayoran. Rata-rata harian penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Oktober, yaitu 30,40 jam yang tercatat di Stasiun Pengamatan Tanjung Priok dan sebesar 30,20 jam yang tercatat di Stasiun Pengamatan Kemayoran. Sedangkan rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2023 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 1.521,70 mm/tahun. Terjadi peloncjakan jumlah curah hujan yang cukup besar pada Bulan September - Oktober di Stasiun Kemayoran dan Bulan Oktober di Stasiun Tanjung Priok.

2.1.1.2 Tata Guna Lahan dan Arah Pengembangan

Penggunaan lahan pada umumnya terbagi 2 (dua), yaitu lahan yang diperuntukan untuk kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian. Sedangkan kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan sekitarnya, dan kawasan rawan bencana. Pertumbuhan penduduk DKI Jakarta yang tinggi menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan lahan untuk dapat menampung berbagai aktivitas penduduk di DKI Jakarta. Secara keseluruhan lahan di DKI Jakarta merupakan lahan budidaya yang mana penggunaan lahan terbesar masih didominasi untuk perumahan dan permukiman. Dalam kurun waktu yang sama, perubahan terbesar terlihat dalam hal peningkatan fasilitas umum, komersil dan pemerintahan, dan lahan tidak terbangun. Perubahan tersebut berdampak pada berkurangnya lahan tidak terbangun di DKI Jakarta.

Pertumbuhan fisik wilayah DKI Jakarta selama beberapa dekade terakhir ditandai dengan peningkatan lahan terbangun (gedung komersial, pusat komunitas, infrastruktur perkotaan, dll). Peningkatan lahan terbangun ini salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk serta peningkatan aktivitas perkotaan yang membutuhkan ruang yang cukup masif. Perbandingan penggunaan lahan di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2008 dan 2022 adalah sebagai berikut.

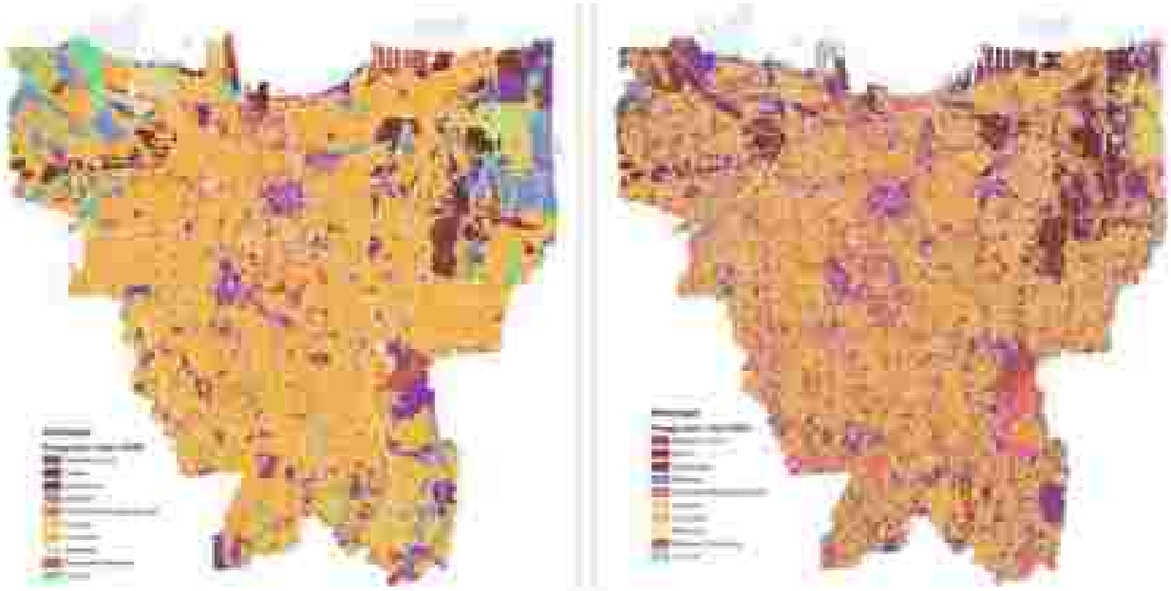
Tabel 2.4
Perubahan Guna Lahan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008 dan 2021

Guna Lahan	2008		2021		Perubahan 2008-2021
	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perumahan	39.442,44	67,09	28.615,49	50,20	-16,89
Pelayanan Umum	5.913,52	10,06	13.202,86	23,16	13,10
Perikanan	3.860,85	6,57	467,75	0,82	-5,75
Perkantoran/Perdagangan/Jasa	2.440,49	4,15	7.414,50	13,01	8,86
Industri	1.820,37	3,10	3.046,17	5,34	2,25
Pergudangan	1.633,65	2,78	1.974,60	3,46	0,68
Lain-Lain	1.497,35	2,55	24,60	0,04	-2,50
Pertanian	1.301,60	2,21	1.415,65	2,48	0,27
Prasarana Transportasi	806,17	1,37	830,51	1,46	0,09
Peternakan	71,47	0,12	10,03	0,02	-0,10

Sumber: Rangkuman RTRW Provinsi DKI Jakarta, (2021)

Sebagaimana tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 14 tahun, Provinsi DKI Jakarta mengalami perkembangan yang pesat yang dibuktikan dengan adanya perubahan dalam penggunaan lahan. Pada tahun 2008, sebagian besar penggunaan lahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah perumahan dan pelayanan umum dengan persentase masing-masing hingga 67% dan 10%. Pelayanan umum meliputi seluruh fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan, dan sosial lainnya. Fungsi Jakarta sebagai pusat pertumbuhan wilayah, termasuk pusat perdagangan dan jasa, menjadikan kebutuhan lahan untuk hunian serta fasilitas pelayanan umum menjadi tinggi. Walaupun fungsi perumahan dan pelayanan umum sampai dengan tahun 2021 masih menjadi guna lahan yang paling besar, namun persentasenya berubah signifikan, terutama pada fungsi pelayanan umum. Perubahan yang cukup besar juga terjadi pada fungsi perkantoran/perdagangan/jasa yang awalnya berada pada persentase 4% menjadi 13%. Selain itu, peningkatan penggunaan lahan juga terjadi pada aktivitas industri, pergudangan, prasarana transportasi, dan pertanian. Guna lahan yang mengalami penurunan luas wilayah selain hunian adalah perikanan, peternakan, dan fungsi lainnya.

Gambar 2.5
Peta Pembangunan Lahan di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Rangerda RTRW Provinsi DKI Jakarta, (2024)

Selanjutnya dengan berbagai potensi yang dimiliki, dari sisi pembangunan wilayah, tata ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 diwujudkan dan dijaberkan dalam Rencana Tata Ruang DKI Jakarta. Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud di DKI Jakarta ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Wilayah Perencanaan DKI Jakarta. Arah pengembangan DKI Jakarta itu sendiri disusun dengan mempertimbangkan potensi di setiap wilayah kota administrasi dan kabupaten administrasi. Adapun 5 (lima) arah pengembangan Kota Jakarta, yaitu:

a. **Kota Berorientasi Transit dan Digital**
Menghadirkan intensifikasi pertumbuhan bangunan di titik transit dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan penggunaan kendaraan umum yang masif dalam setiap mobilitas masyarakat. Selain itu, konsep Kota Berorientasi Transit dan Digital akan diarahkan untuk pembangunan hunian vertikal di area yang terlayani angkutan umum massal, optimalisasi lahan, rencana jaringan transportasi publik terintegrasi dan pengembangan infrastruktur digital sekala kota.

b. **Perumahan dan Pemukiman yang Layak, Terjangkau, dan Berdaya**
Meliputi rumah atau tempat tinggal yang dapat dibangun hingga 4 lantai. Selain itu, kebijakan terkait fleksibilitas tata ruang untuk fasilitas sosial, kelenturan pemanfaatan ruang untuk UMKM berkegiatan secara formal di berbagai zona kecuali Ruang Terbuka Biru/Ruang Terbuka Hijau (RTB/RTH).

c. **Lingkungan Hidup dan Seimbang dan Lestari**
Mencakup perencanaan dan potensi RTH yang dikembangkan di atas 30 persen dari luas wilayah DKI Jakarta. Kemudian, untuk pelestarian lingkungan akan mengoptimalisasikan ragam pendekatan termasuk konsep ruang hijau dan intensitas pembangunan dinamis serta proporsional terhadap daya dukung.

d. **Destinasi Pariwisata dan Bidaya Global**
Pemanfaatan cagar budaya untuk aktivitas produktif dengan memperhatikan aspek konservasinya. Lebih lanjut, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga mengatikan wilayah kepulauan dan perairan dangkal maupun sekitarnya dapat dikembangkan secara *eco-friendly*.

e. **Magnet Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan**
Mencangkup perizinan ruang yang dilakukan secara digital dengan kapasitas dan kecepatan waktu proses maksimal 57 hari.

2.1.1.3 Kondisi Demografi

Berdasarkan data Badan Statistik Daerah (BPS), sampai dengan tahun 2023 penduduk di Provinsi DKI Jakarta berjumlah 10.672.100 jiwa, yang mana angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 10.679.951 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki secara konsisten dari tahun 2019-2023 lebih besar daripada penduduk perempuan, dimana perbandingan antara penduduk perempuan dan laki-laki di DKI Jakarta dapat dikatakan berimbang.

Tabel 2.5
Komposisi Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Laki-laki	5.284.321	5.334.781	5.362.748	5.375.869	5.371.646
2	Perempuan	5.272.489	5.227.307	5.282.028	5.304.082	5.300.454
Jumlah		**10.557.810**	**10.562.088**	**10.644.776**	**10.679.951**	**10.672.100**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024)

Penduduk DKI Jakarta tersebar di 5 Kota Administratif, 1 Kabupaten Administratif. Jumlah penduduk terbanyak berada di Jakarta Timur mencapai 3.079.618 jiwa (28,86%) dari total populasi penduduk DKI Jakarta, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Adm. Kepulauan Seribu dengan total penduduk sebanyak 28.523 jiwa (0,27%). Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 71,74 persen (7.632.045 jiwa) dibandingkan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yang hanya sebesar 28,26 persen (3.006.716 jiwa). Perbedaan yang tajam antara kelompok umur tersebut menyimpulkan bahwa Provinsi DKI Jakarta masih berada dalam masa bonus demografi. Dominasi penduduk usia produktif di Provinsi DKI Jakarta ini dapat menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan, pendapatan, dan daya saing di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2.6
Komposisi Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023
Berdasarkan Wilayah Administrasi dan Umur

Umur	Kota/Kabupaten						
	Kep. Seribu	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Utara	DKI Jakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0-4	2.736	148.917	323.688	69.337	177.478	126.961	754.737
5-9	2.565	139.195	234.365	71.568	184.543	141.672	793.908
10-14	2.324	164.800	256.113	74.163	188.331	140.507	826.238
15-19	2.361	171.467	241.086	79.049	189.332	138.587	822.002
20-24	2.642	175.884	243.352	88.265	189.563	128.863	828.569
25-29	2.491	175.765	243.209	82.275	191.611	141.993	837.335
30-34	2.328	174.688	245.030	82.384	200.745	148.164	852.939
35-39	2.199	175.155	246.610	82.824	208.376	151.862	867.026
40-44	1.967	176.447	241.758	79.924	202.432	147.358	849.906
45-49	1.790	175.215	231.382	78.251	186.830	135.711	810.119
50-54	1.561	158.423	203.846	73.410	159.684	113.414	710.358
55-59	1.312	131.307	169.169	64.676	132.196	92.188	590.848
60-64	971	100.061	130.979	51.253	102.977	72.175	458.543
65-69	611	69.421	93.144	36.936	73.516	52.782	326.380
70-74	339	41.752	53.527	22.990	44.941	31.313	194.862
75+	277	36.709	48.692	20.789	37.395	28.225	161.091
Total	**28.514**	**2.235.606**	**3.046.888**	**1.048.314**	**2.470.004**	**1.808.985**	**10.639.061**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Kinerja beberapa indikator pembangunan yang mewakili gambaran kesejahteraan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dengan dukungan data beberapa tahun terakhir disajikan pada subbab ini.

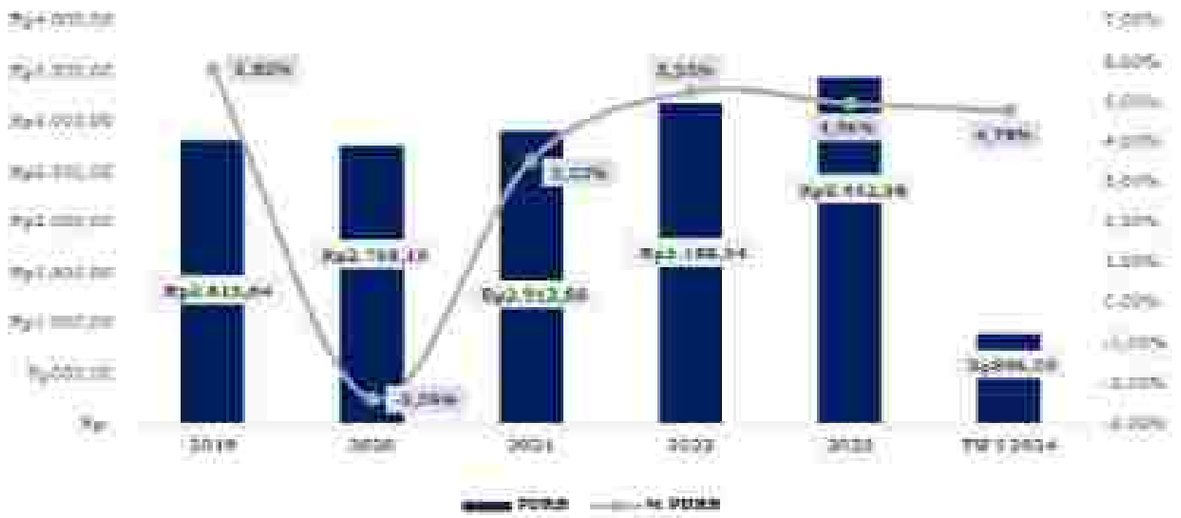
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur dalam melihat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan ekonomi, maka dapat diindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat pun tinggi. Namun demikian, tidak hanya tingkat ekonomi yang diukur, melainkan juga aspek pemerataan, sehingga manfaat dari tingginya ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara makro adalah melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan PDRB memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa di periode tersebut. PDRB Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.3
PDRB Provinsi DKI Jakarta ADHB Tahun 2019 – TW I 2024 (Triliun Rupiah)



Sumber: Diolah dari Buku "Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2024" (2024)

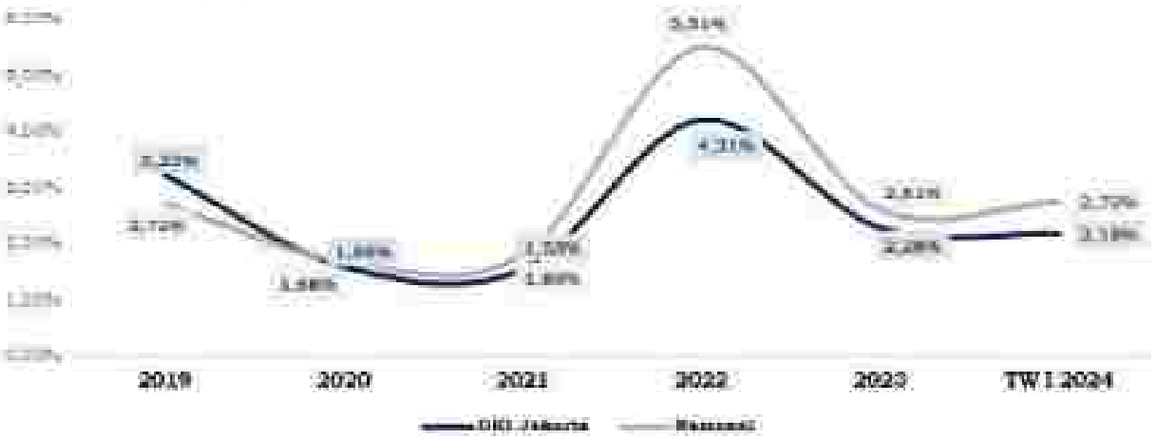
Perekonomian Provinsi DKI Jakarta periode 2019 – TW I 2024 mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Pandemi COVID-19 sangat memengaruhi kondisi perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini memberikan dampak yang besar bagi perekonomian DKI Jakarta itu sendiri, sehingga pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta melambat sampai dengan -2,39% dengan nilai sebesar Rp2.768,19 triliun rupiah. Namun demikian, kondisi perekonomian cenderung membaik sejak tahun 2021 yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan PDRB di tahun 2021 yang kembali menyentuh titik positif sebesar 3,56% jika dibanding tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2023, PDRB berdasarkan harga berlaku di Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp3.442,98 triliun, naik Rp254,44 triliun dari tahun sebelumnya. Kontribusi PDRB Provinsi DKI Jakarta terhadap PDB Indonesia tahun 2023 sudah mencapai 16,77% (sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional). Kondisi tersebut berlanjut di tahun 2024, yang mana perekonomian Provinsi DKI Jakarta tetap kuat pada triwulan I 2024, dengan pertumbuhan sebesar 4,78% (yoy) atau setara dengan Rp896,09 triliun rupiah.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang tetap kuat ditopang oleh meningkatnya konsumsi RT, konsumsi Pemerintah, dan konsumsi LNPRT. Di sisi lain, ekspor dan investasi tumbuh melambat. Adapun impor tumbuh meningkat sehingga turut menjadi penahan pertumbuhan. Sementara itu, dari sisi Lapangan Usaha (LU) utama, pertumbuhan terutama ditopang oleh meningkatnya kinerja LU perdagangan, LU konstruksi, dan LU informasi. Namun, LU utama lainnya seperti industri pengolahan dan jasa keuangan tumbuh lebih rendah. Meskipun tetap tumbuh kuat, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan I 2024 masih lebih rendah dibandingkan perekonomian nasional yang tumbuh mencapai 5,11% (yoy).

b. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 – TW I 2024 menunjukkan tren menurun dan relatif terjaga. Inflasi tersendah di Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,53% dan tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,21%.

Grafik 2.4
Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 – TW I 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam angka 2024 (2024)

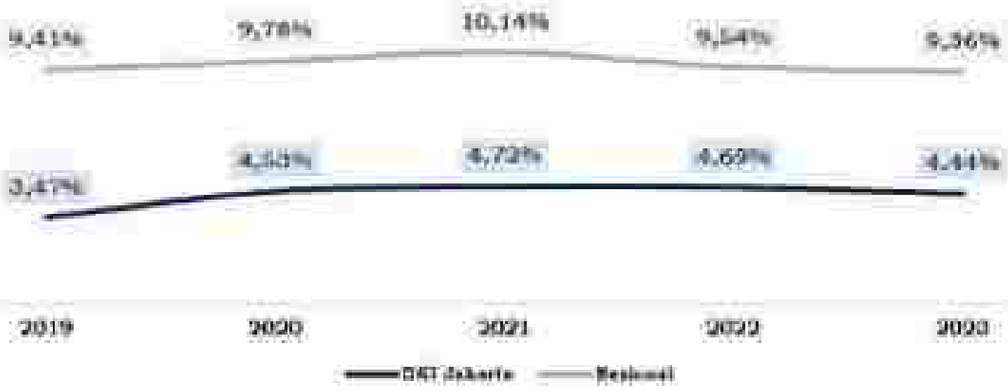
Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara nasional. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan inflasi secara signifikan, dimana inflasi Provinsi DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebagai dampak dari kondisi Pandemi COVID-19. Walaupun demikian, sampai dengan triwulan I 2024 tetap terkendali dalam sasaran target, yaitu sebesar 2,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya (2,28%, yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan tekanan inflasi masih terkendali dalam target sasaran 2,5±1% dengan tetap mendukung stabilitas ekonomi. Laju inflasi yang tetap rendah didukung oleh efektifitas hasil sinergi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Kondisi tersebut membuat tekanan inflasi Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional (2,75%).

Lebih rendahnya tekanan inflasi pada triwulan I 2024 bersumber dari penurunan tekanan inflasi pada beberapa kelompok pengeluaran seperti kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya di tengah kelompok lainnya yang mengalami kenaikan tekanan inflasi. Adapun Kelompok dengan andil inflasi tertinggi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran serta kelompok pendidikan. Adapun berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan I 2024 diantaranya beras, daging ayam ras, cabai merah, emas perhiasan dan tomat.

c. Tingkat Kemiskinan

Pada periode 2019 – Maret 2023 persentase tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta cenderung fluktuatif, pada data tahun 2019 persentase angka kemiskinan berada pada angka 3,47%, kemudian di tahun berikutnya ketika pandemi COVID-19 berlangsung berdampak pada peningkatan persentase angka kemiskinan di tahun 2020 menjadi sebesar 4,53%. Lalu pada tahun 2021 cenderung masih dalam kondisi dampak dari penyebaran COVID-19 dengan peningkatan persentase menjadi 4,72%.

Grafik 2.5
Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 - Maret 2023



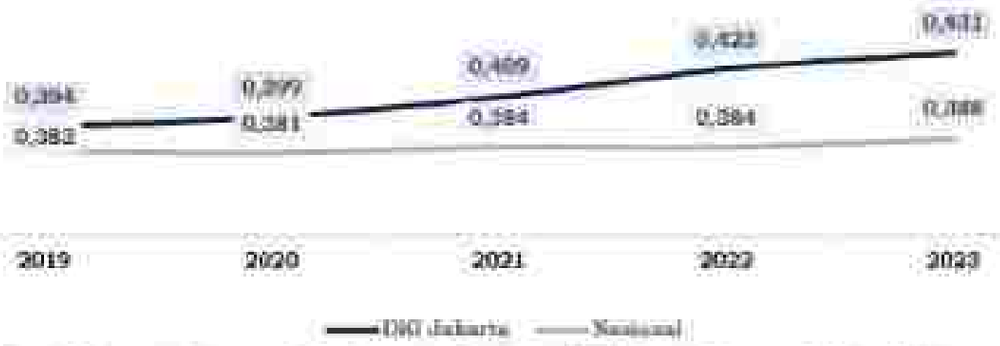
Sumber: Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2024" (2024)

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di Ibu Kota. Namun demikian, jumlah kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, serta jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin nasional. Tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta mulai mengalami penurunan di tahun 2022 sampai dengan Maret 2023. Berdasarkan data Maret 2023, tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 4,44%, menurun dibandingkan Maret 2022 (4,69%). Tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional (9,36%). Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian DKI Jakarta dan pengurangan jumlah pengangguran. Selain itu, gencarnya program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi turut berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin.

d. Rasio Gini

Tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks gini dapat menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan dampak yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Gap antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2023 semakin tinggi setelah terjadi *outlier* di tahun 2020 berupa pandemi COVID-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta mencapai minus. Kondisi demikian menyebabkan banyaknya pemberhentian tenaga kerja. Adapun kemudian di tahun 2023 indeks rasio gini Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 0,431. Indeks tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Kemudian, apabila dibandingkan dengan nasional, indeks rasio gini Provinsi DKI Jakarta selalu berada di atas nasional, yang mana di tahun 2023 indeks rasio gini nasional adalah sebesar 0,388. Adapun kemudian, jika dilihat berdasarkan nilai indeks, ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang, dikarenakan nilainya berada pada rentang 0,4-0,5. Namun demikian, naiknya angka ini juga patut menjadi perhatian dikarenakan semakin banyak penduduk yang pengeluarannya masuk ke kelompok 40 persen terbawah.

Grafik 2.6
Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 - 2023



Sumber: Buku Infografis "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Februari 2024" (2024)

Selanjutnya, dalam konstelasi regional Jawa, tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta termasuk provinsi dengan capaian angka gini ratio di atas capaian nasional dan rata-rata provinsi di Pulau Jawa. Artinya ketimpangan pendapatan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan rata-rata provinsi di Pulau Jawa.

Tabel 2.7
PDRB Per Kapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023

No.	Komponen	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	DKI Jakarta	0,394	0,389	0,409	0,423	0,431
2.	Jawa Barat	0,398	0,398	0,406	0,412	0,425
3.	Jawa Tengah	0,359	0,365	0,368	0,366	0,369
4.	DI Yogyakarta	0,437	0,420	0,436	0,439	0,449
5.	Jawa Timur	0,364	0,384	0,364	0,365	0,387
6.	Banten	0,365	0,361	0,363	0,377	0,368
Nasional		**0,382**	**0,381**	**0,384**	**0,384**	**0,388**

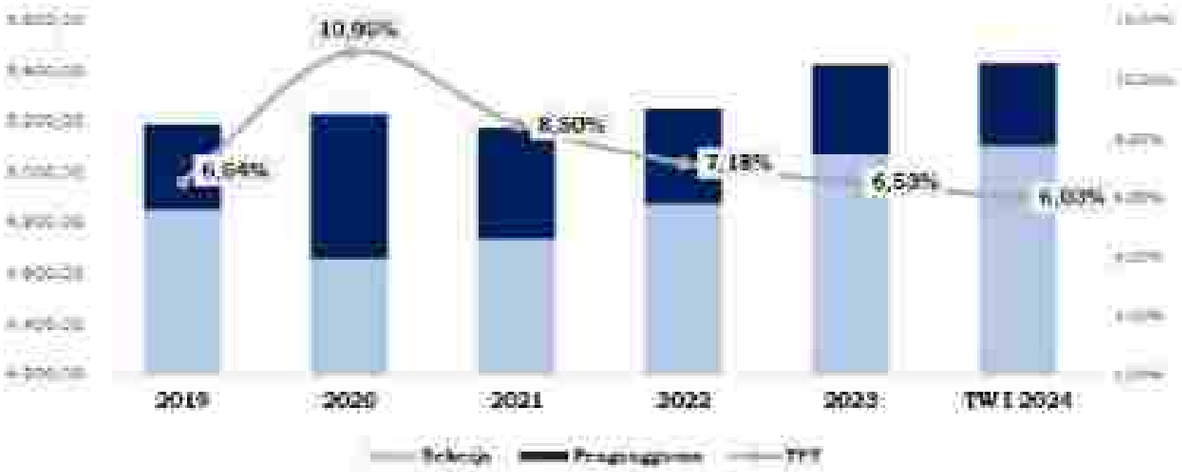
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024)

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Selama periode 2019 – TW I 2024 terdapat gejolak pada performa ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan angka pengangguran terbuka. Kondisi ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda selama tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis ekonomi global secara langsung memengaruhi turunnya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta di tahun 2020. Lesunya perekonomian sebagaimana dimaksud memengaruhi performa sektor usaha sehingga dilakukan pemotongan kontrak tenaga kerja secara besar-besaran. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka meningkat dibanding tahun 2019, yaitu mencapai 10,95%. Namun demikian, angka tersebut terus turun seiring dengan perbaikan ekonomi global. Tercatat pada tahun 2021 sampai dengan TW I 2024 TPT Provinsi DKI Jakarta kembali berada di bawah 10%. Meski mengalami penurunan, angka tersebut belum lebih baik dibanding kondisi sebelum pandemi, sehingga Provinsi DKI Jakarta masih memiliki tugas dalam rangka mencapai performa yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi.

Selama periode 2018 – 2022 telah dilaksanakan program-program yang berkaitan dengan pengurangan pengangguran terbuka, yaitu Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Keluaran dari program tersebut seperti penempatan tenaga kerja, pencari kerja yang berwirausaha, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Program-program ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka. Terlepas dari pandemi Covid 19 pada tahun 2020, pengurangan TPT Provinsi Daerah Khusus Jakarta terus membaik setiap tahunnya pada periode ini.

Grafik 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 - TW I 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Februari 2024" (2024)

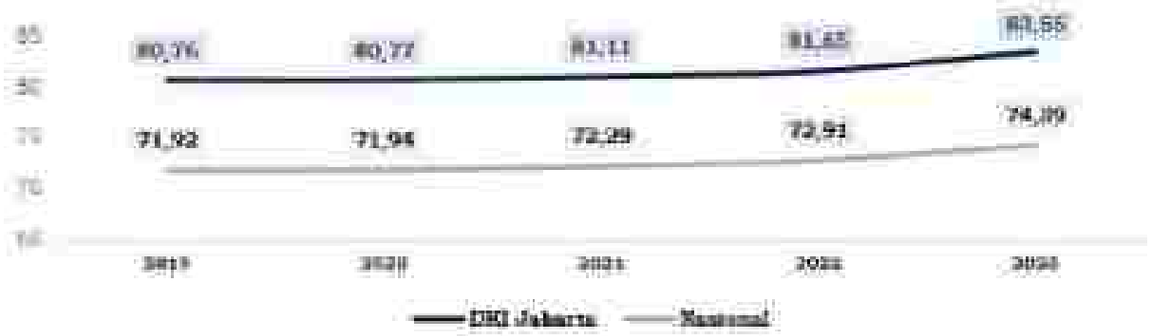
Melihat lebih dalam, penyumbang TPT tertinggi Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun terakhir adalah lulusan SLTA Umum dan Kejuruan. Hal ini menandakan kebijakan wajib belajar 12 tahun belum cukup untuk mempersiapkan kualitas SDM yang diperlukan pencari kerja, sehingga dibutuhkan intervensi-intervensi penguatan kapasitas SDM terutama yang telah menyelesaikan belajar 12 tahun (lulusan SLTA Umum/Kejuruan) untuk dapat bersaing di dunia kerja dan menemui pangsa pasar pencari kerja di Jakarta.

Dalam penanganan tingkat pengangguran di Daerah Khusus Jakarta ke depannya memiliki beberapa tantangan, seperti akan meningkatnya persaingan dengan tenaga kerja asing, selaras dengan tujuan Jakarta sebagai kota global. Selain itu pesatnya perkembangan teknologi, terutama automasi akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja kasar, karenanya perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang keahliannya tidak dapat digantikan oleh teknologi. Selain tantangan di atas, hal yang harus dipertimbangkan adalah tren pertumbuhan ekonomi Jakarta yang mengarah kepada sektor perdagangan dan jasa, terutama jasa keuangan dan komunikasi dan informatika, agar kedepannya dapat menyiapkan tenaga kerja yang sesuai pangsa pasar.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana sebuah penduduk kota dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu, kesehatan melalui Angka Harapan Hidup (AHH), pendidikan melalui angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan daya beli melalui PDRB per kapita. Secara umum, IPM memiliki tiga manfaat utama yaitu mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah, dan menjadi salah satu indikator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Grafik 2.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024)

Pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta terus menginami kemajuan. Sejak tahun 2019, status pembangunan manusia Provinsi DKI Jakarta sudah berada di level "sangat tinggi" (IPM ≥ 80). Selama periode tahun 2019 - 2023, IPM Provinsi DKI Jakarta rata-rata meningkat sebesar 0,66 persen per tahun, dari 80,76 pada tahun 2019 menjadi 83,55 di tahun 2023.

Tabel 2.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Menurut Dimensi Penyusunannya Tahun 2020-2023

No	Dimensi/Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**Umur Panjang dan Hidup Sehat**						
	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	72,79	73,10	73,29	73,54	73,81
2	**Pengetahuan**						
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,97	12,98	13,07	13,08	13,33
	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,09	11,13	11,17	11,21	11,45
3	**Standar Hidup Layak**						
	Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp000	18.527	18.227	18.520	18.907	19.373
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			**80,76**	**81,92**	**82,25**	**82,77**	**83,55**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024)

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, yaitu Umur Panjang dan Hidup Sehat, Pengetahuan, serta Standar Hidup Layak (Tabel 2.9). Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat yang didukung oleh satu indikator, yaitu Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 75,81 tahun di tahun 2023 (meningkat 0,27 tahun dibanding tahun 2022). Kemudian, dimensi Pengetahuan yang didukung oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengalami percepatan di tahun 2023 dengan masing-masing capaiannya adalah 13,33 tahun dan 11,45 tahun. Sama halnya dengan dua dimensi lainnya, dimensi Standar Hidup Layak yang diukur melalui Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) juga mengalami percepatan di tahun 2023, yaitu Rp.19.373.

Tabel 2.9
IPM dan Komponen IPM Kota/Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2023

	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita		IPM	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kep. Seribu	74,17	74,37	12,87	12,68	8,68	8,81	12.612	12.587	74,15	74,65
Jakarta Selatan	75,45	75,52	13,30	13,34	11,63	11,64	23.575	23.886	85,40	85,58
Jakarta Timur	74,82	74,88	13,86	13,95	11,66	11,67	17.438	17.733	83,64	83,84
Jakarta Pusat	75,17	75,34	13,25	13,26	11,28	11,29	17.179	17.362	82,33	82,50
Jakarta Barat	75,32	75,36	12,80	12,81	10,83	10,78	20.468	20.801	82,33	82,70
Jakarta Utara	74,78	74,85	12,63	12,64	10,86	10,81	18.437	18.762	81,04	81,26
DKI Jakarta	**75,20**	**75,28**	**12,98**	**13,07**	**11,13**	**11,17**	**18.227**	**18.520**	**81,92**	**82,25**

	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita		IPM	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kep. Seribu	74,54	74,89	12,68	12,68	9,02	9,03	12.999	13.323	75,34	75,91
Jakarta Selatan	75,77	76,02	13,38	13,66	11,68	11,76	24.221	24.976	85,87	86,71

Jakarta Timur	75,12	75,37	13,97	14,06	11,73	11,88	18.199	18.712	83,80	84,26
Jakarta Pusat	76,02	76,34	13,28	13,29	11,53	11,54	17.785	18.202	83,30	83,29
Jakarta Barat	75,62	75,81	12,82	12,87	11,13	11,23	21.387	21.709	83,49	83,85
Jakarta Utara	74,96	75,07	12,66	12,67	10,82	10,84	19.201	19.617	81,58	81,85
DKI Jakarta	75,84	76,01	13,08	13,10	11,31	11,46	18.927	19.293	82,77	83,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024)

Adapun jika dilihat berdasarkan Kab/Kota administrasi, IPM Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 86,71 merupakan yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, diikuti oleh Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar 84,26, Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar 83,85, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 83,29, dan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 81,85. Kinerja IPM di 5 (lima) kota administrasi sebagaimana dimaksud sudah masuk ke dalam kategori "sangat tinggi". Sementara itu, IPM Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sampai dengan tahun 2023 masih masuk ke dalam kategori "tinggi" (70 ≤ IPM < 80), yaitu sebesar 75,91.

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Tujuan utama dari sebuah pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu sendiri dapat dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator utama, yaitu: a) tercapainya swasembada (kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar); b) peningkatan harga diri (berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain); c) diperolehnya kebebasan untuk memperbaiki mutu hidup tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Pembangunan sosial budaya menjadi salah satu komponen dalam pembangunan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

a. Kualitas Keluarga

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak bisa dilepaskan oleh peran keluarga. Keluarga merupakan lingkaran terkecil dalam lingkungan sosial yang menjadi tempat bagi setiap individu untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, kualitas keluarga menjadi penting agar hak setiap anggota keluarga terpenuhi dan setiap fase kehidupan dapat terpenuhi. Dalam pemenuhan kualitas keluarga, terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian seperti kesenjangan gender serta kekerasan perempuan dan anak sehingga intervensi kebijakan yang berkaitan dengan gender, perempuan, dan anak perlu disiapkan dan ditingkatkan. Pengukuran pembangunan kualitas keluarga diukur menggunakan dua indeks, yaitu Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) menjadi salah satu alat untuk mengukur capaian pembangunan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, yang selanjutnya hasil indeks ini dapat dijadikan sebagai dasar pengidentifikasian masalah keluarga di suatu wilayah. IKK terdiri atas 5 dimensi dan 29 indikator yang meliputi Kualitas Legalitas Struktur (KLS), Kualitas Fisik (KKF), Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP), dan Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB).

Tabel 2.10
Indeks Kualitas Keluarga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

No	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Kualitas Keluarga Provinsi DKI Jakarta	71,24	72,02	78,34
2.	Indeks Kualitas Keluarga Nasional	70,93	73,84	77,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024)

Pada tahun 2022, capaian IKK Provinsi DKI Jakarta adalah 78,34, masuk ke dalam kategori "Responsif Gender dan Hak Anak". Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

yaitu 72,62. Peningkatan nilai indeks juga terjadi pada semua dimensi dengan nilai dimensi yang mengalami peningkatan tertinggi adalah dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologis (KKSP) sebesar 15,75 poin. Kondisi ini menggambarkan semakin baiknya pemahaman orang tua dan keluarga akan pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak sehingga terjamin kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya.

Tabel 2.11
Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

No	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi DKI Jakarta	54,01	56,77	56,77
2.	Indeks Pembangunan Keluarga Nasional	54,01	56,07	61,43

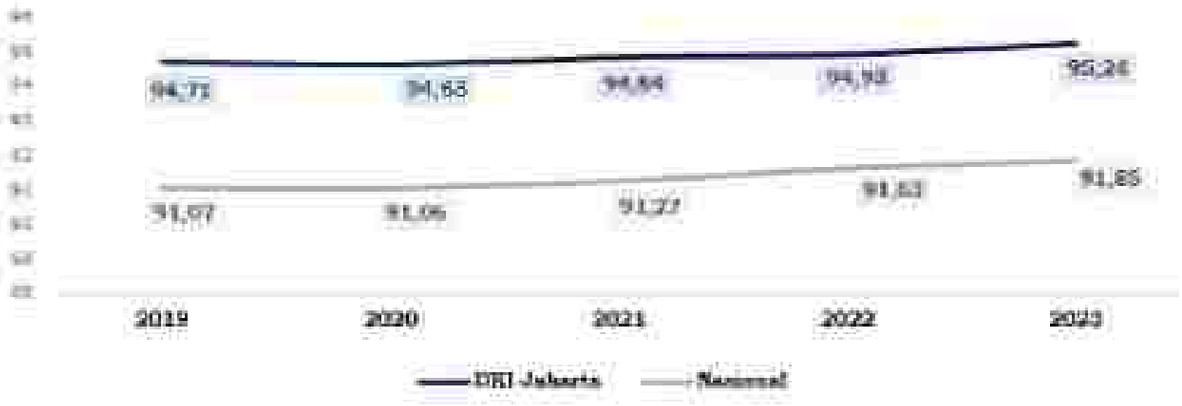
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024)

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam membangun kualitas keluarga dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang, atau rentan. Indeks ini memiliki 3 dimensi, mencakup ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan, yang keseluruhan diturunkan ke dalam 17 variabel. Capaian iBangga Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 54,01 menjadi 56,77. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga di Provinsi DKI Jakarta.

b. Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia seperti IPM, namun data yang dipilih adalah data antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan IPG akan menggambarkan semakin setaranya pencapaian indikator-indikator pembentuk IPM antara laki-laki dan perempuan.

Grafik 2.9
Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023



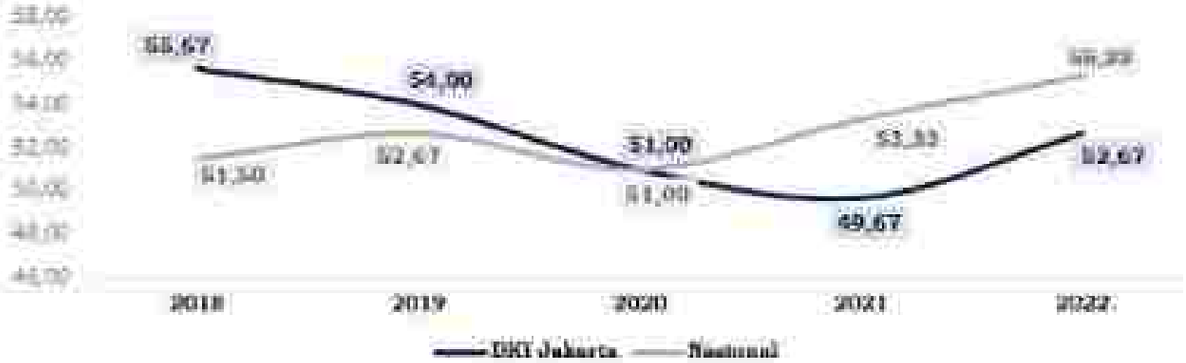
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024)

Sebagaimana data pada grafik di bawah, sejak tahun 2019, IPG Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Peningkatan IPG dalam 5 (lima) tahun terakhir, sejalan dengan nilai IPM Provinsi DKI Jakarta yang juga terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menunjukan bahwa kesadaran dan implementasi kesetaraan gender di Provinsi DKI Jakarta terus membaik dari tahun ke tahun, terutama dalam pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Capaian indeks yang lebih tinggi dibandingkan nasional juga menandakan bahwa kesetaraan gender di Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata semua provinsi di Indonesia.

c. Pembangunan Pemuda

Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing salah satunya ditopang oleh pembangunan pemuda yang berkualitas. Pembangunan pemuda diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). IPP adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia, yang dihitung dari lima domain yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. IPP penting untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terkait dengan perkembangan dan kesejahteraan pemuda di suatu daerah.

Grafik 2.10
Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022



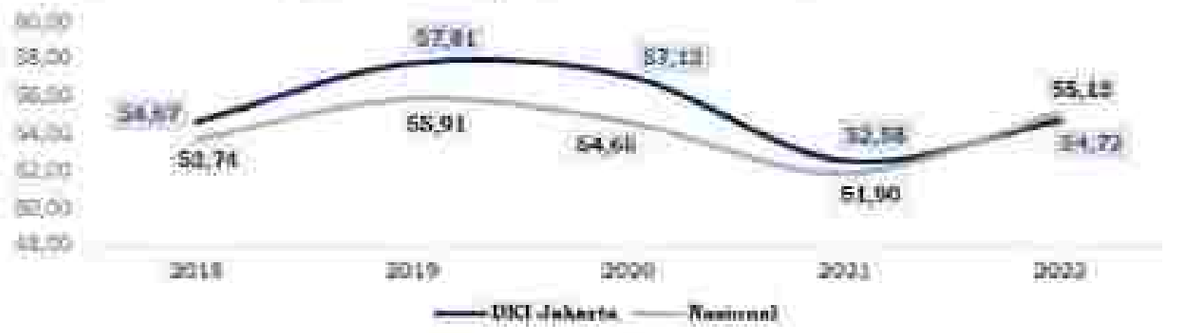
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024)

IPP Provinsi DKI Jakarta cenderung menunjukan penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2022, dan semakin berada di bawah capaian IPP Nasional. Indeks yang menurun ini menunjukan adanya penurunan kondisi dan kesejahteraan pemuda di berbagai aspek kehidupan, salah satunya disebabkan oleh perubahan sosial dan ekonomi di Jakarta yang cepat, termasuk adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020-2021 yang berdampak salah satunya pada domain kesempatan dan lapangan kerja di Provinsi DKI Jakarta.

d. Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan bukan hanya mampu berperan terhadap peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan, namun juga memberikan investasi tersendiri terhadap peradaban bangsa. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, yang disusun mengakomodasi segenap unsur kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi, dan dimensi gender. Ketujuh dimensi penyusun tersebut merujuk pada standar baku pengukuran kebudayaan secara internasional yang terdapat pada *Cultural Development Indicators* (CDIs) yang digagas oleh UNESCO dengan melakukan beberapa adaptasi sesuai dengan unsur-unsur kebudayaan Indonesia.

Grafik 2.11
Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024)

IPK Daerah Khusus Jakarta mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dengan nilai tertinggi adalah tahun 2019 yaitu 57,8 dan nilai terendah di tahun 2021 yaitu 52,67. Meski demikian, IPK Daerah Khusus Jakarta selalu berada di atas nilai IPK nasional dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi budaya, pendidikan budaya, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, serta budaya literasi di Jakarta cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kondisi di provinsi- provinsi lain di Indonesia.

2.1.3 Potensi Daerah

Potensi daerah pada umumnya dilihat dari sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan faktor-faktor lain yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian dan sosial suatu daerah. Potensi yang dimiliki setiap daerah tentunya berbeda-beda bergantung pada karakteristik daerahnya yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan berbagai sektor. Beberapa contoh potensi yang dimiliki daerah, antara lain :

a. Sumber Daya Alam
Potensi ini mencakup segala jenis sumber daya alam yang tersedia di masing-masing daerah, antara lain seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan, hingga energi terbarukan (seperti panas bumi atau angin).

b. Ketenagakerjaan
Setiap daerah memiliki potensi tenaga kerja dengan keterampilan dan keahlian yang berbeda-beda. Pengembangan potensi ini dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan keahlian yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal dan membuka peluang kerja atau lapangan kerja baru.

c. Infrastruktur
Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi,listrik, air bersih, dan telekomunikasi, merupakan faktor yang sangat krusial dalam menarik investasi sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

d. Lingkungan, keindahan alam, dan warisan budaya
Daerah yang memiliki keindahan alam, warisan budaya, dan potensi serupa lainnya memiliki keuntungan yang sangat besar untuk dapat mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah sekaligus sebagai faktor penggerak roda perekonomian daerahnya.

e. Inovasi dan Teknologi
Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam berbagai sektor dapat meningkatkan daya saing daerah dalam skala nasional, regional, maupun global.

Potensi daerah yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat melalui potensi yang ada di masing-masing wilayah kota/kabupaten yang terdiri dari 5 (lima) kota (Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur) dan 1 (satu) kabupaten (Kepulauan Seribu).

a. **Kota Administrasi Jakarta Pusat**
Potensi daerah yang dimiliki Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat dijabarkan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

1) Ekonomi dan Bisnis
Pada sektor ekonomi dan bisnis, Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki potensi berupa pusat perbelanjaan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta Pusat, khususnya untuk sektor perdagangan. Tiga pusat perbelanjaan utama di Jakarta Pusat, yaitu Mall Grand Indonesia, Plaza Indonesia, serta Pusat Tekstil Tanah Abang.

2) Pariwisata
Pada sektor pariwisata, Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki berbagai objek wisata, yaitu Monumen Nasional (Monas), Lapangan Banteng, Pasar Baru, Museum Nasional, Museum Taman Prasasti, Museum Tekstil, Museum Kebangkitan

Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Museum Gedung Joeang 45, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Monas menjadi salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Jakarta Pusat, dikarenakan Monas merupakan ikon utama Kota Jakarta. Pada tahun 2023, Monas juga menjadi objek wisata di Jakarta Pusat dengan catatan kunjungan wisatawan terbanyak, yaitu mencapai 7.321.940 kunjungan, diikuti Museum Nasional dengan 302.929 kunjungan. Keberadaan objek wisata di Jakarta Pusat juga didukung dengan banyaknya hotel atau penginapan, yang mana terdapat 240 hotel berbintang dengan mayoritas berada di Menteng (49 hotel) dan Tanah Abang (41 hotel).

3) Layanan Umum

Pada sektor layanan umum, potensi Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat ditinjau dari 4 (empat) aspek, yaitu Infrastruktur dan Transportasi, Pendidikan, Kesehatan, serta Sosial dan Keberagaman. Potensi pada aspek infrastruktur dan transportasi di Jakarta Pusat dapat terlihat dari ketersediaan infrastruktur serta jaringan transportasi yang relatif maju (jaringan transportasi yang terintegrasi) seperti KRL, MRT, LRT, dan Bus Transjakarta, serta kondisi infrastruktur jalan yang memadai untuk mendukung mobilitas warga yang sangat tinggi. Potensi pada aspek pendidikan di Jakarta Pusat terlihat dari adanya beberapa Perguruan Tinggi, baik Negeri maupun swasta, antara lain Universitas Indonesia (Kampus Salemba), Universitas Trisakti, Universitas Tarumanagara, Universitas Atma Jaya, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, pada aspek kesehatan, potensi Jakarta Pusat terlihat dari adanya beberapa rumah sakit berskala besar, seperti RS Cipto Mangunkusumo, RS St Carolus, dan RS Husada. Adapun untuk aspek sosial dan keberagaman, potensi yang dimiliki Jakarta Pusat terlihat dari adanya Masjid Istiqlal yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara, Gereja Katedral yang merupakan gereja terbesar di Jakarta, serta tempat ibadah lainnya seperti pura dan vihara yang merupakan tempat ibadah bagi umat Hindu dan Buddha.

b. **Kota Administrasi Jakarta Utara**

Potensi utama daerah yang dimiliki Kota Administrasi Jakarta Utara terletak pada wisata pesisir yang didukung oleh berbagai objek wisata. Destinasi wisata pesisir di Jakarta Utara terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu wisata religi, wisata belanja, wisata kuliner, wisata rekreasi, dan wisata alam. Ke depan, potensi wisata pesisir tersebut akan dikembangkan menjadi Kawasan Tujuan Wisata Pesisir, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Adapun beberapa objek wisata di Jakarta Utara yang mendukung pengembangan wisata pesisir antara lain Sentra Belanja Mangga Dua, Kawasan Sunda Kelapa (Pelabuhan Sunda Kelapa, Menara Syahbandar, Galangan VOC, dan Museum Bahari), Gereja Tugu, Masjid Islamic Center, Pusat Perbelanjaan Kelapa Gading, Taman Suaka Margasatwa Muara Angke, Taman Impian Jaya Ancol, Sentra Perikanan Muara Angke, Kawasan Tanjung Priok (Stasiun Tanjung Priok dan Makam Mbah Priok), Kawasan Marunda (Rumah Si Pitung dan Masjid Al Alam), serta Masjid Keramat Luar Batang.

c. **Kota Administrasi Jakarta Barat**

Kota Administrasi Jakarta Barat berpotensi untuk menjadi pusat pertumbuhan bisnis baru di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di koridor Puri Indah dan Kembangan. Hal tersebut didukung oleh beberapa kondisi, yaitu:

1) Koridor Puri Indah dan Kembangan dekat dengan Jakarta Outer Ring Road (JORR) W2 yang merupakan jalan bebas hambatan dan menghubungkan Jakarta Barat dengan selatan Jakarta.
2) Koridor Puri Indah dan Kembangan dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang memudahkan mobilitas warga, khususnya pebisnis.
3) Secara economic demography, kawasan Koridor Puri Indah dan Kembangan dikelilingi oleh perumahan atau hunian mewah yang dihuni oleh masyarakat kalangan menengah atas.

d. **Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Potensi daerah yang dimiliki Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dijabarkan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

1) Pariwisata

Pada sektor pariwisata, Jakarta Selatan memiliki 2 (dua) objek wisata keluarga, yaitu Taman Margasatwa Ragunan dan objek wisata perkampungan betawi Setu Babakan. Selain itu, di Jakarta Selatan juga terdapat 2 (dua) kawasan yang saat ini berkembang menjadi tempat wisata *entertainment*, kuliner, serta *lifestyle*, yaitu kawasan Kemang dan Kebayoran Baru, yang mana 2 (dua) kawasan tersebut saat ini telah didominasi oleh tempat hiburan, restoran, cafe, dan *coffee shop*.

2) Pola Ruang

Dari sisi pola ruang, Jakarta Selatan memiliki potensi besar yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian. Potensi tersebut terlihat dari tersedianya 8 (delapan) kawasan *Transit Oriented Development* (TOD). Keberadaan kawasan TOD tersebut tentunya mendukung mobilitas berbasis transportasi publik dikarenakan secara umum pada 1 (satu) kawasan TOD terdapat minimal 2 (dua) moda transportasi. Kedelapan kawasan TOD tersebut beserta moda transportasinya adalah Blok M (MRT dan BRT), Kebayoran Lama (*Commuter Line*/KRL dan BRT), Manggarai (*Commuter Line*/KRL dan BRT), Fatmawati (MRT dan BRT), Lebak Bulus (MRT dan BRT), Pancoran (LRT dan BRT), Pasar Minggu (*Commuter Line*/KRL dan BRT), serta Tanjung Barat (*Commuter Line*/KRL dan BRT).

e. **Kota Administrasi Jakarta Timur**

Potensi daerah yang dimiliki Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dijabarkan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

1) Transportasi

Salah satu potensi yang dimiliki Jakarta Timur adalah transportasi, hal tersebut dikarenakan moda transportasi umum yang ada di Jakarta Timur dapat dikatakan paling lengkap (memiliki hampir semua jenis moda transportasi). Adapun infrastruktur transportasi yang ada di Jakarta Timur antara lain Bandara Halim Perdanakusuma, Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (Terminal Pulogebang dan Kampung Rambutan), *Bus Rapid Transit* (Transjakarta), Kereta Cepat Whoosh, LRT, dan Kereta *Commuter Line*.

2) Lingkungan

Lingkungan juga menjadi salah satu potensi yang dimiliki oleh Jakarta Timur. Hal tersebut dikarenakan masih dimilikinya ruang terbuka hijau (RTH) yang luas serta memiliki intensitas curah hujan yang lebih tinggi dibanding wilayah kota administrasi lainnya di Provinsi DKI Jakarta, sehingga membuat suhu udara di Jakarta Timur cenderung lebih sejuk dibandingkan dengan wilayah kota administrasi lainnya.

3) Pariwisata

Dari sektor pariwisata, Jakarta Timur memiliki objek wisata yang sudah terkenal cukup lama, yaitu Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang sudah bertahun-tahun lamanya menjadi salah satu tujuan utama wisata keluarga. Berikutnya, Jakarta Timur juga memiliki beberapa pusat perekonomian yang cukup dikenal masyarakat, diantaranya adalah Pusat Industri Kecil (PIK) Pulogadung, Kawasan Industri JIEP, Pasar Induk Kramat Jati, dan Pusat Grosir Jatinegara. Saat ini, kawasan PIK menjadi salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) baru di tahun 2024, yaitu pengembangan *Green Area* dan *Eco-City* di lokasi PIK 2. Kemudian, ke depan, kawasan PIK direncanakan akan diangkat kembali menjadi salah satu destinasi unggulan di Jakarta Timur.

f. **Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu**

Potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat dijabarkan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

1) Pariwisata
Pariwisata merupakan sektor utama perekonomian di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan menawarkan berbagai destinasi wisata bahari seperti *snorkeling*, *diving*, dan memancing. Terumbu karang yang indah dan keanekaragaman hayati bawah laut menjadi daya tarik utama Kepulauan Seribu dalam mengembangkan wisata bahari. Pulau-pulau seperti Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Harapan, Pulau Pari, Pulau Onrust, Pulau Kelor, dan Pulau Bidadari menjadi destinasi favorit wisatawan domestik dan internasional jika berwisata ke Kepulauan Seribu. Masing-masing pulau tersebut menawarkan daya tarik wisata yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Pulau Harapan dan Pulau Pramuka menawarkan ekowisata yang berfokus pada konservasi lingkungan dan pendidikan ekologi. Pulau Bidadari menawarkan resor yang menyediakan akomodasi bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dengan kenyamanan modern. Kemudian, Pulau Onrust dan Pulau Kelor menawarkan wisata sejarah.

2) Perikanan dan Kelautan
Perikanan menjadi sumber pendapatan penting bagi penduduk lokal Kepulauan Seribu melalui beberapa aktivitas yang menjadi mata pencaharian seperti penangkapan ikan serta budidaya laut (ikan, rumput laut, dan kerang mutiara). Banyak penduduk lokal bergantung pada perikanan rangkap sebagai mata pencaharianutama karena Kepulauan Seribu kaya akan berbagai jenis ikan, seperti kakap, kerapu, tenggiri, dan tuna. Kemudian, pengembangan budidaya laut memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian Kepulauan Seribu karena budidaya seperti ikan kerapu, rumput laut, dan kerang mutiara, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, baik di pasar lokal, regional, maupun internasional.

3) Pendidikan dan Penelitian
Kepulauan Seribu dapat menjadi lokasi ideal untuk sebagai pusat penelitian ilmiah dan pengembangan program pendidikan lingkungan bagi siswa dan mahasiswa, dengan fokus tentang kehidupan laut, perubahan iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati.

4) Ekonomi Kreatif
Kerajinan tangan dan produk olahan berupa makanan merupakan 2 (dua) contoh ekonomi kreatif yang berkembang di Kepulauan Seribu. Kerajinan tangan yang dikembangkan oleh penduduk Kepulauan Seribu umumnya berasal dari hasil laut, seperti koral, terumbu karang yang sudah mati, maupun hasil laut lainnya. Kemudian, untuk produk olahan makanan dari hasil laut, beberapa diantaranya seperti ikan asin, abon ikan, dan produk olahan dari hasil laut lainnya. Selain itu, juga terdapat produk olahan makanan dari tanaman buah khas Kepulauan Seribu, yaitu buah Sukun.

5) Transportasi
Peningkatan akses dan layanan transportasi di Kepulauan Seribu dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata karena akan memudahkan mobilitas wisatawan dari dan menuju Kepulauan Seribu. Peningketan akses dan layanan transportasi laut dapat dilakukan dengan meningkatkan layanan dan menambah armada kapal cepat dan kapal feri. Sedangkan untuk transportasi udara, Kepulauan Seribu memiliki potensi besar karena memiliki bandara yang saat ini terbangkalai di Pulau Panjang. Selain itu, wilayah laut juga dapat dikembangkan untuk bisa menjadi landasan bagi pesawat jenis amphibi.

6) Energi Terbarukan
Kepulauan Seribu memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan melalui pengembangan pemanfaatan energi surya dan energi angin sebagai alternatif penyediaan tenaga listrik bagi penduduk dan fasilitas pariwisata. Kondisi terakhir, aliran listrik di Kepulauan Seribu ada yang sudah melalui kabel laut dan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau genset dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum dalam pembangunan daerah merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemberian pelayanan umum yang baik, sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat akan merasa dihargai dan diakui keberadaannya sebagai warga negara. Selain itu, pelayanan yang baik juga dapat meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam sebuah pemerintahan, sehingga dapat meminimalisir birokrasi yang berbelit-belit serta dapat meningkatkan produktivitas pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

2.1.4.1 Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan segala bentuk pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya.

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan kebijakan strategis. Upaya ini tidak hanya mencakup peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendidikan tetapi juga pengembangan kurikulum yang relevan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi serta berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

Tabel 2.12
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,09	13,33
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,33	11,45

Sumber: e-Dekip 2023, diolah

Ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya dapat dilihat dari ketercapaian indikator Harapan Lama sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.12. Harapan Lama Sekolah mengukur jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia tertentu di masa mendatang. Pada tahun 2023, Harapan Lama Sekolah mencapai 13,33 tahun, melebihi target sebesar 13,09 tahun. Hal ini mengindikasikan anak-anak yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan setidaknya hingga diploma 1. Indikator Rata-rata Lama Sekolah mengukur jumlah rata-rata tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Realisasi yang dicapai indikator Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2023 adalah 11,45 tahun, yang juga melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 11,33 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta semakin memiliki akses dan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka lebih lama, yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.

b. Kesehatan

Pemerintah memptinyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai program dan kebijakan, terus berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.

Tabel 2.13
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Universal Health Coverage Service Coverage Index (UHC SCI)	Indeks	70	75,01
2	Persentase Jenis layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan dengan Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) berkategori tuntas	Persen	100	100

Sumber: e-Gakkg 2023, diolah.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada urusan kesehatan adalah Universal Health Coverage Service Coverage Index (UHC SCI). Indikator ini mengukur cakupan layannn kesehatan yang tersedia bagi penduduk. Indeks UHC SHI pada 2023 menunjukkan angka sebesar 75,01, di atas target tahun 2023 sebesar 70. Pencapaian ini menunjukkan bahwa cakupan layanan kesehatan di Jakarta memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Selain itu, indikasi positif pembangunan sektor kesehatan di DKI Jakarta juga ditunjukkan melalui indikator Persentese Jenis layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan dengan Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) berkategori tuntas yang mencapai 100 persen. Hal ini mencerminkan komitmen dan upaya pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh jenis layanan dasar kesehatan tersedia dan berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum dan penataan ruang memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang layak huni, berkelanjutan, dan inklusif di DKI Jakarta. Dengan urbanisasi yang pesat dan jumlah penduduk yang terus meningkat, pengelolaan infrastruktur dan ruang kota menjadi krusial untuk memastikan kualitas hidup masyarakat tetap terjaga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap fasilitas publik, memperbaiki infrastruktur, serta mengembangkan tata ruang yang sesuai dengan perkembangan kota.

Tabel 2.14
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ratio jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas pendukung pada lokasi transportasi massal	Persen	6,06	6,25
2	Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak	Persen	97,74	98,46
3	Indeks Bahaya Banjir	Skor	2,0832	2,03
4	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	Persen	74	79,9
5	Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan Gedung	Persen	2,5	3,99
6	Persentase Jalan dengan Kondisi Mantap	Persen	95	97,27

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Persentase Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan	Persen	65	66,73
8	Persentase akses layanan air limbah aman	Persen	18,636	21,188
9	Luasan Daerah Tergenang	Ha	1071,54	1029,69
10	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	Persen	85	85,5
11	Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau	Persen	7,5	8,32
12	Persentase bangunan gedung yang rumah dimaintas	Persen	7,5	8,32

Sumber : Bidang 2023, diolah

Salah satu indikator untuk mengukur capaian kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Rasio jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas pendukung pada lokasi transportasi massal. Target yang ditetapkan untuk indikator ini pada tahun 2023 adalah 6,06%, dengan realisasi mencapai 6,25%. Indikator berikutnya yaitu Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak. Indikator ini mengukur persentase penduduk yang memiliki akses ke layanan air minum dan sanitasi yang layak, dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 96,46%, sedikit di bawah target 97,74%. Meskipun demikian, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa mayoritas penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan dasar yang penting ini.

Selanjutnya, indikator Indeks Bahaya Banjir mengukur tingkat risiko bahaya banjir di wilayah DKI Jakarta. Skor indeks ini untuk tahun 2023 mencapai 2,03, lebih baik dibanding target sebesar 2,0532. Hal ini merupakan hasil dari upaya mitigasi dan pengelolaan banjir yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warga dari dampak banjir yang sering terjadi di Jakarta. Indikator berikutnya merupakan Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang. Realisasi yang mencapai 79,9% melebihi target 74%, menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang yang dijalankan efektif dalam mengarahkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga mendukung pembangunan kota yang lebih teratur dan berkelanjutan. Adapun indikator lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.14, secara umum menunjukkan realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan pembangunan pada bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan aspek penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan dan layak huni. DKI Jakarta, dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi, kebutuhan akan hunian yang layak menjadi tantangan yang signifikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk menyediakan perumahan yang memadai dan memperbaiki kawasan permukiman, terutama di daerah yang masih tergolong kumuh.

Tabel 2.15
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Persen	40,36	40,36
2	Persentase Jumlah Unit Hunian Layak yang Terhuni	Persen	96,81	88,19
3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	9,49	9,223

Sumber : Bidang 2023, diolah

Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak mencapai 40,36 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator berikutnya yaitu persentase unit hunian layak yang terhuni dengan realisasi sebesar 88,19 persen, di bawah target 98,81 persen. Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak unit hunian layak telah tersedia, tingkat hunian masih di bawah target. Di sisi lain, persentase lingkungan permukiman kumuh di DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 9,223 persen, lebih baik dibandingkan target 9,49 persen. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi area permukiman kumuh lebih dari yang ditargetkan, menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat bagi masyarakat.

c. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) adalah elemen dasar yang menentukan kualitas hidup di kota besar seperti Jakarta. Upaya menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab penting yang diemban oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan trantibumlinmas merupakan 1 (satu) dari 6 (enam) bidang layanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Dengan tingkat populasi yang tinggi dan aktivitas yang padat, DKI Jakarta menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa masyarakat tetap aman, tertib, dan terlindungi dari berbagai ancaman, baik bencana alam maupun risiko lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan sejumlah indikator untuk mengukur kinerja dalam urusan ini (Tabel 2.16), guna memastikan bahwa layanan publik di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat berjalan efektif dan efisien.

Tabel 2.16
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persen	85	69,95
2	Indeks Kesanggupan Kebakaran	Indeks	57	57
3	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,58	0,58
4	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	99,645
5	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Indeks Kesanggupan Kebakaran	Persen	50	50
6	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana	Persen	100	100

Sumber : Satlip 2023, diolah

Dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), tidak jarang terjadi pelanggaran. Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun 2023 mencapai 69,95 persen, kurang dari target sebesar 85 persen. Dalam hal penanggulangan bencana kebakaran, Indeks Kesanggupan Kebakaran mengukur kesanggupan kota dalam menghadapi kebakaran. Target dan realisasi tahun 2023 keduanya berada pada angka 57, menunjukkan bahwa kesanggupan terhadap kebakaran telah sesuai dengan harapan dan standar yang ditetapkan, namun tetap membutuhkan pemeliharaan dan peningkatan agar terus sesuai dengan dinamika perkembangan kota. Indikator berikutnya yaitu Indeks Ketahanan Daerah yang mengukur tingkat ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman dan risiko. Dengan target dan realisasi yang sama yaitu 0,58, ini menandakan bahwa DKI Jakarta telah memiliki ketahanan yang stabil sesuai dengan perencanaan, namun upaya untuk meningkatkan ketahanan lebih lanjut tetap diperlukan agar lebih adaptif terhadap perubahan.

f. Sosial

DKI Jakarta memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan sosial warganya. Upaya Pemerintah dalam menyediakan layanan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menyediakan layanan kesejahteraan sosial yang efektif, mendorong partisipasi sosial, dan memastikan bahwa seluruh warga, terutama yang membutuhkan pelayanan sosial, mendapatkan dukungan yang mereka perlukan untuk berfungsi secara sosial dan ekonomi.

Tabel 2.17
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks	3	4
2	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Indeks	0,88	0,88
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial	Persen	100	100

Sumber: e-Gabrig 2023, diolah

Pada tahun 2023, DKI Jakarta mencatat beberapa pencapaian penting dalam urusan sosial. Salah satunya tercermin dari Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diberikan oleh Pemerintah. Indeks ini menunjukkan realisasi mencapai indeks 4, melampaui target yang sebesar 3 indeks. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat merasa puas dengan layanan kesejahteraan sosial yang disediakan. Sementara itu, Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial tetap stabil dengan realisasi sesuai target pada indeks 0,88, menunjukkan partisipasi yang konsisten dari sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu, persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang berfungsi sosial mencapai 100 persen, sesuai dengan target yang ditetapkan, menandakan keberhasilan program sosial dalam membantu individu-individu tersebut untuk dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat.

2.1.4.2 Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Layanan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan segala bentuk pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat.

a. Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan ekonomi dan sosial di DKI Jakarta. Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia, DKI Jakarta menjadi magnet bagi pencari kerja dari berbagai daerah, yang kemudian mempengaruhi pasar kerja di Jakarta. Selain itu, bonus demografi juga turut memberikan potensi besar bagi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini juga menuntut adanya peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja agar dapat bersaing. Kebijakan ketenagakerjaan di DKI Jakarta juga diarahkan untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia ketenagakerjaan. Pasca pandemi COVID-19, pola kerja mengalami perubahan signifikan yang menuntut adaptasi cepat dari para pekerja dan perusahaan untuk tetap produktif di tengah perubahan tersebut. Digitalisasi menjadi faktor krusial dalam transformasi ini, dimana adopsi teknologi dalam berbagai sektor ekonomi membuka peluang pekerjaan baru sekaligus mengubah pola kerja tradisional. Dengan jumlah penduduk yang besar dan dinamika ekonomi yang kompleks, DKI Jakarta menghadapi tantangan besar dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai serta menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menjawab tantangan tersebut melalui pelatihan keterampilan kerja, baik teknis maupun non-teknis, yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan juga menjadi kunci dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui berbagai inisiatif tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang berimbas pada pertumbuhan perekonomian daerah.

Tabel 2.18
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Tingkat Kesempatan Kerja (Februari)	Persen	92,65	92,43
2	Tingkat Kesempatan Kerja (Agustus)	Persen	93	93,47
3	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	Persen	1,5	2,26

Sumber: e-Sakip 2023, diolah.

Beberapa indikator utama digunakan untuk mengukur kinerja urusan tenaga kerja di DKI Jakarta (Tabel 2.18). Tingkat Kesempatan Kerja pada bulan Februari 2023 tercatat sedikit di bawah target yang ditetapkan, yaitu 92,43 persen dibandingkan dengan target 92,65 persen. Meskipun ada sedikit penurunan dari target, tingkat kesempatan kerja ini tetap menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja di Jakarta memiliki akses terhadap pekerjaan. Sementara itu, pada bulan Agustus 2023, tingkat kesempatan kerja menunjukkan perbaikan dengan realisasi sebesar 93,47 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 93 persen. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam ketersediaan dan akses pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah juga menunjukkan hasil yang positif. Target yang ditetapkan adalah peningkatan sebesar 1,5 persen, dan terealisasi sebesar 2,26 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di DKI Jakarta tidak hanya lebih banyak yang bekerja, tetapi juga bekerja dengan lebih produktif. Hal ini juga menunjukkan bahwa tenaga kerja di Jakarta mampu beradaptasi dengan perubahan pola kerja dan tuntutan pasar. Produktivitas yang lebih tinggi tidak hanya meningkatkan daya saing tenaga kerja Jakarta tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil-hasil ini mencerminkan keberhasilan langkah-langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pembangunan pada bidang tenaga kerja dan memberikan optimisme terhadap masa depan pasar tenaga kerja di DKI Jakarta.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak anak melalui berbagai program dan kebijakan. Upaya ini melibatkan peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengambilan keputusan, serta perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana perempuan dan anak-anak dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Tabel 2.19
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	80,4	76,33

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Indeks Perlindungan Anak	Persen	84,97	N/A
3	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	Persen	49,14	49,82
4	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Persen	26,1	27,22
5	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	Persen	66,67	100
6	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	Persen	41,05	23,56

Sumber : Bapp 2023, diolah

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.19, beberapa indikator digunakan untuk mengukur kemajuan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2023. Indeks Pembangunan Gender menunjukkan realisasi sebesar 76,31 persen, sedikit di bawah target 80,4 persen, menandakan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kesetaraan gender di berbagai sektor. Data realisasi indeks perlindungan anak belum rilis dari KemenPPPA dan BPS, sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lengkap. Namun, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan mencapai 49,82 persen, melebihi target 49,14 persen. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan tercatat sedikit di atas dari target 26,1 persen menjadi 27,22 persen, menunjukkan perlunya upaya intensif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Namun, prevalensi kekerasan terhadap anak menunjukkan capaian signifikan dari target 41,05 persen menjadi 23,56 persen, yang merupakan perkembangan positif dalam pelindungan anak. Selain itu, semua kota/kabupaten di DKI Jakarta berhasil memperoleh peringkat Nindya dalam penilaian, dengan realisasi mencapai 100 persen dari target 66,67 persen, menandakan kemajuan yang signifikan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak di tingkat lokal.

c. Pangan

Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Di DKI Jakarta, ketahanan pangan menjadi salah satu fokus prioritas, mengingat tingginya jumlah penduduk dan kompleksitas distribusi pangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh warganya.

Tabel 2.20
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	80	82,22
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90	92,7
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ *Prevalence of Undernourishment* (PoU)	Persen	2,4	2,57

Sumber : Bapp 2023, diolah

Pada tahun 2023, DKI Jakarta mencatat berbagai pencapaian positif dalam urusan pangan, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.20. Indeks Ketahanan Pangan mencapai 82,22, melebihi target yang ditetapkan sebesar 80. Pencapaian ini menunjukkan bahwa

upaya untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan di Jakarta berjalan dengan baik, menciptakan sistem pangan yang lebih kuat dan resilient. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) juga menunjukkan hasil yang positif dengan skor 92,7, melebihi target 90. Skor PPH yang tinggi mencerminkan keberhasilan dalam mendorong diversifikasi pangan dan pola makan yang lebih sehat dan seimbang di masyarakat. Namun, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*, PoU) sedikit lebih tinggi dari target, dengan realisasi sebesar 2,57 persen dibandingkan target 2,4 persen. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan pada indikator lain, masih ada sebagian kecil penduduk yang mengalami ketidakcukupan pangan, yang memerlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut untuk memastikan semua warga Jakarta dapat menikmati akses yang memadai terhadap pangan yang bergizi. Secara keseluruhan, indikator-indikator ini mencerminkan keberhasilan pembangunan pada sektor ketahanan pangan di DKI Jakarta, meskipun beberapa tantangan tetap perlu diatasi untuk memastikan kesejahteraan pangan yang merata bagi seluruh masyarakat.

d. Pertanahan

Urusan pertanahan di DKI Jakarta merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan tata ruang dan pembangunan kota. Pengelolaan yang efektif atas pertanahan tidak hanya membantu dalam penciptaan lingkungan yang tertata dan berkelanjutan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan, termasuk sertifikasi bidang tanah dan penyelesaian administrasi tanah di kampung-kampung kota, guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.21
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	Persen	10	10
2	Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselesaikan Administrasinya	Persen	5	5

Sumber : Bahan Paparan Kepala Perangkat Daerah, 2023

Tabel 2.21 menunjukkan bahwa DKI Jakarta berhasil mencapai target dalam dua indikator utama terkait pertanahan pada tahun 2023. Persentase penyelesaian sertifikasi bidang tanah mencapai 10%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses legalisasi tanah yang memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Selain itu, persentase bidang tanah di kampung kota yang terselesaikan administrasinya juga mencapai target sebesar 5%. Pencapaian ini mencerminkan upaya efektif pemerintah dalam mempertanahkan administrasi pertanahan di kawasan padat penduduk dan informal, yang seringkali menghadapi tantangan hukum dan birokrasi yang kompleks. Dengan terus mempertahankan momentum ini, DKI Jakarta dapat memastikan pengelolaan pertanahan yang lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan kota yang lebih tertata dan sejahtera.

e. Lingkungan Hidup

Aspek lingkungan hidup menjadi salah satu fokus utama pembangunan di DKI Jakarta, mengingat tantangan urbanisasi yang cepat dan dampaknya terhadap kualitas lingkungan. Sebagaimana diketahui, sebagai ibukota negara serta pusat kegiatan, Provinsi DKI Jakarta telah memberikan dampak terhadap berkurangnya daya dukung lahan dan lingkungan akibat meningkatnya kuantitas limbah dari aktivitas kegiatan usaha, sehingga terjadi penurunan kualitas air sungai, air tanah, dan udara. Menanggapi hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui layanan pengelolaan sampah, peningkatan kualitas air dan udara, serta penguranguan emisi gas rumah kaca. Selain itu, penambahan ruang terbuka hijau juga menjadi prioritas untuk menciptakan kota yang lebih sehat dan nyaman bagi warganya.

Tabel 2.22
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	99	99,75
2	Indeks Kualitas Air	indeks	44,69	40,76
3	Indeks Kualitas Udara	indeks	68,06	68,46
4	Persentase Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	Persen	0,28	0,29
5	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	3,185	5,21
6	Persentase pengurangan sampah	Persen	27	27,08
7	Persentase penanganan sampah	Persen	72	72,67
8	Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)	Persen	24	28
9	Persentase Peningkatan Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	Persen	63	52
10	Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau – biru terintegrasi	Persen	27	37,8

Sumber: e-Setup 2023, diolah

Pada tahun 2023, DKI Jakarta menunjukkan berbagai pencapaian dan tantangan dalam pembangunan bidang lingkungan hidup. Persentase pengelolaan sampah mencapai 99,75 persen, melampaui target 99 persen, yang menunjukkan efektivitas sistem pengelolaan sampah yang diterapkan. Namun, Indeks Kualitas Air tercatat pada angka 40,76, di bawah target 44,69, menandakan pentunya peningkatan dalam upaya pengendalian pencemaran air. Sebaliknya, Indeks Kualitas Udara menunjukkan hasil positif dengan realisasi 68,46, melampaui target 68,06, menegaskan perbaikan dalam upaya pengelolaan kualitas udara. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor limbah melebihi target dengan realisasi 0,29 persen dibandingkan target 0,28 persen, menunjukkan kemajuan dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, persentase ruang terbuka hijau tercapai 5,21 persen, melebihi target 5,185 persen, menunjukkan keberhasilan dalam upaya memperluas area hijau di kota. Adapun indikator lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.22, yang secara umum menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mengatasi tantangan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta.

f. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan data kependudukan yang akurat dan pelayanan pencatatan sipil yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara terpenuhi dan akses terhadap layanan publik dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan sistem dan prosedur dalam administrasi kependudukan untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan memuaskan bagi seluruh masyarakat.

Tabel 2.23
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Indeks	90,5	99,8
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,39	99,96

Sumber: e-Setup 2023, diolah

Sebagaimana tercantum pada Tabel 2.23, DKI Jakarta mencatat pencapaian yang baik dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan mencapai 99,8, jauh melampaui

target yang ditetapkan sebesar 90,5. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan, seperti digitalisasi proses dan peningkatan efisiensi, telah berhasil memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan sangat baik. Selain itu, persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan juga mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 99,95%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 99,29%. Ini mencerminkan keberhasilan dalam memastikan hampir seluruh warga DKI Jakarta memiliki dokumen kependudukan yang diperlukan, yang penting untuk akses terhadap berbagai layanan publik dan hak-hak warga negara.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ukuran kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia setempat sebaik mungkin. Melalui berbagai program pemberdayaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Tabel 2.24
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Persen	68	69,95
2	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	Persen	53	53,45

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Pada tahun 2023, DKI Jakarta menunjukkan hasil yang positif dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa. Persentase kenaikan omset pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.24, mencapai 69,95 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 68%. Ini menunjukkan bahwa program perberdayaan pelaku usaha yang diberikan telah berhasil meningkatkan kinerja ekonomi para pelaku usaha tersebut. Selain itu, persentase pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan yang mengalami kenaikan omset juga melebihi target, dengan realisasi sebesar 53,45 persen dibandingkan target 53 persen. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa inisiatif pemberdayaan yang diterapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat di DKI Jakarta.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana di DKI Jakarta merupakan bagian integrel dari upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk dan pembangunan berkelanjutan. Fertilitas remaja menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan perempuan yang mengalami fertilias remaja lebih berpeluang untuk mengalami masalah bahkan kematian bayi, sehingga nantinya dapat mengurangi kesempatan bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan berkualitas serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga. Dengan upaya ini, diharapkan tercipta kondisi demografis yang seimbang dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan sosial masyarakat Jakarta.

Tabel 2.25
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61,38	58,12
2	*Total Fertility Rate* (TFR)	Rata-Rata Anak per WUS (Wanita Usia Subur)	2,25	1,84

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Tahun 2023 menunjukkan hasil yang beragam dalam upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana di DKI Jakarta. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) mencatatkan angka 58,12, sedikit di bawah target 61,38. Angka ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui program-program yang lebih efektif dan terfokus. Sementara itu, *Total Fertility Rate* (TFR), atau rata-rata jumlah anak per wanita usia subur, tercatat pada angka 1,84, lebih rendah dari target 2,25. Penurunan TFR ini mencerminkan keberhasilan program keluarga berencana dalam mengurangi tingkat kelahiran, namun juga mengisyaratkan perlunya keseimbangan untuk memastikan pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan.

i. Perhubungan

Sektor perhubungan merupakan salah satu elemen kunci dalam mendukung mobilitas dan produktivitas masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Dengan padatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, dan ramah lingkungan semakin mendesak. Melalui pengembangan dan integrasi sistem transportasi publik yang efisien dan nyaman, pemerintah berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan transportasi bagi seluruh warga Jakarta. Inisiatif ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, sehingga mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih.

Tabel 2.26
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Perjalanan Penduduk menggunakan Transportasi Publik	Persen	18,78	18,86
2	Jumlah titik integrasi antar moda	Titik	22	22

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Provinsi DKI Jakarta menunjukkan capaian positif dalam urusan perhubungan, khususnya dalam penggunaan transportasi publik dan integrasi antar moda (Tabel 2.26). Persentase perjalanan penduduk menggunakan transportasi publik mencapai 18,86 persen, sedikit melebihi target yang ditetapkan sebesar 18,78 persen. Ini mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas transportasi umum sehingga mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum yang lebih efisien. Selain itu, jumlah titik integrasi antar moda tercapai sesuai target, yaitu sebanyak 22 titik. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam upaya mengintegrasikan berbagai moda transportasi untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan perjalanan bagi warga Jakarta.

j. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika memegang peran penting dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berfokus terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memastikan bahwa warga

mendapatkan akses yang mudah dan cepat ke informasi publik. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital.

Tabel 2.27
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat Kematangan Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Level	5	5
2	Tingkat Kematangan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	3	4,59
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	94	93,28
4	Persentase Penyelesaian Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persen	100	100

Sumber: e-Setjp 2023, diolah

Pada Tabel 2.27 terlihat bahwa DKI Jakarta berhasil mencapai berbagai target penting dalam urusan komunikasi dan informatika. Tingkat kematangan pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik mencapai level 5, sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, tingkat kematangan layanan teknologi informasi dan komunikasi berhasil melampaui target nilai 3 dengan realisasi sebesar 4,59, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan TIK. Namun, nilai keterbukaan informasi publik sedikit di bawah target, dengan realisasi 93,28 dari target 94, meskipun masih menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi. Terakhir, persentase penyelesaian layanan teknologi informasi dan komunikasi mencapai 100 persen, sesuai dengan target, menandakan keberhasilan dalam menyediakan layanan TIK yang komprehensif bagi seluruh warga. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah DKI Jakarta telah melakukan langkah-langkah yang efektif dalam meningkatkan sistem komunikasi dan informatika, yang penting untuk mendukung pemerintahan yang efisien dan transparan.

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah ditunjukkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah memiliki peran strategis dalam perekonomian DKI Jakarta, tidak hanya sebagai penyedia lapangan kerja tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong perkembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah melalui berbagai kebijakan dan program pendukung, termasuk pelatihan dan pendampingan kewirausahaan, fasilitasi perizinan, pemasaran, serta dukungan kemudahan akses permodalan. Dengan memperkuat sektor ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, mengurangi disparitas ekonomi, serta mendorong inklusi sosial dan ekonomi di semua tingkatan.

Tabel 2.28
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	Persen	4,5	7,35
2	Jumlah koperasi yang berkualitas	Koperasi	50	50
3	Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	Persen	62	89

Sumber: e-Setjp 2023, diolah

Tabel 2.28 menunjukkan pencapaian yang positif kinerja pembangunan pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah. Pertumbuhan pelaku UMKM mencapai 7,35 persen, melebihi target yang ditetapkan sebesar 4,5 persen. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM, baik melalui stimulus ekonomi maupun dukungan kelembagaan. Selanjutnya, jumlah koperasi yang berkualitas tetap terjaga sebanyak 50, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, persentase pelaku UMKM yang berhasil meningkatkan kapasitasnya juga menunjukkan hasil positif, mencapai 59 persen dari target 62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kebijakan yang diimplementasikan telah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di Jakarta.

l. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal berfokus pada pertumbuhan nilai investasi. Pada era perdagangan bebas seperti saat ini, pemerintah (baik pusat maupun daerah) dituntut untuk lebih kreatif dan kompetitif dalam menarik minat investor sebagai upaya untuk lebih menggiatkan investasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan saat ini terus mendorong investasi langsung (*direct investment*) sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganya, salah satunya dengan memberikan kemudahan perizinan berusaha. Tidak hanya kebijakan kemudahan perizinan berusaha, kondisi fasilitas yang terbilang cukup lengkap dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, menjadi alasan lainnya mengapa investor lebih tertarik untuk mencari peluang bisnis di DKI Jakarta. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu untuk terus memberanhi dan melahirkan kebijakan yang semakin dapat menarik minat investor, sehingga dapat memacu pertumbuhan nilai investasi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan sumber daya lokal, akses dan kualitas pelayanan publik, serta penerapan teknologi informasi.

Tabel 2.29
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Realisasi Nilai Investasi	Triliun	128,4	130,3
2	Indeks Kepuasan Layanan Terpadu Satu Pintu	Indeks	91	94,02
3	*Score of Business Enabling Environment*	Nilai	71,69	72,82
4	Persentase Izin yang Diterbitkan Secara Online	Persen	100	100

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Realisasi nilai investasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.29, adalah sebesar Rp.130,3 Triliun. Realisasi tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu Rp.128,4 Triliun. Ketercapaian target realisasi nilai investasi di Jakarta didukung oleh peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berhasil mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang mendukung tumbuhnya iklim investasi, pemberian insentif fiskal, dan terus berjalannya pembangunan infrastruktur. Selain realisasi nilai investasi, kinerja urusan penanaman modal juga diukur dengan 3 (tiga) indikator lain, yaitu indeks kepuasan layanan terpadu satu pintu, *Score of Business Enabling Environment*, dan persentase izin yang diterbitkan secara online sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.29 di atas. Kemudian, pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa realisasi dari ketiga indikator tersebut untuk tahun 2023 telah sesuai atau melebihi target.

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga di DKI Jakarta berfokus untuk membangun generasi muda yang sehat, aktif, dan berdaya saing. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang mendukung pengembangan potensi pemuda serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan keterlibatan pemuda dalam pembangunan kota.

Tabel 2.30
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	51,6	N/A
2	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Persen	1,24	1,25
3	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	Persen	23	25,02

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Pada tahun 2023, tercatat beberapa capaian penting dalam urusan kepemudaan dan olahraga di DKI Jakarta (Tabel 2.30). Indeks Pembangunan Pemuda, meskipun data realisasinya belum dirilis secara resmi oleh Bappenas, menunjukkan fokus pemerintah dalam meningkatkan kondisi dan potensi pemuda dengan target indeks 51,6. Angka partisipasi dan kepemimpinan pemuda mencapai 1,25 persen, sedikit melampaui target 1,24 persen, menandakan keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan publik dan pembangunan komunitas. Selain itu, persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga mencapai 25,02 persen, melampaui target 23 persen, mencerminkan keberhasilan dalam mendukung gaya hidup sehat dan aktif di kalangan masyarakat Jakarta. Secara keseluruhan, pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun generasi muda yang tangguh dan sehat serta mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan daerah.

a. Statistik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan penggunaan data statistik dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan publik. Melalui penerapan manajemen data yang matang, DKI Jakarta berusaha memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan pada informasi yang akurat dan terpercaya, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Tabel 2.31
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Nilai	3	4,43
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persen	100	100

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.31, DKI Jakarta mencatat pencapaian yang signifikan dalam urusan statistik. Tingkat kematangan penerapan manajemen data mencapai nilai 4,43, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 3. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen data yang diterapkan telah efektif dalam mengelola dan memanfaatkan data statistik untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan di tingkat daerah. Selain itu, persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan mencapai 100 persen, ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah DKI Jakarta dalam mendorong penggunaan data statistik sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif. Salah satu data statistik yang sering digunakan oleh para perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta adalah data yang tercantum dalam buku "Provinsi dalam Angka". Pencapaian sebagaimana dimaksud juga mencerminkan langkah positif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

o. Persandian

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pengembangan sistem persandian yang memadai untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman keamanan siber. Dengan meningkatkan tingkat kematangan keamanan sistem persandian dan maturitas keamanan siber, DKI Jakarta berkomitmen untuk menghadirkan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi data pemerintahan dan masyarakat.

Tabel 2.32
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat Kematangan Keamanan SPBE	Nilai	3	4,4
2	Tingkat Maturitas Keamanan Siber	Level	4	4,35

Sumber : Bidlit 2023, diolah

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja pembangunan bidang persandian di DKI Jakarta adalah Tingkat kematangan keamanan SPBE (Sistem Persandian dan Bahan Elektronik) yang pada tahun 2023 mencapai nilai 4,4, melebihi target yang ditetapkan sebesar 3. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan keamanan informasi melalui sistem persandian telah berhasil menghasilkan hasil yang memuaskan. Selain itu, tingkat maturitas keamanan siber juga mencapai level 4,35, di atas target yang ditetapkan sebesar 4. Ini mencerminkan komitmen DKI Jakarta dalam menghadapi tantangan keamanan siber dengan strategi yang matang dan efektif. Dengan demikian, DKI Jakarta dapat terus memastikan bahwa sistem informasi dan persandian yang digunakan aman dari ancaman serta tetap menjadi pelindung data yang kritis bagi seluruh pihak yang terlibat.

p. Kebudayaan

Kebudayaan memegang peran sentral dalam memperkaya identitas dan kehidupan masyarakat DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen yang kuat untuk melestarikan dan memajukan warisan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya. Melalui berbagai kegiatan pemajuan kebudayaan dan layanan di museum, DKI Jakarta bertujuan untuk memperkuat kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya mereka serta meningkatkan partisipasi dalam kegiatan budaya.

Tabel 2.33
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pelestarian Warisan Budaya	Indeks	25,07	26,84
2	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	32,11	33,63
3	Indeks kepuasan layanan museum	Persen	88,5	90,9

Sumber : Bidlit 2023, diolah

Pada tahun 2023, DKI Jakarta mencatat pencapaian yang positif dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Indeks pelestarian warisan budaya mencapai 26,84, melampaui target yang ditetapkan sebesar 25,07. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam menjaga warisan budaya yang beragam dan berharga bagi masyarakat Jakarta. Selain itu, persentase objek pemajuan kebudayaan mencapai 33,63 persen, melebihi target 32,11 persen. Terakhir, indeks kepuasan layanan museum mencapai 90,9 persen, juga di atas target 88,5 persen, menunjukkan bahwa pelayanan di museum-museum DKI Jakarta dinilai baik oleh pengunjung. Pencapaian ini menegaskan komitmen DKI Jakarta dalam menjaga, memberdayakan, dan mempromosikan kekayaan budaya sebagai aset berharga bagi seluruh warga Jakarta.

q. Perpustakaan

Perpustakaan memegang peran penting dalam membangun budaya literasi dan pengetahuan di kalangan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas layanan, dan dukungan terhadap pengembangan literasi diberbagai perpustakaan di wilayahnya. Melalui berbagai inisiatif, DKI Jakarta berupaya memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi, menumbuhkan minat membaca, dan mengembangkan kemampuan literasi yang kritis.

Tabel 2.34
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Budaya Literasi	Nilai	71,3	71,37
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	19,51	19,57

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Kinerja pembangunan bidang perpustakaan diukur melalui 2 (dua) indikator sebagaimana tertera pada Tabel 2.34. Indikator pertama yaitu Nilai budaya literasi yang mencapai nilai 71,37 pada tahun 2023, sedikit melebihi target yang ditetapkan sebesar 71,3. Hal ini mencerminkan upaya yang terus dilakukan pemerintah untuk mempromosikan budaya literasi di masyarakat Jakarta. Kedua, Indeks pembangunan literasi masyarakat yang juga tercapai melebihi target 19,51, yaitu sebesar 19,57. Capaian ini menunjukkan adanya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan literasi dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan dengan baik.

r. Kearsipan

Kearsipan memiliki peran krusial dalam memastikan pengelolaan dan pelestarian dokumen-dokumen penting yang menjadi warisan sejarah dan administratif DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan sistem kearsipan yang efektif dan efisien, guna memastikan bahwa setiap dokumen yang tersimpan dapat diakses dengan mudah dan tetap terjaga keutuhannya.

Tabel 2.35
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	87,64	90,06
2	Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan	Nilai	88,5	92,45

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Tabel 2.35 menunjukkan bahwa DKI Jakarta mencatat kinerja positif dalam urusan kearsipan. Nilai hasil pengawasan kearsipan mencapai 90,06, melampaui target yang ditetapkan sebesar 87,64. Hal ini menunjukkan efektivitas dari sistem pengawasan yang diterapkan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar kearsipan yang telah ditetapkan. Indeks kepuasan layanan kearsipan juga mencatat nilai yang tinggi, yaitu 92,45, melebihi target 88,5. Capaian ini mencerminkan tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan kearsipan yang disediakan. Dengan demikian, DKI Jakarta terus berupaya untuk mempertahankan standar terbaik dalam kearsipan sebagai bagian integral dari upaya mereka untuk meningkatkan pelayanan publik dan transparansi administratif.

2.1.4.3 Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan segala bentuk pelayanan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan, berkaitan dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah.

a. Kelautan dan Perikanan

Meskipun DKI Jakarta dikenal sebagai wilayah perkotaan yang padat, urusan kelautan dan perikanan tetap menjadi fokus penting dalam keberlanjutan lingkungan dan perekonomian daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mengelola secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di dalam wilayah kewenangannya. Langkah-langkah strategis telah diimplementasikan untuk meningkatkan indeks kesehatan laut, meningkatkan produksi perikanan, dan menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat sektor perikanan sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga untuk melestarikan lingkungan laut yang penting bagi kehidupan masyarakat.

Tabel 2.36
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kesehatan Laut di wilayah kewenangan Provinsi	Indeks	65	68,77
2	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	139320	211119,44
3	Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik	Persen	36,56	36,56

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Pada tahun 2023, DKI Jakarta mencatat pencapaian yang signifikan dalam sektor kelautan dan perikanan. Indeks kesehatan laut di wilayah kewenangan Provinsi mencapai 68,77, melampaui target sebesar 65, menunjukkan keberhasilan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Produksi perikanan juga mencatat peningkatan yang sangat baik, mencapai 211.119,44 ton, melebihi target sebesar 139.320 ton. Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik tetap stabil tercapai sesuai target 36,56 persen. Pencapaian ini menegaskan komitmen DKI Jakarta dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

a. Pariwisata

Sebagai salah satu pusat metropolitan utama di Indonesia, DKI Jakarta tidak hanya dikenal sebagai pusat bisnis dan ekonomi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, khususnya wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai destinasi pwriwisata utama Provinsi DKI jakarta. Selain itu, keberagaman budaya, sejarah, dan infrastruktur modern juga menjadikan Jakarta sebagai tujuan wisata menarik baik untuk wisatawan domestik maupun internasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas pariwisata, serta menggalakkan usaha ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan sektor ini sebagai kontributor penting terhadap perekonomian daerah.

Tabel 2.37
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum)	Persen	4,76	9,69
2	Persentase Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif di DKI Jakarta	Persen	3,4	5,29
3	Jumlah Wisatawan	Orang	15756000	26356775
4	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	Usaha	551	558

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Tabel 2.37 menunjukkan target dan capaian indikator kinerja pembangunan bidang pariwisata di DKI Jakarta pada Tahun 2023. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata, yang mencakup akomodasi dan makan minum, mencapai 9,69 persen, jauh melampaui target 4,76 persen. Ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam aktivitas pariwisata yang mendukung perekonomian daerah. Jumlah wisatawan yang datang ke DKI Jakarta mencapai 26.356.775 orang, jauh melebihi target 15.736.000 orang, menunjukkan daya tarik yang kuat dari destinasi pariwisata Jakarta. Selain itu, pertumbuhan usaha ekonomi kreatif di DKI Jakarta juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai 5,29 persen dari target 3,4 persen, dengan jumlah usaha ekonomi kreatif mencapai 558 usaha. Ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta terus mengembangkan sektor ekonomi kreatif sebagai bagian integral dari pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah secara keseluruhan.

b. Pertanian

Di tengah pesatnya urbanisasi dan perkembangan ekonomi, sektor pertanian di DKI Jakarta tetap menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang vital dalam kehidupan. Sektor pertanian juga memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan program *Sustainable Development Goals* (SDG's) kedua, yaitu tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Walaupun bukan merupakan pusat sektor pertanian di Indonesia, dan meskipun memiliki lahan yang terbatas, DKI Jakarta terus berupaya mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan produksi pertanian, pangan, dan peternakan. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga untuk memperkuat ekonomi daerah melalui diversifikasi sumber daya.

Tabel 2.38
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Persen	22,5	23,63
2	Persentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura	Persen	22,5	24,85
3	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	Persen	2,5	22,4

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Sebagaimana tercantum pada Tabel 2.38, DKI Jakarta berhasil melampaui target dalam beberapa indikator utama di sektor pertanian. Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai 23,63%, melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 22,5%. Kondisi tersebut menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya meningkatkan hasil pertanian di wilayah perkotaan. Peningkatan produksi pangan dan hortikultura juga melampaui target dengan realisasi 24,85 persen dibandingkan target 22,5 persen. Selain itu, produksi peternakan menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 22,4 persen, jauh di atas target 2,5 persen. Capaian ini menunjukkan efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam mendukung dan meningkatkan sektor pertanian di DKI Jakarta.

c. Kehutanan

Sebagai daerah yang padat penduduk dan pusat ekonomi Indonesia, DKI Jakarta menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas lingkungan. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui pengelolaan kehutanan, khususnya peningkatan kualitas lahan dan perluasan ruang terbuka hijau (RTH). Keberadaan lahan hijau dan ruang terbuka hijau tidak hanya penting untuk estetika kota, tetapi juga berfungsi sebagai paru-paru kota yang vital dalam meningkatkan kualitas udara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan luas lahan hijau sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.39
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	26,75	27,17
2	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	Persen	75,58	76,39

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

DKI Jakarta berhasil mencapai dan melampaui target yang ditetapkan untuk beberapa indikator kunci dalam urusan kehutanan (tabel 2.39). Indeks Kualitas Lahan mencapai nilai 27,17, lebih tinggi dari target 26,75, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas lahan hijau yang penting untuk keberlanjutan ekosistem perkotaan. Selain itu, persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan juga melampaui target, mencapai 76,39 persen dibandingkan target 75,58 persen. Hasil ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas dan memperbaiki RTH, yang tidak hanya berfungsi sebagai area rekreasi tetapi juga sebagai elemen penting dalam mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kualitas udara di Jakarta.

d. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengelolaan energi dan sumber daya mineral merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan kebijakan dan program untuk mengelola sumber daya mineral secara efisien dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Dengan menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan energi yang terus meningkat, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan bauran energi terbarukan. Selain itu, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan pelarangan terhadap penggunaan air tanah di sejumlah lokasi. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi air tanah di DKI Jakarta yang sudah masuk ke dalam kategori darurat (emergency), serta sebagai upaya pengendalian pemanfaatan air tanah guna menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Tabel 2.40
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat Penurunan Muka Tanah	cm	8	10
2	Persentase Bauran Energi Terbarukan	Persen	0,4	0,54
3	Jumlah area pengendalian Zona Konservasi Air Tanah	Area	1	21
4	Jumlah Daya dari Energi Terbarukan	Mega Watt	20	28,12

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Tabel 2.40 menunjukkan bahwa DKI Jakarta mencatat beberapa pencapaian penting dalam sektor energi dan sumber daya mineral. Tingkat penurunan muka tanah tercatat sebesar 10 cm, lebih tinggi dari target 8 cm, menandakan tantangan yang masih harus dihadapi dalam pengendalian penurunan muka tanah. Namun, jumlah area pengendalian Zona Konservasi Air Tanah meningkat drastis dari target 1 area menjadi 21 area, menunjukkan komitmen kuat dalam pelestarian sumber daya air tanah. Selain itu, persentase bauran energi terbarukan mencapai 0,54 persen, melampaui target 0,4 persen, dan jumlah daya dari energi terbarukan mencapai 28,12 Mega Watt, jauh melebihi target 20 Mega Watt. Pencapaian ini mencerminkan kemajuan dalam diversifikasi sumber energi dan peningkatan penggunaan energi terbarukan, yang merupakan langkah penting dalam upaya pengurangan emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan di DKI Jakarta.

c. Perdagangan

Sebagai sektor penyumbang PDRB terbesar di DKI Jakarta, perdagangan menjadi salah satu sektor vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dengan berbagai kebijakan dan inisiatif yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Dengan demikian, sektor perdagangan diharapkan dapat terus berkontribusi signifikan terhadap PDRB, serta memastikan kestabilan ekonomi dan memperkuat daya saing daerah di kancah nasional maupun internasional.

Tabel 2.41
Target dan Realisasi Indikator Kinerja agan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persen	16,9	17,67
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	5,6	9,49

Sumber: e-Setop 2023, diolah

Indikator kinerja urusan perdagangan DKI Jakarta pada tahun 2023 menunjukkan pencapaian yang positif, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.41. Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan mencapai 17,67 persen, lebih tinggi dari target 16,9 persen. Angka ini mencerminkan pentingnya sektor perdagangan dalam struktur ekonomi Jakarta, di mana aktivitas perdagangan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan mencapai 9,49 persen, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 5,6 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika perdagangan yang kuat di Jakarta, didukung oleh berbagai faktor seperti peningkatan konsumsi domestik, ekspansi usaha, serta investasi dalam infrastruktur dan teknologi perdagangan.

f. Perindustrian

Sektor perindustrian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di DKI Jakarta setelah sektor perdagangan. DKI Jakarta tidak hanya menjadi pusat bisnis dan perdagangan tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai sektor industri yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri, dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, kebijakan yang mendukung, untuk memastikan bahwa sektor perindustrian dapat berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Tabel 2.42
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah	Persen	12,3	11,87
2	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Persen	6,5	4,49

Sumber: e-Setop 2023, diolah

Tabel 2.42 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah tercatat sebesar 11,87 persen, sedikit di bawah target 12,3 persen. Meskipun belum mencapai target, angka ini menunjukkan peran signifikan sektor industri dalam perekonomian DKI Jakarta. Persentase pertumbuhan sektor perindustrian mencapai 4,49 persen, juga di bawah target yang ditetapkan sebesar 6,5 persen. Pertumbuhan yang lebih rendah dari target ini mencerminkan adanya tantangan yang dihadapi oleh sektor industri yang memerlukan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan kinerja sektor industri.

2.1.4.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Unsur pendukung urusan pemerintah daerah yang pertama adalah unsur Sekretariat Daerah. Dalam suatu pemerintahan, Sekretariat Daerah adalah bagian dari struktur pemerintahan di tingkat daerah, baik itu provinsi, kabupaten, atau kota. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan memiliki peran spesifik dalam mendukung Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan koordinatif untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Perangkat Daerah. Kemudian, dalam struktur organisasi, Sekretaris Daerah membawahi 4 (empat) asisten, yaitu (1) Asisten Pemerintahan; (2) Asisten Perekonomian; (3) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup; serta (4) Asisten Kesejahteraan Rakyat.

Tabel 2.43
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	Nilai	35,9	35,9
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	73	73
3	Persentase BUMD kategori sehat	Persen	84	84
4	Skor EKPPD	Skor	4,047	N/A
5	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	Indeks	2	1
6	% Kolaborasi yang terimplementasi	Persen	100	100
7	Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	4	4
8	Persentase BUMD dengan penilaian GCG kategori sangat baik	Persen	46	46
9	Nilai Deviden yang disetor	Miliar Rupiah	542,5	545,8
10	Persentase Kontribusi BUMD dalam Pembangunan Kota	Persen	100	100

Sumber : Bidpp 2023, diolah

Pada Tabel 2.43 di atas dapat dilihat bahwa untuk unsur Sekretariat Daerah terdapat 10 (sepuluh) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Sekretariat Daerah dalam tugas administratif dan koordinatif. Beberapa indikator tersebut antara lain terkait Tata Kelola dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Kinerja BUMD, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pada Tabel 2.43 tersebut juga dapat dilihat ketercapaian ke-10 indikator tersebut pada tahun 2023 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi Skor EKPPD Tahun 2023 belum dirilis oleh Kemendagri, sehingga belum dapat menggambarkan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023.

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan bagian integral dalam menjaga fungsi legislasi dan pengawasan di tingkat daerah serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekretariat DPRD memiliki peran kunci dalam memfasilitasi proses penyusunan peraturan daerah (perda) dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Dalam struktur organisasi, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPRD (Ketua DPRD).

Tabel 2.44
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Sekretariat DPRD Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Indikator Kinerja Lembaga Legislatif dalam aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada Indeks Demokrasi	Persen	30	42,11
2	Nilai Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan dalam Aspek kesetaraan pada Indeks Demokrasi	Persen	56,6	57,55

Sumber: e-Bakip 2023, diolah

Sekretariat DPRD, sebagai unsur pendukung urusan pemerintah daerah, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.44, memiliki 2 (dua) indikator untuk mengukur kinerjanya, yaitu Nilai Kinerja Lembaga Legislatif dalam Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada Indeks Demokrasi dan Nilai Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik melalui Lembaga Perwakilan dalam Aspek Kesetaraan pada Indeks Demokrasi.

2.1.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses sistematis dalam merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan untuk pembangunan suatu daerah dengan memperhatikan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan, dan kelembagaan. Perencanaan pembangunan daerah yang efektif melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam rencana pembangunan yang disusun dan ditetapkan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan landasan penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena dengan proses perencanaan yang baik dan berkelanjutan diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.45
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Perencanaan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi AKIP	Nilai	26	25,56
2	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	75	92,56

Sumber: e-Bakip 2023, diolah

Terdapat 2 (dua) indikator untuk mengukur kinerja perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.45, yaitu Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi AKIP dan Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada Tabel 2.45 tersebut dapat dilihat target tahun 2023 untuk Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi AKIP adalah 26, namun realisasinya masih belum mencapai target, yaitu hanya 25,56. Kemudian, untuk indikator Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan nilai 75 sebagai target yang ditetapkan untuk tahun 2023, dapat dilihat bahwa realisasi pada akhir tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu dengan nilai 92,56.

b. Keuangan

Keuangan Daerah mengarah pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan di daerah yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Keuangan Daerah terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana keuangan daerah atau Rencana APBD indikatif disusun dan

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan, dimana penyusunan rencana tahunan harus mengacu pada rencana jangka menengah. Keuangan daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah diukur kinerjanya antara lain melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan yang transparan.

Tabel 2.46
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Keuangan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pengelolaan Keuangna Daerah	Indeks	3	3
2	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks	4	4
3	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	89,39	98,85
4	Persentase penyusunan kebijakan, pedoman, dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah	Persen	100	100
5	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	5	5
6	Rasio Utilisasi Terhadap Total Aset	Persen	1,62	5,2
7	Jumlah Penerimaan Hasil Pemanfaatan Aset	Rp	539958173368	619467000000
8	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persen	100	101,22

Sumber : e-Rekap 2023, diolah

Kinerja Keuangan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah diukur dengan 8 (delapan) indikator yang mengukur dari sisi fiskal maupun dari sisi kekayaan daerah non fiskal. Indikator dari sisi fiskal seperti Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, serta Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan indikator dari sisi kekayaan daerah yang dalam hal ini berupa Barang Milik Daerah, seperti Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rasio Utilisasi terhadap Total Aset, dan Jumlah Penerimaan Hasil Pemanfaatan Aset.

Berdasarkan data pada Tabel 2.46, dapat dilihat bahwa dari 8 (delapan) indikator, realisasi untuk tahun 2023 telah memenuhi dan/atau melebihi target yang ditetapkan, dengan 4 (empat) indikator memiliki realisasi tahun 2023 yang melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, Rasio Utilisasi terhadap Total Aset, Jumlah Penerimaan Hasil Pemanfaatan Aset, serta Persentase Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun realisasi tahun 2023 dari 4 (empat) indikator lainnya telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah, Persentase penyusunan Kebijakan pedoman dan standar teknis pengelolaan keuangan daerah, serta Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.

c. Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga PNS selalu dituntut untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka kewenangan yang dilimpahkan khususnya di bidang kepegawaian dilaksanakan dan dikelola dalam sistem kepegawaian daerah. Kepegawaian daerah merujuk pada manajemen sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di instansi pemerintah daerah, seperti kantor kepala daerah (Gubernur, Walikota, Bupati), dinas,

badan, dan unit-unit lainnya di tingkat provinsi, kota, atau kabupaten. Kepegawaian memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, kepegawaian daerah harus didukung dengan pengelolaan kepegawaian yang baik antara lain meliputi aspek kebijakan, rekrutmen, pengembangan, kesejahteraan, hingga evaluasi kinerja. Pengelolaan kepegawaian yang baik juga akan mendorong pegawai memberikan kontribusi yang maksimal dan pada akhirnya akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tabel 2.47
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Kepegawaian Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	Nilai	307,5	312,5
2	Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM	Indeks	51	38
3	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	43,3	N/A
4	Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	38,7	N/A

Sumber : Setda 2022, diolah

Kinerja Kepegawaian Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah, berdasarkan Tabel 2.47 di atas, diukur oleh 4 (empat) indikator yang meliputi aspek kinerja, disiplin, hingga pengembangan kompetensi. Dari keempat indikator tersebut, dapat dilihat bahwa 2 (dua) indikator diantaranya menunjukkan realisasi tahun 2023 melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan 2 (dua) indikator lainnya, yaitu Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN dan Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN belum dirilis datanya oleh BKN. Pencapaian positif pada kinerja unsur kepegawaian menggambarkan bahwa pengelolaan kepegawaian di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berjalan dengan baik. Adapun capaian tersebut dapat dijadikan acuan dalam setiap evaluasi kinerja pegawai yang dilakukan secara berkala untuk memastikan disiplin kerja, penegakan aturan dan etika pegawai, serta pencapaian kinerja pegawai dapat terus ditingkatkan.

d. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan di pemerintah daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Selain itu, pendidikan dan pelatihan di pemerintah daerah juga bertujuan agar pegawai dapat lebih siap dan lebih kompeten untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam tata kelola pemerintahan daerah, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi pemerintah daerah.

Tabel 2.48
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM	Indeks	51	38
2	Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	38,7	N/A

Sumber : Setda 2022, diolah

Berdasarkan Tabel 2.48 di atas, Pendidikan dan Pelatihan sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah, dapat diukur kinerjanya dengan 2 (dua) indikator, yaitu Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM serta Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN. Pada Tabel 2.48 tersebut juga dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2023 untuk indikator Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan indikator Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN belum dirilis datanya oleh BKN.

e. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan di pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan inovasi, kebijakan publik, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Penelitian dan pengembangan yang berkualitas di pemerintah daerah dapat berperan sebagai katalisator dalam menciptakan inovasi serta memberikan solusi yang tepat dan berkelanjutan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.49
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Pilar Kapasitas Inovasi	Nilai	4,19	3,51
2	Nilai Dimensi Interaksi dan Keberagaman	Nilai	4,17	1,73

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Kinerja penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu Nilai Pilar Kapasitas Inovasi dan Nilai Dimensi Interaksi dan Keberagaman, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.49.

2.1.4.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah

a. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah adalah lembaga di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, evaluasi, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Inspektorat Daerah berada di bawah koordinasi langsung kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) dan memiliki kewenangan untuk mengakses informasi serta dokumen yang diperlukan untuk melakukan tugas pengawasan. Selain itu, Inspektorat Daerah juga berperan dalam pencegahan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan di pemerintah daerah. Inspektorat Daerah dapat mengambil tindakan disiplin, memberikan rekomendasi perbaikan, atau melaporkan ke pihak yang berwenang untuk penindakan lebih lanjut. Inspektorat Daerah harus memiliki independensi yang cukup dalam melakukan tugasnya serta mendapat dukungan penuh dari pimpinan dan stakeholders terkait agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Tabel 2.50
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Inspektorat Daerah Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,7	3,75
2	Indeks Manajemen Risiko	indeks	3,4	3,413
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks	3,25	3,27

Sumber: e-Sakip 2023, diolah

Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah daerah. Kinerja Inspektorat Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.50, diukur dengan 3 (tiga) indikator, yaitu Nilai Maturitas SPIP, Indeks Manajemen Risiko, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2023 untuk 3 (tiga) indikator tersebut seluruhnya melampaui target yang telah ditetapkan.

2.1.4.7 Unsur Kewilayahan

a. Kota dan Kabupaten Administrasi

Provinsi DKI Jakarta merupakan Provinsi dengan otonomi khusus yang berada di provinsi, dimana Kota dan Kabupaten yang ada hanya berupa wilayah administrasi. Kota dan Kabupaten yang berupa wilayah administrasi tersebut membuat Walikota dan Bupati bukan merupakan jabatan politik (tidak dipilih melalui pemilihan umum), melainkan jabatan karier di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kota dan Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 (lima) kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi:

(1) Kota Administrasi Jakarta Pusat;
(2) Kota Administrasi Jakarta Utara;
(3) Kota Administrasi Jakarta Barat;
(4) Kota Administrasi Jakarta Selatan;
(5) Kota Administrasi Jakarta Timur;
(6) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Adapun indikator kinerja yang diukur dalam unsur kewilayahan adalah terkait Indeks Kepuasan Layanan dan Indeks Efektifitas Koordinasi pada masing-masing wilayah Kota dan Kabupaten sebagaimana dimaksud.

Tabel 2.51
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Kota dan Kabupaten Administrasi
Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Nilai	86,75	93,92
2	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Utara	Nilai	86,75	93,79
3	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Barat	Nilai	86,75	92,33
4	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Nilai	86,75	93,44
5	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Timur	Nilai	86,75	93,22
6	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Nilai	87,33	89,02
7	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi Jakarta Pusat	Nilai	85	90,31
8	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi Jakarta Utara	Nilai	85	92,5
9	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi Jakarta Barat	Nilai	85	89,758
10	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi Jakarta Selatan	Nilai	85	91,145
11	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi Jakarta Timur	Nilai	85	91,79
12	Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Nilai	85	87,243

Sumber : Setda 2023, diolah

Kinerja Kota dan Kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta, diukur dari layanan publik yang dilakukan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Adapun indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Layanan Kota/Kabupaten dan Indeks Efektifitas Koordinasi Kota/Kabupaten. Nilai capaian 2 (dua) indikator tersebut di tiap kota dan kabupaten merupakan gabungan capaian dari seluruh kecamatan dan kelurahan di wilayah kota dan kabupaten. Pada Tabel 2.51 dapat dilihat bahwa capaian tahun 2023 terhadap 2 (dua) indikator di seluruh wilayah kota/kabupaten telah melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan data pada tabel tersebut, Jakarta Pusat merupakan kota dengan capaian tertinggi untuk Indeks Kepuasan Layanan dengan nilai 93,93 dan Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki capaian terendah dengan nilai 89,02. Sedangkan untuk Indeks Efektifitas Koordinasi, Jakarta Utara menjadi kota dengan capaian tertinggi dengan nilai 92,3 dan Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki capaian terendah dengan nilai 87,245.

2.1.4.8 Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan aspek fundamental dalam mempertahankan integritas suatu bangsa dan negara dalam konteks globalisasi dan dinamika politik yang sangat dinamis. Pemahaman yang baik tentang kepentingan dan nilai-nilai kebersamaan serta pengelolaan dinamika politik menjadi sangat penting untuk mencapai stabilitas dan kemajuan bersama. Kesatuan Bangsa dan Politik juga merujuk pada upaya untuk memelihara persatuan, kesatuan, dan stabilitas dalam kerangka berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika politik yang terjadi.

Tabel 2.52
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi	Indeks	82,15	84,29
2	Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi	Indeks	67,17	100
3	Persentase Penurunan Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat	Persen	9,75	9,73

Sumber: e-Renja 2023, diolah

Pemerintah Daerah memiliki peran kunci dalam mempromosikan kesatuan bangsa melalui kebijakan yang inklusif, pengakuan terhadap keberagaman, serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok rentan. Pemerintah Daerah juga harus mampu menangani konflik internal yang terjadi, baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun sosial budaya, untuk menjaga stabilitas dan kesatuan. Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.52, diukur melalui 4 (empat) indikator. Pada tabel tersebut dapat dilihat juga bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang capaian tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu Aspek Kebebasan dalam Indeks Demokrasi serta Nilai Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

Salah satu aspek penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah adalah daya saing daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

a. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan

Salah satu indikator daya saing ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah indikator rata-rata pengeluaran per kapita. Indikator ini menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, kemudian dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di DKI Jakarta tahun 2023 adalah sebesar Rp2.791.716, naik 10,55% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Apabila dilihat menurut kelompok komoditas, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan lebih besar untuk kelompok Makanan sebesar Rp1.055.896, sedangkan untuk kelompok Bukan Makanan sebesar Rp1.735.820.

Tabel 2.53
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Provinsi DKI Jakarta Menurut Komoditas Tahun 2022-2023 (rupiah)

No	Indikator	2022		2023	
		Pengeluaran	%	Pengeluaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Makanan	953.321	37,75	1.055.896	37,82
2	Bukan Makanan	1.572.026	62,25	1.735.820	62,18
Total		**2.525.347**	**100**	**2.791.716**	**100**

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta dalam Angka Tahun 2024, (2024)

Kabupaten/Kota dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan tertinggi ada pada Kota Jakarta Utara, yaitu sebesar Rp3.182.429, kemudian Kota Jakarta Barat sebesar Rp3.005.799. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan rata-rata pengeluaran per kapita terendah adalah Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar Rp1.315.101. Secara persentase, 62,18 persen pengeluaran per kapita sebulan di DKI Jakarta digunakan untuk pengeluaran kelompok bukan makanan, sedangkan untuk kelompok makanan sebesar 37,82%. Selisih nilai pengeluaran per kapita antara yang tertinggi dengan yang terendah sebesar Rp1.867.328 menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan penduduk yang cukup tajam.

Tabel 2.54
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2023 (rupiah)

Kabupaten/Kota	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	817.538	782.803	458.436	532.298	1.315.976	1.315.101
Jakarta Selatan	1.016.274	1.042.961	1.632.131	1.700.882	2.648.405	2.743.843
Jakarta Timur	919.344	989.547	1.256.840	1.524.380	2.176.184	2.514.927
Jakarta Pusat	894.222	1.039.282	1.177.079	1.388.135	2.071.301	2.427.397
Jakarta Barat	992.961	1.054.076	1.783.337	1.922.723	2.776.298	3.006.799
Jakarta Utara	902.760	1.149.089	1.907.585	2.033.340	2.810.355	3.182.429
DKI Jakarta	**953.321**	**1.055.896**	**1.572.026**	**1.735.820**	**2.525.347**	**2.791.716**

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta dalam Angka Tahun 2024, (2024)

Distribusi pembagian total pengeluaran per kapita pada tahun 2023 untuk penduduk pada golongan pengeluaran 40% rendah sebesar 16,39 persen, sedangkan pada kelompok pengeluaran 40% sedang sebesar 32,30 persen dan pada kelompok pengeluaran

20% tinggi sebanyak 51,22 persen. Sementara itu, gini ratio DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 0,431 tidak mengalami terlalu banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di DKI Jakarta memiliki ketimpangan yang cukup tinggi.

Tabel 2.55
Distribusi Pengeluaran Per Kapita Menurut Golongan Pengeluaran dan Indeks Gini di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023

Tahun	Golongan Pengeluaran			Indeks Gini
	40% Rendah	40% Sedang	20% Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	17,30	36,09	46,61	0,394
2020	17,25	35,13	47,62	0,399
2021	16,65	35,34	48,00	0,409
2022	16,60	33,22	50,18	0,433
2023	**16,39**	**32,30**	**51,32**	**0,431**

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta dalam Angka Tahun 2024, (2024)

b. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan *good governance* menuju *clean governance*. Langkah awalnya adalah melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai oleh organisasi yang sangat gemuk dan berjenjang, adanya tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundang- undangan, rendahnya produktivitas kerja pegawai, ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang seharusnya tergambar dalam *Machinery of Government* (MoG) yakni *interconnected between structural and process*, belum sepenuhnya memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) yang jelas dan terukur, serta penempatan sumber daya manusia aparatur yang tidak *The Right Man in The Right Place*.

Penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengutamakan nilai 4E yakni efektivitas, efisiensi, *equity* (rasa adil), serta ekonomis (hemat dan optimal). Tujuan penataan yaitu untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan menegong teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pengukuran penerapan reformasi birokrasi menggunakan indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 adalah 82,47 (A).

c. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel, dan 28 indikator demokrasi. Namun demikian, dalam perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terdapat penyempurnaan hasil kajian revisi IDI (indikator) dan Penajaman indikator revisi dan identifikasi sumber data; Simulasi penghitungan IDI dengan Indikator Revisi. Oleh karena itu, pada tahun 2021 telah dilakukan Finalisasi Indikator Revisi dan Metode Pengukuran yang menjadi 3 (tiga) aspek dan 22 Indikator Demokrasi. Ringkasan Indikator metode baru tersebut meliputi : 1). Aspek Kebebasan terdapat 7 (tujuh) Indikator; 2). Aspek Kesetaraan terdapat 7 (tujuh) indikator; dan 3). Aspek Lembaga Demokrasi terdapat 8 (delapan) Indikator, dengan sumber data diperoleh dari Surat Kabar yaitu 5 (lima) Indicator; Dokumen/Sekunder yaitu 18 (delapan belas) indikator; FGD yaitu 5 (lima) indikator dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil survei BPS Provinsi DKI Jakarta, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di DKI Jakarta adalah sebesar 82,09 dan tahun berikutnya mengalami kenaikan menjadi 82,13. Selanjutnya pada tahun 2023 kembali meningkat ke angka 84,57 (Kategori Baik).

d. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerja sama dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari definisi tersebut, alat ukur Indeks kerukunan umat beragama terdiri dari 3 (tiga) indikator utama, yaitu (1) Toleransi, (2) Kesetaraan, dan (3) Kerjasama. Indeks Kerukunan Umat Beragama dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan kerukunan umat beragama yang dapat menangkal intoleransi dan radikalisme.

Indeks Toleransi menggambarkan kondisi yang berhubungan dengan sikap atau sifat saling menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Sedangkan Indeks Kesetaraan menggambarkan kondisi masyarakat akan sikap tingkatan yang sama kepada sesama manusia, memiliki kesempatan yang sama dan perlindungan perbedaan agama. Adapun Indeks Kerjasama menggambarkan kondisi berkenaan tindakan saling bahu membahu *(to take and give)* dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama kerjasama. Sehingga menggambarkan keterlibatan aktif individu bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati pada berbagai dimensi kehidupan.

Berdasarkan hasil survei Kemenag RI, Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 berada di angka 76,47. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 72 di tahun 2022. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat toleransi di DKI Jakarta semakin membaik. Capaian tersebut didorong oleh adanya peningkatan toleransi beragama, kesetaraan dalam kehidupan beragama, dan kerjasama antar umat beragama.

e. Indeks Risiko Bencana Daerah

Indikator Risiko Bencana Daerah (IRBI) merupakan indikator di dalam mengukur risiko bencana. IRBI dilakukan dengan menghitung indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Proses menghitung IRBI dilakukan dengan menggunakan kalkulasi secara spasial sehingga dapat menghasilkan peta risiko dan nilai grid yang dapat dipergunakan dalam menyusun penjelasan peta risiko.

Tabel 2.56
Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jakarta Timur	75,87	75,08	71,79	74,14	73,46	Sedang
Jakarta Utara	72,72	72,35	69,08	71,34	70,89	Sedang
Jakarta Barat	71,53	71,07	67,96	70,18	69,83	Sedang
Jakarta Pusat	57,27	56,90	54,41	56,19	55,67	Sedang
Jakarta Selatan	52,52	52,18	49,89	51,53	51,05	Sedang
Kepulauan Seribu	64,00	63,66	49,46	62,13	47,47	Sedang
DKI Jakarta	**65,74**	**64,02**	**60,43**	**62,58**	**61,31**	Sedang

Sumber : BNPB "Indeks Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023", (2024)

Sebagaimana diketahui, DKI Jakarta terletak pada topografi yang relatif rendah, merupakan Delta City (Kota yang berada pada daerah muara sungai) dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Sebagaimana Tabel 2.56 di atas, dan berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 61,31 (Sedang). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, indeks risiko bencana Provinsi DKI Jakarta sangat fluktuatif (tersendah di tahun 2021). Jakarta Timur menjadi Kota Administrasi yang memiliki nilai indeks risiko bencana terbesar dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya di tahun 2023. Adapun indeks risiko bencana di seluruh wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masuk ke dalam kategori 'Sedang'.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan I Tahun 2024

Pada tahap penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, telah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD sebelumnya. Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses perencanaan pembangunan yang hasilnya akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Lebih lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah (termasuk RKPD) perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi yang merupakan proses pemantauan serta supervisi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan untuk memastikan target kinerja dan keuangan dapat tercapai secara efektif, efisien, serta ekonomis. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, evaluasi RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dilakukan setiap triwulan.

Secara umum, evaluasi RKPD Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permen PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2017, sehingga pengendalian dan evaluasi dalam konteks RKPD dijelaskan ke dalam 3 (tiga) tahapan:

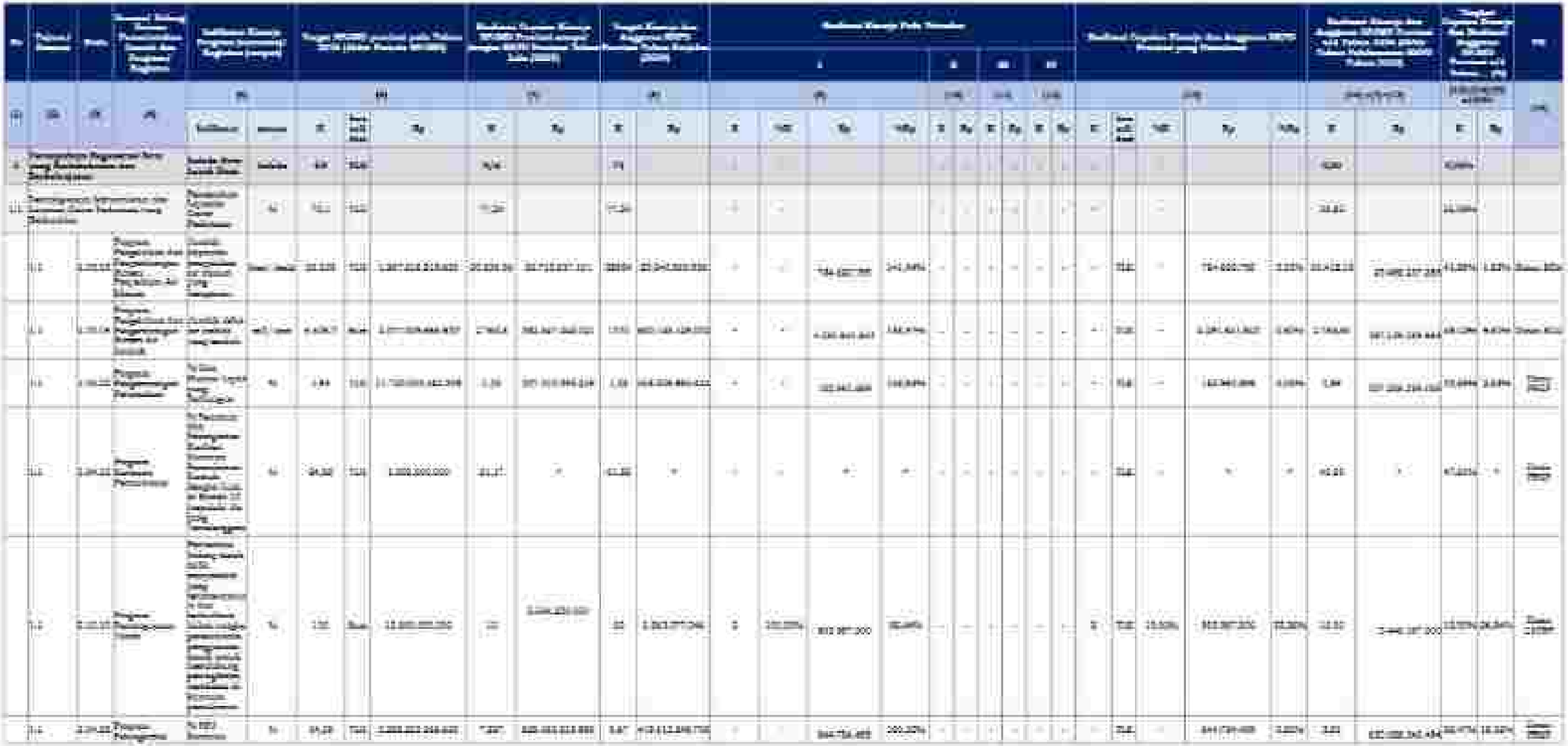
a. **Tahap I**: Memastikan bawa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RKP dan RPJMD provinsi yang dimulai sejak tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD provinsi ditetapkan dengan peraturan Gubernur.
b. **Tahap II**: Menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD Provinsi yang dimulai sejak tahap penyusunan RKA PD dan Raperda APBD sampai dengan penetapan Perda/Pergub APBD.
c. **Tahap III**: Memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional yang dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Dalam pelaksanaan evaluasi dimaksud, Bappeda Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan data pengukuran kinerja dan anggaran yang ada pada aplikasi sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja, dimana Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta secara berkala melakukan penginputan data realisasi kinerja dan anggaran pada aplikasi sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja. Kebenaran data pada data yang diinput dan/atau divalidasi pada sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja merupakan tanggung jawab mutlak dari pejabat pengampu kinerja, atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah bersangkutan. Aplikasi tersebut dikelola oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

Data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2024 merupakan data yang bersumber dari sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja berdasarkan capaian triwulan I tahun 2024 dan koreksi kesalahan data perangkat daerah jika ada. Mengingat sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja juga digunakan untuk pengelolaan data perjanjian kinerja dan pada target kinerja perjanjian kinerja dapat berbeda dengan target pada dokumen rencana Pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya Pergub 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa indikator kinerja utama harus memiliki prinsip SMART-C. Berikut ini disajikan evaluasi capaian program pembangunan daerah pada triwulan I tahun 2024 sebagaimana disampaikan pada Tabel 2.56 di bawah.

Tabel 2.57

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta sampai Triwulan I Tahun 2024



No	Urusan/ Bidang	Kode	Program/ Kegiatan Perangkat Daerah dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Tahun 2025 (Awal Tahun Rencana Tahun Ke-1)		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026 (Tahun Rencana)		Kebutuhan Belanja Pada Struktur								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Berjalan					Perkiraan Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD Tahun 2025)		Target Capaian Kinerja dan Kerangka Anggaran RKPD Provinsi pada Tahun 2027		Ket
												A				A													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)
				Indikator	Satuan	K	Kondisi Awal	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Vol	Rp	Valuasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Kondisi Awal	Vol	Rp	Valuasi	K	Rp	K	Rp	
			Program Pembinaan, Pemanfaatan																											
	1.1	2.11.11																												
1.2	Pengelolaan Perikanan Tangkap Laut, Perairan Umum, Pengelolaan Ikan Nonbudidaya Daerah																													
	1.2	2.11.12	Program Pengembangan Usaha																											
	1.2	2.11.13	Program Pengelolaan																											
	1.2	2.11.14	Program Pengembangan Sumber Daya																											

No	[illegible]	Kode	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]										[illegible]					[illegible]		[illegible]		PD
													I				II		III		IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12)		(13)					(14)		(15)		(16)
				[illegible]	[illegible]	K	[illegible]	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	[illegible]	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-		-		-		-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-	-	-	-	-	-	-		-			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-	-	-	-	-	-	-		-			[illegible]		[illegible]		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun ... (%)		PD
													I				II		III		IV											
				(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12)		(13)					(14)		(15)		(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	Indikator	Satuan	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.1	[illegible]	Program [illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1.1	[illegible]	Program [illegible]	[illegible]	%	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1.1	[illegible]	Program [illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1.1	[illegible]	Program [illegible]	[illegible]	%	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1.1	[illegible]	Program [illegible]	[illegible]	%	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1.1	[illegible]	Program [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1.1	[illegible]	Program [illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



No	Kode	Uraian	Satuan	Target Awal Tahun	Realisasi Capaian Sampai dengan Triwulan I	Target Akhir Tahun	Kebutuhan Anggaran				Realisasi Capaian Sampai dengan Triwulan I				Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan I		Target Capaian Setelah Penyesuaian	Keterangan
							I	II	III	IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)



[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



| No | Kode | Uraian | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Tolok Ukur | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | Lokasi | | |



No	[illegible]	Kode	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]										[illegible]					[illegible]		[illegible]		PD
													I				II		III		IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12)		(13)					(14)		(15)		(16)
				[illegible]	[illegible]	K	[illegible]	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	[illegible]	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
			[illegible]	[illegible]																												
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		-	-			-		-		-		-	[illegible]	-			[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	%	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		-	-			-		-		-		-	[illegible]	-			[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		-	-			-	-	-	-	-	-	-		-			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		-	-			-	-	-	-	-	-	-		-			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		-	-			-	-	-	-	-	-	-		-			[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	[illegible]	Kode	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]										[illegible]					[illegible]		[illegible]		PD
													I				II		III		IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12)		(13)					(14)		(15)		(16)
				Indikator	Satuan	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Satuan	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
				[illegible]																												
	2.5	[illegible]	Program [illegible]	[illegible]	Indeks	100	[illegible]	1.343.728.831.426	99,822	274.327.780.207	100	293.926.212.202	96,23	96,23%	22.614.818.884	100,18%	-	-	-	-	-	-	96,23	[illegible]	96,23%	22.614.818.884	[illegible]	99,71	288.186.017.882	[illegible]	[illegible]	Dinas [illegible]
	2.5	[illegible]	Program [illegible]	[illegible]	%	100	[illegible]	4.443.264.260.250	98,78	321.153.495.476	100	265.748.281.780	40	40,00%	21.505.969.837	107,22%	-	-	-	-	-	-	40	[illegible]	40,00%	21.505.969.837	8,09%	58,26	972.002.403.883	58,26%	21,87%	Dinas [illegible]
	2.5	[illegible]	Program Pengelolaan [illegible]	[illegible]	Indeks	100	[illegible]	482.713.357.984	99,88	97.216.777.344	100	[illegible]	100	100,00%	3.592.399.060	[illegible]	-	-	-	-	-	-	100	[illegible]	100,00%	3.592.399.060	11,54%	99,89	33.983.891.056	[illegible]	[illegible]	Dinas [illegible]
	2.5	[illegible]	Program [illegible]	[illegible]	%	85	[illegible]	7.368.888.872	100	84.457.810	85	224.789.467	100	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	[illegible]	100,00%	-	0,00%	100,00	84.457.810	[illegible]	1,15%	Suku Dinas [illegible]
	2.5	[illegible]	Program [illegible]	[illegible]	%	100	[illegible]	4.183.888.967.032	100	1.248.124.285.891	100	755.166.072.288	-	-	81.755.000.833	107,29%	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	81.755.000.833	11,24%	29,65	1.130.664.375.123	[illegible]	[illegible]	Dinas [illegible]
	2.5	[illegible]	Program [illegible]	[illegible]	%	97,73	[illegible]	870.840.000	100	-	95,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	50,00	-	51,17%	-	Dinas [illegible]
	2.5	[illegible]	Program [illegible]	[illegible]	%	98,6	[illegible]	34.130.132.344	98,54	7.109.062.590	98,6	2.809.328.957	100	100,00%	315.198.870	11,54%	-	-	-	-	-	-	100	[illegible]	100,00%	315.198.870	11,22%	99,97	[illegible]	[illegible]	20,57%	Dinas [illegible]
	2.5	[illegible]	Program [illegible]	[illegible]	%	97,43	[illegible]	3.171.109.931.148	96,024	468.318.537.862	[illegible]	[illegible]	-	-	73.897.221.132	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	73.897.221.132	16,77%	47,81	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dinas [illegible]
2.6	Meningkatnya [illegible]			Indeks [illegible]	Indeks	4,01	[illegible]		3,87		4,01		-	-			-	-	-	-	-	-	-		-			1,00		49,36%		
	2.6	[illegible]	Program [illegible]	[illegible]	Nilai	80,1	[illegible]	7.374.866.222	73,02	867.033.391	74	2.780.806.076	-	-	126.775.420	111,89%	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	126.775.420	4,43%	34,41	1.283.440.721	43,89%	14,47%	Dinas [illegible]

No	Urusan/ Bidang	Kode	Program/ Kegiatan Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga	Indikator Program/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Tahun 2025 (Akhir Tahun RKPD)			Realisasi Capaian Tahun 2025 (Posisi Triwulan IV)		Target Capaian Tahun 2026 (Posisi Tahun Rencana)		Kerangka Pendanaan								Perkiraan Capaian Hasil dan Keluaran RKPD Provinsi yang Diusulkan					Perkiraan Capaian Hasil dan Keluaran Tahun 2026 (Posisi Tahun Rencana RKPD Tahun 2026)		Target Capaian Hasil dan Keluaran RKPD Provinsi s.d. Tahun 2026 (Posisi Tahun Rencana RKPD Tahun 2026)		Ket
												I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12)		(13)				(14)		(15)		(16)
				Indikator	Satuan	K	Kondisi Awal	Rp	A	Rp	B	Rp	K	Rp	Rp	Total	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Kondisi Awal	Total	Rp	Total	K	Rp	K	Rp	
			Perangkat Daerah																											
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah																											
			Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah																											
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah																											
			Program Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan																											
			Program Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																											
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah																											

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun ... (%)		PD
													I				II		III		IV											
				(4)		(5)			(6)		(7)		(8)				(9)		(10)		(11)		(12)					(13)=(6)+(12)		(14)=(13)/(5) x100%		(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	Indikator	satuan	K	[illegible]	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	[illegible]	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
				[illegible]	%	25,5	[illegible]		24,8		25		8,85	100,00%			-		-		-		8,85	[illegible]	25,53%			25,85		83,49%		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	100,00%			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
	2.4	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	75,0	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	41,50%	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	%	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		-	-			-		-		-		-	[illegible]	-			[illegible]		[illegible]		
	2.4	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	[illegible]	%	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24	[illegible]	2,71	[illegible]	[illegible]	87,42%	-	-	-	-	-	-	2,71	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2.4	2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	%	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		-	-			-		-		-		-	[illegible]	-			[illegible]		[illegible]		
	2.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]

No	Urusan	Kode	Program yang Harus Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Capaian Tahun 2025 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Tahun 2025 (Posisi Triwulan IV)		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun Berjalan (2026)		Kebutuhan Belanja Pada Perangkat Daerah								Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan yang Disesuaikan				Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Triwulan IV (Posisi Laporan) Tahun 2025 (Akhir Tahun)		Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Perubahan RPJMD Provinsi (4) Tahun Terakhir (Tahun ke-5)		Ket
													I		II		III		IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)				(14)		(15)		(16)		(17)
				Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Realisasi	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Urusan Wajib																											
	2.6	2.06.03	Program Pelatihan dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Pelatihan dan Pengembangan Daerah (Survei Internal)	%	100	95.0	4.710.000.000	40	3.540.540.000	60	4.500.000.000	-	-	3.540.540.000	50,79%	-	-	-	-	-	-	-	95.0	-	47.540.000	0,67%	60,00	3.792.480.000	80,00%	80,00%	Target 60
3	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan	Indeks Pembangunan Pendidikan	Indeks	84,00	84,00		83,84		84,00		-	-															83,79		84,00%		
3.1	Dinamisasi Kompetensi Pendidikan untuk Peserta Didik, Pendidik dalam Pembelajaran Berbasis Multi	Angka Partisipasi Pendidikan	Tahun	13,5	13,5		13,25		13,50		-	-															13,50		13,70%		
	3.1	3.01.01	Program Pelayanan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase	93	73,5	41.000.000.000.000	83,27	347.400.224.000	81,00	370.401.000.000	83,68	112,00%	347.400.000.000	101,00%	-	-	-	-	-	-	81,00	73,5	83,27%	347.400.000.000	6,00%	83,00	3.824.000.000.000	101,24%	84,00%	Dalam Pembahasan
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat	Persentase	100	95,00		78,24		100		-	-				-		-		-	95,00	-	78,24			98,24%			
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat	Persentase	100	75,00		95,00		100		-	-				-		-		-	75,00	-	95,00			45,00%			
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat	Persentase	90,7	75,0		97,00		90,9		-	-				-		-		-	75,0	-	97,00			45,07%			
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi/Perguruan Tinggi	Persentase	75,50	75,00		93,04		75,50		-	-				-		-		-	75,00	-	93,04			50,79%			
				Persentase Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Pendidikan Layanan Khusus (Disabilitas)	Anak	75,00	75,00		91,00		80,00		-	-				-		-		-	75,00	-	91,00			50,75%			
				Persentase Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Pendidikan Layanan Khusus (Potensi Kecerdasan Istimewa)	Anak	84,00	75,0		89,00		82,0		-	-				-		-		-	75,00	-	89,00			51,00%			

No	[illegible]	Kode	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]										[illegible]					[illegible]		[illegible]		PD
													I				II		III		IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12)		(13)					(14)		(15)		(16)
				Indikator	Satuan	K	Tahun	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Tahun	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
				[illegible]	[illegible]	100	2024		[illegible]		100		-	-			-		-		-		-	2024	-			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	100	2024		[illegible]		100		-	-			-		-		-		-	2024	-			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	2024		[illegible]		[illegible]		-	-			-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-			[illegible]		[illegible]		
7.2	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	2024		[illegible]		[illegible]		-	-			-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-			[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	100	2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	%	100	2024		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	2024	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	%	100	2024		100		100		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	2024	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	2024		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	2024	[illegible]			[illegible]		[illegible]		

No	[illegible]	Kode	[illegible]	Indikator	Satuan	K	[illegible]	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	[illegible]	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12)		(13)					(14)		(15)		(16)
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	%	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	%	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	%	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	%	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	%	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Sasaran	Kode	[illegible]	Indikator	Satuan	(6) K	(6) Satuan	(6) Rp	(7) K	(7) Rp	(8) K	(8) Rp	(9) I K	(9) I %K	(9) I Rp	(9) I %Rp	(10) II K	(10) II Rp	(11) III K	(11) III Rp	(12) IV K	(12) IV Rp	(13) K	(13) Satuan	(13) %K	(13) Rp	(13) %Rp	(14) K	(14) Rp	(15) K	(15) Rp	(16) PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																												
			[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	%	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	%	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	%	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	%	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		

No	Kode	Nama	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 (Awal Tahun RKPD)			Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan Tahun Berjalan (2025)		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun Berjalan (2026)		Kebutuhan Anggaran Pada Perubahan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Berjalan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Berjalan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun Berikutnya (2027)		No
											I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(8)										(9)					(10)		(11)		(12)
			Indikator	Satuan	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Indikator	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Indikator	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Indikator	(5) Satuan	(6) K	(6) Satuan	(6) Rp	(7) K	(7) Rp	(8) K	(8) Rp	(9) K	(9) %K	(9) Rp	(9) %Rp	(10) K	(10) Rp	(11) K	(11) Rp	(12) K	(12) Rp	(13) K	(13) Satuan	(13) %K	(13) Rp	(13) %Rp	(14) K	(14) Rp	(15) K	(15) Rp	(16)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	%	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		-	-			-		-		-		-	[illegible]	-			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	%	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		-	-			-		-		-		-	[illegible]	-			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		-	-			-		-		-		-	[illegible]	-			[illegible]		[illegible]		

No	Urusan/ Bidang	Kode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target 2025 (Akhir Tahun RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja pada Tahun Awal (2025)		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun Berjalan (2026)		Kerangka Acuan Pada Tahunan										Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka RKPD Periode yang Disesuaikan					Realisasi Capaian dan Kerangka Pendanaan pada Awal Tahun 2026 (Sebelum Penyesuaian RKPD Tahun 2026)		Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Akhir Tahun 2026 (Setelah Penyesuaian RKPD Tahun 2026)		Ket
												I		II		III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12)		(13)					(14)=(13)/(6)x100%		(15)=(13)/(8)x100%		(16)
				Indikator	Satuan	R	Rasio Akhir Jabatan	Rp	R	Rp	R	Rp	R	Vol	Rp	Vol/Rp	R	Rp	R	Rp	R	Rp	R	Rasio Akhir Jabatan	Vol	Rp	Vol/Rp	R	Rp	R	Rp	
	2.2	2.02.01	Program Pembinaan, Pelatihan, Pemberdayaan, Kemitraan dan Kemandirian Petani	Jumlah kelompok tani/gapoktan yang mendapatkan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, kemitraan	Kelompok	0	Tidak	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	0,00%	Rp 0	0,00%	-	-	-	-	-	-	0	0,00%	0,00%	Rp 0	0,00%	0	Rp 0	0,00%	0,00%	Tetap
2.3	Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Peternak Pemula			Jumlah Peternak yang Dibina	Kelompok	62,24	Tidak		62,24		62,24		0	0			-	-	-	-	-	-	-		-			47,62		76,50%		
	2.3	2.03.01	Program Pembinaan, Pelatihan, Pemberdayaan, Kemitraan dan Kemandirian Peternak	Persentase UMK dan Koperasi yang mengikuti pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan	%	100	Tidak	Rp 0,00	91	Rp 0,00	74	Rp 0,00	0	0	Rp 0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	0	Tidak	-	Rp 0,00	0,00%	91	Rp 0,00	91,00%	28,57%	Tetap Angka
	2.3	2.03.02	Program Pengembangan Peternak	Persentase kelompok peternak yang mendapatkan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan	%	100	Tidak	Rp 0,00	100	Rp 0,00	100	Rp 0,00	100	100,00%	Rp 0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	100	40%	100,00%	Rp 0,00	0,00%	100,00	Rp 0,00	100,00%	0,00%	Tetap Angka
	2.3	2.03.03	Program Pengembangan Budidaya Ternak	Persentase kelompok peternak yang mendapatkan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan	%	100	Tidak	Rp 0,00	100	Rp 0,00	100	Rp 0,00	0	0,00%	Rp 0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	Tidak	-	Rp 0,00	0,00%	0,00	Rp 0,00	0,00%	0,00%	Tetap Angka
	2.3	2.03.04	Program Pengembangan Budidaya Ternak Potensial Lainnya	Persentase kelompok yang mendapatkan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan	%	100	Tidak	Rp 0,00	100	Rp 0,00	100	Rp 0,00	0	0,00%	Rp 0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	Tidak	-	Rp 0,00	0,00%	0,00	Rp 0,00	0,00%	0,00%	Tetap Angka
	2.3	2.03.05	Program Pengelolaan Pos Inseminasi Buatan	Persentase kelompok peternak yang mendapatkan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan	%	100	Tidak	Rp 0,00	100	Rp 0,00	100	Rp 0,00	0	0,00%	Rp 0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	Tidak	-	Rp 0,00	0,00%	0,00	Rp 0,00	0,00%	0,00%	Tetap Angka

No	Kode	Nama	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Perangkat Daerah Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 (Awal Rancangan Perubahan)			Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan II Tahun 2024		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 (Rancangan Awal)		Kerangka Regulasi				Kerangka Pendanaan								Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 (Rancangan Perubahan)				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 (Rancangan Akhir)				No
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12)		(13)				(14)		(15)		(16)		(17)
				Indikator	Satuan	K	Real. (%)	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Vol	Rp	Valid	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Real. (%)	Vol	Rp	Valid	K	Rp	K	Rp	
			Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Dinas Pendidikan Perangkat Daerah Pendukung: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kehutanan, Dinas Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Penghubung Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelola Sumber Daya Air, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Badan Pengelola Perumahan dan Permukiman, Badan Pengelola Transportasi Daerah, Badan Pengelola Pertanahan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pengelola Pendidikan, Badan Pengelola Pangan, Badan Pengelola Kesehatan, Badan Pengelola Kebudayaan, Badan Pengelola Kepemudaan dan Olahraga, Badan Pengelola Ketahanan Pangan, Badan Pengelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengelola Komunikasi, Informatika dan Statistik, Badan Pengelola Perindustrian dan Energi, Badan Pengelola Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengelola Kehutanan, Badan Pengelola Perdagangan, Badan Pengelola Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Badan Pengelola Sosial, Badan Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Badan Pengelola Perhubungan, Badan Pengelola Pekerjaan Umum, Badan Pengelola Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase																															
1.1	Pengurusan Pilihan Orang Perseorangan Terdaftar dan Terverifikasi (Persentase)			Indikator	Persentase	77.27	77.27		80.00		80.00																77.27			80.00			
	1.1	0.01.01	Program Pemenuhan Hak Politik Warga (PHPW)	Persentase Pemenuhan Hak Politik Warga	Indikator	4	Tidak Ada Data	1.807.702.114.636	4	462.124.322.000	4	4.724.000.000.247	4	100,00%	2.262.124.000.247	100,00%	-	-	-	-	-	-	4	0,00%	100,00%	924.124.322.114	20,00%	4,00	924.000.000.114	100,00 %	0,00 %	Perangkat Daerah
	1.1	0.01.02	Pengelolaan Pendaftaran Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase Pemilih yang Terdaftar dan Terverifikasi	%	100	77,27	84.871.000.000	100	8.700.000.000	100	17.000.000.000	100	100,00%	1.000.000.000	77,27%	-	-	-	-	-	-	100	0,00%	100,00%	1.000.000.000	0,00%	80,00	8.170.000.000	80,00%	80,00%	Perangkat Daerah
	1.1	0.01.03	Pengelolaan Pendaftaran Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase Pemilih yang Terdaftar dan Terverifikasi	%	100	77,27	1.722.000.000	100	100	100	100	100	100,00%	100	77,27%	-	-	-	-	-	-	100	0,00%	100,00%	100	0,00%	100	100	100,00%	100,00%	Kode Urusan dan Nama Perangkat Daerah Pendukung
	1.1	0.01.04	Pengelolaan Pemilihan Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih Pengelolaan Pemilihan Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase Pemilih yang Terdaftar dan Terverifikasi	%	100	77,27	800.831.000.000	100,0	800.000.000.000	100	700.700.000.000	100	100,00%	2.000.700.000	98,00%	-	-	-	-	-	-	100	0,00%	100,00%	2.000.700.000	0,00%	100,00	800.000.000.000	100,00%	100,00 %	Perangkat Daerah

No	Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Capaian Sebelum Tahun Perencanaan (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Sebelum Tahun Perencanaan (Tahun 2024)		Target Capaian Tahun Perencanaan (Tahun 2025)		Kondisi Kinerja pada Awal Perubahan										Realisasi Capaian Sampai dengan Triwulan I Tahun Perencanaan (Tahun 2025)					Proyeksi Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2025) s.d. Triwulan III		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2025)		Ket
											I				II		III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)				(9)		(10)		(11)		(12)						(13)		(14)=(12)/(7)x100%		(15)
			Indikator	Satuan	K	Rasio Arah Kinerja	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Nilai	Rp	Nilai/Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rasio Arah Kinerja	Nilai	Rp	Nilai/Rp	K	Rp	K	Rp	
3.4	3.01.03	Program Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh, Perbaikan Perumahan, Pemukiman Kumuh dan Pengembangan Kawasan Rumah Susun	Persentase Jumlah Penduduk Terpenuhi Kebutuhan Dasar Perumahan Layak Huni	%	80	naik	458.118.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
3.4	3.01.04	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Penduduk Terpenuhi Kebutuhan Dasar Air Minum	%	80	naik	87.118.007.000	85,5	12.545.000.000	91	6.752.134.000	91	100,00%	18.000.000	37,50%	-	-	-	-	-	-	91	naik	100,00%	50.000.000	0,00%	93,75	13.000.000.000	97,00%	14,30%	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya
3.4	3.01.05	Program Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sanitasi	Persentase Jumlah Penduduk Terpenuhi Kebutuhan Dasar Sanitasi	%	80	naik	87.500.119.000	85,5	12.545.000.000	91	1.800.000.000	91	100,00%	274.000.000	1.500,00%	-	-	-	-	-	-	91	naik	100,00%	274.000.000	15,20%	93,75	1.700.000.000	97,00%	0,77%	Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jakarta
3.4	3.01.06	Program Pengelolaan Persampahan, Kebersihan, dan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Jumlah Penduduk Terpenuhi Kebutuhan Dasar Persampahan, Kebersihan, dan Ruang Terbuka Hijau	%	80	naik	147.500.000.000	85,5	855.500.000.000	91	325.000.000.000	91	100,00%	1.277.000.000	1,00%	-	-	-	-	-	-	91	naik	100,00%	1.277.000.000	0,00%	93,75	900.000.000.000	97,00%	31,20 %	Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Sampah Jakarta
3.4	3.01.07	Program Pengelolaan Pemakaman dan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya	Persentase Jumlah Penduduk Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pemakaman, Suaka Alam, dan Cagar Budaya	%	80	naik	1.700.744.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	[illegible]
				[illegible]					
4	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	[illegible]	Kode	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]										[illegible]					[illegible]		[illegible]		PD
													I				II		III		IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]
				Indikator	[illegible]	K	[illegible]	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	[illegible]	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
				[illegible]																												[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



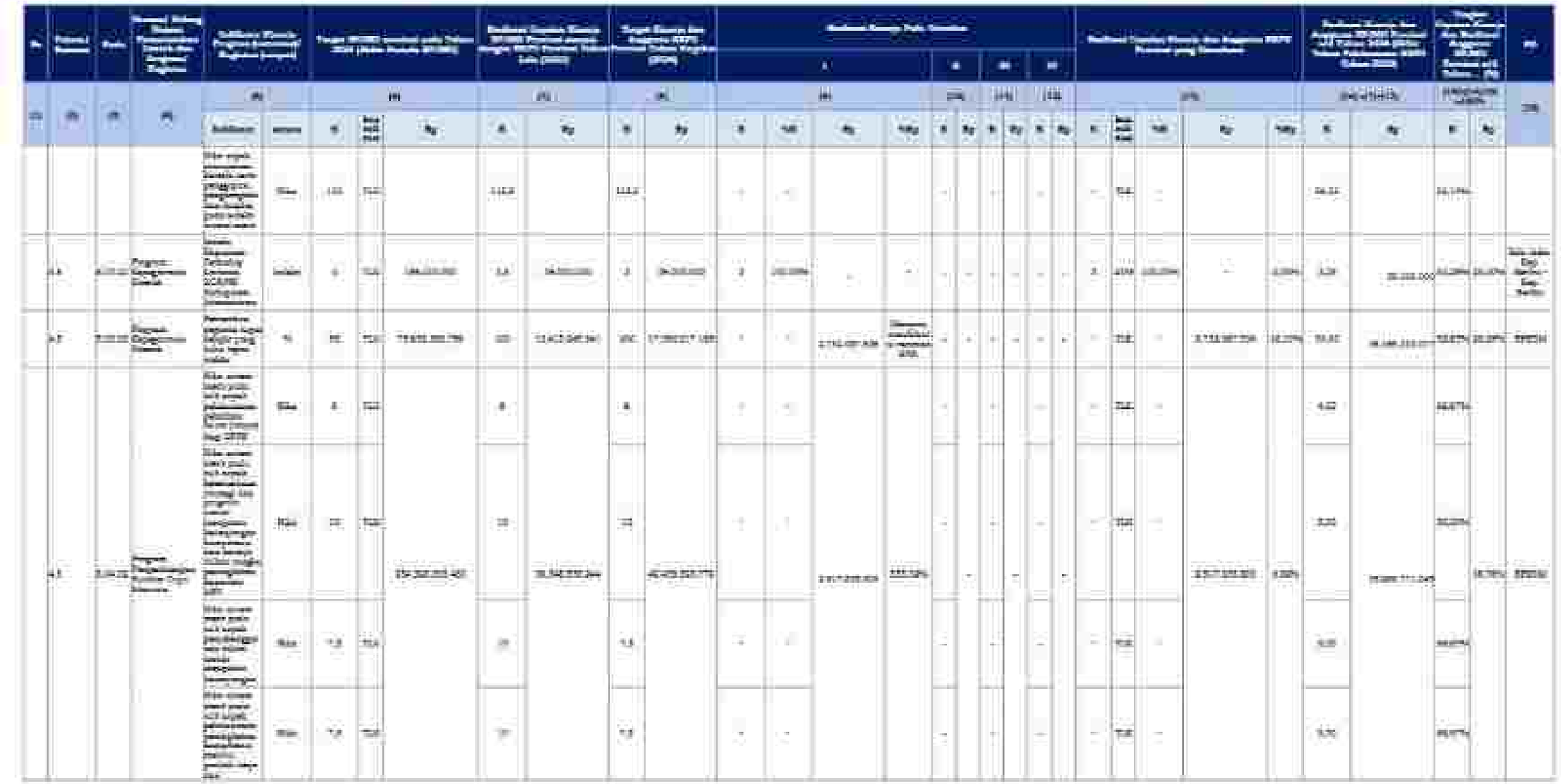


No	Kode	Uraian	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) pada Tahun Awal Perubahan RKPD	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) pada Tahun Awal Perubahan RKPD	Target Capaian Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) pada Tahun Berjalan RKPD	Kebutuhan Belanja Pada Tahun				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan yang Diharapkan				Kondisi Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Tahun Berjalan yang Akan Dicapai pada Akhir Tahun Perencanaan RPJMD Tahun 2025	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Regulasi pada RKPD Perubahan yang Berikutnya Tahun 2026	No
							I	II	III	IV								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)	(9)				(10)			
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		[illegible]			[illegible]		[illegible]		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]
													I				II		III		IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12)		(13)					(14)		(15)		(16)
				Indikator	Satuan	K	[illegible]	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	[illegible]	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
			[illegible]	[illegible]																												
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		-	-	[illegible]		-		-		-		-	[illegible]	-			[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	100	[illegible]	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	[illegible]	100,00%	-	[illegible]	100,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		-	-			-	-	-	-	-	-	-		-			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	%	100	[illegible]		100		100		-	-			-		-		-		-	[illegible]	-			[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	100	[illegible]	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	100,00%	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	100	[illegible]	100,00%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	%	100	[illegible]		100		100		100	100,00%			-		-		-		100	[illegible]	100,00%			[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	[illegible]	Kode	[illegible]	[illegible] (Indikator)		[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]										[illegible]					[illegible]		[illegible]		PD
													I				II		III		IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12)		(13)					(14)		(15)		(16)
				[illegible]	[illegible]	K	[illegible]	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	[illegible]	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	%	100	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	%	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			-		-		-		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		-	-			-	-	-	-	-	-	-		-			[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		-	-			-		-		-		-	[illegible]	-			[illegible]		[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		-	-			-		-		-		-	[illegible]	-			[illegible]		[illegible]		



No	Urusan/ Bidang	Kode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Pendukung	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target RPJMD (awal) Tahun 2025 (Kondisi Kinerja RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Pertama (Awal) Tahun 2025 (Posisi Akhir Tahun 2025)		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026 (Posisi Awal Tahun)		Kerangka Pendanaan								Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka RKPD Pertama yang Disesuaikan					Realisasi Kinerja dan Kerangka Pendanaan Akhir Tahun 2026 (Posisi Awal Tahun 2027)		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Akhir Tahun 2026 (Posisi Awal Tahun 2027)		Ket
												I				II		III		IV										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12)		(13)					(14)		(15)		(16)
				Indikator	Satuan	R	Rasionalisasi	Rp	R	Rp	R	Rp	R	Rp	Rp/kg	Sumber	R	Rp	R	Rp	R	Rp	R	Rasionalisasi	Rp	Rp/kg	Sumber	R	Rp	R	Rp	
				Indikator program																											
				Persentase [nama yang diukur] [periode waktu] [lokasi] [target tambahan]	%	80	75,00		74,00		83		-	-			-	-	-	-	-	-	-	75,00				77,00		80,00%		
				Rata-rata pengeluaran kinerja (%)									(50,00%)	(1.473.333.484,33)	(100%)																
				Realisasi Kinerja									80,00% 80,00%		80,00% 80,00%																

Sumber: Sistem informasi monitoring evaluasi kinerja 2024 (diolah)

Keterangan: * Program tidak menggunakan APBD
** Didukung oleh anggaran Program Penunjang
*** Pembentukan organisasi dan tata laksa perangkat daerah
**** Tidak memiliki data kinerja (R / A)

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2024, kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja program prioritas Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan I tahun 2024 berada di angka 99,28% atau predikat kinerja organisasi sangat tinggi.
2. Realisasi serapan anggaran berada di angka Rp. 3.872.016.484.504 atau 122% dari target Triwulan I sebesar Rp. 3.173.791.522.660,-. Dengan demikian realisasi serapan anggaran masuk kategori sangat tinggi.
3. Salah satu indikator kinerja di Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu persentase penerapan sistem informasi kesehatan terintegrasi tidak memiliki data kinerja. Kemudian Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan tidak memiliki target maupun trajektori capaian kinerja sepanjang tahun. Hal ini dikarenakan program tersebut dilaksanakan melalui program penunjang.
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan yang tidak ditrajektorikan di triwulan I 2024 dan pelaksanaan programnya menggunakan/ dibiayai dengan dana dekonsentrasi APBN. Selain itu, hal ini juga terjadi pada Program Kawasan Permukiman yang pelaksanaannya dibiayai melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan dan/ atau dana konversi kewajiban pengembang.
5. Indikator kinerja Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah yaitu Persentase Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan, tidak memiliki target pada RKPD 2024. Hal ini dikarenakan terdapat perpindahan tupoksi dari DPMPTSP ke Bappeda sesuai dengan Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja, dimana Pergub tersebut disahkan setelah Pergub tentang renstra perangkat daerah disahkan.
6. Terdapat tiga indikator kinerja program Kab. Adm. Kep. Seribu yang tidak lagi diakomodasi dalam renja Kab. Adm. Kep. Seribu tahun 2024 karena program tersebut telah dipindahkan ke Suku Badan Kesbangpol Kab. Adm. Kep. Seribu sesuai Pergub nomor 57 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja.
7. Tingginya realisasi capaian kinerja program pemprov DKI Jakarta triwulan I 2024 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
   a. Faktor Pendorong
      1) Pendampingan, penyuluhan, sosialisasi dan monitoring rutin oleh PD terkait
      2) Kolaborasi dan koordinasi antar *stakeholder*
      3) Kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi definisi operasional/ metode perhitungan dan kebijakan pemerintah sebagai guideline/ standar pelayanan
      4) Peningkatan kualitas pelayanan atau kemudahan pelayanan dengan adanya *online system* dan layanan pengaduan
      5) Pengadaan prasarana dan sarana yang mendukung
   b. Faktor Penghambat
      1) Pekerjaan konstruksi yang masif
      2) Penggunaan basis data yang menunggu pihak ketiga
8. Rekomendasi untuk evaluasi hasil RKPD triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a. Pada setiap tahapan perencanaan, disediakan mekanisme baik teknis maupun non teknis perihal kelengkapan dan kualitas atribut kinerja pada semua level kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan).
   b. Penentuan trajektori target kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada setiap triwulan sebaiknya mempertimbangkan tren realisasi kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan setiap triwulan pada periode tahun sebelumnya.
   c. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja maka seluruh program yang merupakan turunan dari kinerja tersebut dapat dikelola melalui perjanjian kinerja kepala PD/ pejabat administrator/ pejabat pengawas. Kinerja tersebut harus memiliki target maupun trajektori capaian kinerja sepanjang tahun, sehingga pelaporan realisasi kinerjanya dapat direkam dan dipantau secara rutin.
   d. Sebaiknya dalam penyusunan aturan tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah agar memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan (RPD/ RPJMD dan Renstra PD). Hal ini didasarkan pada prinsip *performance based organization*.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Permasalahan pembangunan Urusan Pendidikan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Belum optimal dan memadainya utilisasi dan modernisasi TIK untuk mendukung penguatan sistem dan proses pembelajaran jarak jauh di setiap satuan pendidikan serta pengembangan fitur-fitur pembelajaran daring yang menarik minat dan mudah dicerna oleh para siswa dari setiap mata pelajaran yang diajarkan.
b. Masih belum terpenuhinya sebagian sarana prasarana pendidikan khususnya untuk sekolah sekolah pinggiran.
c. Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan (bangunan sekolah dan ruang kelas), serta sarana prasarana penunjang lainnya untuk pendidikan formal.
d. Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan informal yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan anak usia dini, seperti pondok pesantren, MDTA, RA, TK, PAUD.
e. Belum optimalnya ketersediaan, distribusi, dan kualitas tenaga pendidik (guru).
f. Masih rendahnya persentase guru bersertifikasi (perbandingan antara jumlah guru bersertifikasi dengan jumlah guru seluruhnya pada suatu jenjang pendidikan).
g. Belum merata dan memadainya Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk siswa disabilitas.
h. Belum optimalnya pelaksanaan program *based learning* (cara pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengkaji, mencari tahu, dan menemukan sendiri).
i. Belum efektifnya pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

2.3.1.2 Kesehatan

Permasalahan pembangunan Urusan Kesehatan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Belum optimalnya tingkat kemandirian alat kesehatan dan farmasi.
b. Masih terdapat kelurahan yang belum memiliki Puskesmas mandiri (status kepemilikannya masih kontrak):
    1) 6 (enam) Puskesmas Pembantu dengan kepemilikan kontrak (5 Puskesmas Pembantu berproses perolehan lahan dengan BPAD)
    2) 11 (sebelas) kelurahan yang tidak memiliki Puskesmas Pembantu dan akan berkolaborasi dengan klinik pratama kolaborasi.
c. Masih ditemukan kasus 'permasalahan gizi' pada balita (5.753 balita kurang berat badan, 9.191 balita kurang gizi, 2.026 balita tidak gizi buruk, dan 22.823 balita lainnya masuk kategori stunting) pada Agustus 2023.
d. Masih minimnya total kelurahan yang mendeklarasikan sebagai kelurahan *Open Defecation Free* (ODF).
e. Belum optimalnya penyediaan fasilitas ramah disabilitas (trotoar, transportasi publik, rumah ibadah, pertokoan, fasilitas kesehatan).

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Banjir yang disebabkan oleh alih fungsi lahan, penyempitan, pendangkalan saluran pembuangan air, serta dampak dari perubahan iklim.
b. Masih tingginya angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
c. Masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan tata ruang (RTRW dan RDTR) dengan pemanfaatan ruang di Provinsi DKI Jakarta.

d. Masih rendahnya cakupan layanan air limbah dan tingginya pencemaran lingkungan.
e. Masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar perkotaan.
f. Berkurangnya daerah resapan dan area dengan tingkat resapan tinggi dan kurangnya sistem jaringan drainase permukiman.
g. Masih rendahnya persentase panjang jalan yang memiliki trotoar.
h. Sebagian besar tanah di DKI Jakarta sudah menjadi hak milik perseorangan, sehingga mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan.
i. Masih rendahnya angka Indeks Kualitas Air (IKA) dengan capaian tahun 2023 sebesar 58,69 dari nilai maksimal 100.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Rendahnya akses Rumah Tangga hunian layak di Jakarta yang sebesar 38,8% (BPS,2023) disebabkan oleh masih maraknya penggunaan material asbes sebagai atap pada hunian yang merupakan komponen utama pemenuhan standar, jika tidak terpenuhi maka hunian dianggap tidak layak.
b. Rasio luasan kawasan permukiman kumuh terhadap luasan DKI Jakarta masih sebesar 9,49% (DPKKP, 2023). Hal ini disebabkan oleh padatnya permukiman penduduk, tingginya harga lahan, serta terbatasnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang tidak bisa mengintervensi aset privat.

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Belum efektifnya pelaksanaan giat penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lokasi yang strategis dalam mencegah PKL tersebut membuka lapak kembali di lokasi yang ditertibkan.
b. Masih tingginya potensi pelanggaran hukum terkait ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh masyarakat umum dan Dunia Usaha. Beberapa hal yang sering ditemukan meliputi pelanggaran lalu lintas, pelanggaran keabsahan perlunan bangunan, temuan narkoba dan prostitusi pada lokasi usaha, maupun penyelenggaraan reklame yang tidak berizin.
c. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah terkait ketenteraman dan ketertiban umum yang berlaku. Beberapa contoh meliputi pemanfaatan trotoar yang tidak sesuai peruntukannya, membuang sampah tidak pada tempatnya, merokok pada Kawasan Dilarang merokok, maupun mendirikan bangunan pada lokasi yang dilarang.
d. Masih tingginya frekuensi kejadian kebakaran terutama pada pemukiman padat penduduk.
e. Masih rendahnya kecepatan pemberian layanan terhadap pengungsi.
f. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah.
g. Belum optimalnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana daerah:
    1) Terdapat 1.258 kejadian bencana di DKI Jakarta Tahun 2023 dengan korban jiwa meninggal dunia sebanyak 97 orang, luka-luka 362 orang dan 9.361 orang mengungsi. Kerugian materi akibat bencana di tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp 272 Milyar.
    2) Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan 1.411 kejadian, dengan korban jiwa 32 orang, luka-luka 263 orang dan 7.889 orang mengungsi. Kerugian materi akibat bencana di tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp 217 Milyar.

h. Penyelesaian kasus pelanggaran terhadap Perda/Pergub belum seluruhnya ditindaklanjuti sampai keluarnya putusan Pengadilan.

2.3.1.6 Sosial

Permasalahan pembangunan Urusan Sosial di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Jumlah Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) meningkat (5.241 orang pada tahun 2022, 7.345 orang pada tahun 2023) didominasi gelandangan dan orang terlantar sehingga berdampak pada permasalahan sosial.
b. Peningkatan kapasitas panti masih terhambat karena keterbatasan anggaran khususnya panti anak terlantar dan panti lanjut usia, serta panti ODGJ terlantar.
c. Pemenuhan SPM di dalam panti masyarakat belum terpenuhi secara baik, kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha perlu ditingkatkan.
d. Belum optimalnya tahap verifikasi dan validasi data DTKS, khususnya dalam hal pemberian bantuan sosial.
e. Belum optimalnya pengintegrasian data untuk program kependudukan

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan Urusan Tenaga Kerja di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 sudah mengalami penurunan, yaitu menjadi 6,53. Walaupun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian TPT DKI Jakarta sebelum Pandemi COVID-19.
b. Masih ditemukan tenaga kerja dengan tingkat produktivitas yang rendah, yang mana kualitas kompetensi yang dimiliki tenaga kerja belum mampu memenuhi kebutuhan pasar yang tersedia.
c. Proporsi penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan / *vulnerable employment*" masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja diatas 35 jam/minggu.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Masih kurangnya pemahaman pemangku kebijakan mengenai konsep dan isu gender serta manfaat pengarusutamaan gender dalam pembangunan sehingga berdampak pada rendahnya penganggaran pembangunan yang responsif gender.
b. Masih maraknya atau tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
c. Belum optimalnya atau masih rendahnya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Perangkat Daerah sesuai ketentuan yg berlaku.

2.3.2.3 Pangan

Permasalahan pembangunan Urusan Pangan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat pada satu jenis bahan pangan pokok yaitu beras.
b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Skor PPH DKI Jakarta Tahun 2023 92,7 poin, masih di bawah angka nasional yaitu 94,1 poin di tahun 2023.
c. Fluktuasi harga pangan strategis menyebabkan menurunnya akses keterjangkauan terhadap pangan.
d. Belum optimalnya kerjasama antar daerah terkait ketersediaan pangan strategis.

2.3.2.4 Pertanahan

Permasalahan pembangunan Urusan Pertanahan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Masih terdapat tanah masyarakat yang belum bersertifikat.
b. Belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainya.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan Urusan Lingkungan Hidup di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Menurunnya kualitas udara ambien akibat emisi sektor transportasi, pembangkit listrik, aktivitas industri manufaktur, produksi limbah padat/sampah, dan kegiatan rumah tangga. Beberapa partikulat seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon monoksida, dan ozon adalah beberapa polutan yang berkontribusi terhadap pencemaran udara yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bagi manusia.
b. Perilaku masyarakat membuang sampah sembarang serta masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah atau *Reuse, Reduce* dan *Recycle* (3R).
c. Pembangunan infrastruktur dan urbanisasi yang cepat telah menyebabkan kerusakan habitat alami di sekitar Jakarta dan mengancam keberadaan berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Kehilangan keanekaragaman hayati memiliki dampak negatif yang luas pada ekosistem lokal dan keseimbangan lingkungan.
d. Permasalahan daerah rawan banjir diakibatkan kombinasi antara curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang buruk, dan penurunan permukaan tanah akibat ekstraksi air tanah yang berlebihan.
e. Minimnya ketersediaan luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) dan distribusi RTH yang belum merata di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, rasio RTH hingga tahun 2023 sebesar 5,214% sesuai data resmi yang dirilis melalui laman Jakarta Satu.
f. Meningkatnya konstruksi bangunan gedung yang berdampak pada penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
g. Jumlah limbah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat.
h. Berdasarkan Pergub Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga, telah dimanatkan pendahan sampah di masyarakat melalui pembentukan Bidang Pengelolaan Sampah RW (BPSRW) di 2.742 RW yang masih perlu dioptimalkan implementasinya.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Banyaknya penduduk dengan NIK yang belum terupdate di lembaga pengguna (BPJS, Vaksin, Bansos, dll) sehingga perlu dilakukan konsolidasi secara manual oleh Disdukcapil setempat.
b. Masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki data kependudukan.
c. Proses pelaksanaan inventarisasi data kependudukan yang tidak sesuai dengan domisili.
d. Dengan disahkannya UU Daerah Khusus Jakarta, berpotensi adanya penggantian KTP seluruh warga DKJ.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dengan Lembaga Kemasyarakatan PKK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Belum optimalnya tingkat keaktifan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Posyantek Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut dalam program pemberdayaan masyarakat.

c. Belum adanya pembaharuan kebijakan yang mengatur pola pemberdayaan masyarakat DKI Jakarta yang melibatkan berbagai sektor.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Permasalahan pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang belum optimal sehingga masih terjadi perkawinan usia anak yang berdampak pada tingginya prevalensi stunting.

b. Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan peserta KB aktif di DKI Jakarta melalui sistem terintegrasi.

c. Belum maksimalnya sosialisasi dan edukasi terkait seks dan reproduksi dalam pembelajaran di semua jenjang pendidikan.

d. Rendahnya pemahaman mengenai fungsi keluarga sehingga masih banyak keluarga yang belum memenuhi unsur kebahagiaan, kesejahteraan dan kemandirian atau masih banyak keluarga yang kurang berkualitas.

e. Penduduk DKI memasuki *ageing population* sehingga perlu konvergensi program lansia agar lansia DKI tetap produktif.

2.3.2.9 Perhubungan

Permasalahan pembangunan Urusan Perhubungan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Minimnya penggunaan transportasi publik (Modal share 2023: 18,86%).

b. Belum optimalnya perkembangan penyediaan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang terintegrasi antar moda angkutan.

c. Penguatan dan branding penggunaan transportasi massal yang masih kurang.

d. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Berorientasi Transit pada simpul-simpul integrasi antarmoda.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Kurang optimalnya pemanfaatan Internet Gratis (JakWIFI) yang seringkali disalahgunakan oleh masyarakat.

b. Perlunya peningkatan terhadap *Urban Digital Connectivity* terutama dalam mencapai kecepatan download dan upload internet rata-rata di wilayah Jakarta.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Persentase koperasi aktif dari tahun 2017-2023 masih fluktuatif, pada tahun 2023 jumlah koperasi aktif sudah 2.206 dari 3.945 koperasi.

b. Kurang memadainya keberadaan sentra ekonomi UKM dan industri kreatif baik secara *offline* maupun *online*.

c. Masih kurangnya akses perluasan pasar dan masih banyaknya Koperasi serta UMKM yang belum optimal dalam memanfaatkan teknologi digital pengembangan usahanya.

d. Masih rendahnya literasi keuangan bagi pelaku UMKM.

2.3.2.12 Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan Urusan Penanaman Modal di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Penyesuaian regulasi sebagai dampak dari diterapkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap kepastian perubahan regulasi seperti PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Rancangan UU Daerah Khusus Jakarta.

b. Belum meratanya persebaran investasi ke seluruh wilayah administrasi di DKI Jakarta. Pada triwulan 2023, realisasi penanaman modal masih terpusat di Jakarta Selatan dengan realisasi Rp 31.984.637 dan Jakarta Pusat dengan realisasi Rp 32.538.477.

c. Masih minimnya pelaku usaha yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), walaupun DPMPTSP rutin memberikan sosialisasi serta bimbingan teknis.

d. Masih minimnya kesepakatan investasi yang dihasilkan dari kegiatan promosi penanaman modal atas proyek-proyek prioritas DKI Jakarta kepada berbagai *stakeholder*.

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Masih rendahnya partisipasi pemuda yang ikut serta secara aktif dalam kegiatan kewargaan, sosial kemasyarakatan, dan politik.

b. Diskriminasi gender, beban ganda, dan belum optimalnya akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan menyebabkan kesenjangan TPAK antara perempuan dan laki-laki di DKI Jakarta.

c. Dekadensi moral pada pemuda Jakarta disebabkan oleh lemahnya nilai-nilai moral dan pengaruh negatif globalisasi.

2.3.2.14 Statistik

Permasalahan pembangunan Urusan Statistik di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu belum optimalnya integrasi sistem/aplikasi maupun berbagi pakai data yang dimiliki antar OPD.

2.3.2.15 Persandian

Permasalahan pembangunan Urusan Persandian di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Masih adanya OPD yang belum menerapkan persandian dalam rangka menjaga dokumen rahasia maupun arsip penting.

b. Masih kurangnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (*security awareness*).

c. Belum memadainya sarana dan prasarana Persandian.

d. Belum meratanya kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

2.3.2.16 Kebudayaan

Permasalahan pembangunan Urusan Kebudayaan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Perubahan nilai-nilai budaya akibat pengaruh globalisasi.

b. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana kebudayaan yang bertaraf internasional.

c. Belum optimalnya peran budaya dalam proses perencanaan pembangunan.

2.3.2.17 Perpustakaan

Permasalahan pembangunan Urusan Perpustakaan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Masih minimnya minat masyarakat terhadap perpustakaan.
b. Perlunya peningkatan literasi dengan menambah dan memperbaharui buku-buku bacaan di sekolah-sekolah baik SMA/SMK termasuk bantuan untuk perpustakaan.

2.3.2.18 Kearsipan

Permasalahan pembangunan Urusan Kearsipan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di perangkat daerah.
b. Transformasi pengelolaan arsip konvensional menjadi arsip dengan format digital belum didukung dengan infrastruktur yang efektif.
c. Belum optimalnya tingkat pengawasan pengelolaan arsip di daerah.

2.3.3 Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Belum optimalnya hasil olahan sumber daya laut.
b. Belum optimalnya Pengembangan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan.
c. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan perikanan dan kelautan. Indeks Kesehatan Laut Jakarta pada tahun 2023 sebesar 68,77, dengan nilai tersendah berada pada tujuan 3 yaitu Laut sebagai sumber produk alam dengan nilai 4,02.
d. Pemasaran hasil kelautan dan perikanan belum terintegrasi.
e. Terbatasnya teknologi penangkapan yang dimiliki oleh nelayan.

2.3.3.2 Pariwisata

Permasalahan pembangunan Urusan Pariwisata di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara di DKI Jakarta menunjukan tren yang fluktuatif.
   1) Tahun 2019: 40.555.694
   2) Tahun 2020: 7.141.420
   3) Tahun 2021: 5.499.037
   4) Tahun 2022: 18.556.888
   5) Tahun 2023: 30.966.614
b. Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas dan pelaku industri pariwisata.
c. Belum optimalnya pengembangan wisata konvensi di DKI Jakarta.
d. Kurangnya publikasi dan informasi mengenai destinasi wisata maupun event-event di Jakarta.
e. Belum optimalnya sistem pemasaran pariwisata yang terpadu.
f. Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum belum dapat mencapai kondisi yang sama sebelum pandemi:
   1) Tahun 2019: 4.79
   2) Tahun 2020: 4.16
   3) Tahun 2021: 4.36
   4) Tahun 2022: 4.51
   5) Tahun 2023: 4.68

2.3.3.3 Pertanian

Permasalahan pembangunan Urusan Pertanian di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Tingginya anggaran dikeluarkan untuk impor bahan pangan (beras, gandum, daging).

b. Kenaikan harga bahan pangan strategis yang dapat berdampak pada tingkat inflasi.
c. Menurunnya Produksi beras di Jakarta, pada tahun 2022 produksi beras di Jakarta sebesar 1.616 ton, turun sekitar 20,55%.
d. Ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai sumber makanan pokok.
e. Banyaknya alih fungsi lahan di DKI Jakarta.
f. Belum optimalnya penggunaan teknologi pada sektor pertanian.
g. Adanya potensial terkena DPI (kekeringan/ kebanjiran).
h. Terlalu rendahnya penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani.

2.3.3.4 Kehutanan

Permasalahan pembangunan Urusan Kehutanan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Masih terbatasnya SDM Bidang kehutanan terkait kapasitas dan kebutuhan personil untuk pengelolaan dan perlindungan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta.
b. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan, penataan, pemeliharaan, dan perencanaan RTH hutan.
c. Perlunya pengaturan kembali sektor kehutanan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
d. Tingkat degradasi hutan dan lahan masih tinggi pada Daerah Aliran Sungai (DAS).
e. Meningkatnya jumlah gangguan fungsi ekosistem hutan.
f. Rendahnya teknologi pemanfaatan sumber daya hutan.

2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Rendahnya kesadaran para pelaku pengambil air tanah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin, seperti membuat sumur imbuhan.
b. Ketersediaan lahan untuk instalasi biogas yang terbatas.

2.3.3.6 Perdagangan

Permasalahan pembangunan Urusan Perdagangan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Stagnasi hasil produksi UMKM.
b. Belum optimal dan memadainya dukungan pasar baik *offline* maupun *online*.
c. Perlambatan ekonomi global berdampak pada menurunnya permintaan ekspor.
d. Dominasi barang impor.
e. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok.
f. Promosi produk industri lokal (asal DKI Jakarta) masih dirasa kurang.
g. Adanya persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern.
h. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.
i. Belum Optimalnya akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan bagi pelaku usaha/IKM.

2.3.3.7 Perindustrian

Permasalahan pembangunan Urusan Perindustrian di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Penurunan nilai tambah dari sektor perindustrian.
b. Produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi) sehingga mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat.
c. Produk industri belum sepenuhnya menjadi bagian dalam rantai pasok nasional maupun global.
d. Belum optimalnya kemitraan antara industri besar dan industri kecil menengah.

e. Rendahnya kualitas produk industri yang belum sesuai dengan Standar Mutu Produk sehingga kurang berdaya saing.
f. Aktivitas kegiatan produksi dan distribusi hasil produk industri belum berjalan normal pasca pandemi COVID-19.

2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Perencanaan

Permasalahan pembangunan Urusan Perencanaan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Masih terdapat indikator kinerja di beberapa bidang/urusan yang belum selaras dan mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/ SDGs/ Standar Nasional/ target tahunan di dalam RPJMD/ capaian tahun sebelumnya atau tren).
b. Belum optimalnya pelibatan stakeholder non pemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan.

2.3.4.2 Keuangan

Permasalahan pembangunan Urusan Keuangan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber alternatif pembiayaan lain salah satunya melalui mekanisme pendanaan dan investasi.
b. Belum terdapat ukuran penetapan belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional terhadap kebutuhan belanja unit penghasil.
c. Realisasi PAD terhadap pendapatan daerah masih berfluktuatif dikarenakan sebagian besar masih berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Variabilitas dalam penerimaan pajak dan retribusi menjadi tantangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.
d. DKI Jakarta memiliki beban utang yang relatif besar, di mana pembayaran bunga serta cicilan utang menjadi beban tambahan bagi anggaran daerah dan semakin memperketat kapasitas fiskal daerah.

2.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Masih terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
b. Adanya tuntutan regulasi tentang aparatur yang memenuhi standar kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis serta pemerintahan yang mendukung Provinsi DKJ Menuju Kota Global.
c. Dengan disahkannya UU Daerah Khusus Jakarta, dibutuhkan Grand Design Kelembagaan serta Dukungan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKJ Menuju Kota Global.
d. Adanya tuntutan akan aparatur yang profesional dan mampu mendukung pelayanan Kota Global.

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan Urusan Penelitian dan Pengembangan di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2024, yaitu:

a. Belum optimalnya pelaksanaan kajian dan penelitian dalam siklus perencanaan.
b. Masih kurangnya inisiatif dan peran serta Perangkat Daerah untuk terlibat dalam penelitian dan riset daerah.
c. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan riset dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
d. Hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat.

2.4 Inovasi Daerah

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menuntut Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan inovasi daerah dalam rangka peningkatan tata kelola, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi Daerah sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembaharuan sebagaimana dimaksud dapat berlaku pada seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi. Lebih lanjut, inovasi daerah terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu: (1) inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; (2) inovasi Pelayanan Publik; dan (3) inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Penyelenggaraan inovasi daerah di Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 265 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Inovasi yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam berinovasi. Adapun sampai dengan tahun 2023, DKI Jakarta telah memiliki 272 inovasi dengan kategori inovasi pelayanan publik memiliki jumlah paling banyak, yaitu 123 inovasi. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara aktif melibatkan berbagai pihak dalam berinovasi, hal tersebut dikarenakan keberhasilan suatu inovasi pada hakikatnya ditentukan oleh hubungan yang terkoordinasi, saling menguji dan saling memperkuat antar *stakeholders* (daerah, nasional dan internasional) yang nantinya akan berimplikasi pada koherensi dan sinergi dari strategi, kebijakan, serta tindakan. Oleh karena itu, pelibatan para pihak dalam berinovasi diharapkan dapat mendorong kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengembangan ekosistem inovasi di Provinsi DKI Jakarta terus dilakukan, salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan menyediakan wadah yang dapat diakses oleh berbagai pihak, yaitu "Jakarta *Future City Hub*".

Gambar 2.6
Jakarta *Future City Hub*



Sumber: Jakarta.go.id, 2024 (diolah)

Jakarta *Future City Hub* merupakan ruang temu bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai *problem owner* dengan berbagai *stakeholders* seperti *startup*, akademisi, serta kolaborator lain sebagai *problem solvers* untuk bersama-sama memecahkan masalah perkotaan. Jakarta *Future City Hub* berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan mendukung ekonomi berkelanjutan di DKI Jakarta. Selain itu, Jakarta *Future City Hub* juga diperuntukan untuk menumbuh kembangkan ekosistem digital di DKI Jakarta, sehingga dalam pelaksanaannya, Jakarta *Future City Hub* menyediakan *one stop shop* untuk *startup*, *founders*, dan inovator dalam konsep *co-working*, *networking*, serta ruang kegiatan dan lokakarya. Jakarta *Future City Hub* ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Berlin dalam proyek bernama *Smart Change* yang didanai Uni Eropa.

Kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Berlin dalam Jakarta *Future City Hub* memberikan peluang bagi para pakar dari Jerman untuk berkunjung ke Indonesia untuk berbagi pengetahuan tentang inovasi yang sedang dibangun, begitu pun sebaliknya. Selain itu, pihak dengan inovasi terbaik juga dapat menunjukkan karyanya di Berlin, Jerman untuk kemudian dapat menjalin berkolaborasi serta mengakses jejaring yang dibutuhkan, baik terkait *talent*, pendanaan, atau lainnya dengan pembuat kebijakan, investor, dan lain-lain. Adapun beberapa program utama Jakarta *Future City Hub* adalah sebagai berikut:

a. ***Smart City* Forum:**
Jakarta *Smart City* untuk pertama kalinya menggelar forum *smart city* yang bertajuk Jakarta *Smart City Forum* 2023. Jakarta *Smart City Forum* 2023 merupakan kegiatan untuk merayakan inovasi serta menguatkan jejaring sinergi Jakarta. Mengundang para pemangku kepentingan dan mitra yang terdiri atas *founders*, *innovators*, *startup*, komunitas, akademisi, serta jaringan kota cerdas di Indonesia dan dunia. Jakarta *Smart City Forum* menjadi wadah selebrasi sinergi dan inovasi kota cerdas Jakarta, serta menjembatani para pemangku kepentingan untuk menciptakan jejaring kota cerdas berskala global.

b. **Data Science Trainee:**
Data Science Trainee (DST) merupakan sebuah program yang diselenggarakan Jakarta *Smart City* untuk melatih talenta ilmuwan data (*data scientist*) di Indonesia. Para *Trainee* yang mengikuti program ini diharapkan mendapat pengalaman untuk mencoba mencari solusi dari masalah perkotaan. Program ini sudah berjalan sejak 2021 dan diselenggarakan sebanyak 2-3 *batch* dalam kurun waktu setahun.

c. **#Hack4ID Gerakan Nasional 1000 Startup Digital x *Jakarta Smart City***
#Hack4ID merupakan kegiatan sinergi Jakarta *Smart City* dengan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital berbentuk *Hackathon* yang bertujuan untuk membantu peserta menciptakan ide solusi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selama 2 (dua) hari peserta akan mengikuti *hackathon* dengan menggunakan metode *design sprint*. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali semasa tahun 2023, diikuti 88 peserta yang mengangkat tema tentang *Smart City* dan JAKI. Kegiatan ini menghasilkan banyak inovasi yang dapat dikembangkan oleh Jakarta *Smart City* maupun para inovator.

d. **Kompetisi *Student Science Research*:**
Kompetisi *Student Science Research* merupakan sebuah rangkaian seleksi yang bertujuan untuk mengasah dan menguji keterampilan siswa SMA/SMK/Sederajat di Jakarta dalam bidang data dan *critical thinking*. Kompetisi ini berlangsung sejak 16 Oktober 2023 hingga 6 November 2023. Rangkaian seleksi meliputi pembekalan materi untuk para siswa, pengerjaan *use-case* (penelitian) dalam upaya menyelesaikan permasalahan di Jakarta yang berbasis data.

e. **Aktivasi Hub:**
Tidak hanya itu, *Future City Hub* juga digunakan untuk aneka kegiatan yang bertujuan memaksimalkan pemanfaatan hub, seperti :

(a) Kelas Bersama Pakar (*JSC2Lab Sharing*), yang merupakan satu program yang diinisiasi oleh Jakarta *Smart City* dalam upaya mempertemukan praktisi, pakar atau ahli dalam bidang tertentu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tertentu.

(b) *Talkshow* terkait isu Jakarta Terkini (*JSC Talks*), yang merupakan sebuah ruang diskusi dan lokakarya yang membahas berbagai layanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menerapkan konsep *Smart City*. *JSC Talks* juga membahas seputar data, kota, teknologi, riset dan konsep kota cerdas Jakarta.

(c) *JSC Community*, merupakan *talkshow* khusus yang dikemas oleh Jakarta *Smart City* untuk melibatkan komunitas sebagai *Co-Creator* untuk tampil bersama dalam bentuk *sharing* dan diskusi terkait isu *smart city*, program prioritas Pemprov DKI Jakarta atau isu Jakarta terkini.

Adapun selanjutnya merupakan penjabaran untuk beberapa inovasi yang menjadi unggulan Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025.

2.4.1 Jakarta *Innovation Day*

Jakarta *Innovation Days* (JID) merupakan kegiatan inovasi tahunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pertama kali diadakan pada tahun 2022. JID bertujuan untuk menyediakan wadah bagi unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat untuk memperkenalkan dan berdiskusi terkait karya inovasi yang telah dihasilkan, sehingga penyelenggaraan JID diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang ekosistem inovasi di Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 2.7
Logo Jakarta Innovation Days Tahun 2023



Sumber: Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, 2024

JID pada 2 (dua) tahun terakhir diadakan di Balai Kota DKI Jakarta. Pada tahun 2022 JD mengangkat tema "Bersama Berinovasi" sedangkan pada tahun 2023 mengangkat tema *"Urban Innovation for Sustainability Jakarta"*. Jakarta *Innovation Days* merupakan pameran yang berisikan berbagai inovasi yang dikembangkan melalui kolaborasi *pentahelix* antara pemerintah, NGO, mitra pembangunan, akademisi, dan komunitas di DKI Jakarta. Jakarta *Innovation Days* lahir dari kesadaran bahwa inovasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, dan pemerintah dalam hal ini memfilisi peran untuk memadahi semua demi manfaat yang lebih besar. Oleh karena itu, melalui JID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan wadah pertemuan kepada para inovator untuk berkreasi, berkolaborasi memperkenalkan gagasan dan karyanya kepada masyarakat, serta membuka wawasan dan kesadaran masyarakat dalam menumbuhkembangkan budaya inovatif di kehidupan sehari-hari.

Tujuan utama dari inovasi ini adalah untuk memperkenalkan produk atau layanan baru kepada masyarakat dengan cara yang kreatif dan menarik perhatian, sehingga produk atau layanan tersebut dikenal dan mendapatkan perhatian yang lebih luas. Selain itu, dengan menghadirkan inovasi secara langsung melalui *event* ini, pemerintah dan *stakeholders* terkait bertujuan untuk memperlihatkan kelebihan dan keunggulan produk atau layanan mereka. Dengan demikian, mereka berharap dapat membangun kepercayaan dan keyakinan publik terhadap produk atau layanan baru yang ditawarkan. *Event* ini juga bertujuan untuk memamerkan inovasi kepada investor atau mitra potensial, sehingga pemerintah dan *stakeholders* terkait berharap dapat membuktikan nilai dan potensi inovasi

mereka sehingga dapat memperoleh dukungan atau investasi yang lebih mudah. Lebih jauh lagi, event ini diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan atau implementasi kebijakan publik.

Target peserta yang berpartisipasi dalam JID mencakup lima unsur dari model kolaborasi *pentahelix*. Kegiatan ini juga turut mengundang tamu-tamu dari regional Asia Tenggara yaitu perwakilan pemerintah dari ibukota negara-negara ASEAN serta *Sister City* Jakarta. Hal ini dilakukan dalam rangka memperluas jejaring dan sinergi khususnya dalam berinovasi, sehingga manfaat yang dihasilkan pun lebih besar. peserta dapat memperoleh pertukaran jejaring dan peluang kolaborasi, pertukaran wawasan pengalaman dan eksposur terhadap produk inovasi. Berikut ini beberapa rangkaian kegiatan pada JID, antara lain:

a. Jakarta *Innovation Award* (JIA), merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan apresiasi kepada para inovator pada beberapa kategori yaitu OPD, BUMD, Masyarakat dan SMA/SMK terkait inovasi yang sudah dibangun untuk Jakarta.
b. Pameran Inovasi, merupakan pameran karya inovasi oleh berbagai pemangku kepentingan (OPD, BUMD, swasta, *Non-Governmental Organization* (NGO), startup, akademisi, SMA/SMK) yang telah dikurasi sesuai dengan tema JID.
c. Bincang Inovasi, merupakan diskusi panel terkait inovasi dalam beberapa isu sektoral sesuai dengan tema JID.
d. Temu Inovasi, merupakan wadah bagi para inovator untuk berdiskusi dan mendapatkan peluang kerjasama dengan berbagai pihak.
e. Diskusi Inovasi, merupakan diskusi inovasi antar para Kepala Bappeda se-Indonesia.
f. Jelajah Jakarta, merupakan peserta dapat melihat secara langsung proses dan hasil pembangunan DKI Jakarta yang berkelanjutan.
g. *Innovation Matchmaking*, merupakan kegiatan dimana para *startup*/inovator dapat berdiskusi langsung dengan para pemangku kepentingan atau pelaku industri untuk dapat menjelaskan ide solusinya untuk Jakarta dan rencana kolaborasi yang ditawarkan.

2.4.2 Proyek 492

Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di seluruh dunia. Jakarta termasuk salah satu kota dengan tingkat risiko banjir tinggi, hal ini dikarenakan kondisi alam Jakarta yang berada di daerah cekungan, serta dialiri 13 (tiga belas) sungai membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terus aktif beradaptasi dan melakukan mitigasi dalam menghadapi ancaman banjir. Sebagai upaya mengendalikan banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta memiliki Proyek 942. Proyek tersebut merupakan salah satu prinsip pengendalian banjir dengan melakukan kegiatan pembangunan polder, waduk, kali dan drainase vertikal. Proyek 942 sebagai berikut:

a. Pembangunan dan rehabilitasi 9 (sembilan) Polder, dengan tujuan mengelola sistem tata air terintegrasi untuk melindungi suatu kawasan banjir.
b. Pembangunan 4 (empat) Waduk, dengan tujuan untuk mengurangi beban saluran/sungai sehingga meminimalisir genangan.
c. Revitalisasi 2 (dua) Kali, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas kali

Proyek 942 merupakan proyek padat karya, hal ini dikarenakan pengerjaannya turut menggabungkan konsep pengendalian banjir: konservasi air melalui konsep biru (*blue*) dan hijau (*green*); perbaikan ekologi; serta estetika kota. Proyek ini adalah pembangunan baru sekaligus peningkatan kapasitas infrastruktur yang sudah ada. Pembangunan polder dilakukan untuk memangani banjir di daerah yang tidak dapat mengalirkan air secara gravitasi. Pembangunan waduk atau embung dilakukan untuk mereduksi debit puncak banjir pada sistem aliran kali. Sementara, revitalisasi kali dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sekaligus menata bantaran kali.

Berikut merupakan rincian pembangunan 942 *Project*:

a. Pembangunan Polder:
   (1) Polder Kelapa Gading (Berik & Artha Gading);
   (2) Polder Pulomas;
   (3) Sub-Polder Marinda (JGC-*Metland*);
   (4) Polder Muara Angke;
   (5) Polder Teluk Gong;
   (6) Polder Mangga Dua;
   (7) Polder Green Garden;
   (8) Polder Kamal;
   (9) Sub-Polder Pompa Tipala-Adhyaksa.

b. Pembangunaa waduk:
   (1) Waduk Pondok Ranggon;
   (2) Embung Wirajasa atau Pilar Jati;
   (3) Waduk Brigif;
   (4) Waduk Lebak Bulus.

c. Pembangunan sungai/kali:
   (1) Peningkatan kapasitas sungai/kali besar dan sodetan kanal Museum Bahari;
   (2) Peningkatan kapasitas kali/sungai Ciliwung Hilir Kawasan Pasar Baru.

Gambar 2.8
Proyek 492 (Waduk Brigif dan Polder Kelapa Gading)



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2024

2.4.3 Gerai Memulai Usaha (*Starting Business Corner*)

Program inovasi "Gerai Memulai Usaha" (*Starting Business Corner*) yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta adalah suatu tanggapan terhadap kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses perizinan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Program ini membawa manfaat yang substansial dengan peningkatan aksesibilitas, pemangkasan birokrasi, dan penyediaan informasi yang jelas. Gerai Memulai Usaha juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Provinsi DKI Jakarta. Dengan menyediakan layanan yang efisien dan mendukung, program ini ada sebagai inisiatif yang berpotensi meningkatkan kewirausahaan, memberikan kesempatan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan sektor usaha secara berkelanjutan dalam kerangka formal yang mendukung pengembangan ekonomi di tingkat lokal.

Kemudahan memulai usaha merupakan bagian dari kemudahan birokrasi untuk mendukung transformasi kelembagaan yang adaptif dan akuntabel. Gerai Memulai Usaha hadir untuk meningkatkan kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Gerai Memulai Usaha memiliki pelayanan berupa peta perizinan dan investasi, pelayanan Sistem *Online Single Submission* (OSS), sertifikasi produksi pangan olahan industri rumah tangga, serta pelayanan sertifikasi halal. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kondusifitas iklim investasi melalui pengembangan pelayanan

konsultasi dan pendampingan perizinan berusaha serta Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil, serta mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.9
Inovasi Gerai Memulai Usaha



Sumber: Diskominfotik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2024

Inovasi ini memberikan wadah bagi pelaku usaha untuk berkonsultasi, mengurus pelayanan perizinan berusaha hingga mendapatkan fasilitasi penanganan persoalan kegiatan usaha dengan pelaku kepentingan yang berwenang di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai sebuah program inovasi yang berjalan secara berkelanjutan, penyelenggaraan inovasi terus bertransformasi mengikuti kebutuhan usaha di Provinsi DKI Jakarta. Guna mendekatkan jangkauan layanan di tengah pelaku usaha, DPMPTSP menyelenggarakan Gerai Memulai Usaha di sejumlah kantor pelayanan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang membantu dan mengawal proses permohonan perizinan usaha, mulai dari tahap pengajuan hingga penerbitan izin. Inovasi ini juga memastikan pelaku usaha memiliki legalitas yang diperlukan dan mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Tujuan dari inovasi Gerai Memulai Usaha di Provinsi DKI Jakarta adalah untuk mendorong dan mendukung masyarakat dalam memulai usaha serta meningkatkan iklim investasi di wilayah tersebut. Beberapa tujuan utama dari program ini adalah:

a. Mendorong Kewirausahaan: Untuk mendorong semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat, dengan menyediakan akses yang mudah dan pelayanan yang baik, program ini memberikan dorongan dan dukungan kepada individu-individu yang ingin memulai usaha mereka sendiri.

b. Mempercepat Proses Perizinan: Salah satu tujuan utama dari program ini adalah mempercepat proses perizinan untuk mendirikan usaha. Dengan menghadirkan inovasi yang terintegrasi, pemohon perizinan dapat mengurus berbagai persyaratan dan prosedur perizinan secara efisien dan cepat.

c. Memudahkan Akses Informasi: Program ini juga bertujuan untuk menyediakan informasi yang jelas mengenai proses perizinan, persyaratan, dan langkah-langkah yang harus diambil dalam memulai usaha. Hal ini membantu para calon pengusaha untuk memahami persyaratan dan tahapan yang harus mereka ikuti.

d. Memberikan Konsultasi dan Pendampingan: Program ini juga berfokus pada pemberian konsultasi dan pendampingan kepada calon pengusaha dengan cara mendapatkan bantuan teknis, saran, dan arahan dalam mengembangkan rencana bisnis mereka, memahami pasar, serta memperoleh informasi terkait aspek hukum dan perpajakan.

e. Meningkatkan Keberlanjutan Usaha: Salah satu tujuan penting dari program ini adalah untuk meningkatkan keberlanjutan usaha yang baru didirikan melalui bimbingan dan pendampingan. Program ini berupaya memastikan bahwa pengusaha baru memiliki pemahaman yang cukup dalam menjalankan usaha mereka, termasuk dalam hal manajemen, pemasaran, dan keuangan.

f. Peningkatan Investasi: Program ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Provinsi DKI Jakarta dengan menyediakan layanan yang efisien dan

mendukung bagi para pengusaha. Melalui Program ini diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sasaran dari Inovasi Gesi Memulai Usaha adalah masyarakat yang memulai dan menjalankan usaha, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta.

2.4.4 Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA)

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2022, menyiapkan wadah pengintegrasian Data Keluarga Satu Pintu dan sinkronisasi pelayanan kesejahteraan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga, atau yang disingkat PUSPA yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) bekerja sama dengan TP PKK Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan keluarga berketahanan, bahagia lahir dan batin. Kegiatan PUSPA berlokasi di Gedung Dinas PPAPP, Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 64 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Hanwha Life Indonesia dalam penyediaan sarana dan prasarana fisik di Gedung DPPAPP lantai 8. Mengingat layanan PUSPA antara lain dalam bentuk online maka dukungan website disediakan oleh Yayasan Save The Children, Sedangkan pengembangan dan pemeliharaan website dilakukan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 2.10
Inovasi PUSPA



Sumber: pulpa.jakarta.go.id, 2024

Layanan virtual PUSPA terus berkembang sejak diresmikan pada bulan Juli 2022. Bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu Pusat Informasi Keluarga, Pusat Konsultasi Keluarga, Tim Pendamping Keluarga, Jahpreneur, Putaran (Pusat Pembelajaran Perempuan), Kampanye Edukasi, Pusat Pelatihan Keluarga, Pusat Kegiatan Keluarga, Pusat Rujukan Keluarga, Sahabat Peduli dan Lapor Tindakan Kekerasan. Layanan puspa bersifat non diskriminatif dengan dilengkapi juru bahasa isyarat. PUSPA diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi antara Pemerintah, dunia usaha, civitas akademika, media, dan masyarakat, dengan memanfaatkan data keluarga satu pintu, yang dapat memberikan informasi lengkap dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di DKI Jakarta. PUSPA juga bermitra dengan berbagai stakeholders, yaitu Organisasi Perempuan, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/NGO dan Professional. Berikut beberapa manfaat yang diperoleh dari inovasi PUSPA, antara lain:

a. Masyarakat mendapatkan edukasi dan informasi tentang pengelolaan keluarga
b. Memberikan pemecahan masalah yang tepat secara efektif dan efisien pada masyarakat
c. Masyarakat memiliki literasi digital
d. Masyarakat sebagai bagian dari co-creator, dapat terlibat aktif dalam pengembangan inovasi PUSPA
e. Masyarakat dapat mengakses layanan secara gratis
f. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2.4.5 Aplikasi *Mobile* Jakarta Satu

Dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta maka dibuatlah sistem integrasi peta dan data melalui program Jakarta Satu. Program Jakarta Satu akan menjadi salah satu alat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 (generasi ke-empat) karena memiliki basis data yang berintegritas tinggi dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (*Decision Support System*).

Gambar 2.11
Peta Pengendalian Wilayah Skala RT



Sumber: jakartasatu.go.id, 2024

Situs Jakarta Satu ini merupakan sarana komunikasi dan visualisasi peta dan data dari program Jakarta Satu baik untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun untuk masyarakat. Pada tampilan beranda situs Jakarta Satu terdapat banyak sekali informasi mengenai Data Spasial Provinsi DKI Jakarta yang dapat dilihat dengan mudah seperti cara mengetahui Peta Rencana Kota, Peta Informasi Banjir, Peta Batas Administrasi Indikatif, Simpul Jaringan Spasial Pemerintah, Peta Tematik, Peta Batas Wilayah Kecamatan atau Kelurahan, Portal Media, Landasan Hukum Jakarta Satu hingga Informasi Kontak Jakarta Satu. Simpul Jaringan Spasial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada aplikasi mobile Jakarta Satu, antara lain :

a. Badan Pertanahan Nasional
b. Badan Pendapatan Daerah
c. Badan Pengelolaan Aset Daerah
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
f. Dinas Sosial
g. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
h. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
i. Dinas Pemuda dan Olahraga
j. Dinas Sumber Daya Air
k. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
l. Dinas Pendidikan
m. Dinas Lingkungan Hidup
n. Dinas Kesehatan
o. Dinas Bina Marga
p. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
q. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

r. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
s. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
t. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

Gambar 2.12
Situs Jakarta Satu



Sumber: jakartasatu.go.id, 2024

Menu beranda situs Jakarta Satu terdapat Galeri Peta Tematik Provinsi DKI Jakarta. Peta tersebut berbasis aplikasi *ArcGIS Web Application*. Daftar peta yang tersedia di dalam situs Jakarta Satu melalui Galeri Peta Tematik Provinsi DKI Jakarta seperti sebagai berikut:

a. Peta Persebaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
b. Peta Ruang Terbuka Hijau (RTH)
c. Peta 3D Bangunan
d. Peta Persebaran Sekolah
e. Peta Histori Banjir pada bulan Januari 2020.
f. Peta Lokasi *Wifi* di Jakarta
g. Peta Penurunan Muka Tanah Provinsi DKI Jakarta
h. Peta Rencana Induk Transportasi (RIT) Jakarta
i. Portal Kumuh Terpadu Berbasis Spasial

Sebagai sistem data berbasis geospasial di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Satu telah meraih beberapa penghargaan sebagai berikut:

a. Bhumandala Kanaka *Award* Tahun 2018. Merupakan penghargaan tingkat Provinsi se-Indonesia dari Badan Informasi Geospasial. Penghargaan diarahkan kepada DKI Jakarta karena telah berhasil membangun simpul jaringan dengan baik dan aktif, serta mengikuti sistem referensi geospasial nasional.
b. *Geo Innovation Award* Tahun 2019. Merupakan penghargaan untuk mendukung industri 4.0 Geospasial atas inovasi dalam implementasi GIS (*Geographic Information System*) untuk mendukung kebijakan Satu Peta Indonesia, yang diselenggarakan oleh Esri Indonesia.
c. Bhumandala Kanaka *Award* Tahun 2020. Merupakan penghargaan terhadap upaya membangun simpul jaringan informasi geospasial kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dinilai terbaik dalam upayanya memperslapkan diri dan membangun simpul jaringan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih 2 (dua) penghargaan yaitu Bhumandala Kanaka Simpul Terbaik dan Bhumandala Kanaka Geoportal terbaik kategori Provinsi.

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kerangka ekonomi dan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas kondisi serta proyeksi perekonomian global dan nasional, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, serta alternatif pembiayaan pembangunan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Di tengah dinamika perekonomian global yang berubah cepat dengan tingginya risiko dan ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan tetap tumbuh positif di tahun 2024. Masih solidnya proyeksi ekonomi dunia bersumber dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan akan tetap tumbuh kuat dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa yang diperkirakan juga lebih tinggi. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi dengan laju yang berbeda antarnegara, dimana terjadi perlambatan ekonomi seperti antara lain di Tiongkok, India, dan Jepang. Kuatnya ekonomi AS terutama ditopang oleh perbaikan permintaan domestik, termasuk kebijakan fiskal akomodatif dan juga kenaikan ekspor. Namun, inflasi AS masih tinggi, sehingga ketidakpastian kemungkinan penurunan suku bunga (*Fed Funds Rate*) akan terus berlanjut. Keputusan The Fed pada pertemuan ke-5 pada Maret 2024 adalah mempertahankan suku bunga tetap pada kisaran 5,25-5,50 persen. The Fed menambahkan bahwa mereka akan mulai mengambil keputusan untuk menurunkan suku bunga apabila inflasi turun menjadi 2 persen.

Selain suku bunga, tensi geopolitik juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Ketegangan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, menimbulkan dampak materil terhadap tingginya harga energi serta pangan global dan menyebabkan terganggunya rantai pasokan yang berdampak pada kenaikan inflasi global. Ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok juga mempengaruhi penurunan ekspor-impor kedua negara dan volume perdagangan dunia. Konflik Israel-Palestina menambah ketegangan geopolitik, memberi dampak signifikan di Timur Tengah dan dunia. Sementara itu, tahun 2024 juga menjadi tahun politik bagi banyak negara di dunia. Lebih dari 50 negara menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan regional. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian pasar keuangan global karena investor cenderung akan lebih berhati-hati.

Di sisi lain, terdapat beberapa tantangan global seperti dampak perubahan iklim, pemuaan populasi *aging population*, serta digitalisasi yang turut menentukan dinamika ekonomi global. Perubahan iklim menjadi faktor penghambat proses pemulihan ekonomi global. Cuaca ekstrem dingin di Eropa pada awal tahun memperburuk dampak terhatasnya pasokan energi dan pangan akibat perang Rusia-Ukraina. Sementara itu, kawasan Asia dilanda kekeringan akibat El Nino, sehingga mengharuskan otoritas memastikan pasokan dan ketahanan pangan untuk mengatasi dampaknya.

Struktur demografi di banyak negara maju yang sebagian besar usia tua lian memberikan beban pada anggaran fiskal, sementara kenaikan tabungan masyarakat makin terbatas. Sementara negara berkembang yang masih menikmati bonus demografi belum tentu dapat memanfaatkannya karena keterbatasan lapangan kerja maupun kemampuan teknis bekerja. Berbagai tantangan tersebut menyebabkan proses pemulihan ekonomi global melambat, disertai berlanjutnya tekanan inflasi karena harga energi dan pangan dunia, serta ketatnya pasar tenaga kerja di sejumlah negara maju.

Sementara itu, kecepatan digitalisasi di satu sisi memberikan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti melalui digitalisasi UMKM, perbankan digital, dan *financial technology* (FinTech), kerja sama pembayaran antarnegara, teknologi *blockchain* dan perdagangan internasional hingga penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam berbagai aktivitas ekonomi-keuangan. Namun di sisi lain, akselerasi digitalisasi juga menimbulkan permasalahan dengan maraknya perdagangan aset kripto, penggunaan AI dalam perdagangan pasar keuangan, hingga makin tingginya serangan siber. Kinerja ekonomi global pada tahun 2023 diwarnai dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi global dan disertai divergensi pertumbuhan antar negara yang semakin melebar (Tabel 3.1). Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 tumbuh sebesar 3,2 persen (yoy), melambat dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,5 persen (yoy). Pada tahun 2024 dan tahun 2025, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan tetap stabil sebesar 3,2 persen.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Global

Pertumbuhan Ekonomi (persen, yoy)	2022	2023	Proyeksi	
			2024	2025
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
Dunia	**3,5**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
Negara Maju	**2,6**	**1,6**	**1,7**	**1,8**
Amerika Serikat	1,9	2,5	2,7	1,9
Kawasan Euro	3,4	0,4	0,8	1,5
Jepang	1,0	1,9	0,9	1,0
Negara Berkembang	**4,1**	**4,3**	**4,2**	**4,2**
Thailand	3,0	5,2	4,6	4,1
India	7,2	7,8	6,8	6,5
ASEAN-5	5,5	4,2	4,7	4,4
Amerika Latin	4,2	2,3	2,0	2,5
Negara Berkembang Eropa	1,2	3,2	3,1	2,8
Timur Tengah dan Asia Tengah	5,5	2,0	2,8	4,2

Sumber: IMF, World Economic Outlook (WEO), April 2024

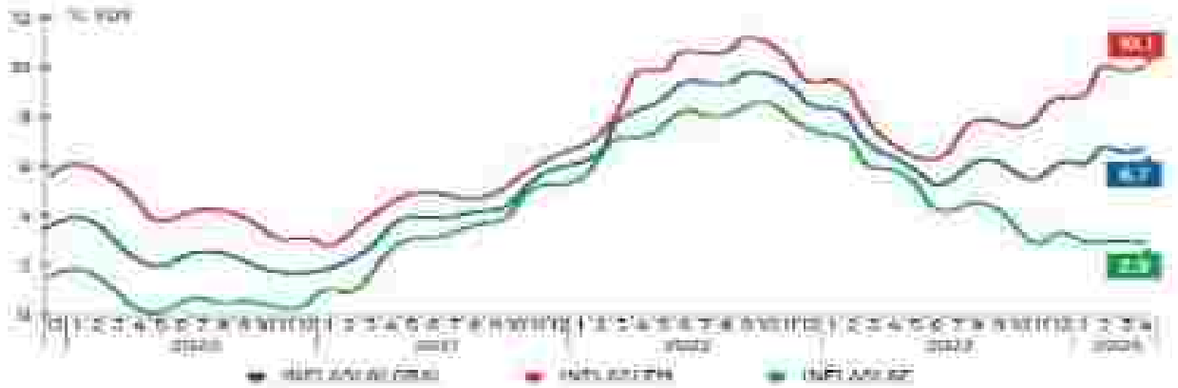
Ekonomi negara maju melambat secara signifikan dari 2,6 persen pada tahun 2022 menjadi 1,6 persen pada tahun 2023; namun diproyeksikan meningkat menjadi 1,7 persen pada tahun 2024 dan 1,8 persen pada tahun 2025. Di negara maju, pertumbuhan ekonomi didorong oleh AS yang tumbuh sebesar 2,5 persen pada tahun 2023, kemudian diproyeksikan meningkat menjadi 2,7 persen pada tahun 2024 dan diperkirakan melambat pada tahun 2025 sebesar 1,9 persen. Pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang meningkat pada tahun 2023 sebesar 4,3 persen dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 4,1 persen. Namun pada tahun 2024 dan 2025, pertumbuhan diperkirakan melambat sebesar 4,2 persen. Pertumbuhan ekonomi Thailand diperkirakan melambat dari 5,2 persen pada 2023 menjadi 4,6 persen pada tahun 2024 dan 4,1 persen pada tahun 2025, dipengaruhi oleh pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti. Di antara negara Asia, ASEAN-5 diproyeksikan tumbuh sebesar 4,7 persen pada tahun 2024 dan 4,4 persen pada tahun 2025. Di samping tetap kuatnya permintaan domestik, pertumbuhan ASEAN-5 juga didukung oleh kebijakan perdagangan dan investasi yang tetap terbuka di tengah fragmentasi geopolitik.

Gejolak geopolitik dan ekonomi akibat ketegangan Rusia-Ukraina mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk meninjau ulang strategi kebijakan ekonomi untuk program pemulihan ekonomi. Situasi ini berkaitan dengan peran krusial Rusia sebagai salah satu pemasok energi terbesar di dunia, dengan pasokan gas alam mencapai 16 persen dan minyak 11 persen. Sementara itu, Ukraina menduduki posisi sebagai pemasok gandum terbesar bagi beberapa negara. Besarnya peran kedua negara tersebut secara langsung mempengaruhi lonjakan harga energi dan pangan secara global, yang selanjutnya memicu inflasi di beberapa negara.

Inflasi, sebagaimana diketahui, sampai dengan saat ini lebih tinggi jika dibandingkan beberapa dekade sebelumnya sebagai dampak dari kebijakan moneter yang ketat dan cepat. Hal ini mengakibatkan kesehatan masa depan perekonomian dunia tergantung dari sukses atau tidaknya kebijakan moneter dalam merespon tekanan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.1, tekanan inflasi di beberapa negara masih cukup tinggi walaupun mulai menunjukan tren penurunan. Inflasi dunia turun menjadi sebesar 6,7 persen pada April 2024 dari level tertinggi 9,7 persen pada triwulan II 2022. Pada negara maju, inflasi April 2024 sebesar 2,9 persen, turun dibandingkan angka tertinggi tahun 2022 yang mencapai 8,4 persen. Sementara inflasi di negara berkembang masih

cukup tinggi mencapai 10,1 persen, perlahan menurun dibanding tahun 2022 dengan inflasi tertinggi mencapai 11 persen. Tingginya tingkat inflasi didorong oleh peningkatan permintaan global sebagai efek dari kebijakan sebelumnya, terhambatnya rantai pasok, serta berkurangnya cadangan. Selain itu, inflasi di beberapa negara juga dipengaruhi oleh kondisi yang ketat di pasar tenaga kerja yang berdampak pada kenaikan upah dan tingginya harga produksi, serta terdepresiasinya nilai tukar mata uang domestik terhadap Dollar AS.

Grafik 3.1
Inflasi Global



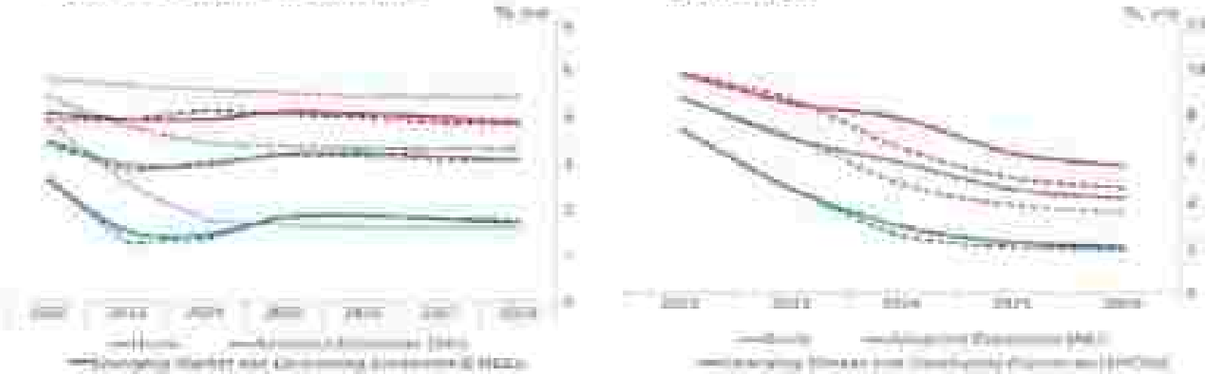
Sumber: Bloomberg dan IMF, dalam Bank Indonesia "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mei 2024", (2024)

Prospek ekonomi global dalam jangka menengah diperkirakan butuh waktu lebih lama untuk mencapai keseimbangan antarnegara dan bahkan belum tentu dapat pulih ke tingkat sebelum pandemi Covid-19. Dalam WEO Oktober 2023, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2028 hanya mencapai 3,1 persen atau lebih rendah dari proyeksi sebesar 3,6 persen sebelum Covid-19 tahun 2020, dan dari proyeksi 4,9 persen sebelum krisis keuangan global tahun 2008 (Grafik 3.2A). Sekitar 80 persen penurunan pertumbuhan ditaksir disebabkan oleh penurunan pendapatan per kapita dan pertumbuhan produktivitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja.

Grafik 3.2
Prospek Ekonomi Global Jangka Menengah

A. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global Jangka Menengah

B. Prospek Inflasi Global Jangka Menengah



Sumber: IMF, World Economic Outlook (WEO) Oktober 2023, dalam Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia, 2023
Data publikasi = WEO April 2019, Titik-titik = WEO Januari 2022

Di negara maju, sekitar sepertiga dari penurunan pendapatan juga didorong oleh perlambatan partisipasi tenaga kerja yang disebabkan oleh penuaan populasi. Di negara berkembang, penurunan pendapatan per kapita menyebabkan lebih lamanya jangka waktu untuk mengejar ketertinggalan kemajuan ekonominya dari negara maju.

Sementara itu, fragmentasi geopolitik dan ekonomi menyebabkan proses penurunan inflasi global diperkirakan berjalan lambat (Grafik 3.2B). Pada tahun 2023, sekitar 72 negara (34 negara maju dan 38 negara berkembang) masih akan mengalami inflasi di atas

sasarannya. Demikian pula pada tahun 2024, inflasi di sekitar 89 persen negara masih akan melebihi sasarannya. Inflasi di sebagian besar negara diperkirakan baru akan kembali stabil ke sasaran pada tahun 2025.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan ketidakpastian ekonomi dan keuangan global makin tinggi seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik. Dalam mengantisipasi hal tersebut, perlu penguatan respons kebijakan serta penguatan kerja sama internasional baik skala multilateral maupun regional untuk memitigasi risiko sedini mungkin dampak rambatannya pada ketahanan perekonomian dan memperkuat pemulihan ekonomi baik global maupun domestik, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Di tengah tingginya ketidakpastian global, kinerja dan prospek ekonomi Indonesia di triwulan I 2024 tetap kuat dan membaik. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dan pemulihan ekonomi terus berlanjut. Tabel 3.2 menunjukkan bahwa kinerja ekonomi domestik pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh sebesar 5,11 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen (yoy). Perbaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024 terus berlanjut terutama didorong oleh permintaan domestik yang baik di konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh kuat, termasuk konsumsi generasi muda, seiring dengan meningkatnya konsumsi di sektor jasa, masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, dan stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Konsumsi Pemerintah juga membaik didorong oleh dampak positif pelaksanaan Pemilu 2024 dan HBKN. Investasi tumbuh lebih tinggi dari perkiraan, ditopang oleh berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berkembangnya properti swasta. Investasi nonbangunan tetap terjaga, meskipun perlu terus didorong untuk mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Namun, kinerja ekspor belum kuat sejalan dengan harga komoditas yang turun dan masih lemahnya permintaan dari mitra dagang utama, seperti Tiongkok.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Pengeluaran

Komponen	2020	2021	2022	2023					2024
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
Konsumsi RT	-2,63	2,01	4,94	4,53	5,22	5,05	4,47	4,82	4,91
Konsumsi LNPRT	-4,21	1,62	5,66	6,16	8,59	6,18	18,11	9,83	24,29
Konsumsi Pemerintah	2,12	6,25	-4,47	3,31	10,47	-3,93	2,81	2,95	19,90
Investasi(PMTOH)	-4,95	3,8	3,87	2,11	4,63	5,77	5,02	4,4	3,79
Ekspor	-6,42	17,59	16,23	11,74	-2,91	-3,91	1,64	1,22	0,60
Impor	-17,6	24,86	15	4,15	-3,23	-6,75	-3,15	-1,65	1,77
PDB	**-2,07**	**3,7**	**5,31**	**5,04**	**5,17**	**4,94**	**5,04**	**5,05**	**5,11**

Sumber: BPS, 2024

Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada pertumbuhan positif seluruh Lapangan Usaha (LU) sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3. Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh kinerja positif dengan pertumbuhan pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin), serta LU Informasi dan Komunikasi (Infokom) seiring dengan meningkatnya mobilitas.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Lapangan Usaha

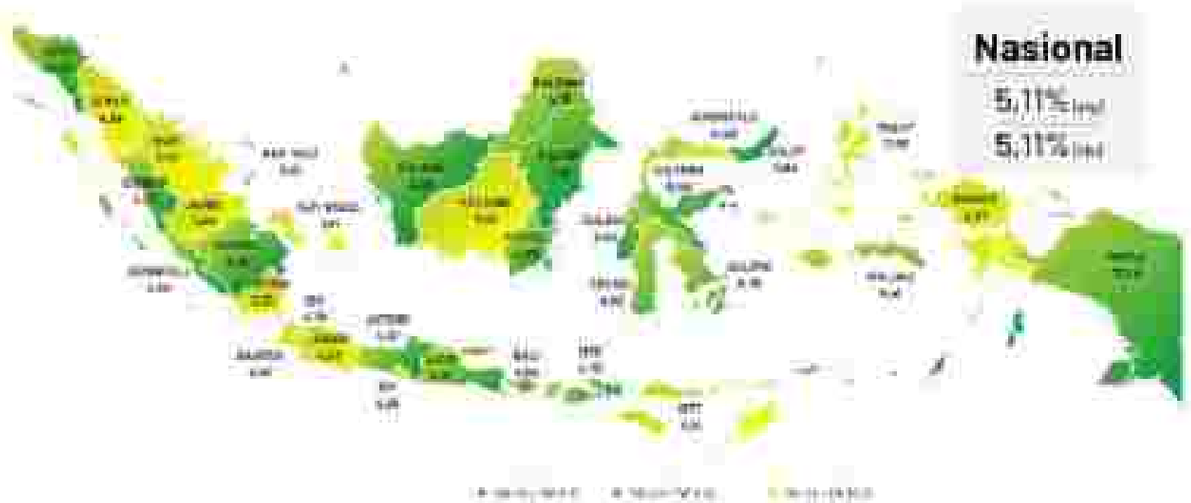
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023					2024
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,77	1,87	2,25	0,44	2,03	1,49	1,12	1,3	-3,54
Pertambangan dan Penggalian	-1,99	-4	4,36	4,92	5,01	5,95	7,46	6,12	9,51
Industri Pengolahan	-2,93	3,39	4,89	4,43	4,88	5,19	4,07	4,64	4,13
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,34	5,88	8,61	2,67	3,15	5,08	8,88	4,93	5,15
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	4,97	3,23	3,69	4,78	4,48	4,56	4,55	4,44
Konstruksi	-3,25	2,81	2,01	0,32	5,23	6,39	7,68	4,93	7,39
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,79	4,63	5,53	4,96	5,29	5,1	4,08	4,83	4,58
Transportasi dan Pergudangan	-15,05	5,24	19,87	15,93	15,28	14,74	10,33	13,96	8,65
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,26	3,88	11,94	11,14	9,91	10,94	7,89	10,01	9,39
Informasi dan Komunikasi	1,61	6,82	7,73	7,11	8,03	8,51	6,74	7,59	8,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	1,85	1,93	4,45	2,86	5,24	8,56	4,77	3,91
Real Estate	2,32	2,78	1,72	0,37	0,96	2,21	2,18	1,43	2,54
Jasa Perusahaan	-5,44	0,73	8,77	6,37	9,89	9,37	7,83	8,24	9,63
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,63	-1,29	2,51	2,1	8,16	-6,24	1,61	1,55	18,68
Jasa Pendidikan	2,61	-1,41	0,57	1,02	3,43	-2,07	2,63	1,78	7,34
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,56	4,52	2,75	4,77	8,28	2,91	3,09	4,66	11,64
Jasa Lainnya	-4,1	8,25	9,47	8,9	11,89	11,14	10,15	10,52	8,92
PDB	**-2,07**	**3,7**	**5,31**	**5,04**	**5,17**	**4,94**	**5,04**	**5,06**	**5,11**

Sumber: BPS, 2024

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024 di hampir seluruh wilayah Indonesia juga tetap baik, didukung oleh permintaan domestik, terutama

konsumsi rumah tangga (Gambar 3.1). Sebagian besar wilayah Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan dan Jawa. Tingginya pertumbuhan ekonomi Sulampua terutama didorong oleh ekspor dan hilirisasi minerba, serta konsumsi swasta yang kuat. Ekonomi wilayah Jawa juga tumbuh kuat didukung oleh konsumsi dan investasi bangunan seiring dengan terus berlanjutnya penyelesaian PSN di tengah tekanan terhadap ekspor manufaktur. Di wilayah Kalimantan, pertumbuhan ekonomi didukung oleh investasi bangunan terkait pembangunan IKN dan konsumsi swasta yang tetap kuat, walaupun terjadi pelemahan ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) akibat penurunan permintaan dari mitra dagang utama, khususnya Tiongkok. Ekonomi wilayah Sumatera juga tumbuh baik karena ditopang konsumsi swasta dan investasi bangunan seiring dengan berlanjutnya PSN yang mampu menahan dampak kinerja ekspor komoditas SDA yang melambat. Sementara itu, wilayah Balinusra juga tetap tumbuh positif terutama bersumber dari konsumsi swasta sejalan dengan kembali pulihnya pariwisata dan investasi di sektor pertambangan. Ke depan, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan terus membaik di sebagian besar wilayah di tengah normalisasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan sejalan dengan normalisasi belanja modal IKN, serta Sulampua karena selesainya realisasi investasi modal pada beberapa proyek hilirisasi nikel.

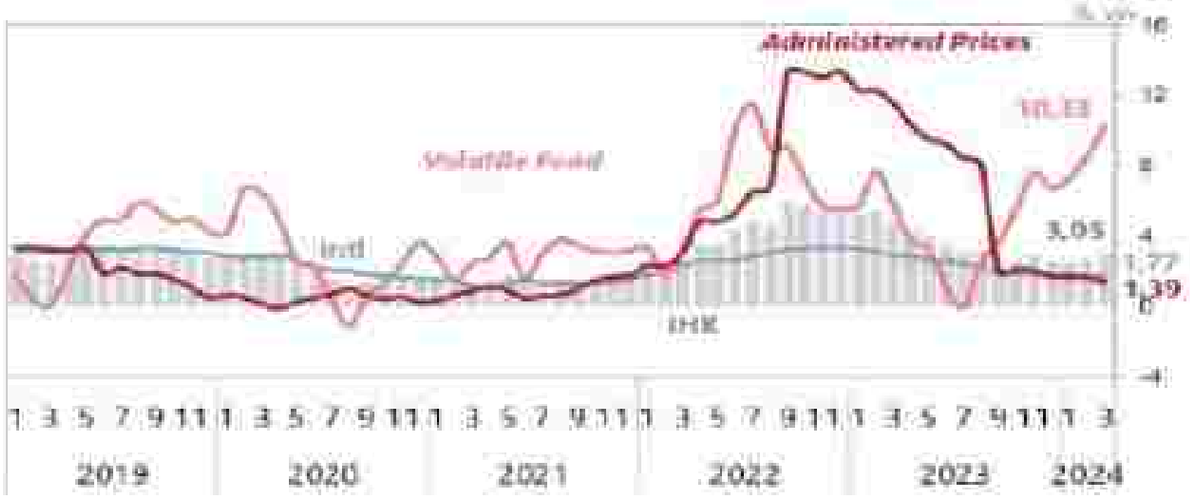
Gambar 3.1
Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan I 2024



Sumber: BPS, diolah Bank Indonesia "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mei 2024", (2024)

Sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi, inflasi nasional menunjukkan tren menurun dan tetap terkendali dalam kisaran sasaran (Grafik 3.4). Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Maret 2024 tercatat sebesar 3,05 persen (yoy), jauh lebih rendah dari inflasi IHK akhir 2022 sebesar 5,51 persen (yoy). Penurunan inflasi dipengaruhi oleh terjaganya berbagai komponen inflasi sebagai hasil nyata konsistensi kebijakan moneter yang *pro-stability*. Inflasi inti terjaga rendah sebesar 1,77 persen (yoy) dipengaruhi oleh *imported inflation* yang rendah, ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, dan kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik. Inflasi *volatile food* juga meningkat menjadi sebesar 10,33 persen (yoy) dari 8,47 persen (yoy) pada bulan sebelumnya, didukung oleh faktor musiman periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam mengendalikan harga pangan, dan pergeseran musim tanam dampak dari El Nino. Inflasi kelompok *administered prices* juga menurun menjadi 1,39 persen (yoy), sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang tetap diarahkan menjadi *shock absorber* dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik.

Grafik 3.3
Inflasi Nasional



Sumber: BPS, dalam Bank Indonesia "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mei 2024", (2024)

Secara spasial, sebagian besar daerah di Indonesia mengalami inflasi pada bulan Mei 2024 (Gambar 3.2). Inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Papua Tengah yang mencapai 6,39 persen (yoy) dan Provinsi Gorontalo sebesar 4,91 persen (yoy). Sedangkan, inflasi terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,25 persen (yoy).

Gambar 3.2
Peta Inflasi Daerah Bulan Mei 2024



Sumber: BPS, dalam Bank Indonesia "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mei 2024", (2024)

Dengan tren perbaikan kinerja perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2023 tercapai sebesar 5,05 persen. Ke depan, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7-5,5 persen (yoy) pada 2024 dan 5,1-5,5 persen (yoy) pada 2025 (Tabel 3.4). Prospek ini dipengaruhi oleh permintaan domestik yang tetap kuat dari konsumsi rumah tangga sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh meningkat dipengaruhi kepercayaan pelaku ekonomi yang tetap optimis terhadap perbaikan kondisi ekonomi ke depan serta dampak positif pengaruh dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak. Inflasi yang diperkirakan tetap terkendali juga diperkirakan akan memberikan dampak positif pada terjaganya daya beli masyarakat. Adapun kinerja investasi juga diperkirakan tumbuh membaik didorong perbaikan prospek bisnis, peningkatan aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlanjut.

Pertumbuhan ekonomi nasional juga diperkirakan mengalami perbaikan pada kinerja ekspor, khususnya pada ekspor jasa. Adanya pelaksanaan berbagai event skala internasional diperkirakan akan mendorong kinerja ekspor jasa pada tahun 2024. Kinerja impor pada tahun 2024 masih akan tumbuh positif ditopang oleh impor barang konsumsi dan bahan baku sejalan dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan perbaikan kinerja ekspor. Impor barang modal juga diperkirakan meningkat, seiring dengan berlanjutnya berbagai PSN.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional

Indikator	2023	Proyeksi	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan ekonomi (persen, yoy)	5,05	4,7 - 5,5	5,1 - 5,5
Inflasi (persen, yoy)	2,61	2,5 ± 1	2,5 ± 1

Sumber: BPS dan Proyeksi Bank Indonesia, Bahan Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Mei 2024

Sejalan dengan perbaikan perekonomian nasional, tingkat inflasi nasional secara keseluruhan pada 2023 tercatat sebesar 2,61 persen dan terkendali dalam target sasaran 3,0 ± 1 persen. Pemerintah perlu terus mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap tetap terkendalinya inflasi, termasuk dampak kenaikan harga energi dan pangan global untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5 ± 1 persen pada 2024 dan 2025 sesuai sasaran inflasi yang ditetapkan.

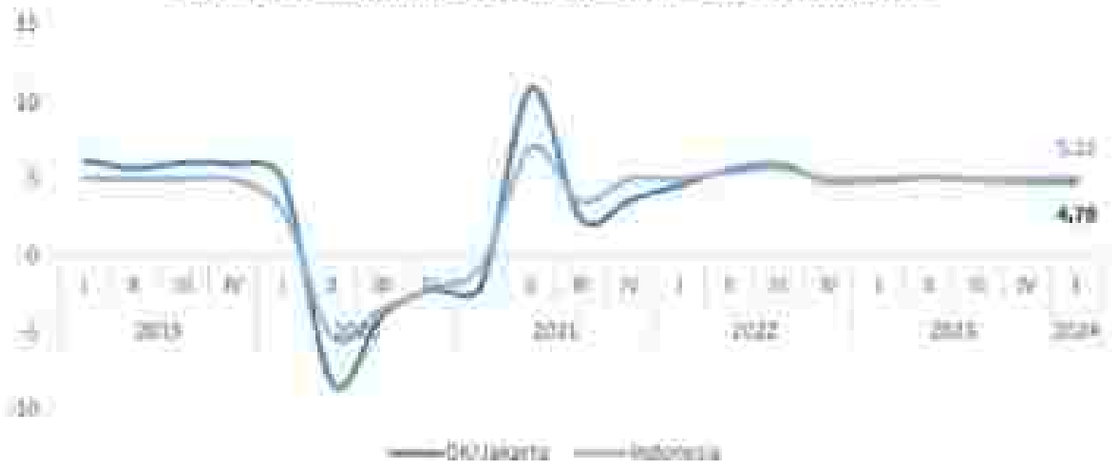
Dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2023, Bank Indonesia menyebutkan bahwa prospek perbaikan ekonomi nasional akan terus berlanjut dengan stabilitas yang tetap terjaga sehingga mendukung kebangkitan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju. Dalam jangka menengah panjang, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus membaik ditopang oleh konsumsi swasta yang meningkat sejalan dengan terjaganya daya beli, dukungan kebijakan fiskal dan moneter, serta makin besarnya peran generasi muda milenial. Investasi akan meningkat seiring dengan peningkatan ekspor dan juga berlanjutnya PSN. Kinerja ekspor juga akan makin meningkat seiring dengan perbaikan prospek ekonomi global dan makin maraknya program hilirisasi di berbagai sektor.

Konsistensi implementasi reformasi struktural, termasuk melalui pembangunan infrastruktur, implementasi UU Cipta Kerja, berbagai program hilirisasi, akselerasi digitalisasi, dan penguatan sumber daya manusia akan mampu memperkuat kapasitas perekonomian sehingga ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi tanpa memberikan tekanan yang signifikan pada stabilitas. Untuk itu, perlu dilakukan perluasan pada penguatan bauran kebijakan nasional sebagai upaya memperkuat stabilitas eksternal dari rambatan global, termasuk dampaknya terhadap pengendalian inflasi domestik, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju Indonesia Maju.

3.1.2 Kondisi, Prospek dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Sejalan dengan nasional, perekonomian DKI Jakarta menunjukkan tren perbaikan pasca mengalami kontraksi akibat pandemi global yang berimbas pada turunnya laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 hingga 2021. Grafik 3.4 menunjukkan bahwa perekonomian nasional dan DKI Jakarta kembali bangkit sejak triwulan IV 2021. Pada triwulan I 2024, perekonomian DKI Jakarta tetap tumbuh kuat sebesar 4,78 persen (yoy), walaupun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,85 persen (yoy). Meskipun tetap tumbuh kuat, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan I 2024 tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan dengan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,11 persen (yoy).

Grafik 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta



Sumber: BPS, diolah Bank Indonesia "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, May 2024", (2024)

Dari sisi pengeluaran, perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2024 terutama ditumbang oleh pertumbuhan positif pada hampir seluruh komponennya, kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Ekspor yang mengalami kontraksi, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Sisi Pengeluaran

Komponen	2020	2021	2022	2023					2024
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Konsumsi Rumah Tangga	-2,23	3,54	5,64	4,18	5,26	5,49	5,23	5,05	5,25
Konsumsi LNPRT	-4,06	6,10	5,25	7,95	9,53	6,27	15,45	9,84	19,70
Konsumsi Pemerintah	14,05	9,77	-9,55	1,70	8,06	-10,87	-5,04	-3,85	30,30
formasi (PMTB)	-6,98	1,05	4,51	1,33	4,29	4,17	5,17	3,89	4,36
Ekspor	-9,70	11,26	12,60	11,59	8,93	5,82	4,46	7,67	3,22
Impor	-10,74	12,45	8,48	7,01	8,19	2,82	3,16	5,25	6,30
PDRB	**2,39**	**3,56**	**5,26**	**4,95**	**5,19**	**4,93**	**4,85**	**4,96**	**4,78**

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Pada triwulan I 2024, konsumsi rumah tangga sebesar 5,25 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,23 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsi RT yang meningkat terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi pada kelompok hotel dan restoran, transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya sejalan dengan berlangsungnya bulan Ramadan dan penyelenggaraan MICE di DKI Jakarta. Selain itu, meningkatnya konsumsi rumah tangga juga ditopang oleh penyaluran THR yang lebih awal.

Dari sisi konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), kinerjanya tercatat sebesar 19,70 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya 15,45 persen (yoy). Tingginya konsumsi LNPRT pada triwulan I 2024 didorong oleh meningkatnya aktivitas partai politik untuk mendukung Pemilu serta meningkatnya aktivitas lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat pada bulan Ramadan. Pertumbuhan yang signifikan juga terjadi dari sisi konsumsi pemerintah, dimana pada triwulan I 2024 pertumbuhan tercatat sebesar 30,30 persen (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 5,04 persen (yoy). Membaiknya konsumsi

pemerintah dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang bersumber dari APBN. Belanja pegawai pada triwulan I 2024 didorong oleh peningkatan gaji ASN dan penyaluran THR yang lebih awal.

Di sisi lain, pertumbuhan investasi atau PMTB DKI Jakarta pada triwulan I 2024 tertahan, menjadi sebesar 4,36 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17 persen (yoy). Perlambatan terutama disebabkan oleh kontraksi pada investasi nonbangunan dipengaruhi perilaku *wait and see* investor pada periode Pemilu. Di sisi lain, investasi bangunan masih tumbuh positif yang terutama didorong oleh masih berlangsungnya pembangunan proyek strategis multitahun Pemerintah, seperti MRT, LRT, kawasan *Transit on Development* (TOD), *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) dan jalan tol.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor masih tertahan dan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekspor pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,23 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya 4,46 persen (yoy). Melambatnya kinerja ekspor terutama dipengaruhi oleh penurunan pada ekspor barang yang dipengaruhi oleh pertambatan ekonomi, tensi geopolitik terutama di jalur distribusi ekspor (Laut Merah), adanya permasalahan kualitas dan keamanan produk ekspor, serta pembatasan ekspor di beberapa negara tujuan ekspor. Berdasarkan komoditasnya, penurunan pada kinerja ekspor barang, utamanya dipengaruhi oleh penurunan ekspor mesin dan peralatan listrik, kendaraan dan bagiannya, serta lemak dan minyak hewan/nabati. Adapun dari sisi ekspor jasa, kinerja ekspor jasa pada triwulan I 2024 juga tumbuh melambat yang tercermin dari menurunnya kedatangan wisata mancanegara ke Jakarta.

Berbeda dengan pertumbuhan ekspor yang melambat, kinerja impor tumbuh meningkat pada triwulan I 2024 sehingga turut menjadi penahan pertumbuhan. Impor pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh 6,30 persen (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 3,16 persen (yoy). Meningkatnya kinerja impor terutama bersumber dari perdagangan antardaerah sehubungan dengan pemenuhan untuk kebutuhan Pemilu dan HKBN Ramadan-Idul Fitri. Selain itu, meningkatnya impor jasa (masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri) sejalan dengan berlangsungnya berbagai *event* di luar negeri juga diperkirakan menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya impor.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), LU Industri Pengolahan serta LU Jasa Keuangan yang termasuk dalam LU Utama Jakarta tumbuh melambat dan menjadi penahan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan I 2024 (Tabel 3.6). Struktur PDRB Jakarta menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku pada triwulan I 2024 masih didominasi oleh lima lapangan usaha, yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Keuangan dan Asuransi, LU Konstruksi, serta LU Informasi dan Komunikasi (Infokom).

Tabel 3.6
Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Sisi Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023					2024
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,49	4,14	2,59	0,15	-10,87	-5,85	1,32	-3,94	9,15
Pertambangan dan Penggalian	-6,43	-4,06	-3,43	-5,16	-33,33	-12,67	-6,63	-12,76	-11,43
Industri Pengolahan	-10,36	11,65	5,88	1,88	1,16	2,13	2,54	1,86	-0,53
Pengadaan Listrik dan Gas	-10,95	-16,50	-2,51	-7,69	-5,29	-5,19	-10,34	-7,29	-13,17

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023					2024
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,68	4,07	0,51	5,56	4,37	3,06	6,65	6,33	5,22
Konstruksi	-5,55	0,09	1,69	0,11	2,36	3,01	4,53	2,50	6,27
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7,04	5,46	7,78	5,79	4,67	3,99	3,78	4,32	5,46
Transportasi dan Pergudangan	-7,65	12,73	7,17	17,43	18,04	13,96	7,76	14,05	6,48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16,21	8,99	9,31	8,27	10,49	11,59	8,40	9,69	9,36
Informasi dan Komunikasi	11,05	4,65	6,95	7,63	8,26	5,42	5,37	7,45	6,38
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,39	0,12	1,22	6,04	0,67	4,69	10,24	5,39	2,02
Real Estate	1,57	1,77	2,04	0,92	1,01	0,68	0,27	0,74	1,31
Jasa Perusahaan	-2,07	+0,21	5,96	6,77	8,19	6,06	5,03	6,49	6,56
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,79	-7,82	2,39	0,22	1,72	1,92	0,02	0,04	14,16
Jasa Pendidikan	2,64	0,81	-0,13	0,33	3,55	+0,79	-0,19	1,30	3,69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,85	8,10	9,28	1,44	6,07	6,59	9,27	5,85	9,09
Jasa Lainnya	-8,08	-1,90	15,27	13,16	14,20	11,82	7,53	11,60	3,45
PDRB	**-2,59**	**3,55**	**5,25**	**4,96**	**5,13**	**4,94**	**4,85**	**4,96**	**4,78**

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024

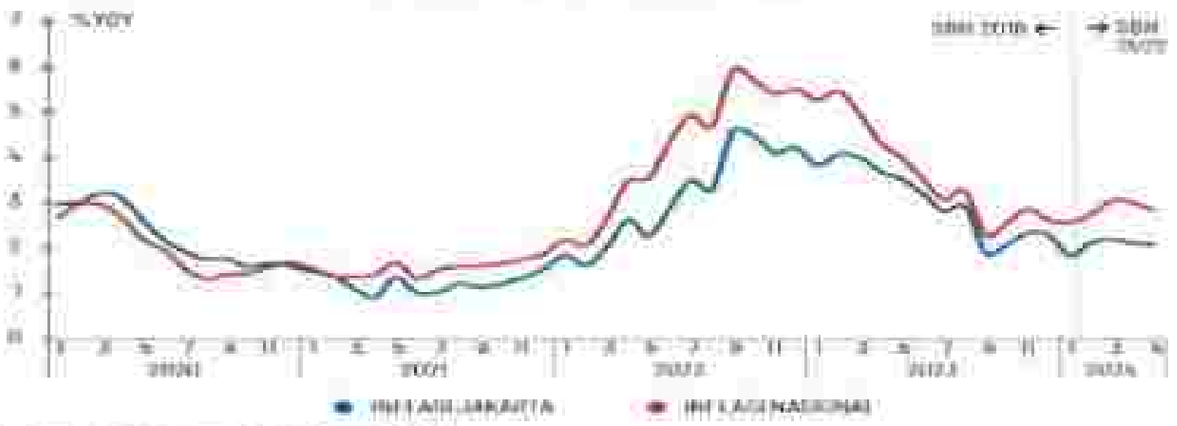
Setelah mengalami perlambatan kinerja pada triwulan IV 203, LU Perdagangan Besar dan Eceran mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,46 persen (yoy) pada triwulan I 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (3,78 persen, yoy). Hal ini sejalan dengan kinerja konsumsi rumah tangga yang meningkat. LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2024 mengalami kontraksi sebesar 0,53 persen (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,54 persen (yoy). Perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan dipengaruhi juga oleh kinerja ekspor yang juga melambat.

Selain itu, LU Jasa Keuangan pada triwulan I 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,02 persen (yoy), lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang cukup tinggi mencapai 10,24 persen (yoy). Perlambatan kinerja LU Jasa Keuangan utamanya disebabkan oleh penurunan kinerja jasa penunjang keuangan, jasa keuangan lainnya, serta asuransi. Sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah di Jakarta yang bersifat multitahun, LU Konstruksi kembali mencatatkan peningkatan kinerja dengan tumbuh 6,27 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 4,53 persen (yoy). Semantara itu pada LU Infokom tercatat tumbuh sebesar 6,38 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,37 persen (yoy). Kembali meningkatnya pertumbuhan LU Infokom selaras dengan peningkatan penggunaan paket data dan internet serta meningkatnya jumlah penonton bioskop yang sejalan pula dengan kinerja konsumsi RT yang meningkat.

Selanjutnya, LU Jasa Perusahaan mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,56 persen (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,03 persen (yoy). Kinerja LU Jasa Perusahaan meningkat seiring dengan marsinnya penyelenggaraan MICE di Jakarta pada triwulan I 2024. Pada triwulan I 2024, LU Akomamin juga mencatatkan pertumbuhan kinerja sebesar 9,56 persen (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,40 persen (yoy). Hal ini sejalan dengan kinerja Konsumsi RT yang juga meningkat pada kelompok hotel dan restoran. Kendati demikian, LU Transportasi dan Pergudangan mengalami perlambatan kinerja sebesar 6,48 persen (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,76 persen (yoy). Penyebab perlambatan ini utamanya berasal dari komponen transportasi barang yang juga sejalan dengan penurunan kinerja ekspor.

Perbaikan kinerja perekonomian DKI Jakarta juga terlihat dari tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) DKI Jakarta. Pada triwulan I 2024, tingkat inflasi DKI Jakarta tercatat sebesar 2,18 persen (yoy), tetap terkendali dalam sasaran target inflasi, lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,28 persen (yoy). Capaian inflasi ini juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 3,05 persen (yoy). Relatif terkendalinya inflasi tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi sebagai hasil sinergi TPID melalui program pengendalian inflasi yang mengacu pada pedoman 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) yang tertuang pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 - 2024. Upaya pengendalian terus dilakukan agar tekanan inflasi tidak mengalami akselerasi lebih lanjut dan sebagai antisipasi dampak tekanan inflasi global.

Grafik 3.5
Inflasi Nasional dan DKI Jakarta



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024

Lebih rendahnya tekanan inflasi DKI Jakarta pada triwulan I 2024 bersumber dari penurunan tekanan inflasi pada beberapa kelompok pengeluaran seperti kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya di tengah kelompok lainnya yang mengalami tekanan kenaikan inflasi. Kelompok dengan andil inflasi tertinggi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; serta kelompok pendidikan.

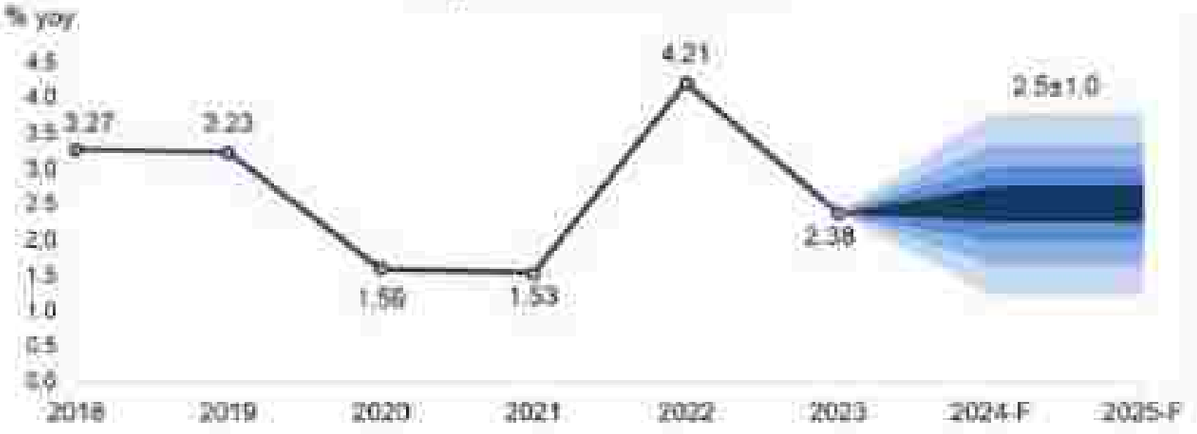
Ke depan, inflasi DKI Jakarta untuk keseluruhan tahun 2024 dan 2025 diperkirakan terkendali dalam rentang sasaran yaitu 2,5 ± 1%. Perkiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang akan lebih kondusif pasca berlangsungnya El Nino pada 2023 dan didukung oleh sinergi, kolaborasi dan koordinasi yang kuat dalam TPID dengan tetap berfokus pada strategi 4K, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Sinergi dan kolaborasi pengendalian inflasi utamanya dilakukan melalui:

a. penyaluran bansos antara lain Program Pangan Bersubsidi berkolaborasi dengan BUMD Pangan;
b. meredam kenaikan tarif transportasi dan layanan publik;

c. pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah komoditas yang masih mengalami tekanan harga khususnya beras dan minyak goreng bekerja sama dengan Bulog dan BUMD pangan; serta

d. memperluas kerja sama antar daerah (KAD) dengan daerah produsen potensial yang surplus serta memperkuat kerja sama dengan TPID Bodetabek yang mempunyai hubungan ekonomi kuat dengan Jakarta. Proyeksi tersebut juga sudah memasukkan profil pergeseran komoditas terkait penggunaan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022.

Grafik 3.6
Proyeksi Inflasi DKI Jakarta



Sumber: BPS dan Proyeksi Bank Indonesia, 2024

Sejalan dengan proyeksi terkendalinya tingkat inflasi di DKI Jakarta, berdasarkan asesmen Bank Indonesia, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan masih akan melanjutkan pertumbuhan yang tinggi pada 2024 (4,8 – 5,6 persen) dan akan semakin terakselerasi pada 2025 (4,9 – 5,7 persen). Perkiraan ini terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang semakin tinggi seiring kuatnya optimisme konsumen dan daya beli yang tetap terjaga. Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi Jakarta pada tahun 2024 oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat sejalan dengan kenaikan penghasilan (UMP dan gaji ASN) serta terkendalinya laju inflasi. Meningkatnya aktivitas MICE dan *event* baik skala nasional maupun internasional di Jakarta juga turut mendorong konsumsi RT tumbuh meningkat. Konsumsi Pemerintah juga diperkirakan tumbuh positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi, sejalan dengan perbaikan postur APBN dan APBD serta kenaikan belanja untuk mendukung Pemilu 2024. Adapun kinerja investasi juga diperkirakan masih akan tumbuh meningkat didorong terutama oleh masuknya investasi untuk berbagai pembangunan proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta yang bersifat multitahun. Di sisi lain, kinerja ekspor diperkirakan masih akan tertahan dipengaruhi terutama oleh dinamika perkembangan ekonomi global pada tahun 2024 dan pembatasan kuota ekspor di beberapa negara.

Dari sisi Lapangan Usaha, perekonomian DKI Jakarta diproyeksikan bertumbuh lebih baik dari tiga sektor utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi. Ketiga sektor tersebut diperkirakan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2024. LU Perdagangan Besar dan Eceran diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga yang didorong oleh kenaikan UMP dan gaji ASN pada tahun 2024. Kondisi ini juga terindikasi dari proyeksi penjualan mobil Gaikindo pada tahun 2024 yang juga diperkirakan lebih baik dibanding tahun lalu. Faktor lainnya yang mendorong kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran yaitu semakin masifnya pelaksanaan MICE dan *event* skala internasional di DKI Jakarta, termasuk MICE dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Kinerja LU Industri Pengolahan pada tahun 2024 juga diperkirakan tumbuh meningkat yang terutama didorong untuk pemenuhan permintaan domestik. Beberapa jenis industri yang diperkirakan akan tumbuh meningkat yaitu industri makan dan minum,

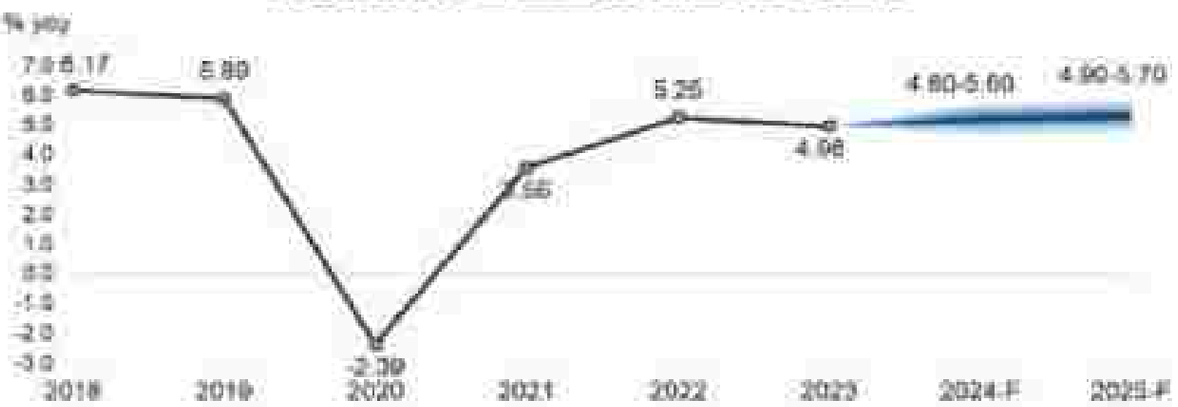
industri tekstil, dan industri kimia. Di sisi lain, kinerja industri pengolahan yang lebih baik diperkirakan akan tertahan sejalan dengan penurunan kinerja industri terutama industri otomotif sejalan dengan penurunan kinerja ekspor akibat adanya permasalahan kualitas dan keamanan serta pembatasan kuota ekspor. LU Konstruksi pada tahun 2024 juga diprakirakan akan tumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yang terutama didorong oleh masih berlanjutnya pembangunan beberapa proyek strategis Pemerintah DKI Jakarta yang bersifat multitahun, yaitu antara lain NCICD, 6 ruas jalan tol dalam kota, MRT, LRT Jakarta, serta kawasan TOD. Selain itu, juga terdapat proyek pembangunan jaringan tol JORR 2 yang ditargetkan selesai pada tahun 2024 dan akan melengkapi struktur jaringan jalan tol di wilayah Jabodetabek.

Sementara itu, LU utama lainnya seperti LU Infokom juga diperkirakan masih mencatatkan pertumbuhan yang positif didorong oleh tingginya produksi film dan permintaan film di bertagai lanal (bioskop dan beberapa aplikasi *mobile streaming*), meningkatnya penggunaan paket data periode Pemilu dan Pilkada serentak, serta meningkatnya preferensi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang terus berlangsung. Adapun, LU Jasa Keuangan dan Asuransi juga diperkirakan masih akan tumbuh positif di tahun 2024 seiring dengan intermediasi perbankan yang diperkirakan masih tetap kuat terutama dipengaruhi oleh masih tingginya penyaluran kredit.

Sektor LU Jasa lainnya seperti LU Akomodasi diperkirakan juga akan tetap tumbuh positif, sejalan dengan berlangsungnya beberapa event berskala nasional dan internasional yang diselenggarakan di Jakarta termasuk MICE dalam rangka mendukung aktivitas Pemilu. Berdasarkan data terkini, terdapat 19 konser musik yang sudah terjadwal dan akan dilaksanakan di DKI Jakarta. Jumlah ini kemungkinan besar akan terus bertambah sampai dengan akhir tahun 2024. Beberapa konser musik khususnya skala internasional yang dilaksanakan di DKI Jakarta, yaitu antara lain *The 38th Golden Disc Awards*, *Jonas Brother Concert*, *Ed Sheeran*, dan *Bruno Mars*. Untuk event olahraga terdapat 9 event yang saat ini sudah terjadwal dilaksanakan di Jakarta, dengan mayoritas berskala internasional, yaitu antara lain *Indonesia Master* 2024 (*Super* 500), *Jakarta International Marathon*, *Indonesia International Open* 2024, *Asian Rifle/Pistol Championship* 2024, dan UPC 2024. Sama halnya dengan konser musik dan event olahraga, kegiatan MICE di DKI Jakarta yang sudah sampai dengan saat ini berjumlah masing-masing sebesar 299 event untuk pameran dan 1.822 event untuk konferensi. Jumlah tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan jumlah pameran dan konferensi di tahun 2023.

Kendati demikian, LU Transportasi dan Pergudangan yang juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Jakarta, mengalami perlambatan kinerja dengan tumbuh sebesar 6,48 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 7,66 persen (yoy). Perlambatan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan utamanya berasal dari komponen transportasi barang yang juga sejalan dengan penurunan kinerja ekspor.

Grafik 3.7
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta



Sumber: BPS dan Proyeksi Bank Indonesia, 2024

Di tengah berbagai indikasi positif perekonomian Jakarta yang disertai dengan inflasi yang masih terjaga, perlu dicermati sejumlah faktor risiko yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi Jakarta dan meningkatkan tekanan inflasi yaitu:

Dari sisi pertumbuhan ekonomi:

a. Perlambatan ekonomi global, termasuk perlambatan ekonomi yang lebih dalam di negara tujuan ekspor dan impor Jakarta;
b. Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tetap tinggi dan tensi geopolitik yang meluas;
c. Pembangunan proyek strategis Pemerintah yang mundur dari *timeline*; serta
d. Tahapan transisi perpindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara, terutama dari sisi fiskal.

Dari sisi inflasi:

a. Meningkatnya permintaan dan ekspektasi pada periode HKEN;
b. Dampak lanjutan El Nino terhadap pergeseran musim tanam dan musim panen yang dapat memengaruhi produksi dan ketersediaan pasokan pangan;
c. Kenaikan harga bahan pangan untuk mendukung aktivitas Pilkada serentak;
d. Tensi geopolitik yang meluas sehingga berdampak pada volatilitas harga energi dan pangan global;
e. Potensi berlanjutnya kenaikan tarif kontrak dan sewa rumah seiring dengan permintaan yang meningkat;
f. Rencana kenaikan berbagai tarif layanan publik.

Berbagai risiko tersebut berpotensi dapat memberikan dampak pada tertahannya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2024 dan 2025. Di samping itu, periode jelang Pilkada 2024 berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta lebih lanjut apabila tidak diiringi dengan pembangunan iklim politik yang positif. Oleh karena itu, untuk tetap mendorong momentum pemulihan ekonomi di tengah masih adanya berbagai tantangan dan risiko, penguatan perekonomian Jakarta penting untuk dilakukan antara lain melalui arah kebijakan berikut.

a. Penguatan Peran Jakarta sebagai lokomotif utama perekonomian nasional
   1. Optimalisasi sektor ekonomi utama, termasuk mendorong hilirisasi dan mendorong iklim investasi;
   2. Pengembangan sektor potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru;
   3. Pengesahan Undang-Undang (UU) Daerah Khusus Jakarta untuk mendukung penguatan posisi Jakarta sebagai kota global.
b. Penguatan sinergi pengendalian inflasi
   1. Penguatan program TPID Jakarta dalam 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif), utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP);
   2. Sinergi dengan TPID Jabodetabek melalui manajemen pengelolaan *supply demand* untuk komoditas yang memiliki bobot besar terhadap inflasi.
c. Penguatan ekosistem digital melalui penguatan sinergi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah untuk sektor Pemerintah dan sektor swasta, termasuk UMKM.

Dalam rangka memperkuat Jakarta sebagai kontributor utama nasional dan meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global, maka salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah optimalisasi sektor utama dengan pangsa terbesar, melalui *focusing* di tiap-tiap sektor serta pengembangan sektor potensial untuk mempersiapkan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis pemetaan sektor ekonomi (*Forward and Backward Linkage* serta Penggolongan Sektor Basis dan Progresif) di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Bank Indonesia, 5 (lima) sektor ekonomi utama yang memiliki pangsa terbesar dalam ekonomi DKI Jakarta antara lain: Industri Pengolahan (Green *HighTech*, otomotif dan kimia), Jasa Keuangan (Digitalisasi dan IFC-Regional), Informasi Komunikasi (Data Center dan Ekosistem Startup), Perdagangan (Hub dan Ecommerce), serta Konstruksi (TOD dan Infrastruktur Hijau). Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk

mendorong pengembangan sektor ekonomi potensial yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sektor-sektor ini mencakup Transportasi dan Pergudangan, Pariwisata dan Akomodasi Makan Minum, Industri Kreatif, Jasa Kesehatan, Jasa Pendidikan, serta Pemberdayaan UMKM.

Untuk optimalisasi sektor utama dan pengembangan sektor potensial, diperlukan strategi yang tersucana dengan baik, antara lain:

a. Peningkatan sinergi dan kerja sama

Peningkatan sinergi dan kerja sama perlu dilakukan dengan melibatkan penguatan kerja sama yang sudah ada dan pengembangan kerja sama dengan mitra baru. Kerja sama yang erat antara sektor-sektor ekonomi dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat pertumbuhan, dan menciptakan lingkungan usaha yang berdaya saing.

b. Penguatan regulasi dan *business environment*

Regulasi yang jelas dan mendukung serta lingkungan bisnis yang kondusif akan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Birokrasi yang efisien dan perbaikan kebijakan bisnis dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pelaku usaha.

c. Perluasan implementasi digital

Penerapan teknologi digital juga menjadi elemen kunci dalam strategi pengembangan ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan produksi dan promosi, sektor ekonomi dapat meningkatkan daya saingnya.

d. Pengembangan sinergi dengan daerah sekitar

Pengembangan sinergi dengan daerah sekitar, terutama sebagai megapolitan Jabodetabek, dapat memperluas peluang kerja sama dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat. Kerja sama lintas daerah dapat meningkatkan konektivitas, pertukaran sumber daya, dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi.

Dengan menerapkan strategi tersebut, diharapkan pengembangan sektor ekonomi utama dan potensial dapat melampaui kendala kritikal yang dihadapi dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi Jakarta secara keseluruhan dan meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional dan global.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah kesehariahan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengenggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berdasarkan fungsi:

a. Fungsi otorisasi memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun bersangkutan.
b. Fungsi perencanaan memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun bersangkutan.
c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
e. Fungsi distribusi mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f. Fungsi stabilisasi mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah, kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab sebelumnya, serta prakiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun 2025, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagaimana berikut.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Dengan melihat potensi pemulihan ekonomi global, Nasional maupun DKI Jakarta pada tahun 2025 serta melihat performa pendapatan daerah tahun sebelumnya, diharapkan pendapatan daerah akan mengalami peningkatan pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut.

a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun kebijakan pajak daerah di DKI Jakarta untuk tahun 2025 adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Implementasi Kebijakan Pajak Daerah perihal pemberian Insentif Pajak Daerah. Untuk itu, dirumuskan beberapa strategi untuk mendukung kebijakan pajak daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi
   a. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
   b. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah;
   c. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment*;
   d. Penegakan hukum/*law enforcement* dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah;
   e. Pemberdayaan Juru Sita, PPNS, Intel Pajak Daerah dalam upaya penegakan hukum;
   f. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) mendekati harga pasar yang wajar;
   g. Meningkatkan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
   h. Peningkatan koordinasi kelembagaan dalam proses pemungutan pajak daerah (pertukaran data informasi, tax clearance, law enforcement, sosialisasi dan pendataan).
2. Ekstensifikasi
   a. Pertumbuhan kendaraan bermotor baru baik kendaraan bermotor roda 4 (empat) maupun kendaraan bermotor roda 2 (dua);
   b. Pertumbuhan penjualan properti meningkat;
   c. Stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
   d. Pengukuhan Wajib Pajak baru berdasarkan pendataan, terutama objek pajak baru sebagai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kebijakan retribusi daerah di DKI Jakarta tahun 2025 adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut beberapa strategi untuk mendukung kebijakan retribusi daerah sebagai berikut :

1. Pengembangan retribusi daerah pada Retribusi *Online* Sistem (R.O.S) sebagai sarana pemungutan retribusi;
2. Penggunaan sistem e-ticketing dalam pelayanan retribusi yang masih menggunakan kasus;
3. Peningkatan pelayanan yang berdaya saing kepada masyarakat atas objek retribusi;
4. Penyesuaian tarif retribusi secara berkala yang menyesuaikan harga pasar;
5. Penerbitan petunjuk pelaksana terkait tata cara pemungutan retribusi;
6. Pengintegrasian sistem pendukung pemungutan retribusi yang dimiliki oleh SKPD Pemungut Retribusi ke dalam R.O.S;
7. Perluasan kanal pembayaran retribusi;
8. Melakukan pendataan retribusi untuk perluasan objek retribusi baru.

Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang bersal dari bagi hasil laba (Dividen) Perusahaan Daerah dan

Perusahaan Patungan atas investasi modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 13 BUMD dan 10 PT Patungan. Namun demikian dari total 23 Perusahaan, terdapat 2 perusahaan yaitu PT Ratax Armada dan PT. Grahasabari Suryajaya yang sudah tidak beroperasi. Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disamanatkan bahwa atas perolehan laba dapat dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap tahunnya BUMD dan PT Patungan yang memperoleh laba dan tidak ada akumulasi kerugian (akumulasi saldo laba negatif) menyetorkan dividen kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penegang atau pemilik saham. Pada periode 2017-2020 pendapatan daerah yang bersasal dari Dividen BUMD dan PT Patungan tumbuh dengan rata-rata 11,3 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan Dividen BUMD setiap tahunnya didukung dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan BUMD yang membuat perusahaan semakin efektif, efisien dan berkembang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (dividen) BUMD memiliki target sebesar Rp.823 Miliar dimana angka tersebut merupakan angka optimis yang ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Jakarta tumbuh 4,8 – 5,6 persen.

Berbagai isu permasalahan yang akan dihadapi tahun 2025 antara lain digitalisasi dan perubahan tren konsumen dimana perkembangan teknologi dan informasi yang cepat mendorong BUMD untuk mengadopsi teknologi dalam melakukan inovasi bisnis agar dapat bertaya saing, mengantisipasi dampak dari transisi pemindahan Ibukota Negara/IKN yang diskalkan mulai tahun 2024. Untuk tahun 2025, BUMD dan PT Patungan ditargetkan mampu berkontribusi secara optimal kepada pendapatan daerah.

Adapun arah kebijakan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2025 adalah Pengembangan BUMD pada tahun 2025 diarahkan untuk penguatan inovasi bisnis dalam rangka memperkuat BUMD untuk mendukung ketahanan BUMD dan pembangunan ekonomi masyakarat. Pada tahapan ini setiap BUMD sudah memiliki rancangan inovasi baru untuk dapat beradaptasi dan bertransformasi sehingga memiliki kapabilitas, resiliensi dan manajemen risiko yang telah mumpuni. Untuk meningkatkan kinerja BUMD sehingga dapat meningkatkan kinerja komponen pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan status rasio kesehatan serta tata kelola BUMD;
2. Menciptakan kepengurusan yang unggul dan profesional dalam pengelolaan bisnis BUMD;
3. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
4. Optimalisasi produktivitas aset BUMD melalui kerja sama dengan BUMD, BUMN dan pihak swasta;
5. Meningkatkan inovasi dan diferensiasi bisnis agar mampu bersaing secara unggul;
6. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah (LLPAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini bersasl dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Dalam hal meningkatkan kinerja LLPAD, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Pembuatan regulasi terkait pemungutan LLPAD dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam hal optimalisasi penerimaan LLPAD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Pengembangan sistem monitoring LLPAD guna mempermudah proses monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi penerimaan LLPAD;

3. Membuat analisa terkait pendataan potensi LLPAD atas pemanfaatan aset BMD;
4. Peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah pemungut LLPAD dan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam proses pemungutan LLPAD;
5. Inventarisasi potensi penerimaan denda retribusi berkoordinasi dengan SKPD pemungut retribusi.

Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, diperlukan strategi dalam hal optimalisasi pemanfaatan aset, pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan diatas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi, serta pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame, yang dilakukan melalui langkah-langkah berikut.

1. Optimalisasi pemanfaatan aset

   Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pemanfaatan aset yang optimal adalah meningkatnya manfaat finansial dan/atau non finansial bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan/atau pendayagunaan tanah dan/atau bangunan adalah:

   a. Melakukan identifikasi konsep dan skema pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan;
   b. Membuat kajian *Highest Best And Used* atas aset non lokolasan yang dapat dioptimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan;
   c. Menyusun daftar prioritas pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan;
   d. Mengembangkan *database* dan sistem informasi pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame;
   e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame;
   f. Pengembangan layanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame berbasis digital;
   g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan;
   h. Melakukan pengembangan skema pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan seiring dengan perkembangan ekonomi, bisnis dan perdagangan termasuk perluasan pengelolaan pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan dalam penguasaan Pengguna Barang; dan
   i. Pengembangan layanan pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan berbasis digital.

2. Optimalisasi pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan diatas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tanah Kota Praja dan Eks Desa

   Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan diatas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tanah Kota Praja dan Eks Desa yang optimal adalah:

   a. Melakukan identifikasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tanah HPL meliputi dokumen kepemilikan, perjanjian kerja sama diatas HPL, dan dokumen lainnya yang sejenis;
   b. Mengembangkan database HPL;
   c. Mengintegrasikan data HPL dengan BPN, Jakartasatu, dan data pajak;
   d. Melakukan identifikasi bidang tanah HPL secara geospasial pada peta jakartasatu;
   e. Melakukan komunikasi dengan para pihak yang bekerja sama diatas HPL;
   f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan dan pendayagunaan tanah HPL; dan
   g. Pengembangan layanan rekomendasi Hak Guna Bangunan di atas HPL berbasis digital.

3. Optimalisasi pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi

   Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi seperti Menara Telekomunikasi, Jaringan Mikro Seluler dan Serat Optik yang optimal adalah:

   a. Melakukan identifikasi dan rekonsiliasi data infrastruktur telekomunikasi dengan Dinas Teknis;
   b. Melakukan komunikasi dengan provider infrastruktur telekomunikasi;
   c. Mengembangkan tarif layanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi;
   d. Mengembangkan database dan sistem informasi pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi;
   e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi; dan
   f. Pengembangan layanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi berbasis digital.

4. Optimalisasi pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame

   Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame sebagai media informasi dan publikasi yang optimal adalah:

   a. Menyusun regulasi terkait pemanfaatan ruang infrastruktur reklame;
   b. Melakukan komunikasi dengan *provider* infrastruktur reklame;
   c. Mengembangkan tarif layanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame.

b. Kebijakan Pendapatan Transfer

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pendapatan Transfer terdiri atas transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer yaitu untuk memenuhi aspek kepatuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan,sinergi serta koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Keuangan agar pengelolaan pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan, antara lain:

1. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tepat waktu sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
2. Berupaya agar menerima alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan berkoordinasi dan sinergi melalui penyampaian data kebutuhan formula perhitungan alokasi DAU;
3. Penyerapan secara optimal atas Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
4. Mengupayakan terpenuhinya penilaian kriteria utama Dana Insentif Fiskal yaitu Opini WTP atas LKPD 5 tahun terakhir serta Perda APBD tepat waktu agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh alokasi Dana Insentif Fiskal. Dana tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh Masyarakat.

c. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan hibah yang dilakukan dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan SKPD/UKPD terkait MoU penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Adapun realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 s.d tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 s.d Tahun 2025

Uraian	Realisasi APBD Tahun 2021 (Audited)*	Realisasi APBD Tahun 2022 (Audited)**	Realisasi APBD Tahun 2023 (Unaudited)***	APBD Tahun 2024****	Proyeksi/Target APBD Tahun 2025*****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan Asli Daerah	**41.606.307.405.630**	**45.608.404.729.501**	**49.139.975.249.272**	**52.998.081.040.625**	**54.083.756.505.175**
Pajak Daerah	34.575.563.219.178	40.275.146.196.210	43.316.481.672.833	46.240.000.000.000	47.900.000.000.000
Retribusi Daerah	383.859.710.080	376.977.989.704	454.697.560.911	483.034.270.805	970.650.619.545
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	398.792.009.852	402.424.109.447	545.859.249.987	823.000.000.000	774.000.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	6.248.092.466.321	4.553.854.434.140	4.822.926.765.541	4.852.046.769.820	4.439.205.894.630
Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan	**22.673.794.344.052**	**18.860.858.779.549**	**20.159.569.841.034**	**19.326.007.889.000**	**19.326.007.889.000**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	22.673.794.344.052	18.860.858.779.549	20.159.569.841.034	19.326.007.889.000	19.326.007.889.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**1.286.907.449.318**	**2.821.215.663.258**	**1.766.153.820.454**	**722.293.641.636**	**1.460.929.059.707**
Pendapatan Hibah	1.286.907.449.318	2.821.215.663.258	1.766.153.820.454	722.293.641.636	1.460.929.059.707
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	**65.567.009.190.000**	**67.290.479.172.308**	**71.065.698.910.760**	**72.446.382.571.261**	**74.870.693.453.882**

Sumber: *) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 Audited
**) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 Audited
***) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 Unaudited
****) Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
*****) Proyeksi APBD Tahun 2025

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal dirinci atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan, Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci menjadi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Dalam hal kebijakan belanja daerah tahun 2025 sebagaimana berikut :

1. Mendorong peran Jakarta sebagai Kota Bisnis berskala Global dengan melakukan perbaikan terhadap permasalahan fundamental melalui prioritas perbaikan pada isu Ketahanan Bencana, Perumahan, Mobilitas, Emisi dan Polusi, Penanganan Sampah, serta Akses Air Bersih dan Limbah;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, peluang kerja dan pekerjaan, peluang bisnis, serta penyediaan ruang publik;
3. Menciptakan ekosistem inklusif dan berkembang dalam rangka meningkatkan daya saing industri, inovasi, inklusifitas dan kesetaraan, identitas budaya dan sejarah, transparansi dan akuntabilitas, serta tata kelola yang cerdas;
4. Selain itu pemberian bantuan dilakukan dalam bentuk:
   a. Subsidi diberikan untuk meningkatkan akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik tanpa membebani biaya hidup;
   b. Hibah diberikan dengan ketentuan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
   c. Bantuan sosial diberikan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang pemberiannya dilakukan secara selektif;
   d. Bantuan keuangan untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah.
5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang yang berlaku.

Adapun realisasi dan proyeksi/target belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 s.d tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Realisasi dan Rencana Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 s.d Tahun 2025

Uraian	Realisasi APBD Tahun 2021 (Audited)*	Realisasi APBD Tahun 2022 (Audited)**	Realisasi APBD Tahun 2023 (Unaudited)***	APBD Tahun 2024****	Rencana APBD Tahun 2025*****
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)
Belanja Operasi	**53.925.743.536.172**	**55.542.186.969.752**	**57.597.155.087.931**	**59.655.768.655.772**	**60.456.389.001.698**
Belanja Pegawai	18.816.237.919.714	17.705.440.378.717	17.577.776.327.870	20.065.594.901.085	20.349.294.894.974
Belanja Barang/Jasa	21.488.685.347.585	25.813.048.650.069	25.824.342.986.611	27.309.645.709.375	28.837.589.431.809
Belanja Bunga	86.116.019.368	270.632.758.937	229.704.491.741	256.000.000.000	158.000.000.000
Belanja Subsidi	4.395.291.571.465	6.278.332.984.915	5.532.653.281.534	3.603.712.087.924	3.603.712.087.924
Belanja Hibah	2.551.074.469.075	2.639.327.211.333	3.622.026.321.307	3.306.327.319.994	2.249.586.751.060
Belanja Bantuan Sosial	6.528.360.206.967	5.035.404.985.749	4.383.641.476.658	3.114.488.637.394	3.258.265.835.931
Belanja Modal	**6.865.827.016.719**	**8.808.194.842.704**	**8.857.260.068.298**	**11.554.909.926.952**	**13.490.217.631.860**
Belanja Tidak Terduga	**439.889.457.199**	**29.976.747.630**	-	**1.072.006.625.640**	**1.199.777.588.143**
Belanja Transfer	**387.579.910.312**	**484.762.660.210**	**356.446.480.500**	**318.312.154.164**	**367.899.671.520**
Belanja Bantuan Keuangan	387.579.910.312	484.762.660.210	356.446.480.500	318.312.154.164	367.899.671.520
TOTAL BELANJA DAERAH	**61.619.040.160,565**	**64.865.121.220.296**	**66.770.861.636.729**	**72.600.997.362.528**	**75.514.283.893.221**

Sumber: *) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 Audited
**) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 Audited
***) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 Unaudited
****) Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
*****) Rancangan APBD Tahun 2025

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, bahwa Pembiayaan Daerah adalah pembiayaan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, selang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Pada kebijakan pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 terdiri atas beberapa unsur pembentukan berikut.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dalam penyertaan penganggaran daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Penerimaan Pengembalian, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan terdiri atas Sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah dan pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah. Dalam rangka efektivitas pemberian PMD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembatasan atas pengusulan PMD melalui pemberian persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain mendukung program prioritas Provinsi DKI Jakarta, penyerapan PMD sebelumnya mencapai 75 persen, terdapat dalam rencana bisnis, serta adanya persetujuan dari Dewan Pengawas/Komisaris perusahaan. Pembatasan tersebut bertujuan agara setiap BUMD lebih fokus dalam memanfaatkan dana PMD yang telah diberikan sebelumnya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta *good corporate governance* (GCG).

Beberapa isu dihadapi dalam pemberian PMD kepada BUMD tahun 2025, diantaranya masih minimnya motivasi BUMD untuk dapat berkembang, sehingga inovasi dan kreasi barang dan pelayanan yang dihasilkan BUMD juga belum optimal serta daya saing BUMD yang belum unggul terhadap perusahaan swasta lain. Di samping itu, BUMD DKI Jakarta masih bergantung pada PMD dalam melaksanakan kegiatan korporasinya, sehingga BUMD perlu didorong untuk aktif untuk mendanai aksi korporasinya secara mandiri. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah berikut dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD:

1. Meningkatkan status rasio kesehatan serta tata kelola BUMD;
2. Menciptakan kepengurusan yang unggul dan profesional dalam pengelolaan bisnis BUMD;
3. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
4. Optimalisasi produktivitas aset BUMD melalui kerja sama dengan BUMD, BUMN dan pihak swasta;
5. Meningkatkan inovasi dan diferensiasi bisnis agar mampu bersaing secara unggul;
6. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

Khusus untuk PMD kepada PT MRT Jakarta (Perseroda), terdapat porsi untuk pembangunan MRT Jakarta yang pembiayaannya bersumber dari pinjaman luar negeri yang diteris pinjamkan (51%) dan diteris hibahkan (49%) oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang mana dalam pelaksanaannya, disertakan sebagai pemberian PMD kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) secara bertahap setiap tahunnya selama jangka waktu penyelesaian pembangunan.

Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 s.d tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 s.d Tahun 2025

Uraian	Realisasi APBD Tahun 2021 (Audited)*	Realisasi APBD Tahun 2022 (Audited)**	Realisasi APBD Tahun 2023 (Unaudited)***	APBD Tahun 2024****	Proyeksi/Target APBD Tahun 2025*****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penerimaan Pembiayaan	**11.914.196.646.991**	**10.701.758.095.955**	**8.892.096.664.254**	**9.270.190.454.798**	**9.458.189.456.604**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	5.165.696.289.559	9.721.718.831.341	8.600.096.664.254	3.859.858.398.967	4.961.070.254.476
Penerimaan Pinjaman Daerah	6.744.339.136.564	979.251.450.334	292.000.000.000	5.410.332.055.831	4.497.119.202.128
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.171.220.068	787.784.280	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	**6.106.817.230.655**	**4.526.625.491.573**	**5.719.141.913.711**	**9.115.575.663.531**	**8.814.599.017.265**
Penyertaan Modal Daerah	5.906.817.230.655	3.492.066.426.925	4.806.670.975.375	7.253.905.829.467	6.712.928.393.835
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	1.034.559.064.648	912.270.938.336	1.861.669.834.064	2.101.670.623.430
Pemberian Pinjaman Daerah	200.000.000.000	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	**5.807.379.416.336**	**6.175.132.604.382**	**3.172.954.750.543**	**154.614.791.267**	**643.590.439.339**

Sumber: *) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 Audited
**) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 Audited
***) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 Unaudited
****) Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
*****) Proyeksi APBD Tahun 2025

Ringkasan realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023, Ringkasan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, dan Proyeksi Ringkasan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah beserta rincinannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Ringkasan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-204 dan Proyeksi Ringkasan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

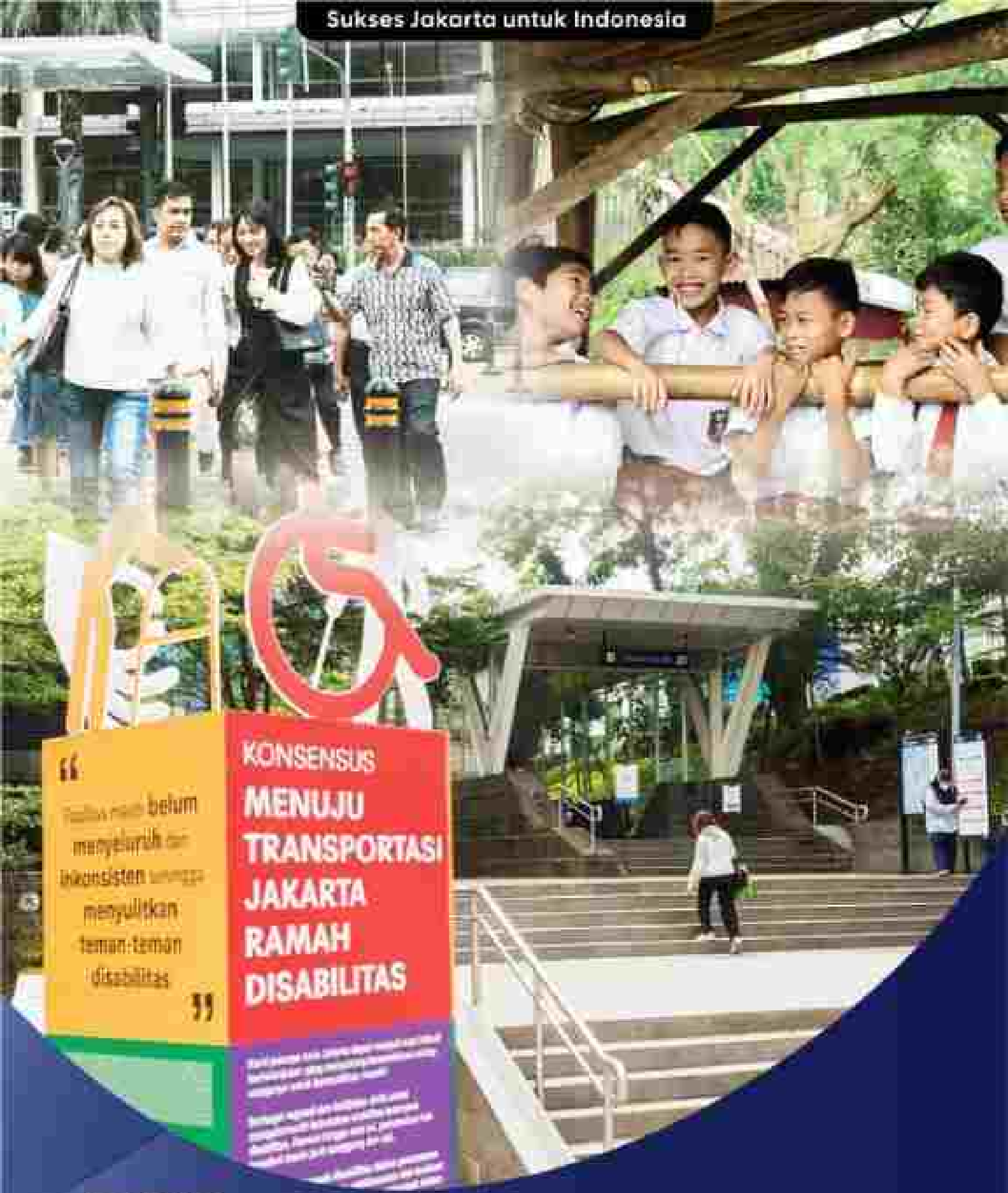
Kode	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2021 (Audited)*	Realisasi APBD Tahun 2022 (Audited)**	Realisasi APBD Tahun 2023 (Unaudited)***	APBD Tahun 2024****	Proyeksi/Target APBD Tahun 2025*****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	**Pendapatan Daerah**	**65.567.009.199.000**	**67.290.479.172.308**	**71.065.698.910.760**	**72.446.382.571.261**	**74.870.693.453.882**
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**41.606.307.405.630**	**45.608.404.729.501**	**49.139.975.249.272**	**52.398.081.040.625**	**54.083.756.505.175**
4.1.01.	Pajak Daerah	34.575.563.219.175	40.275.148.196.210	43.516.481.672.833	46.240.000.000.000	47.900.000.000.000
4.1.02.	Retribusi Daerah	383.859.710.282	376.977.989.704	454.697.560.911	483.034.270.805	970.550.610.545
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	398.792.009.852	402.424.109.447	543.860.249.987	823.000.000.000	774.000.000.000
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	6.248.092.466.321	4.553.854.434.140	4.622.926.765.541	4.850.046.769.820	4.439.205.894.630
4.2.	**Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan**	**22.673.794.344.052**	**18.860.858.779.549**	**20.159.569.841.034**	**19.326.007.889.000**	**19.326.007.889.000**
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	22.673.794.344.052	18.860.858.779.549	20.159.569.841.034	19.326.007.889.000	19.326.007.889.000
4.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**1.286.907.449.318**	**2.821.215.663.258**	**1.766.153.820.454**	**722.293.641.636**	**1.460.929.059.707**
4.3.01.	Pendapatan Hibah	1.286.907.449.318	2.821.215.663.258	1.766.153.820.454	722.293.641.636	1.460.929.059.707
5.	**Belanja Daerah**	**61.619.040.160.565**	**64.865.121.220.296**	**66.770.861.636.729**	**72.600.997.362.528**	**75.514.283.893.221**
5.1.	**Belanja Operasi**	**53.925.743.536.172**	**55.542.186.969.752**	**57.557.155.087.931**	**59.655.768.655.772**	**60.456.389.001.698**

Kode	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2021 (Audited)*	Realisasi APBD Tahun 2022 (Audited)**	Realisasi APBD Tahun 2023 (Unaudited)***	APBD Tahun 2024****	Proyeksi/Target APBD Tahun 2025*****
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
5.1.01.	Belanja Pegawai	18.616.237.919.714	17.705.440.378.717	17.977.776.327.870	20.065.594.901.085	20.349.294.894.574
5.1.02.	Belanja Barang/Jasa	21.486.663.347.585	23.613.048.550.099	25.824.342.988.611	27.309.645.709.375	28.837.589.431.809
5.1.03.	Belanja Bunga	80.116.019.366	270.632.758.937	229.704.491.741	256.000.000.000	158.000.000.000
5.1.04.	Belanja Subsidi	4.355.291.571.465	6.276.332.984.915	5.539.653.281.534	5.603.712.087.924	5.603.712.087.924
5.1.05.	Belanja Hibah	2.651.074.469.075	2.639.327.211.338	3.622.036.321.507	3.306.327.319.994	2.249.586.751.060
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	6.528.360.208.967	5.035.404.985.749	4.363.641.476.668	3.114.488.637.394	3.258.205.835.931
	Belanja karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan rekening milik BUD	240.163				
5.2.	**Belanja Modal**	**6.865.827.016.719**	**8.808.194.842.704**	**8.857.260.068.298**	**11.554.909.926.952**	**13.490.217.631.860**
5.3.	**Belanja Tidak Terduga**	**439.889.457.199**	**29.976.747.630**	**-**	**1.072.006.625.640**	**1.199.777.588.143**
5.4.	**Belanja Transfer**	**387.579.910.312**	**484.762.660.210**	**356.446.480.500**	**318.312.154.164**	**367.899.671.520**
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	387.579.910.312	484.762.660.210	356.446.480.500	318.312.154.164	367.899.671.520
	Total Surplus/(Defisit)	**3.947.969.038.435**	**2.425.357.952.012**	**4.294.837.274.031**	**(154.614.791.267)**	**(643.590.439.339)**
6.	**Pembiayaan Daerah**					
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**11.914.196.646.991**	**10.701.758.095.955**	**8.892.096.664.254**	**9.270.190.454.798**	**9.458.189.456.604**

Kode	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2021 (Audited)*	Realisasi APBD Tahun 2022 (Audited)**	Realisasi APBD Tahun 2023 (Unaudited)***	APBD Tahun 2024****	Proyeksi/Target APBD Tahun 2025*****
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	5.163.696.290.359	9.721.718.831.341	8.600.096.664.254	3.659.658.398.967	4.961.070.254.476
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	6.744.329.139.364	979.251.480.334	292.000.000.000	5.410.332.055.831	4.497.119.202.128
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.171.220.068	787.784.280	-	-	-
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**6.106.817.230.655**	**4.526.625.491.573**	**5.719.141.913.711**	**9.115.575.663.531**	**8.814.599.017.265**
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5.906.817.230.655	3.492.066.426.925	4.806.870.975.375	7.253.905.829.467	6.712.928.393.835
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	1.034.559.064.648	912.270.938.336	1.861.669.834.064	2.101.670.623.430
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	200.000.000.000	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	**-5.807.379.416.336**	**-6.175.132.604.382**	**-3.172.954.750.343**	**154.614.791.267**	**643.590.439.339**
	Jumlah Pendapatan Daerah + Penerimaan Pembiayaan	**77.481.205.845.991**	**77.992.237.268.263**	**79.957.795.575.014**	**81.716.573.026.059**	**84.328.882.910.486**
	Jumlah Belanja Daerah + Pengeluaran Pembiayaan	**67.725.857.391.220**	**69.391.746.711.869**	**72.490.003.550.440**	**81.716.573.026.059**	**84.328.882.910.486**

Sumber: *) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 Audited
**) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 Audited
***) Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 Unaudited
****) Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
*****) Proyeksi APBD Tahun 2025

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan DKI Jakarta.

Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 merupakan tahap pembangunan ketiga dari RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta disusun secara teknokratik tanpa mengembar Visi dan Misi Kepala Daerah. Namun, rumusan konsep RPD tetap mempertimbangkan 6 (enam) Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, 5 (lima) Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, dan 6 (enam) isu strategis tahun 2023-2026. Prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam dokumen RPD 2023-2026 juga sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025, yaitu "Mencapai Kota Jakarta yang Berdaya Saing Global Berlandaskan Kapasitas Sarana dan Prasarana yang Memadai, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan serta Kapasitas Inovasi Daerah yang Terus Meningkat". Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD untuk tahun 2025 adalah:

"PENGUATAN KETAHANAN KOTA MELALUI PEMBANGUNAN YANG MERATA, INKLUSIF, DAN BERKELANJUTAN

Ketahanan kota itu sendiri didefinisikan sebagai kapasitas individu, masyarakat, institusi, bisnis, dan sistem dari sebuah kota untuk bisa bertahan, beradaptasi, dan tumbuh terhadap tekanan (stress). Fokus terhadap penguatan ketahanan kota inilah yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025.

Gambar 4.1
Pendekatan Perencanaan Pembangunaan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB I, perencanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), dengan tetap:

a. Menjaga keberlanjutan melalui penyusunan 4 (empat) tujuan, 17 sasaran, dan 108 strategi utama pembangunan daerah yang ada dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.
b. Menerapkan prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, diantaranya yaitu pencapaian target indikator makro pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2024, penyelesaian isu-isu komprehensif seperti kemiskinan dan stunting, dan penyelesaian isu strategis serta isu kewilayahan.
c. Memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
d. Melibatkan secara aktif *stakeholders* di luar pemerintahan (lima *stakeholders* utama, yaitu masyarakat, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan media) dalam rangka

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan menerapkan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

e. Memaksimalkan penerapan sistem informasi baik yang terkoneksi dengan Pemerintah Pusat maupun milik internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

f. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain APBN, APBD Provinsi, CSR, KPBU, hibah, maupun sumber pendanaan lain yang sah untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah.

Perencanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 juga mengacu dan memperhatikan:

a. Prioritas nasional dan pokok-pokok arah kebijakan nasional dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025;

b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, isu, dan prioritas pembangunan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;

c. Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023;

d. Tantangan global, nasional, maupun tantangan kewilayahan;

e. Dokumen RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2030;

f. Kerangka Ekonomi Daerah serta kerangka pendanaan pembangunan 2025;

g. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs); dan

h. Pembangunan Rendah Karbon.

Gambar 4.2
Kerangka Pikir Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025



Sumber: Hasil Analisa Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2024

Pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran pembangunan DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Gambar 4.2 di atas, memperlihatkan bahwa beberapa dokumen perencanaan dan isu strategis yang dalam penentuannya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu hasil evaluasi, tantangan, capaian, dan kondisi kewilayahan termasuk implikasi dari disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi dasar dalam merumuskan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2025. Kemudian, dalam rangka mencapai target setiap prioritas pembangunan, dirumuskan sejumlah sasaran (dimodifikasikan dengan indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah), kebijakan, strategi, program dan kegiatan perangkat daerah yang diharapkan dapat mendukung secara langsung ketercapaian setiap prioritas pembangunan daerah. Selain itu, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selain dijadikan sebagai salah satu alat dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi juga dapat menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam menjalani prinsipnya sebagai pelayan masyarakat (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Dalam pelaksanaannya, strategi akan dijabarkan ke dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah, sehingga rumusan strategi perlu memperhatikan keterkaitannya dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Mempertimbangkan hal tersebut, dalam konteks pembangunan daerah strategi perlu dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, yang mana strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari para pemangku kepentingan. Adapun arah kebijakan merupakan penjelajawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan daerah dijadikan sebagai panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan pada periode tertentu (jangka panjang, menengah, dan tahunan). Dalam penyusunannya, arah kebijakan pembangunan daerah harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

4.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Nasional Tahun 2025

Selama 2 (dua) dekade terakhir, berbagai kemajuan di berbagai bidang pembangunan sebagaimana dijelaskan pada BAB I telah berhasil dicapai oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia sampai dengan saat ini masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Berbagai tantangan ke depan, seperti pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim perlu menjadi perhatian utama Bangsa Indonesia. Untuk merespon berbagai tantangan tersebut, diperlukan optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Dengan demikian, cita-cita atau visi 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi "Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" dapat terwujud.

Sebagaimana hasil Sidang Pleno Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2024, ditetapkan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2025-2029. Visi Indonesia 2045 di atas kemudian diselaraskan ke dalam visi Indonesia untuk periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi sebagaimana dimaksud akan dicapai melalui 8 (delapan) misi, 17 program prioritas, dan 8 (delapan) program hasil terbaik cepat. Mempertimbangkan fondasi ekonomi, sosial, dan politik, pembangunan Indonesia untuk periode 2025-2029 berfokus pada beberapa target utama, yaitu:

a. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju
b. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurangan;

c. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat;
d. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; dan
e. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Menurun Menuju *Net Zero Emission*.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan target di atas, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum komunikasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, fokus utama pembangunan untuk tahun 2025 adalah:

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Adapun sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi GRK dengan target sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Pembangunan	Target 2025	No	Sasaran Pembangunan	Target 2025
(a)		(b)	(a)	(b)	(c)
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6	5.	Rasio Gini (Nilai)	0,379 – 0,383
2.	TPT (%)	4,5 – 5,0	6.	Indeks Modal Manusia (Nilai)	0,55
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	7.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	28,0
4.	Nilai Tukar Petani (Kumulatif)	113 – 115	8.	Nilai Tukar Nelayanan (Kumulatif)	104 – 105

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, (2024)

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan Prioritas Nasional yang merupakan Asta Cita (Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029) sebagai berikut.

a. **Prioritas Nasional 1:**
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

b. **Prioritas Nasional 2:**
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

c. **Prioritas Nasional 3:**
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

d. **Prioritas Nasional 4:**
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

e. **Prioritas Nasional 5:**
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

f. **Prioritas Nasional 6:**
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

g. **Prioritas Nasional 7:**
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

h. **Prioritas Nasional 8:**
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Dalam pelaksanaannya, setiap Prioritas Nasional didukung oleh sasaran, indikator, serta arah kebijakan, adapun penjabaran untuk masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional 1

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 1

No	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
1.	Indeks Demokrasi Indonesia	80,41 (2022)	81,69 – 85,23

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, (2024)

Terdapat 3 (tiga) arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, yaitu: (1) memperkokoh ideologi pancasila; (2) penguatan demokrasi; dan (3) penegakan HAM.

b. Prioritas Nasional 2

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.3
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 2

No	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			
1.	*Asia Power Index (Military Capability)*	14,6 (2022)	20
2.	*Asia Power Index (Diplomatic Influence)**	60,42	61,34
3.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	62,8 (2020)	67,5
4.	Prevalensi Kerawanan Pangan (PoU)	8,53	7,21
5.	Indeks Ketahanan Energi	6,64 (2022)	6,77
6.	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	60,43	65,18
7.	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	24 (2020)	39,20
8.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	16,21	12,5
9.	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	45	43
10.	Indeks Ekonomi Hijau	59,17 (2020)	70,80
11.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	13,21	20,00

No	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
(a)	(b)	(c)	(d)
12.	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	15,00 (13,00 terdaur ulang) (2020)	24,00 (16,00 terdaur ulang)
13.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44
14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,09	76,68
15.	Persentase Penurunan Emisi GRK • Tahunan (%) • Kumulatif (%)	35,53 27,82	32,65 28,12

Sumber: Rancangan RDP Tahun 2025, (2024)

Terdapat 17 arah kebijakan yang difokuskan untuk mewujudkan amanat Prioritas Nasional 2 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, yaitu:: (1) penguatan pertahanan negara; (2) pembangunan dan pengembangan industri; (3) penguatan keamanan negara; (4) profesionalisme dan pelayanan kepolisian; (5) penguatan keamanan laut dan *hidro-oseanografi*; (6) keamanan siber, sandi, dan sinyal; (7) pemeliharaan hubungan internasional; (8) penguatan infrastruktur dan jejaring *smart diplomacy*; (9) kerja sama pembangunan internasional; (10) penguatan diplomasi ekonomi; (11) swasembada pangan; (12) swasembada energi; (13) pengembangan ekonomi syariah; (14) ekonomi digital; (15) ekonomi hijau; (14) keanekaragaman hayati; (15) peningkatan kualitas lingkungan; (16) pembangunan rendah karbon; dan (17) ekonomi biru.

c. Prioritas Nasional 3

Untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, telah dirumuskan sasaran pembangunan tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.4
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 3

No	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
(a)	(b)	(c)	(d)
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			
1.	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,32 (2019)	1,44
2.	Rasio Kewirausahaan (%)	3,04	3,14
3.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,07 (2021)	1,26
4.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,10	4,60
5.	Devisa Pariwisata (miliar USD)	14,63	22,10
6.	Proporsi PDB Ekosistem Kreatif (%)	6,77	7,92
7.	Aset Perbankan/PDB (%)	56,23	59,39
8.	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,37	8,10
9.	Aset Asuransi/PDB (%)	8,35	8,78
10.	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,87	56,7
11.	Total Kredit/PDB (%)	34,2	36,1
12.	Inklusi Keuangan (%)	88,5	90,6

Sumber: Rancangan RDP Tahun 2025, (2024)

Terdapat 5 (lima) arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, yaitu: (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur, (2) mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, (3) penguatan koperasi, (4) mengembangkan industri kreatif, serta (5) pendalaman sektor keuangan.

d. Prioritas Nasional 4

Untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, sasaran pembangunan diukur melalui indikator berikut.

Tabel 4.3
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 4

No	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			
1.	Hasil Pembelajaran		
	a. Rata-Rata Nilai PISA		
	i. Membaca	359 (2022)	396
	ii. Matematika	366 (2022)	404
	iii. Sains	383 (2022)	416
	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (tahun)	9,13	9,46
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,15	15,37
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	31,45	33,94
3.	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30	66,78
4.	Tingkat Penguasaan Iptek:		
	a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,26 (2020)	0,30
	Peringkat Indeks Inovasi Global	61	60
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	4,50 – 5,00
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,52	56,30
7.	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,93	74,43
8.	Kesehatan Ibu dan Anak:		
	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189 (2020)	122
	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	21,50	18,80
9.	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	383 (2022)	272
10.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98	98
11.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	69,53 (2022)	70,29
12.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,469 (2022)	0,425

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025, [2024]

Terdapat 5 (lima) arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 4 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, yaitu: (1) penguatan sistem peningkatan kualitas sumber daya manusia; (2) memperkuat pendidikan, sains, dan teknologi; (3) memperkuat sistem kesehatan nasional; (4) menguatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; dan (5) meningkatkan prestasi olahraga.

e. Prioritas Nasional 5

Untuk mengawal keberlanjutan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.6
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 5

No	Sasaran Pembangunan	Baseline (2022)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri			
1.	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,67	19,9 – 20,0
2.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3	30,1 – 30,2
3.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,7	21,0 – 21,6
4.	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,50

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, (2024)

Terdapat 3 (tiga) arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 5 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, yaitu: (1) pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; (2) penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta (3) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.

f. Prioritas Nasional 6

Untuk mengawal keberhasilan proses membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.7
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 6

No	Sasaran Pembangunan	Baseline (2022)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			
1.	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	0	15
2.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	31,48	43,19
3.	Persentase pengandung disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	19,71	22
4.	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	44,11	44,34
5.	Persentase desa mandiri (%)	3,9	4
6.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	63,15	67,00

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, (2024)

Terdapat 3 (tiga) arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 6 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, yaitu: (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3) memberantas kemiskinan.

g. Prioritas Nasional 7

Untuk mengawal keberhasilan proses penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran pembangunan di tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.8
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7

No	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			
1.	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,05 (2022)	3,45
2.	Indeks Integritas Nasional	76,97	74,32
3.	Indeks Materi Hukum	0,48 (2022	0,51
4.	Indeks Pelayanan Publik	3,93	3,68 *
5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79	3,00
6.	Indeks Persepsi Korupsi	34	38
7.	Indeks Pembangunan Hukum	0,56	0,69
8.	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,3 *	10,70 – 11,20
9.	Tingkat Inflasi (%)	2,61	1,5 – 3,5

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, (2024)

Tentapat 5 (lima) arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 7 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, yaitu: (1) mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi; (2) membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun personalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu; (3) menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; (4) menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, tersedia dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan (5) penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.

h. Prioritas Nasional 8

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2025 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Tabel 4.9
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 8

No	Sasaran Pembangunan	Baseline (2023)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13	58,39
2.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,02	76,77
3.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14 (2022)	0,137

Terdapat 3 (tiga) arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 8 yang termuat dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, yaitu: (1) masyarakat adil, makmur, dan harmonis; (2) pelestarian budaya; (3) penanganan bencana.

4.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Selama dua dekade terakhir, Provinsi DKI Jakarta telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan. Perekonomian Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 15 tahun terakhir terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 5,4% setiap tahunnya, begitu pula dengan PDRB per kapita yang juga mengalami peningkatan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 11,14% setiap tahunnya. Kemudian, dari sisi sumber daya manusia, capaian IPM Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 15 tahun terakhir telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Capaian tersebut juga diberengi dengan angka pengangguran yang terus menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, serta tingkat kompetensi penduduk DKI Jakarta secara pendidikan terus mengalami perbaikan. Keberhasilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana disebutkan, tidak lepas dari proses perencanaan yang baik. Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB I, sampai dengan saat ini Provinsi DKI Jakarta telah memiliki berbagai dokumen perencanaan yang terbagi ke dalam berbagai periodisasi waktu (dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan).

Gambar 4.3
Skema Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026



Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, 2023

RKPD tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan jangka tahunan Provinsi DKI Jakarta yang juga menjadi dokumen perencanaan tahun ketiga dari pelaksanaan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan yang berbeda dikarenakan tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga, dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka RPD Tahun 2023-2026 dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

a. 6 (enam) misi RPJPD DKI Jakarta Tahun 2005-2025;
b. 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
c. 5 (lima) misi RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022;
d. 6 (enam) isu-isu strategis Tahun 2023-2026.

Selanjutnya, berdasarkan 4 (empat) konsideran tersebut, teridentifikasi 4 (empat) dimensi:

1. **Lingkungan Bangun (*Built Environment*)**
   Dimensi perencanaan terkait ruang fisik kota yang dibangun dalam rangka menyediakan sarana bagi segala kegiatan manusia dalam bertinggal dan berusaha.

2. **Perekonomian (*Economic*)**
   Dimensi perencanaan yang menyentuh upaya-upaya manusia dalam meningkatkan derajat hidupnya melalui kegiatan-kegiatan bernilai ekonomi.
3. **Manusia (*Human*)**
   Dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan dan interaksi manusia dengan sesama.
4. **Pemerintahan (*Governance*)**
   Dimensi perencanaan yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak warga dalam bertinggal di kota dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif.

Masing-masing dimensi tersebut kemudian dielaborasi menjadi 4 (empat) tujuan dan 17 sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dijabarkan sebagai berikut:

a. Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan dengan 4 (empat) sasaran:
   1. Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas;
   2. Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon;
   3. Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota;
   4. Perbaikan Pola Aktivitas - Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit.
b. Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan, dengan 4 (empat) sasaran:
   1. Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi;
   2. Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial;
   3. Peningkatan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja;
   4. Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah.
c. Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan, dengan 4 (empat) sasaran:
   1. Pemerataan Kesempatan Pendidikan Untuk Semua dan Edukasi Terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat;
   2. Penguatan Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat;
   3. Peningkatan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan;
   4. Penurunan Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender.
d. Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas, dengan 5 (lima) sasaran:
   1. Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas;
   2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel;
   3. Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur;
   4. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat;
   5. Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah.

Seluruh tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Pencapaian 17 sasaran pembangunan tersebut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengarahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administratif/Kabupaten Administratif, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan akademisi.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, strategi disusun sebagai langkah yang ditempuh oleh seluruh perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta yang berisi program indikasi untuk mewujudkan dimensi dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi Provinsi DKI Jakarta tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD adalah "Terbangunnya Warga dan Ekosistem Warga Kota yang Setara, Sejahtera, dan Bahagia Dilandasi Semangat Gotong-Royong" dengan penjabaran sbb:

a. Keadilan dan Keberpihakan, dijabarkan ke dalam 4 (empat) hal, yaitu:

1. Kesempatan yang Setara
   Memastikan hadirnya kesempatan yang setara bagi semua, keadilan dirasakan dalam setiap sendi pengelolaan kota, sejak pembuatan regulasi sampai layanan publik, serta mengajak seluruh elemen kota ikut bergerak memberdayakan warga yang lemah dan terpinggirkan.
2. Suara Warga
   Mendengarkan suara seluruh elemen warga, mempertimbangkan perspektif perempuan, anak-anak, difabilitas, dan masyarakat marjinal dalam setiap kebijakan, membangunan interaksi yang manusiawi dan realistis dengan seluruh warga dan elemen kota.
3. Kota Global
   Mendorong Jakarta menjadi kota global dengan segala keragaman dan kegiatannya, terbuka terhadap perubahan dan kemajuan, serta masyarakat dan bisnis merasakan manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
4. Kelestarian Kota
   Memastikan kelestarian lingkungan (*sustainability*), tradisi, dan karakter kota ikut terjaga dan berkembang, membangun kenadahan setiap sudut kota, serta memberikan ruang seluasnya bagi seni dan budidaya.

b. Orientasi pada Warga dan Ruang Interaksi, dijabarkan dalam 4 (empat) hal, yaitu:

1. Pola Perilaku dan Ruang Interaksi
   Setiap kebijakan mempertimbangkan pola perilaku dan ruang interaksi antar warga, warga difabilitas yang terhubung dengan komunitasnya, dan saling terhubung lintas segmen sehingga menciptakan lingkungan permukiman mandiri yang meminimalisasir kebutuhan mobilitas fisik. Begitu juga dengan penyediaan ruang interaksi pada ruang publik dan privat yang menciptakan budaya urban Jakarta.
2. Ekosistem Sosial
   Membangun ekosistem sosial, tak hanya ekosistem ekonomi, peka pada perubahan konteks sosial dan ekonomi yang dinamis.
3. Pelibatan Warga
   Warga adalah pelaku utama pembangunan dengan pemerintah sebagai rekan kolaborator yang menggerakkan dan memberikan dukungan, memangkap, dan berkolaborasi dalam mengembangkan praktik baik, kearifan lokal dan solusi inovatif dari masyarakat.
4. Pelayanan Kebutuhan Personal Warga
   Menyediakan layanan kesejahteraan yang inklusif dan dirancang khusus sesuai kebutuhan masing-masing personal warga dengan berbasiskan data kependudukan yang terintegrasi.

c. Birokrasi Efektif dan Penguatan Tata Kelola, dijabarkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kepercayaan Publik
   Mengedepankan etika, transparansi, dan keterbukaan dalam setiap proses pemerintahan dan interaksi dengan seluruh elemen kota, yang mana setiap aparat menjadi wakil hadirnya negara dan menjadi duta pemerintah untuk seluruh warga.
2. Profesionalisme Birokrasi
   Menerapkan sistem merit, prinsip akuntabilitas dan agilitas dalam tata kelola pemerintahan sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang tangkas, efektif dan adaptif terhadap dinamika perkembangan kota.
3. Sistem dan Institusionalisasi Solusi
   Mengembangkan sistem automasi, prosedur operasional standar dan pemanfaatan teknologi berbasis data dalam perumusan kebijakan, layanan pemerintahan, dan pemecahan masalah untuk meminimalkan diskresi dan solusi spontan terhadap masalah yang dapat diantisipasi atau berulang.

Ke-3 (tiga) strategi utama tersebut kemudian diterjemahkan kembali ke dalam 108 strategi pembangunan sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Sasaran Pembangunan dan Strategi Pembangunan
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

No	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
(1)	(2)	(3)
TUJUAN: Terwujudnya Pegunungan Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		
1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	a. Optimalisasi kapasitas sistem penanganan genangan. b. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau. c. Evaluasi tata ruang dalam mencapai tertib pertanahan. d. Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan. e. Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya. f. Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air limbah. g. Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum.
2.	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	a. Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan hijau dan ramah disabilitas. b. Pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan dan aturan. c. Penurunan beban pencemaran lingkungan. d. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau. e. Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi. f. Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha. g. Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. h. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. i. Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap. j. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. k. Peningkatan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan. l. Pembangunan/ Penataan / Penghijauan Hutan. m. Inventarisasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. n. Pemberian pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan tentang kehutanan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan SDM Dinas.

No	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		o. Inventarisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS. p. Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan. q. Peningkatan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota.
3.	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	a. Pengurangan dampak banjir. b. Pengurangan genangan air. c. Penegakan perda/perkada secara yustisial dan non yustisial. d. Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun non alam. e. Optimalisasi perangkat kebijakan di bidang penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. f. Pengaturan dan pemantauan pemanfaatan air tanah dalam upaya pengendalian penurunan muka tanah.
4.	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lalu lintas. b. Peningkatan kualitas penataan ruang. c. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. d. Peningkatan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengawasan balai uji/a angkutan perairan. e. Perumusan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian.
TUJUAN: Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas Guna Diterima Penghidupan Layak dan Peningkatan Kesejahteraan.		
5.	Pengurangan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	a. Peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial. b. Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). c. Pemberian Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tepat sasaran kepada Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). d. Penanganan bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi korban bencana alam dan sosial. e. Peningkatan jumlah kecamatan yang tahan pangan. f. Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran. g. Peningkatan dan penggunaan mutu & keamanan pangan, hasil pertanian, perikanan dan peternakan.

No	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		h. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan kewirausahaan terpadu (Jakpreneur).
6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	a. Peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan produk, dan daya tarik pariwisata. b. Peningkatan pemasaran dan informasi pariwisata secara sinergis, intensif, inovatif, dan interaktif. c. Peningkatan kerja sama kelembagaan secara profesional, efektif, efisien, produktif, serta pemberdayaan, penguatan dukungan, dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif. d. Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. e. Peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging, olahan hasil pertanian peternakan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming. f. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui *Online Single Submission Risk Based Approached* (OSS-RBA). g. Pelaksanaan operasi pasar, pemantauan dan pelaporan harga. h. Peningkatan ekspor dan pengendalian impor. i. Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga. j. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. k. Peningkatan produktivitas industri dan IKM.
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	a. Peningkatan daya serap tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja. b. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi. c. Penguatan SDM pengelola dan pengawas koperasi. d. Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan kewirausahaan, pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
8.	Meningkatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	a. Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal. b. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal. c. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal. d. Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk mempercepat kebudayaan yang inklusif. e. Penguatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan cagar budaya. f. Penguatan peran dan tata kelola permuseuman.

No	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		g. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya literasi. h. Pendataan, pengolahan, preservasi, pengalih mediaan, dan/atau akuisisi naskah kuno. i. Penguatan kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha. j. Penguatan tata kelola sarana daerah.
TUJUAN: Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan.		
9.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua diantar Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	a. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang.
10.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	a. Implementasi transformasi pelayanan kesehatan yang adaptif dan terintegrasi. b. Pemenuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan optimalisasi implementasi hospitality. c. Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan keamanan makanan dan minuman. d. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. e. Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan tenaga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan merata. f. Penguatan pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat. g. Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan. h. Peningkatan daya saing olahraga. i. Pembentukan anggota pemuda yang bejiwa patriotik, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup melalui peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi kepemudaan.
11.	Meningkatnya Ketangguhan Melalui Pembangunan Responsif Gender	a. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. b. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk TPPO. c. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. d. Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu. e. Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang pemenuhan hak anak pada lembaga/ organisasi/ kelompok/ stakeholder. f. Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang perlindungan bagi kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (ABPK).
12.	Meningkatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	a. Peningkatan kualitas layanan kepada anggota dewan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. b. Penguatan ideologi pancasila. c. Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi.

No	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		d. Peningkatan pemberdayaan ormas. e. Pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. f. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial di masyarakat.
TUJUAN: Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
13.	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	a. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil. b. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penyajian profil kependudukan. c. Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan.
14.	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	a. Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik. b. Peningkatan kualitas layanan TIK. c. Peningkatan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan di daerah. d. Peningkatan manajemen keamanan informasi.
15.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	a. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. b. Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang-Undangan dan advokasi hukum. c. % pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan. d. Percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI). e. Peningkatan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam mewujudkan kapabilitas APIP level 4.
16.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	a. Pengembangan sistem informasi serta perbaikan standar pelayanan pengadaan barang/jasa. b. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. c. Peningkatan penyusunan dan pengelolaan standar harga satuan barang milik daerah. d. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
17.	Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	a. Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN. b. Peningkatan pengembangan SDM.

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, Analisis

Ke-17 sasaran dan 108 strategi pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam tabel 4.10 di atas akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sasaran dan strategi pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 telah selaras dengan sasaran dan strategi pembangunan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Sasaran dan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaannya akan didukung oleh berbagai program pembangunan, yang namanya implementasi dari sasaran, strategi, dan program tersebut diharapkan dapat mendukung ketercapaian pembangunan tahun 2025 serta ketercapaian pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Jakarta dalam Konteks Kota Global

Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menjadi dasar hukum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi "pusat gravitasi" ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. Oleh karena itu, perpindahan IKN telah memberikan dampak bagi Provinsi DKI Jakarta, yaitu perubahan status dan kedudukannya. Pasca pemindahan IKN tersebut, DKI Jakarta diarahkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota bisnis berskala global. Sebagai kota bisnis berskala global, DKI Jakarta akan berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia yang memiliki hubungan mengikat dengan kota-kota lain serta memiliki dampak langsung dan nyata pada urusan sosial ekonomi global. Untuk menjalankan peran tersebut, DKI Jakarta membutuhkan beberapa kekhususan yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengamanatkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi yang berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Provinsi Daerah Khusus Jakarta berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.

Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tersebut sejalan dengan hasil evaluasi RPJPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2025, yang mana dalam penyusunan dokumen RPJPD periode selanjutnya, DKI Jakarta sudah perlu memperluaskan target pembangunan jangka panjang yang dapat bersaing secara global. Diskursus tentang kota global pada hakekatnya telah banyak dilakukan oleh berbagai institusi, akademisi, maupun praktisi internasional. Menurut Ann Markusen (1994), kota global adalah kota yang berhasil bersaing mendapatkan status kota besar dalam. Menurut Saskia Sassen (2006), kota global merupakan simpul utama dari berbagai kota-kota di dunia dan memiliki hubungan yang mengikat dengan kota-kota lain, serta memiliki dampak langsung pada urusan sosio-ekonomi global. Menurut Derek Gregory et.al (2009), kota global adalah simpul utama dalam organisasi ekonomi dunia sebagai pusat-pusat kendali ekonomi, produksi dan perdagangan, perputaran informasi, dan transmisi budaya, serta kekuatan politik. Menurut Greg Clark (2016), Kota global dicirikan oleh beberapa kondisi, yaitu sebagai kota yang: (1) mendukung dan memiliki spesialisasi dari sektor yang diperdagangkan; (2) menarik dan mempertahankan wirausaha dengan populasi yang beragam; (3) mendorong inovasi untuk menciptakan pengaruh; (4) terdepan dalam penciptaan pasar, rute, produk, atau layanan baru; dan (5) memiliki keunggulan geopolitik. Dari penelaahan definisi menurut para pakar, definisi kota global diarahkan kepada "sebuah kota yang memiliki peran penting dalam pengintegrasian ekonomi transnasional (menjadi *primary node* dalam jaringan ekonomi dunia) yang mampu menarik modal, barang, sumber daya manusia, gagasan, serta informasi secara global".

Berdasarkan definisi kota global di atas, dan melihat perkembangan serta capaian pembangunan DKI Jakarta, saat ini DKI Jakarta sudah menjadi bagian dari Kota Global. Walaupun demikian, DKI Jakarta belum dapat berdiri sejajar atau bersaing dengan kota-kota global lainnya di dunia. Hal tersebut terlihat dari posisi DKI Jakarta yang masih menduduki peringkat rendah apabila dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Adapun beberapa lembaga internasional telah melakukan pemeringkatan kota-kota global di dunia dengan masing-masing pendekatan serta indikator penilaian yang berbeda. Beberapa indeks kota global yang diterbitkan antara lain: (1) *Global City Index* (GCI) oleh AT Kearney; (2) *Global Power City Index* (GPCI) oleh *The Mori Foundation*; (3) *Economic Intelligence* (EIU) *Liveability Index* oleh EIU; dan (4) *Cities in Motion Index* (CIMI) oleh *Center for Globalization and Strategy* dan *IESE Business School*. Dari empat indeks kota global tersebut, posisi DKI Jakarta dibandingkan kota global lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11
Peringkat DKI Jakarta dalam Indeks Kota Global

Index	Variabel dan Indikator	Peringkat
(1)	(2)	(3)
Global City Indeks (GCI)	*Business Activity; Human Capital; Information Exchange; Cultural Experience; and Political Engagement* (total 29 indikator)	Tahun 2023 Jakarta peringkat 74 dari 156 kota
Global Power City Indeks (GPCI)	*Economy; Research and Development; Cultural Interaction; Livability; Environment; and Accessibility* (total 68 indikator)	Tahun 2022 Jakarta peringkat 45 dari 48 kota
Economic Intelligence Unit (EIU) *Livability Index*	*Stability; Healthcare; Cultural and Environment; Education; Infrastructure* (total 30 indikator)	Saat ini secara keseluruhan Jakarta berada di 139 dari 173 kota
Cities in Motion Index	*Economy; Social Cohesion; Environment; Human Capital; Governance; Mobility and Transportation; Urban Planning; International Profile; Technology* (total 103 indikator)	Tahun 2022 Jakarta peringkat 152 dari 183 kota

Sumber: Laporan Provinsi DKI Jakarta, 2024

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, dapat terlihat bahwa dari masing-masing indeks, posisi DKI Jakarta saat ini masih belum cukup kompetitif. Oleh karena itu, dari definisi kota global beserta berbagai variabel dan indikator pembentuknya, dalam 20 tahun kedepan, DKI Jakarta diarahkan untuk menjadi kota global yang berdaya saing dan dapat berdiri sejajar dengan kota-kota global lain di dunia. Beberapa karakteristik yang berhasil dirumuskan untuk DKI Jakarta sebagai kota global adalah sebagai berikut.

Tabel 4.12
Karakteristik Kota Global yang Berdaya Saing

Parameter	Karakteristik
(1)	(2)
Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi Secara Global	1. Memiliki skala ekonomi yang berdaya saing. 2. Memiliki potensi (iklim) pengembangan ekonomi yang baik. 3. Memiliki sumber daya tenaga kerja yang kompetitif, dan terhubung secara global (ditunjukkan dengan keberadaan perusahaan internasional skala besar).
Kapasitas Riset dan Inovasi yang Baik dan Menerus	1. Memiliki hasil riset dari inovasi dengan kuantitas dan kualitas yang mumpuni. 2. Memiliki iklim yang mendukung penciptaan riset dan inovasi, memiliki lembaga riset (termasuk universitas) yang kompetif secara global.
Ruang yang Nyaman untuk Dihuni	1. Memiliki kelengkapan infrastruktur dasar perkotaan yang baik. 2. Konflik (manusia dan konflik sosial yang terjadi/ada). 3. Kemudahan dalam memenuhi penghidupan. 4. Biaya hidup terjangkau. 5. Kualitas sumber daya manusia yang baik (kesehatan dan pendidikan). 6. Kemudahan dalam mengakses informasi.
Pariwisata dan Interaksi Budaya yang Menarik untuk Wisatawan Berkunjung	1. Memiliki daya tarik wisata dan budaya. 2. Memiliki kualitas untuk menerima event-event internasional (konser, event olahraga). 3. Memiliki infrastruktur wisata (stadion, museum, teater).

Parameter	Karakteristik
(1)	(2)
	4. Memiliki fasilitas penunjang wisata yang memadai (hotel, restoran, hiburan malam, dll).
Lingkungan yang Bersih, Nyaman dan Berkelanjutan	1. Memiliki kualitas lingkungan yang baik, berketahanan terhadap perubahan iklim, dan mengarah pada keberlanjutan.
Aksesibilitas yang Terkoneksi Secara Inter dan Inner Kota	1. Memiliki kemudahan diakses oleh penduduk negara lain. 2. Memiliki kemudahan dan pilihan moda transportasi dalam kota, nyaman dan bebas hambatan bermobilitas di dalam kota.

Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2024

Karakteristik yang tertuang dalam enam parameter tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi serta dipengaruhi satu sama lain. Untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, perlu perencanaan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Namun, dengan kondisi DKI Jakarta saat ini dan karakteristik kota global yang ingin diwujudkan, masih terdapat gap yang perlu menjadi perhatian utama, yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.13
Gap Kondisi Jakarta dan Kota Global

Variabel	Komponen	Data Dukung			
		Indikator	Jakarta	Kota Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aksesibilitas	Rendahnya penggunaan transportasi publik	Mode share transportasi publik (%)	18,80%	Singapura	61%
				Tokyo	61,70%
				Shanghai	43,30%
		Pergerakan metropolitan menggunakan kendaraan pribadi (%)	90,30%	Greater London	42%
	Panjangnya waktu tempuh akibat kemacetan	Rata-rata jarak dan waktu tempuh perjalanan menuju sekolah/tempat kerja (km / menit)	17 km / 52 menit	Tokyo dan Singapura	14,5 km / 41 menit
				Bangkok	15,84 km / 45 menit
		Rata-rata waktu yang dihabiskan selama rush hour akibat kemacetan (jam)	169 jam	Tokyo	193 jam
				Bangkok	138 jam
				London	134 jam
				New York	114 jam
	Konektivitas menuju bandara belum optimal	Waktu tempuh dari bandara ke pusat kota dan headway kereta bandara (menit)	52 menit/ 30 menit	Bangkok	26 menit / 10-15 menit
				Singapura	34 menit / 7-13 menit
	Rendahnya konektivitas Jakarta terhadap kota- kota dunia lainnya	Jumlah penerbangan direct internasional ke dan dari Jakarta (kota)	37 Kota	Bangkok	83 kota
				Singapura	116 kota
				New York	126 kota
				London	365 kota

Variabel	Komponen	Data Dukung			
		Indikator	Jakarta	Kota Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Riset dan Inovasi	Kualitas pendidikan tinggi sebagai pusat gerbang riset dan inovasi belum berdaya saing	Jumlah 1 universitas top 1000's dunia	1	London	> 13
				Bangkok	4
				Singapura	2 (rank 19 dan 32)
		Jumlah pelajar internasional di universitas top 1000's dunia (siswa)	5772 siswa	London	>100.000 siswa
				Singapura	14.492 siswa
				Bangkok	3.079 siswa
	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya riset Jakarta	Jumlah tenaga riset / 1 juta penduduk	3.375/1 juta penduduk	Beijing	15.075/ 1 juta penduduk
				Seoul	13.104/1 juta penduduk
				London	13.104/ 1 juta penduduk
				Singapura	7.225/ 1 juta penduduk
		Skor h-index (national level)	8,12	London	39,01
				New York	16,11
				Seoul	14,07
	Iklim riset belum optimal dalam mendukung penciptaan inovasi dan pengembangan bisnis	Jumlah paten yang diberikan	9.970	Cina	798.347
				US	323.410
				Jepang	201.420
				Korea Selatan	133.180
				Jerman	22.592
		Jumlah start up	377	New York	35.000
				Singapura	4.000
				Tokyo	1.200
				Shanghai	971
		Pengeluaran riset (USD)	USD 572 juta *) menggunakan asumsi proporsi research expenditure nasional terhadap PDB	Seoul	USD 11,1 miliar
				Singapura	USD 6,56 miliar
Ekonomi	Produktivitas ekonomi di Jakarta belum cukup bersaing dengan kota-kota global lainnya di dunia	PDRB per kapita	USD 17.956	New York	USD 122.980
				Tokyo	USD 88.322
				Singapura	USD 59.828
		Tingkat Pengangguran Terbuka	7,18% (377 ribu jiwa)	Singapura	1,90%
				Tokyo	2,79%
				New York	5,30%

Variabel	Komponen	Data Dukung			
		Indikator	Jakarta	Kota Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Iklim usaha dan investasi di Jakarta belum kondusif dibandingkan dengan kota-kota global lainnya	*Ease of Doing Business* score	82,2	China	94,1
				Malaysia	92,4
				Thailand	83,3
		Foreign Direct Investment DKI Jakarta	-	-	-
		Top 500 Company	1	Tokyo	50
				London	22
				Beijing	18
		Unicorn Company	22	New York	-
				Tokyo	-
				Singapura	-
	Kualitas SDM yang masih rendah	Global Talent Competitiveness Index	Peringkat 13 dengan score 30,1	San Francisco	-
				Singapura	-
				London	-
		Proporsi tenaga kerja di sektor jasa	83,7% atau 4,08 juta jiwa	Singapura	-
				Tokyo	-
				London	-
	Kesejahteraan masyarakat belum merata seluruhnya	Tingkat Kemiskinan	-	-	-
		Rasio Gini	-	-	-
	Penerapan ekonomi hijau di Jakarta masih belum optimal	Indeks Ekonomi Hijau	-	-	-
Lingkungan dan Kelayakan Hidup	Kualitas lingkungan hidup di wilayah Jakarta yang masih belum baik	Nilai AQI US	102 (per 5 Januari 2024)	Brussels	27 (per 5 Januari 2024)
		Suhu udara		Singapura	-
				Sao Paulo	-
				Bangkok	-
		Persentase luas RTH	5,78%	Tokyo	30%
				Shanghai	38,15%
				Singapura	46,50%
	Sistem pengelolaan sampah yang di Jakarta yang belum efisien untuk menopang pembangunan berkelanjutan	Persentase tingkat daur ulang sampah	20,26%	Brussels	39%
				Singapura	52%
				Beijing	67%
	Masih terdapat	Persentase	23%	Seoul	0,02%

Variabel	Komponen	Data Dukung			
		Indikator	Jakarta	Kota Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	penduduk Jakarta yang tinggal di kawasan kumuh	penduduk tinggal di permukiman kumuh		Tokyo	2%
				Bangkok	20%
		Jumlah rumah layak huni	922.918	-	-
	Pengelolaan energi yang berkelanjutan belum maksimal	Bauran EBT	0,08%	Beijing	10.40%
				Tokyo	13,70%
				Paris	25-30%
	Sistem pengelolaan air bersih di Jakarta belum menyeluruh	Persentase cakupan layanan	98,81%	Singapura	100%
				London	99,82%
				Seoul	99,1%
	Pengelolaan sanitasi dan pengelolaan air limbah masih terbatas	Persentase cakupan layanan		Seoul	85%
				Tokyo	100%
				London	100%
	Tingginya tingkat kriminalitas serta belum ramah terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan disabilitas)	Jumlah kriminalitas	8.112	Sydney	6.588
				Melbourne	5.536
				Tokyo	230
		Indeks Pembangunan Gender	93,54	-	-
	Pembangunan dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah akibat rendahnya keterampilan dan minimnya kualitas bersaing global	Angka Harapan Hidup	73,22 tahun	Brussels	81,7 tahun
				Singapura	83 tahun
		Tingkat Pengangguran	7,18%	Singapura	2,76%
				Amsterdam	4,08%
		Indeks Pembangunan Manusia	81,55	Singapura	0,939
				Tokyo	0,925
				London	0,929
	Kualitas pendidikan yang tidak bersaing	Rata-Rata Lama Sekolah	11,31 tahun	Singapura	13,9 tahun
				Tokyo	13 tahun
		Peringkat PISA	216	Sydney	64
				Singapura	1
				London	70

Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2024

Sebagaimana tabel di atas, diketahui bahwa masih cukup banyak tantangan besar yang harus diselesaikan oleh DKI Jakarta untuk mencapai Jakarta sebagai Kota Global. Beberapa tantangan tersebut antara lain kepadatan penduduk, kurangnya tenaga kerja terampil, permukiman kumuh, kemacetan, polusi udara, pengelolaan persampahan, akses air bersih, pengelolaan limbah, tingginya risiko bencana alam (banjir, rob, dan penurunan

tanah), serta tantangan perubahan iklim. Selain itu, sebagai kota global, Jakarta harus mampu bersaing untuk memiliki perekonomian yang kuat sehingga memungkinkan Jakarta untuk menjadi *primary node* dalam jaringan perekonomian dunia. Jakarta juga harus mampu menyediakan lingkungan yang nyaman untuk dihuni oleh warga lokal maupun internasional, serta mampu memperkenalkan budaya Jakarta di mata dunia. Hal tersebut dikarenakan dalam 20 tahun ke depan, Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat mampu berada di jajaran Top 10 Kota Global Dunia. Oleh karena itu, melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025 – 2045, cita-cita untuk mencapai "Jakarta Kota Global yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan" akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk mencapai cita-cita dan/atau visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai perwujudan visi Jakarta 2045, yaitu:

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera;
b. Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan;
c. Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas;
d. Mewujudkan Stabilitas Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global;
e. Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis.

serta 4 (empat) arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagai pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan. Adapun keterhubungan antara visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 4.14
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang DKI Jakarta Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jakarta Kota Global Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera	Pemerataan Layanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial	Penguatan Landasan Pembangunan menuju Sumber Daya Manusia Jakarta Berdaya Saing Global	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan Bertaraf Global	Perwujudan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Global
	Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan	Penguatan Landasan Ekonomi Produktif berbasis Riset dan Inovasi yang Berkelanjutan	Akselerasi Pembangunan Ekosistem Ekonomi yang Berorientasi pada Daya Saing Global	Perluasan Peran Ekonomi Jakarta di Tingkat Global dan Transisi menuju Ekonomi Hijau	Perwujudan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan berbasis Riset dan Inovasi
	Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas	Peningkatan Kapasitas dan Integritas Aparat Pemerintahan	Peningkatan Responsivitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan Kualitas Regulasi dan Pelayanan Publik yang Memerlahi Kebutuhan Transisi menuju Kota Global	Perwujudan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas
	Mewujudkan Stabilitas	Penguatan Ketahanan	Pemantapan Ketahanan	Pemeliharaan Stabilitas	Perwujudan Stabilitas

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global	Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi sebagai Modal Dasar Diplomasi yang Tangguh	Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi sebagai Modal Dasar Diplomasi yang Tangguh	Jakarta dan Penguatan Diplomasi Jakarta di Kancah Global	Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global
	Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis	Penguatan Landasan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sebagai Modal Dasar Pembangunan	Peningkatan Perlindungan Hak Dasar Sosial Budaya dan Pemulihan Kualitas Lingkungan	Aktualisasi Jakarta Berketahanan Sosial dan Ekologi yang Mampu Mewadahi Aktivitas Kota Global	Perwujudan Jakarta Kota Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Adaptif terhadap Perubahan

Sumber: Olahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2024

Selanjutnya, dari 6 (lima) misi tersebut akan dilaksanakan melalui 17 sasaran pokok pembangunan. Sasaran pokok pembangunan merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam mewujudkan Jakarta Kota Global Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan. Penjabaran untuk masing-masing sasaran pokok tersebut, yaitu:

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera
   (1) Terwujudnya Masarakat Jakarta yang Sehat dan Menyeluruh
   (2) Terwujudnya Masyarakat Jakarta yang Berkeadilan Tinggi, Unggul, dan Bermartabat
   (3) Terwujudnya Masyarakat Jakarta Tangguh dan Terlindungi secara Sosial yang Inklusif serta Berkeadilan

b. Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan
   (1) Terciptanya Produktivitas Ekonomi Jakarta yang Berdaya Saing Berbasis IPTEK dan Inovasi
   (2) Terwujudnya Ekonomi Jakarta yang Maju, Merata, dan Berkelanjutan
   (3) Terwujudnya Ekosistem Digital Jakarta yang Adaptif dan Berdaya Saing Global
   (4) Terwujudnya Ekonomi Jakarta yang Terintegrasi secara Domestik dan Global
   (5) Terwujudnya Keberlanjutan Peran Jakarta sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

c. Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas
   (1) Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif

d. Mewujudkan Stabilitas Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global
   (1) Terciptanya Jakarta yang Aman, Damai, dan Partisipatif
   (2) Terciptanya Ekonomi Jakarta yang Stabil, Kuat, dan Mandiri
   (3) Terwujudnya Jakarta yang Berpengaruh di Kancah Global

e. Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis
   (1) Terwujudnya Jakarta yang Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
   (2) Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Pemuda yang Produktif
   (3) Terwujudnya Lingkungan Jakarta yang Berkualitas dan Berkelanjutan
   (4) Terwujudnya Jakarta Berketahanan Energi, Air, dan Berkemandirian Pangan
   (5) Terwujudnya Jakarta yang Tangguh dan Berketahanan terhadap Bencana serta Perubahan Iklim.

4.3 Jakarta Rendah Karbon untuk Ketahanan Iklim

Pembangunan rendah karbon merupakan *platform* baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan dengan emisi gas rumah kaca rendah dan penggunaan sumber daya alam yang efisien. Pembangunan rendah karbon merupakan salah satu strategi transisi untuk menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan rendah karbon juga menjadi tulang punggung menuju ekonomi hijau untuk mencapai visi Indonesia maju 2045 dan mencapai nol emisi pada tahun 2060. Fokus perencanaan pembangunan rendah karbon adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan emisi gas rumah kaca (karbon). Dalam konteks pembangunan di Indonesia, transformasi ekonomi menjadi ekonomi hijau dapat dijadikan sebagai salah satu strategi agar Indonesia dapat keluar dari "*middle income trap*", yang mana ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Oleh sebab itu kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, masyarakat sipil (CSO), dan warga lokal, sangat penting untuk mendorong suksesnya pembangunan rendah karbon.

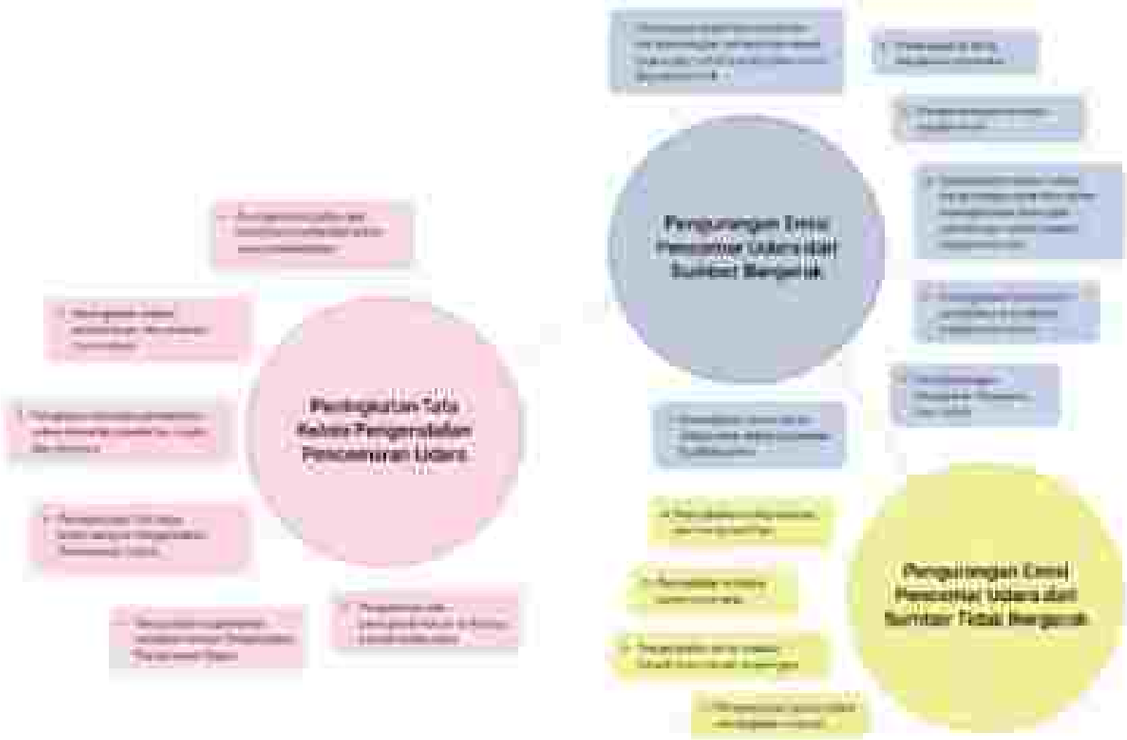
Pemerintah Pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menyiapkan 3 (tiga) strategi utama pembangunan rendah karbon sebagai bagian penting dari implementasi Ekonomi Hijau, yaitu: (1) Kebijakan *Net Zero Emissions* untuk menurunkan emisi gas rumah kaca; (2) Stimulus Hijau untuk pemulihan ekonomi; serta (3) Implementasi Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon untuk memenuhi target RPJMN. Selanjutnya, dalam implementasinya, pembangunan rendah karbon juga diharapkan dapat menjawab isu pada 3 (tiga) pilar TPB, yaitu: (1) lingkungan, melalui pengurangan emisi gas rumah kaca; (2) pertumbuhan ekonomi; dan (3) sosial melalui pengurangan kemiskinan. Dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB, setidaknya terdapat 11 (sebelas) tujuan yang terkait langsung dan diharapkan dapat dicapai melalui kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai berikut:

a. **Tujuan 1**: Tanpa Kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
b. **Tujuan 2**: Tanpa Kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
c. **Tujuan 6**: Air Bersih dan Sanitasi, yaitu menjamin ketersediaan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
d. **Tujuan 7**: Energi Bersih dan Terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
e. **Tujuan 8**: Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu meningkatkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
f. **Tujuan 9**: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
g. **Tujuan 11**: Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
h. **Tujuan 12**: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
i. **Tujuan 13**: Tindakan terhadap Iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
j. **Tujuan 14**: Kehidupan di Bawah Air, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
k. **Tujuan 15**: Kehidupan di Darat, yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pembangunan rendah karbon telah dituangkan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Sebagai implikasi dari penetapan undang-undang tersebut, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 akan digantikan dengan Peraturan Presiden mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK), sebagai transformasi dari kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca dimana di dalamnya telah memasukkan upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan jumlah dan intensitas emisi gas rumah kaca, serta kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti Perpres tersebut melalui Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) yang Berketahanan Iklim, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30% dan 50% dengan skenario ambisius pada tahun 2030 dan *nett zero emission* pada tahun 2050 pada sektor energi, limbah, IPPU (*Industrial Processes and Product Use*) dan AFOLU (*agriculture, forestry and other land use*). Selain itu DKI Jakarta telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 376 tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara yang berisi rencana aksi dan target pengendalian pencemaran udara hingga tahun 2030 beserta sektor pelaksananya.

Gambar 4.4
Strategi Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Kepgub Nomor 376 tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara, (2024)

Rencana Aksi Strategi Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 376 tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara, dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Strategi Pengendalian Pencemaran Udara:

a. **Peningkatan Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Udara**, dengan 6 (enam) program, yaitu:
   (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas inventarisasi emisi yang berkelanjutan.
   (2) Peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi mutu udara.
   (3) Pengkajian dampak pencemaran udara terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi.
   (4) Pembentukan tim kerja lintas sektoral Pengendalian Pencemaran Udara.
   (5) Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait Pengendalian Pencemaran Udara.
   (6) Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran udara.

b. **Pengaturan Emisi Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak**, dengan 7 (tujuh) program, yaitu:
   (1) Peremajaan angkutan umum dan pengembangan transportasi ramah lingkungan untuk transportasi umum dan pemerintah.
   (2) Penerapan uji emisi kendaraan bermotor.
   (3) Pengembangan kawasan rendah emisi.
   (4) Pengendalian emisi melalui pengurangan mobilitas dalam kerangka kerja sama pilar pemerintah - sektor swasta - masyarakat sipil.
   (5) Peningkatan infrastruktur penghubung sarana transportasi umum.
   (6) Pengembangan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
   (7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perbaikan kualitas udara.

c. **Pengurangan Emisi Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak**, dengan 3 (tiga) program, yaitu:
   (1) Peningkatan ruang terbuka dan bangunan hijau.
   (2) Peningkatan instalasi panel surya atap.
   (3) Pengendalian polusi udara dan kegiatan industri.

Provinsi DKI Jakarta melalui dokumen RPD Tahun 2023-2026 juga mencoba memasukkan kebijakan pengendalian pencemaran udara ke dalam salah satu sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu sasaran ke-3: **"Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon"** yang secara langsung mendukung tujuan pembangunan DKI Jakarta itu sendiri, yaitu Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan pada Dimensi *Built Environment*. Sasaran ini kemudian dicapai melalui 17 (tujuh belas) strategi dan 19 (sembilan belas) kegiatan prioritas.

Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dalam Pencapaian Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon:

a. Membangun orientasi pembangunan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas seluruh pemangku kepentingan penyelenggara bangunan gedung.
b. Pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan.
c. Menurunkan Beban Pencemaran Lingkungan.
d. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau.
e. Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi.
f. Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha.
g. Peningkatan keterlibatan dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
h. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.
i. Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap.
j. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
k. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
l. Melakukan Pembangunan/ Penataan/ Penghijauan Hutan untuk meningkatkan kualitas Hutan Kota.
m. Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan.
n. Melaksanakan inventarisasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
o. Melaksanakan diklat dan pemberdayaan tentang kehutanan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan SDM Dinas sesuai dengan perkembangan teknologi.
p. Melakukan inventerisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS di Provinsi DKI Jakarta.

q. Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota.

Kegiatan Prioritas Provinsi DKI Jakarta dalam Pencapaian Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

a. Penataan Bangunan Gedung.
b. Perencanaan Lingkungan Hidup.
c. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
d. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
e. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
f. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
g. Pelaksanaan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
h. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
i. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
j. Pengelolaan Perikanan Tangkap.
k. Pengelolaan Perikanan Budidaya.
l. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
m. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
n. Pengelolaan Hutan.
o. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
p. Diklat, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
q. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
r. Pengelolaan Energi Terbarukan dan Ketenagalistrikan.

Untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran ke-3: "Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon" dari misi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada kegiatan prioritas di atas, dirumuskan dua indikator di tahun 2025, yaitu:

Tabel 4.15
Target Indikator Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Tahun 2025

Visi	Satuan	Target 2025	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	55,93	Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase	14,65	

Sumber: BA Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024, 2024

Target indikator tersebut akan dilaksanakan pada aksi mitigasi perubahan iklim yang terdiri dari 5 (lima) sektor yaitu (1) Energi; (2) AFOLU; (3) Limbah; (4) IPPU; (5) lainnya (diplomasi perubahan iklim dan aksi adaptasi perubahan iklim yang terdiri dari 6 (enam) sektor, yaitu: (1) Kesehatan; (2) Sumber Daya Air; (3) Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (4) Energi; (5) Ketahanan Pangan; (6) Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun untuk kegiatan yang tidak termasuk dalam keenam sektor tersebut dibuat pengembangan dengan menambahkan 10 bidang tambahan yaitu: (1) Infrastruktur Transportasi; (2) Limbah; (3) Tata Guna Lahan; (4) Pertanian; (5) Kehutanan; (6) Kesamanan; (7) Pariwisata; (8) ITK serta Sosial; dan (9) Komunitas; dan (10) Budaya sebagaimana tertera di dalam pasal 9 ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.

4.4 Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2025

Pembangunan sangat berkaitan erat dengan upaya penyelesaian suatu masalah yang melekat dan berkembang di dalamnya. Serangkaian tindakan yang diatur dalam rangka penyelesaian masalah tersebut akan berhasil dengan baik jika ditunjang oleh suatu proses perencanaan pembangunan yang matang. Salah satu prasyarat bahwa proses pembangunan akan mencapai sasarannya ialah dengan mengetahui apakah isu dan permasalahan utama di suatu wilayah dapat dikenali dan dirumuskan dengan baik atau tidak. Dalam implementasinya, isu dan permasalahan sering dianggap sebagai dua hal yang sama, walaupun sebenarnya keduanya berbeda. Permasalahan merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat (perbedaan antara kondisi riil ekspektasinya). Sementara isu merupakan permasalahan-permasalahan yang dipertimbangkan. Berdasarkan kerangka waktunya, isu dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu isu saat ini (isu yang telah ada dan sedang aktif), serta isu yang akan datang (isu yang perlu untuk diantisipasi karena dikhawatirkan akan terjadi di masa yang akan datang atau dalam waktu dekat).

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pembangunan yang ideal, setiap pelaku pembangunan harus mampu melihat suatu permasalahan maupun isu sebagai sebuah tantangan. Hal tersebut dikarenakan tantangan itu sendiri merupakan hal atau objek yang dapat menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi suatu permasalahan maupun isu. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan, permasalahan atau isu harus sangat diperhatikan dan dijadikan sebagai sebuah tantangan dikarenakan dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Adapun untuk menentukan data atau informasi yang akan dijadikan sebagai suatu permasalahan ataupun isu strategis dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
b. Merupakan tugas dan tanggung jawab, baik untuk Pemerintah Pusat atau Daerah;
c. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
d. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan;
e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.4.1 Tantangan Strategis Pembangunan Nasional Tahun 2045-2029

Sebagaimana telah dijabarkan pada BAB I, untuk menjadi negara maju di tahun 2045, terdapat 3 (tiga) tantangan utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, yaitu kondisi geopolitik, akselerasi teknologi dan informasi, serta perubahan iklim. Tiga tantangan tersebut juga diyakini menjadi 3 (tiga) tantangan dari 8 (delapan) tantangan strategis yang harus dihadapi dan menjadi perhatian utama Bangsa Indonesia dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penjelasan serta implikasi dari masing-masing tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Perubahan Iklim**

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyatakan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan cuaca ekstrem di seluruh dunia. Dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem tersebut tidak hanya berupa kenaikan suhu global yang menjadikan tahun 2023 disebut sebagai tahun terpanas, tetapi juga berdampak pada meningkatnya kuantitas bencana alam seperti banjir dan badai. Dampak yang timbul dari fenomena tersebut tidak hanya berupa statistik, tetapi juga memengaruhi secara langsung kelompok paling rentan khususnya di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Di Indonesia sendiri, fenomena perubahan iklim berupa kenaikan suhu rata-rata muka bumi telah mengakibatkan perubahan pola cuaca menjadi sangat ekstrem (pemanasan global dan naiknya permukaan air laut). Bank Indonesia menyatakan bahwa,

berdasarkan hitungannya, kerugian ekonomi yang ditanggung oleh Indonesia sebagai dampak dari perubahan iklim di tahun 2023 mencapai Rp.112 triliun atau setara dengan 0,5 persen PDB meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 dan 2022). Oleh karena itu, berdasarkan kondisi tersebut, perubahan iklim menjadi bagian dari tantangan strategis Indonesia untuk 5 (lima) tahun ke depan dikarenakan dampak yang akan ditimbulkan cukup signifikan (turunnya produksi pangan, peningkatan kerawanan pangan, peningkatan harga pangan, serta mengancam keselamatan jiwa).

b. **Konflik Bersenjata di Ukraina dan Palestina**

Center of Digital Economy and Small and Micro Enterprises (SMEs) INDEF menyatakan bahwa perang antara Rusia dengan Ukraina dengan eskalasi ketegangan di Timur Tengah antara Israel dengan Palestina telah membawa dampak di banyak negara. Ketegangan geopolitik secara global tersebut telah menyebabkan harga minyak dunia mengalami pelonjakan yang cukup besar yang memicu terjadinya krisis pangan energi, kenaikan suku bunga, dan terhambatnya arus logistik. Ketegangan geopolitik sebagaimana dimaksud juga berimbas pada keterlambatan infrastruktur, yang berisiko secara langsung terhadap stabilitas pasar dan komoditas, distribusi kebutuhan pangan dan non-pangan hingga perdagangan secara umum. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya konflik bersenjata, maka negara-negara yang selama ini menjadi pemasok kebutuhan pangan maupun non-pangan, berpotensi menunda bahkan memutus pasokan ekspor dan impor. Bagi negara seperti Indonesia sendiri yang beberapa kebutuhan bahannya masih tergantung pada impor atau melalui pasar internasional, maka konflik bersenjata seperti di Ukraina dan Palestina akan memberikan dampak langsung, seperti kenaikan harga pangan dan energi. Oleh karena itu, konflik bersenjata di Ukraina dan Palestina menjadi bagian dari tantangan strategis Indonesia untuk 5 (lima) tahun ke depan dikarenakan sampai dengan saat ini harga pangan dan energi semakin menghadapi krisis, sehingga ke depan kondisi tersebut akan semakin membebani perekonomian, mengurangi proses produksi, dan berpotensi untuk meningkatkan inflasi tidak terkecuali Indonesia.

c. **Potensi Konflik Bersenjata di Laut Natuna Utara**

Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan strategis yang kaya akan sumber daya alam. Kondisi tersebut menjadikan Laut Cina Selatan menjadi arena persaingan kekuatan besar antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok menegaskan dominasinya melalui pembangunan militer dan pembangunan pulau buatan, sementara Amerika Serikat dan sekutunya mendukung kebebasan navigasi dan supremasi hukum. Pertaruhan perekonomian di Laut Cina Selatan sangat besar, yang mana kawasan ini merupakan saluran penting bagi perdagangan global dengan nilai pengiriman barang lebih dari $3 triliun setiap tahunnya. Bagi Indonesia, menjamin keamanan jalur Laut Cina Selatan merupakan hal penting bagi stabilitas perekonomian, utamanya ladang gas Natuna yang diperkirakan menampung 46 triliun kaki kubik gas alam, merupakan sumber daya penting bagi ketahanan energi dan pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, ketegangan di Laut Cina Selatan mempunyai implikasi yang signifikan terhadap kedaulatan Indonesia, khususnya terhadap Pulau Natuna yang rentan terhadap ancaman eksternal dikarenakan dapat mengancam kelancaran rantai pasok pangan, energi, dan perdagangan yang melewati Arus Lintas Laut Indonesia (misi. Selat Malaka) dan Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, potensi konflik bersenjata di Laut Natuna Utara menjadi salah satu bagian dari tantangan strategis Indonesia untuk 5 (lima) tahun ke depan.

d. **Perlambatan Ekonomi Global**

Dinamika perekonomian global saat ini masih terus diliadapkan dengan berbagai risiko salah satunya adalah perlambatan kondisi perekonomian di sejumlah negara maju. Sejumlah negara maju seperti Jepang dan Inggris, saat ini sedang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi dan melemahnya permintaan domestik. Kondisi sebagaimana dimaksud perlu menjadi perhatian Indonesia utamanya hubungan Indonesia dengan Jepang. Hal tersebut dikarenakan

Indonesia saat ini telah memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan Jepang, baik pada aspek investasi sampun ekspor-impor, yang mana Jepang menjadi salah satu tujuan utama ekspor bagi Indonesia dengan komoditas utama batubara, komponen elektronik, nikel dan otomotif. Pada tahun 2023, tercatat ekspor Indonesia ke Jepang berada pada peringkat ke-4 dengan total ekspor mencapai USD18,8 miliar, sementara *Foreign Direct Investment* Jepang ke Indonesia tahun 2023 juga berada pada peringkat ke-4 dengan total sebesar USD4,63 miliar. Mempertimbangkan kondisi tersebut, perlambatan ekonomi global di beberapa negara menjadi bagian dari tantangan strategis Indonesia untuk lima tahun ke depan dikarenakan dengan adanya pelemahan ekonomi dapat menekan laju permintaan produk ekspor Indonesia dan meningkatkan suku bunga acuan, yang nantinya akan memberikan tekanan pada Rupiah.

e. **Disrupsi Kecerdasan Buatan**

Seiring dengan perkembangan zaman, *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan semakin memberikan manfaat bagi manusia. Kemampuan yang dimiliki AI, seperti dapat memecahkan masalah, mempelajari hal baru, serta memahami logika yang saling berkaitan membuatnya dapat diterapkan hampir di semua sektor. Kondisi tersebut menjadikan keberadaan AI di tengah kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua. Sisi positifnya, AI dapat melahirkan jutaan hal yang baru dan *promising* atau disebut *the fall and the rise*. Namun, di sisi lain, AI juga dapat 'membunuh' jutaan produk dan lapangan pekerjaan yang sudah ada, yang mana berdasarkan prediksi yang ada, AI akan berdampak ke 17 sektor lapangan usaha di Indonesia. Oleh karena itu, disrupsi kecerdasan buatan menjadi bagian dari tantangan strategis Indonesia untuk 5 (lima) tahun ke depan dikarenakan kecerdasan buatan dapat mengubah kebutuhan talenta di hampir semua industri dan memaksa peningkatan kemampuan tenaga kerja secara cepat.

f. **Ancaman Pandemi Baru**

Salah satu tantangan strategis yang perlu menjadi perhatian Indonesia ke depan adalah terkait perubahan iklim. Tidak hanya berdampak pada sektor perekonomian, perubahan iklim juga dapat secara langsung berdampak pada sektor kesehatan, yaitu berkaitan dengan aspek penyakit menular dan tidak menular. Perubahan iklim juga dapat membuat interaksi hewan dan manusia mengalami perubahan hingga memicu terjadinya pandemi penyakit baru yang berasal dari hewan atau zoonosis. Salah satu contohnya, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa penurunan curah hujan dan suhu di Maluku telah meningkatkan kasus pneumonia hingga 96 persen dan diare sebesar 19 persen. Selain itu, perubahan iklim juga dapat berdampak terhadap pemenuhan gizi masyarakat dikarenakan banyaknya komoditas pangan yang akan terancam. Di sisi lain, kondisi Bumi yang semakin panas dan tingginya paparan radiasi dari sinar matahari dapat meningkatkan potensi kanker kulit pada manusia. Oleh karena itu, ancaman pandemi baru utamanya yang disebabkan oleh perubahan iklim menjadi bagian dari tantangan strategis Indonesia untuk lima tahun ke depan.

g. **Terbatasnya Waktu Bonus Demografi**

Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Pada hakekatnya, bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) berusia produktif yang melimpah. Namun, apabila bonus demografi gagal dimanfaatkan maka akan sangat berbahaya ketika suatu negara masuk ke masa *aging population* atau masa di mana jumlah penduduk berusia tua lebih besar dari jumlah produktif. Oleh karena itu, Pemerintah memprediksikan bahwa Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun untuk bisa keluar dari perangkap negara menengah (*middle income trap*) atau berisiko jadi negara yang tua sebelum kaya.

h. **Meningkatnya Populasi**

Sampai dengan saat ini, pertumbuhan penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi pangan. Gap pertumbuhan ini semakin besar dengan kondisi dimana ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang, akibat konversi lahan ke non pertanian yang disebabkan pertumbuhan penduduk tersebut. Bertambahnya populasi mengakibatkan semakin meningkatnya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan dan papan. Dengan demikian, dalam kondisi seperti ini pertanian Indonesia sedang mengalami *double pressure*, yaitu tarikan permintaan (kebutuhan pangan dan papan) dan penawaran (penurunan luasan lahan pertanian sebagai akibat dari penggunaan lahan pertanian ke lahan non pertanian, seperti perumahan, pabrik, perkantoran, dll) yang keduanya semakin besar pada masa yang bersamaan. Pemerintah telah memprediksikan bahwa diburuhkan tambahan 56% produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan 10 miliar populasi dunia di tahun 2050, dengan kebutuhan luas lahan tambahan setara 2x dari luas negara India, menjadikan pemenuhan pangan untuk semua akan sangat menantang.

4.4.2 Isu Strategis Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perumusan isu strategis Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya serta isu strategis yang tercantum dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Untuk jangka waktu lima tahun, DKI Jakarta memiliki enam isu strategis, yaitu:

a. Ketahanan Terhadap Bencana.
b. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas.
c. Ketahanan Ekonomi Inklusif.
d. Pemerataan Pembangunan.
e. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara.
f. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik.

Isu strategis tersebut selanjutnya akan dilakukan penfokusan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Dinamika tantangan maupun isu strategis global, nasional, dan kewilayahan;
b. Perpindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan;
c. Kondisi kewilayahan Provinsi DKI Jakarta; dan
d. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Memperhatikan dinamika permasalahan maupun isu strategis global dan nasional bertujuan agar rumusan isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta memiliki keselarasan dengan tantangan maupun isu yang saat ini sedang menjadi perhatian utama Pemerintah Pusat. Memperhatikan dinamika permasalahan maupun isu strategis kewilayahan dimaksudkan agar rumusan isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta dapat selaras dan mengakomodir permasalahan pembangunan yang ditemukan di wilayah kota administrasi maupun kabupaten administrasi. Sedangkan memperhatikan kondisi kewilayahan dan hasil evaluasi, di dalamnya mencangkup kondisi serta posisi DKI Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara serta upaya Provinsi DKI Jakarta mencapai rendah karbon untuk ketahanan iklim.

Sebagaimana telah dijabarkan pada subbab sebelumnya, ke depan DKI Jakarta akan berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia yang memiliki hubungan mengikat dengan kota-kota lain serta memiliki dampak langsung dan nyata pada urusan social ekonomi global. Walaupun demikian, posisi DKI Jakarta saat ini masih belum cukup kompetitif jika dibandingan dengan kota global lainnya. Hal tersebut dikarenakan DKI Jakarta masih memiliki berbagai tantangan besar yang harus diselesaikan, antara lain kepadatan penduduk, kurangnya tenaga kerja terampil, permukiman kumuh, kemacetan, pengelolaan persampahan, akses air bersih, pengelolaan limbah, tingginya risiko bencana alam, polusi udara, serta tantangan perubahan iklim. Oleh karena itu, berbagai kondisi di atas menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam merumuskan isu strategis Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2025.

Tabel 4.16
Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	Gap Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Perpindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara 2. Perubahan Iklim 3. Konflik Berenjata di Ukraina dan Palestina 4. Potensi Konflik Bersenjata di Laut Natuna Utara 5. Perlambatan Ekonomi Global 6. Disrupsi Kecerdasan Buatan 7. Ancaman Pandemi Baru 8. Terbatasnya Waktu Bonus Demografi 9. Meningkatnya Populasi	1. Ruang Nyaman untuk Dihuni 2. Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Berkelanjutan 3. Aksesibilitas yang Terkoneksi Secara Intra dan Inter Kota	1. Rendahnya penggunaan transportasi publik 2. Panjangnya waktu tempuh akibat kemacetan 3. Konektivitas kemudia bandara belum optimal 4. Rendahnya konektivitas Jakarta terhadap kota-kota dunia lainnya 5. Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau di Jakarta 6. Belum baiknya kualitas lingkungan hidup di wilayah Jakarta 7. Sistem pengelolaan sampah yang di Jakarta yang belum efisien untuk mendorong pembangunan berkelanjutan	Ketahanan Terhadap Bencana	1. Tingginya tingkat urbanisasi. 2. Meningkatnya tingkat kemacetan menimbulkan pola pergerakan yang tidak efisien. 3. Pembangunan kota yang car-oriented. 4. Masih terdapat warga miskin/rentan miskin yang belum mendapatkan akses kebutuhan dasar dan kesempatan kehidupan yang layak (akses air bersih, permukiman dan sanitasi layak, serta bayi miskin dan rentan miskin belum memperoleh nutrisi yang cukup). 5. Belum optimalnya pelaksanaan naturalisasi dan normalisasi sumber daya alam seperti danau dan sungai. 6. Banjir yang disebabkan oleh alih fungsi lahan, penyempitan serta pendangkalan saluran pembuangan air, penataan sungai, serta pembuatan sumur resapan. 7. Perda tentang RDTR belum dapat menangani permasalahan banjir, macet, dan hunian bangunan.	**Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota** Fokus utama: 1. Kualitas Layanan Transportasi Publik 2. Banjir 3. Kualitas Lingkungan 4. Sampah 5. Energi Baru Terbarukan 6. Air Bersih dan Air Minum 7. Bencana 8. Kualitas Udara 9. Akses Hunian Layak

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	Gap Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8. Belum maksimalnya pengelolaan energi yang berkelanjutan 9. Belum menyeluruhnya sistem pengelolaan air bersih di Jakarta 10. Terbatasnya pengelolaan sanitasi dan pengelolaan air limbah		8. Menurunnya kualitas udara ambien akibat emisi kendaraan bermotor dan cerobong industri, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik. 9. Belum maksimalnya transformasi ke kendaraan rumah lingkungan (elektrifikasi) moda pribadi maupun massal. 10. Masih rendahnya kinerja pengaturan mitigasi banjir. 11. Penurunan muka tanah di beberapa kawasan. 12. Masih rendahnya kinerja pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh. 13. Belum optimalnya edukasi masyarakat terkait perubahan iklim dan pencemaran. 14. Perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan 15. Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah atau *Reuse, Reduce* dan *Recycle* (3R). 16. Belum optimalnya pendekatan cara penanganan sampah terutama	

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	Gap Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dalam hal penyediaan kapasitas fasilitas pengangkutan.	
			Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas	1. Belum meratanya fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda di setiap ruas jalan. 2. Masih terbatasnya lebar jalan yang disediakan untuk pejalan kaki dan jalur sepeda. 3. Belum maksimalnya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jaringan utilitas. 4. Pengembangan hunian yang belum mempertimbangkan aksesibilitas. 5. Belum optimalnya integrasi fasilitas transportasi seperti fisik, tarif, dan waktu. 6. Keterseblasan dan pelayanan transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu masih terbatas untuk mobilitas pergerakan orang dan barang, sehingga mengurangi aksesibilitas dan konektivitas dengan Kota Jakarta. 7. Belum adanya kebijakan-kebijakan baik pada level pusat dan daerah yang saling mendukung satu sama lain untuk dapat menjadi insentif dan disinsentif bagi pengguna transportasi umum dan kendaraan	

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	Gap Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pribadi, seperti regulasi yang mengatur kepemilikan kendaraan pribadi baik di Jakarta dan di area penyangganya.	
	1. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi Secara Global 2. Kapasitas Riset dan Inovasi yang Baik dan Menerus 3. Menarik Wisatawan untuk Berkunjung	1. Produktivitas ekonomi di Jakarta belum cukup bersaing dengan kota-kota global lainnya di dunia 2. Iklim usaha dan investasi di Jakarta belum kondusif dibandingkan dengan kota-kota global lainnya 3. Kualitas pendidikan tinggi sebagai pintu gerbang riset dan inovasi belum berdaya saing 4. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya riset Jakarta 5. Iklim riset belum optimal dalam mendukung penciptaan inovasi dan	Ketahanan Ekonomi Inklusif	1. Masih rendahnya peran kelompok penduduk dengan pendapatan rendah dalam pembentukan total pendapatan yang diterima penduduk DKI Jakarta. 2. Indeks Rasio Gini DKI Jakarta sampai dengan Maret 2023 masih berada di angka 0,431. 3. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2023 (4,96% lebih rendah dibanding tahun 2022 (5,25%) 4. Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) yang masih berfluktuatif dan belum kembali pada capaian sebelum Pandemi COVID-19. 5. Kurangnya kesiapan angkatan kerja untuk membuat usaha mandiri. 6. Belum optimalnya pengelolaan lapangan kerja dalam upaya mendorong tingkat kemudahan berbisnis. 7. Masih rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, yaitu kualitas kompetensi yang dimiliki	**Pertumbuhan Ekonomi** Fokus utama: 1. Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization*) 2. Daya Saing Ekonomi 3. Investasi Daerah 4. Daya Tarik Pariwisata 5. Kesempatan Kerja

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	Gap Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pengembangan bisnis		belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. 8. Belum memadainya keberadaan sentra ekonomi UKM dan industri kreatif baik secara offline - online. 9. Belum optimalnya pelaksanaan kajian dan penelitian dalam tiap perencanaan. 10. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan riset dalam perencanaan dan pembangunan daerah. 11. Belum optimalnya peran serta perangkat daerah dalam penelitian dan pembangunan daerah.	
			Pemerataan Pembangunan	1. Pengembangan destinasi yang belum maksimal di Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 2. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) khususnya. 3. Masih ditemukan kesenjangan antar wilayah di DKI Jakarta, baik dari sisi tingkat kemiskinan maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	**Kesejahteraan Masyarakat** Fokus utama: 1. Partisipasi Pendidikan Tinggi 2. Stunting 3. Kemiskinan 4. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial 5. Layanan Pendidikan 6. Ketahanan Pangan

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	Gap Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				4. Belum meratanya distribusi sarana prasarana Kesehatan dan sumber daya manusia Kesehatan. a. Belum optimalnya tingkat kemandirian alat kesehatan dan farmasi b. Masih terdapat kelurahan yang belum memiliki Puskesmas mandiri (status kepemilikannya masih kontrak) 5. Belum optimalnya penyediaan fasilitas ramah disabilitas. 6. Tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat pada satu jenis bahan pangan pokok yaitu beras. 7. a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). 8. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya berfluktuatif di setiap tahunnya. 9. Terbatasnya Puskesmas yang memiliki layanan Psikolog dan koordinasi dengan satuan pendidikan.	
	1. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi Secara Global	1. Kualitas SDM yang masih rendah 2. Kesejahteraan masyarakat belum	Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara	1. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak yang berdampak pada	

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	Gap Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Kapasitas Riset dan Inovasi yang Baik dan Menerus 3. Ruang Nyaman untuk Dihuni	merata seluruhnya 3. Kualitas pendidikan yang tidak berbeda jauh		tingginya prevalensi stunting dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang belum optimal. 2. Masih tingginya angka pernikahan di DKI Jakarta dalam satu tahun dan kehamilan di tahun pertama pernikahan. 3. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan orang tua terkait kesehatan dan tumbuh kembang anak usia dini. 4. Masih ditemukan kasus prevalensi stunting. 5. Masih minimnya total keluarahan yang menjadi kawasan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Sampai dengan tahun 2022, total kelurahan yang sudah menjadi kawasan STBM yaitu baru 9 Kelurahan. 6. Menurunnya capaian indikator persentase OPD yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. 7. Belum optimalnya tahap verifikasi dan validasi data DTKS, khususnya dalam hal pemberian bantuan sosial.	

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	Gap Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
				8. Menurunnya angka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 9. Menurunnya jumlah sarana sosial (panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dll). 10. Belum optimalnya pengintegrasian data untuk program kependudukan.	
	1. Ekonomi yang Maju dan Terkoneksi Secara Global 2. Kapasitas Riset dan Inovasi yang Baik dan Mencerdaskan 3. Ruang Nyaman untuk Dihuni 4. Menarik Wisatawan untuk Berkunjung 5. Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Berkelanjutan 6. Aksesibilitas yang Terkoneksi Secara Intra dan Inter Kota	1. Masih rendahnya pembangunan dan kualitas sumber daya manusia akibat mismatch keterampilan dan minimnya keahlian berdaya saing global	Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Belum terciptanya budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. 2. Belum optimalnya kolaborasi *quatro-public* untuk memaksimalkan dampak positif dari *platform digital* untuk industri dan masyarakat. 3. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi. 4. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga, serta pengawasan secara *collaborative* oleh para pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat.	**Tata Kelola Pemerintahan** Fokus utama: 1. Transformasi dan Digitalisasi 2. Layanan Publik 3. Penggunaan TIK 4. Iklim Riset dan Inovasi

Tantangan Global dan Nasional	Parameter Kota Global	Gap Status Menuju Kota Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
				5. Masih ditemukan ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN. 6. Adanya tuntutan Revolusi Industri 4.0 akan PNS yang mampu melayani Masyarakat dengan cepat menggunakan sarana digital; 7. Adanya tuntutan reformasi akan aparatur yang memenuhi standar kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis serta pemerataan.	

Rujukan: 1. Dokumen Rancangan RPP Tahun 2025, 2024 (diolah)
2. Hasil Kajian Capaian Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global, 2024 (diolah)
3. Dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, 2024 (diolah)

Sebagaimana tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2025, terumuskan 4 (empat) isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

a. Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota
b. Pertumbuhan Ekonomi
c. Kesejahteraan Masyarakat
d. Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis pembangunan tersebut merupakan bagian dari isu strategis Provinsi DKI Jakarta untuk jangka menengah (lima tahun) sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Adapun penjelasan terhadap masing-masing isu strategis pembangunan dan pemfokusannya di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya, suatu pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek mulai dari potensi yang dimiliki wilayah setempat sampai kepada kondisi lingkungan yang ada, baik fisik (tanah, air, udara), biotik (flora, fauna), maupun kultur (budaya, interaksi antarmanusia). Kota Berkelanjutan merupakan konsep pembangunan wilayah yang saat ini dijadikan sebagai landasan dasar pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Kota berkelanjutan itu sendiri merupakan kota yang dalam pembangunan dan pengelolaannya telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan baik fisik, sosial, ekonomi, budaya, keuangan, kesehatan, dan lainnya. Pilar utama yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah terkait kualitas lingkungan serta infrastruktur kota. Oleh karena itu, kualitas lingkungan dan infrastruktur kota menjadi isu strategis utama Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 yang berfokus pada beberapa hal, yaitu: (1) Akses Hunian Layak; (2) Kualitas Layanan Transportasi Publik; (3) Kualitas Udara; (4) Kualitas Lingkungan; (5) Bencana; (6) Banjir; (7) Sampah; (8) Air Bersih dan Air Minum; dan (9) Energi Baru Terbarukan.

Sebagaimana diketahui, saat ini hampir setengah dari populasi dunia tinggal di kawasan perkotaan. DKI Jakarta sebagai salah satu kota megapolitan sampai dengan saat ini masih memiliki pekerjaan rumah untuk memenuhi standar infrastruktur dan layanan dasar agar dapat berdiri sejajar dengan kota global lainnya. Infrastruktur dan layanan dasar perkotaan berkualitas yang dimaksud antara lain mencakup akses air bersih dan permukiman layak huni. Upaya konservasi dan pengelolaan air secara berkelanjutan dilakukan dengan merehabilitasi sumber daya air, meminimalkan kebocoran air, mendorong penggunaan kembali air, serta menambah tempat penyimpanan dan penampungan air sebagai alternatif sumber air baku, dengan mempertimbangkan siklus air. Pada tahun 2022 akses layanan sumber air minum layak di DKI Jakarta telah mencapai 99,42%, namun demikian, untuk akses air minum perpipaan baru mencapai 65,89%, dengan tingkat kebocoran sebesar 46,67% *Non Revenue Water* (NRW). Tingkat kebocoran air tersebut memberikan gambaran bahwa dalam kurun waktu satu tahun, Provinsi DKI Jakarta telah kehilangan sebanyak 46,67% air, serta memberikan gambaran pula bahwa DKI Jakarta untuk mencapai tingkat akses air minum perpipaan sebesar 89,02% dan tingkat kebocoran NRW menjadi 40% di tahun 2026 masih memerlukan upaya penanganan yang cukup banyak.

Selanjutnya, seiring dengan pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta yang semakin bertambah di setiap tahunnya, menjadikan kebutuhan akan perumahan dan permukiman juga semakin meningkat, yang mana hingga saat ini peruntukan lahan untuk perumahan dan permukiman sudah menduduki proporsi terbesar di DKI Jakarta. Namun, dalam kenyataannya tingginya permintaan terhadap perumahan dan permukiman tersebut, tidak disertai dengan pertambahan jumlah perumahan dan permukiman, sehingga mengakibatkan adanya *backlog* (kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat). Berdasarkan data yang ada, DKI Jakarta merupakan provinsi kedua dengan *backlog* perumahan terbesar di Indonesia, yang mana persentase kepemilikan rumah di DKI Jakarta hanya sebesar 56,6%. Persentase ini

menggambarkan bahwa sekitar 2,78 juta rumah tangga yang ada di DKI Jakarta, sebanyak 63% atau sekitar 1,77 juta rumah tangga belum memiliki rumah sendiri atau belum memiliki rumah yang sehat dan layak huni. Adapun hal yang menjadi persoalan utama dalam upaya Pemerintah untuk menyediakan hunian adalah keterbatasan lahan dan mahalnya harga lahan. Kondisi demikian menjadikan tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah saja yang pada akhirnya mengalami kesulitan memperoleh hunian, namun, juga para pekerja dan kelas menengah.

Selain berdampak pada peningkatan kebutuhan akan perumahan dan permukiman, penambahan jumlah penduduk juga berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Berdasarkan data, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, yang mana per 31 Desember 2023 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 11.495.973. Sepeda motor merupakan jenis kendaraan bermotor dengan jumlah terbanyak, yaitu 8.750.446 (76,12%). Padahal, sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk bisa mengurangi jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta, khususnya untuk kendaraan yang difungsikan sebagai kendaraan pribadi, dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penggunaan kendaraan pribadi, maka tingkat kemacetan akan semakin buruk. Kondisi kemacetan di DKI Jakarta dapat tergambar salah satunya melalui data yang dikeluarkan oleh Lembaga TomTom *Traffic Index*, yang mana disebutkan bahwa pada tahun 2023 DKI Jakarta menempati urutan ke-30 sebagai kota termacet di dunia. Sepanjang tahun 2023, 225 jam waktu yang dihabiskan untuk mengemudi, 117 jam di antaranya karena kemacetan yang terjadi di jam-jam sibuk (pukul 18.00 WIB sampai 19.00 WIB). Kondisi tersebut memberikan kesimpulan bahwa dalam satu tahun, warga Jakarta harus menghabiskan 117 jam atau setara 4 hari 21 jam untuk berkendara dalam kemacetan. Merespon hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengembangkan transportasi publik guna mengurangi tingkat kemacetan, walaupun sampai dengan tahun 2023, penggunaan transportasi publik (*public transport mode-share*) di DKI Jakarta baru mencapai angka <30%. Kondisi demikian memberikan gambaran bahwa transportasi publik belum menjadi transportasi utama atau andalan bagi masyarakat DKI Jakarta.

Tingkat kemacetan yang semakin meningkat sebagaimana penjabaran di atas, menjadi salah satu penyumbang utama buruknya kualitas udara di DKI Jakarta. Hal tersebut didukung oleh hasil kajian yang menyatakan bahwa, sampai dengan tahun 2023, kadar pelutan PM 2,5 di DKI Jakarta mayoritas disumbang oleh sektor transportasi, yaitu sebesar 67%. Walaupun telah ada kebijakan uji emisi dan kebijakan ganjil genap, namun, realitanya pada jam-jam berangkat maupun pulang kerja kendaraan pribadi masih mendominasi jalanan di DKI Jakarta. Dominasi kendaraan tersebut telah menyumbang emisi mencapai 81,17 juta kg CO_2e. Penurunan tingkat kualitas udara di DKI Jakarta selain disebabkan oleh emisi kendaraan, disebabkan pula oleh kegiatan pembakaran sampah secara terbuka sebagaimana hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Apabila melihat total produksi sampah yang dihasilkan masyarakat DKI Jakarta, berdasarkan data yang ada, volume sampah selalu meningkat di setiap periodenya (angka timbulan sampah diperkirakan 3,4 liter tiap orang/hari dan kepadatan sampah adalah 0,20 kg/liter). Tingginya volume sampah tersebut, sampai dengan saat ini masih belum diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk daur ulang sampah atau *Reuse, Reduce dan Recycle* (3R), sehingga masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan pembakaran sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkannya.

Kegiatan pembakaran sampah sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil kajian yang ada, telah menghasilkan emisi karbondioksida sebesar 12.627 gigagram per tahun atau hampir setara dengan pembakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan pada tahun 2021 yang mencapai 14.280 gigagram per tahun. Pelaku pembakaran sampah di DKI Jakarta berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh WasteForChange bersama Yayasan Bicara Udara terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu pelaku perorangan yang membakar sampah atas kemauan sendiri, pelaku perorangan yang disuruh untuk membakar, dan pelaku bisnis. Lebih lanjut, diketahui bahwa sebanyak 61,5% aktivitas pembakaran

sampah di DKI Jakarta didominasi oleh perempuan, 36% di antaranya merupakan ibu rumah tangga. Hasil kajian yang ada juga menunjukkan bahwa sebesar 31% aktivitas pembakaran sampah sudah menjadi kebiasaan di lingkungan warga setempat, dikarenakan pelaku tidak ingin mengeluarkan biaya untuk iuran pengangkutan sampah. Padahal telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang secara tegas menetapkan sanksi administratif berupa uang paksa sebesar Rp.500.000 bagi siapa saja yang salah mengelola sampah, salah satunya dengan membakar sampah. Namun, hal tersebut masih belum menjadikan masyarakat DKI Jakarta tertib dalam melakukan pengolahan sampah.

Berbagai kondisi di atas, memberikan gambaran bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, masih cukup banyak tantangan serta isu yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun kemudian perubahan iklim juga merupakan salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian, baik oleh masyarakat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana seperti kekeringan, banjir dan longsor, kegagalan panen, kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, serta wabah penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Tingkat urbanisasi yang cukup tinggi di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 136.000 orang pendatang selama tahun 2023 (menurun dibandingkan tahun 2022 dan meningkat dibandingkan tahun 2021) diyakini menjadi salah satu pemicu terjadinya perubahan iklim. Hal tersebut dikarenakan sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, perkembangan dan pembangunan di DKI Jakarta tumbuh sangat pesat di setiap tahunnya. Perkembangan dan pembangunan dalam bentuk kegiatan konstruksi berskala besar, serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman menyebabkan berkurangnya luas daerah resapan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, ditambah pula dengan kondisi dimana sebagian besar tanah sudah menjadi hak milik perseorangan, kian mempersulit pemataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan.

Sepanjang tahun 2023, terdapat 1.258 kejadian bencana yang memberikan dampak signifikan di DKI Jakarta. Bencana tersebut terdiri atas 664 kejadian kebakaran pada gedung dan permukiman, 65 kejadian banjir, 234 kejadian pohon tumbang, 22 kejadian tanah longsor, 4 kejadian angin kencang, dan 69 kejadian bencana atau peristiwa lainnya. Dampak dari kejadian ini melibatkan evakuasi kepada 9.361 orang, 362 orang luka-luka, dan 97 orang meninggal dunia. Selain itu, 3.004 rumah, 537 perkantoran/pertokoan, 16 fasilitas publik, dan 511 fasilitas lainnya terdampak kerusakan akibat bencana tersebut. Total kerugian yang diakibatkan dari berbagai kejadian bencana tersebut diperkirakan mencapai Rp272.337.749.995. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan dari 1.220 kejadian pada tahun 2022 menjadi 1.258 pada tahun 2023. Peristiwa kebakaran sangat mendominasi kejadian bencana di DKI Jakarta selama tahun 2023 dikarenakan fenomena El Nino dan IOD Positif saling menguatkan, sehingga menyebabkan musim kemarau di tahun 2023 menjadi lebih kering yang berdampak pada tingginya frekuensi kebakaran pada musim kemarau ekstrem. Adapun penggunaan listrik, pembakaran sampah dan rokok masih menjadi faktor terbesar penyebab kebakaran di Provinsi DKI Jakarta.

Bencana banjir juga menjadi peristiwa yang cukup banyak menimbulkan kerugian dalam kehidupan bermasyarakat. Rentannya DKI Jakarta terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari kondisi demografi yang memiliki tingkat kemiringan 0-3% dan 13 aliran sungai di dalam wilayahnya. Kemudian berdasarkan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD 2017-2022, kinerja jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi banjir di DKI Jakarta didominasi oleh klasifikasi jasa lingkungan kelas rendah (64,74%) dan sangat rendah (29,48%). Kinerja Jasa Lingkungan Hidup tersebut erat kaitannya dengan fungsi pengaturan air dan pada peran wilayah sebagai resapan. Sebaran kinerja sangat rendah di DKI Jakarta menghampar di tengah dan sepanjang aliran sungai. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan tipologi bentang alam berupa dataran fluvial landai, dataran fluvial sangat landai, dan dataran banjir yang merupakan dataran yang rentan

terhadap luapan air sungai. Oleh karena itu, kinerja pengaturan mitigasi banjir pada wilayah ini dinilai sangat rendah. Berbeda halnya dengan wilayah selatan Jakarta, dataran fluvio vulkanik menghampar di bagian selatan yang secara alami memiliki potensi resapan yang lebih baik dibandingkan tipologi dataran lain.

Mendasari beberapa kondisi di atas, maka 'kualitas lingkungan dan infrastruktur kota' dijadikan sebagai isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2025. Isu sebagaimana dimaksud, memiliki keselarasan dengan isu jangka menengah lima tahunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu isu Ketahanan Terhadap Bencana serta isu Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas.

b. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Dalam dua dekade terakhir, sebagaimana penjabaran pada bagian sebelumnya, baik pada level nasional maupun regional, Pemerintah Indonesia tidak terkecuali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menganticipasi dan memitigasi tantangan yang datang silih berganti. Sebagaimana diketahui, pada periode tersebut, eskalasi tensi geopolitik dan perang dagang telah menimbulkan fragmentasi global serta disrupsi rantai pasok. Kemudian, pandemi COVID-19 dan perubahan iklim telah mengancam ketahanan serta menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar. Di sisi lain, volatilitas harga komoditas dan dinamika sektor keuangan memunculkan tekanan pada pertumbuhan global. Di tengah berbagai guncangan tersebut, Pemerintah melalui instrumen fiskal dan berbagai strategi kebijakan mampu menopang kinerja perekonomian. Kondisi tersebut terbukti dari perekonomian Provinsi DKI Jakarta yang terus tumbuh dalam kurun waktu 15 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 5,4% setiap tahunnya. Adapun untuk menghadapi tantangan jangka panjang dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju 2045, kebijakan fiskal DKI Jakarta di tahun 2025 akan diarahkan untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan fokus utamanya adalah sebagai berikut: (1) Transformasi Ekonomi; (2) Daya Saing Ekonomi; (3) Investasi Daerah; (4) Daya Tarik Pariwisata; dan (5) Kesempatan Kerja.

Indonesia, melalui Kementerian PPN/Bappenas mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. *World Economic Forum* (WEF) sendiri mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan akan menjadi perhatian utama Pemerintah, tidak terkecuali DKI Jakarta dalam perencanaan pembangunan ke depan. Transformasi ekonomi yang inklusif pada hakekatnya selaras dengan salah satu prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu "*Leave No One Behind*". Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan akses dan kesempatan yang memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan meningkatkan kesejahteraannya hingga akhirnya mengurangi kesenjangan ekonomi antarkelompok dan wilayah. Sedangkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang dapat merestorasi kerusakan lingkungan yang telah terjadi dan terus menjaga kualitas lingkungan yang tidak saja dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini, akan tetapi juga mampu memberikan kesempatan dan harapan yang sama bagi generasi mendatang.

Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan konsep *Green Economy*, *Blue Economy*, serta *Gig Economy* yang saat ini telah menjadi perhatian global. *Green Economy* atau ekonomi hijau secara sederhana dipandang sebagai ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan bersifat inklusif secara sosial. *Blue Economy* atau ekonomi biru berkaitan dengan pembangunan yang terdiri atas berbagai sektor ekonomi dan kebijakan terkait yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Berbeda halnya dengan *Green Economy* dan *Blue Economy* yang berfokus pada pemanfaatan SDA untuk mencapai keberlanjutan, *Gig Economy* berfokus

pada individu atau pekerja, yang mana *Gig Economy* disebut sebagai sistem ekonomi yang menunjukkan kondisi di mana sesaorang dapat bekerja dengan bebas secara independen dan fleksibel. Ketiga konsep perekonomian di atas, ke depan perlu menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal ini disebabkan oleh kondisi dimana *gap* antara realisasi dan potensi ekonomi di DKI Jakarta masih cukup besar, utamanya *Gig Economy* yang sampai saat ini pelaksanaannya masih belum dilengkapi dengan payung hukum.

Selanjutnya, Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas juga telah mengeluarkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pembangunan dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Indeks sebagaimana dimaksud memuat tiga pilar utama, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi tinggi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; serta (3) perluasan akses dan kesempatan. Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 4,78% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,85%, yoy). Perekonomian DKI Jakarta apabila dilihat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp 896,09 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 528,10 triliun. Adapun struktur ekonomi DKI Jakarta triwulan I-2024 didominasi oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,91%. Sementara dari sisi pengeluaran, didominasi oleh proporsi Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 61,87%. Kedepannya, walaupun perekonomian DKI Jakarta dalam beberapa periode terus mengalami pertumbuhan, namun kondisi ekonomi global masih terus diwarnai berbagai gejolak serta tantangan berat yang harus dimitigasi. Selain itu, untuk menjadi kota global, DKI Jakarta juga perlu melakukan akselerasi terhadap mengingat kondisi perekonomian DKI Jakarta yang masih relatif tertinggal dibandingkan kota-kota bisnis global lainnya.

Dari sisi ketimpangan ekonomi yang diukur melalui rasio Gini, sampai dengan Maret 2023, rasio Gini Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 0,431 atau naik 0,019 dibandingkan kondisi September 2022 (0,412) dan naik sebesar 0,008 jika dibandingkan dengan Maret 2022. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa *gap* antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas semakin tinggi. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa masuknya pendatang ke Ibu Kota menjadi salah satu penyebab meningkatnya rasio Gini, utamanya jika pendatang tersebut baru berpotensi untuk mencari kerja. Selain kondisi ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan juga terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan ketahanan ekonomi inklusif juga berkorelasi erat dengan tingkat kemiskinan yang dalam implementasinya berkorelasi erat dengan aspek kehidupan lainnya (kesehatan, pendidikan, kualitas hidup masyarakat). Sebagaimana diketahui, tingkat kemiskinan DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi sebesar 4,44% pada Maret 2023 (menurun dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 4,69%). Walaupun demikian, capaian tersebut masih cukup jauh apabila dibandingkan dengan target kemiskinan DKI Jakarta untuk tahun 2023, yaitu 4,13%. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus dalam perbaikan kualitas kehidupan masyarakat DKI Jakarta, salah satunya melalui program peningkatan pendapatan masyarakat dan jaring pengaman sosial.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta dalam rangka mewujudkan Kota Jakarta yang berdaya saing adalah melalui pemberian kemudahan dalam berbisnis. Untuk mencapainya, DKI Jakarta perlu membenahi beberapa hal, salah satunya adalah terkait perizinan yang menjadi indikator Tingkat Kemudahan Berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB). Tahun ini, Indonesia diwakilkan oleh DKI Jakarta dan Surakarta) masih menempati peringkat 73 dari 190 negara yang disurvei oleh Bank Dunia. Kemudian, sampai dengan Agustus 2023, penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama di DKI Jakarta masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebesar 60,10%. Walaupun penduduk bekerja dengan status berusaha bukan menjadi status pekerjaan dengan persentase terendah, namun, gap

besaran persentase dengan total penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai cukup besar. Kondisi tersebut dikarenakan belum optimalnya penyediaan lapangan kerja dan tingkat kemudahan berbisnis di DKI Jakarta. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyederhanakan proses dan prosedur perizinan dengan menghapus izin yang tidak lagi relevan sehingga berhasil mengurangi jenis izin/non izin untuk mendongkrak Tingkat Kemudahan Berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB), namun demikian hal tersebut masih belum memperlihatkan hasil yang maksimal.

Selain kemudahan dalam berbisnis, pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat juga penting untuk diperhatikan. Kondisi tersebut mengingat bahwa prospek kewirausahaan di DKI Jakarta cukup baik dan pengembangannya akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Dalam menghadapi situasi ekonomi yang sangat kompetitif, sektor UKM dan industri kreatif dituntut lebih aktif dan dinamis sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sosial. Sampai dengan saat ini, daya saing khususnya di sektor UKM masih ditemukan kerentanan dalam menghadapi tantangan pasar utamanya, yaitu berkaitan dengan potensi sumber daya manusia, kemampuan teknologi, serta akses keuangan. Perhatian khusus harus diberikan dalam sektor industri kreatif maupun UMKM, dikarenakan sektor industri kreatif maupun UMKM menjadi salah satu kontributor utama untuk pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Keberadaan sentra ekonomi UKM dan industri kreatif juga perlu didukung dengan pasar yang memadai baik *offline* maupun *online*. Melalui keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui unit kerja pada urusan UMKM dan pariwisata, selain merevitalisasi sarana prasarana usaha UKM/Pedagang, juga perlu menciptakan *platform* sentra ekonomi berbasis digital dan/atau berkolaborasi dengan unicorn *marketplace* yang sudah ada, integrasi dengan pihak ketiga melalui kerjasama produk pariwisata, serta peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku usaha untuk mendorong kreativitas dan menciptakan inovasi bisnis yang mumpuni.

Sektor pariwisata urban juga merupakan aspek strategis yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan dan investasi yang efektif. Pengembangan wisata konvensi di Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini dinilai belum optimal, karena Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki gedung konferensi dengan kapasitas besar dan bertaraf internasional. Satu-satunya gedung dengan kapasitas besar yang tersedia adalah Jakarta Convention Centre (JCC). Selain wisata konvensi, wisata lain yang memiliki potensi cukup baik adalah wisata kuliner. Hal ini tidak terlepas dari keberagaman budaya yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta dan tidak ditemukan di daerah lain, namun, sampai dengan saat ini pusat-pusat kuliner di Provinsi DKI Jakarta masih sangat terbatas. Selain itu, mayoritas festival makanan yang ada juga masih diselenggarakan oleh swasta dan bukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mendasari beberapa kondisi di atas, maka 'akselerasi pertumbuhan ekonomi' dijadikan sebagai isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2025. Isu sebagaimana dimaksud, memiliki keselarasan dengan isu jangka menengah (lima tahunan) sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu isu Ketahanan Ekonomi Inklusif.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan menjadi tolak ukur penting dalam sebuah pembangunan, adapun dalam implementasinya, kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pemerataan pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Pemerataan pembangunan itu sendiri pada hakekatnya menjadi salah satu tuntutan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dikarenakan strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan secara langsung dapat meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan. Kemakmuran yang berkeadilan sejatinya merupakan jawaban terhadap berbagai masalah ketimpangan yang

sampai dengan saat ini masih menjadi tantangan besar bangsa Indonesia tidak terkecuali DKI Jakarta. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat menjadi isu strategis utama Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 yang akan difokuskan pada beberapa hal, yaitu: (1) Kemiskinan; (2) Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial; (3) Layanan Pendidikan; (4) Partisipasi Pendidikan Tinggi; (5) Stunting; dan (6) Ketahanan Pangan.

Ketimpangan antar wilayah yang dalam hal ini dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin masih ditemukan di DKI Jakarta. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (13,13%) dan wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara (6,78%) menjadi 2 (dua) wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar dibandingkan wilayah lainnya, bahkan persentase tersebut melampaui persentase penduduk miskin provinsi (4,44%). Disparitas lainnya yang memperlihatkan masih adanya ketimpangan antar wilayah di DKI Jakarta adalah nilai IPM antar wilayah. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya wilayah dengan nilai IPM yang masih berada pada kisaran 70, yaitu sebesar 75,91. Begitu pula dengan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Pusat walaupun sudah mencapai angka 80, namun, besaran nilai IPM-nya masih berada di bawah IPM Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 83,55 pada tahun 2023. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan bahwa konteks pemerataan masih menjadi isu utama DKI Jakarta sampai dengan tahun 2025. Hal ini dikarenakan pemerataan pembangunan dianggap dapat menjadi jawaban dari permasalahan ketimpangan antar wilayah. Idealnya, pembangunan suatu wilayah sudah dianggap merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya apabila aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur, serta pengembangan potensi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi sudah terpenuhi dengan baik.

Sebagaimana diketahui, berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menuntaskan masalah ketimpangan antar wilayah di Provinsi DKI Jakarta, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur berupa akses jalan yang merupakan bagian dari pemenuhan akan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur berupa akses jalan diyakini memiliki peran penting diantaranya sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai *social overhead capital* yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Akses jalan sebagaimana dimaksud telah diterapkan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, disamping itu semua masih ditemukan bahwa infrastruktur berupa transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu masih sangat terbatas utamanya untuk melayani pergerakan orang dan barang, sehingga mengurangi aksesibilitas dan konektivitas dengan kota lain di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut terlihat dari data kondisi transportasi di Kepulauan Seribu yang tidak banyak berubah selama lima tahun terakhir, yang mana hingga saat ini Kepulauan Seribu hanya memiliki 40 kapal kayu, 21 kapal milik pemerintah, dan 9 kapal penumpang reguler.

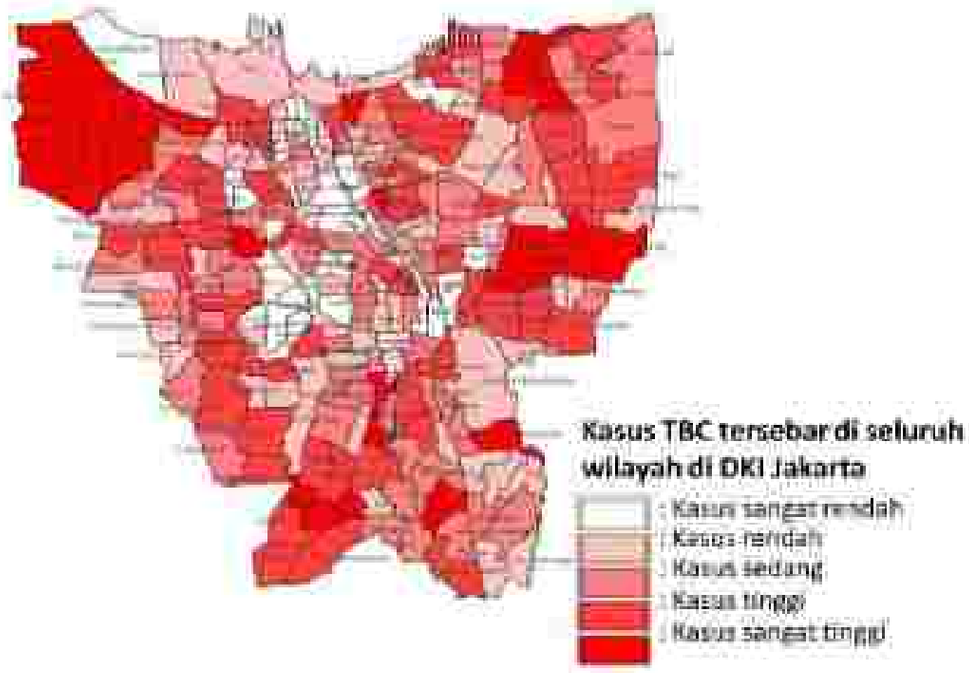
Pemenuhan layanan dasar masyarakat seperti fasilitas pendidikan juga masih menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Masih ditemukan berbagai permasalahan khususnya dalam hal pemenuhan fasilitas pendidikan di DKI Jakarta sebagaimana sudah dijelaskan pada Tabel 4.8 di atas, antara lain belum terpenuhinya sebagian sarana prasarana pendidikan khususnya untuk sekolah-sekolah pinggiran, belum optimalnya ketersediaan, distribusi, dan kualitas tenaga pendidik (guru), dan belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan khususnya untuk pendidikan informal. Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk juga menjadi salah satu indikator dalam pemerataan pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan hasil skor PPH tahun 2023, kualitas konsumsi pangan masyarakat DKI Jakarta sudah cukup baik dengan skor 92,7 kkal/kap/hari, meskipun belum mencapai kondisi ideal. Skor tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 3,3 kkal/kap/hari dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 89,4 kkal/kap/hari.

Selanjutnya, dengan segala keunggulan sumber daya manusia yang dimiliki dibandingkan dengan daerah lain, DKI Jakarta mampu menjadi *Center of Human Development* bagi Indonesia yang membawa kontribusi positif bagi daerah lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kualitas sumber daya manusia tentunya menjadi hal yang

penting untuk dikejar dan dijadikan sebagai fokus pembangunan. Salah satu aspek yang dapat menciptakan manusia sehat, berdaya saing, dan setara adalah pelayanan kesehatan. Perbaikan pelayanan kesehatan perkotaan dikembangkan secara menyeluruh sebagai suatu sistem yang tangguh, berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya baik fisik maupun non fisik. Dalam rangka menciptakan generasi emas sebagaimana dimaksud, diperlukan intervensi dalam meningkatkan derajat kesehatan pada berbagai siklus kehidupan. Dimulai dari pencegahan dan pengendalian penyakit menular, kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin, sampai kepada periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) yang merupakan simpul kritis sebagai awal terjadinya pertumbuhan stunting.

Penyakit menular yang saat ini menjadi perhatian khusus adalah tuberkulosis dan HIV/AIDS. Tuberkulosis (TB) saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs).

Gambar 4.5
Kasus Tuberkulosis di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023



Sumber: Data TB (SITB per 7 Maret 2024, (2024)

TB merupakan salah satu dari 20 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Tuberkulosis menyerang semua kalangan usia termasuk didalamnya balita yang akan berdampak pada gangguan tumbuh kembang anak yaitu stunting. Berdasarkan data pada Global TB Report 2023, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia yang memiliki estimasi kasus TB baru sebanyak 1.060.000 kasus dengan kematian mencapai 134.000 per tahun, meningkat dibanding tahun 2022. Angka kematian TB di Indonesia pada tahun 2022 yaitu sebanyak 34 per 100.000 penduduk, sedangkan di Provinsi DKI Jakarta jumlah kematian akibat TB pada tahun 2022 sebesar 947 orang, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 850 orang.

Selanjutnya, di tahun 2023 penemuan kasus TB secara keseluruhan di DKI Jakarta meningkat dibanding tahun 2022 dari 43.005 menjadi sebesar 60.420 kasus yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta (Gambar 4.5) menunjukan adanya insiden TB 535 per 100.000 penduduk. Angka tersebut berada di atas target penemuan kasus yang diterapkan Kementerian Kesehatan sebesar 44.953 kasus. Berdasarkan data persebaran kasus TB tahun 2023, sebanyak 60.420 kasus di DKI Jakarta terdiri dari TB resisten obat sebanyak 1.203 kasus (2%), TB sensitif obat sebanyak 39.217 kasus (95%), TB anak sebanyak 9.684 kasus (16%), dan TB HIV sebanyak 1.765 kasus (3%). Tren peningkatan kematian TB disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah efek pandemi dimana banyak kasus

TB yang tidak terobati atau terlaporkan dan baru muncul pasca pandemi berakhir. Kebutuhan untuk mengendalikan faktor risiko utama dalam menurunkan beban penyakit menular harus dipantau melalui pengawasan atau surveilans yang efektif secara rutin dan terkoordinasi, mengingat inisiasi/memulai pengobatan TB (*enrollment*) tahun 2023 masih di angka 86%, sementara angka keberhasilan pengobatan (*success rate*) TB di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 adalah sebesar 81%. Angka ini belum memenuhi sasaran nasional yaitu 90% maupun capaian nasional yaitu 86%.

Berbeda halnya dengan TB, *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) merupakan virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) merupakan sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Orang yang terinfeksi HIV memerlukan pengobatan *Antiretroviral* (ARV) untuk menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh. Tren jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2022 dilaporkan terdapat sebanyak 32.955 kasus di tingkat nasional dan 5.982 kasus berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Namun, tren jumlah kasus AIDS cenderung menurun. Pada tahun 2022 dilaporkan sebanyak 9.901 kasus di tingkat nasional dan 103 kasus berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan angka ini, DKI Jakarta menempati peringkat ke-7 provinsi terbanyak penderita AIDS nasional. Pada HIV dan AIDS, proporsi kasus kelompok laki-laki lebih besar dibandingkan pada kelompok perempuan, dimana laki-laki sebanyak 4.848 kasus HIV positif dan perempuan sebanyak 1.134 kasus. Sedangkan pada AIDS, kasus pada laki-laki sebanyak 93 dan perempuan sebanyak 10 kasus di tahun 2022. Adapun kemudian, sebagian besar sebaran kasus HIV dan AIDS terdapat pada kelompok umur produktif 15-49 tahun. Sementara itu masih ditemukan kasus HIV pada kelompok usia dibawah 4 tahun yang menunjukkan penularan HIV dari ibu ke anak.

Kasus kesehatan lainnya, yang sampai dengan saat ini masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah stunting. Stunting merupakan kondisi di mana tinggi badan anak lebih pendek daripada standar usianya akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menurunkan angka stunting, yaitu dari total kasus stunting di seluruh wilayah yaitu berjumlah 22.000 kasus, 9.000 kasus di antaranya sudah dituntaskan. Walaupun sudah terdapat penurunan jumlah kasus stunting, namun angka tersebut masih memberikan gambaran bahwa masih terdapat kasus stunting di Provinsi DKI Jakarta. Adapun cita-cita besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah prevalensi kasus stunting dapat mencapai 0%. Untuk menuntaskan stunting di DKI Jakarta, pemerintah akan mengawal dengan serius terkait faktor sensitif berupa lingkungan, tingkat disiplin orang tua, dan jarak antar kelahiran, mengingat dalam satu tahun terdapat 158 ribu pernikahan di DKI Jakarta, yang kemudian dari jumlah tersebut sebanyak 75 ribu pasangan dipastikan hamil pada tahun pertama pernikahan. Selain itu, sampai dengan saat ini pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi masih terhitung rendah, kondisi tersebut juga menyebabkan tingginya angka perkawinan anak yang kemudian berdampak pada tingginya prevalensi stunting. Tingkat kedisiplinan orang tua dalam memantau kesehatan dan tumbuh kembang anak saat dalam usia dini juga menjadi penting. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mendapati bahwa dalam kurun waktu satu jam, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap 15 anak, 3 diantaranya sudah masuk ke dalam kategori stunting.

Mendasari beberapa kondisi di atas, maka "kesejahteraan masyarakat" dijadikan sebagai isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2025. Isu sebagaimana dimaksud, memiliki keselarasan dengan isu jangka menengah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu isu Pemerataan Pembangunan dan isu Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara.

d. Tata Kelola Pemerintahan

Adaptive Governance atau tata kelola pemerintahan yang adaptif merupakan suatu model pemerintahan yang berusaha untuk menyesuaikan dan merespon perubahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sederhananya, *adaptive governance* merupakan model pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, yang mana model pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan efisien. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu aspek yang perlu untuk diperhatikan dan ditingkatkan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang adaptif. Pelayanan publik itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan. Oleh karena itu, inovasi pelayanan publik menjadi hal penting pada saat ini guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih maksimal.

Pemerintahan dinamis (*dynamic governance*) menjadi sangat penting dalam pemenuhan pelayanan publik. Konsep pemerintahan dinamis merupakan konsep yang menekankan pada kebijakan, institusi dan struktur yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, konsep pemerintahan dinamis perlu didukung oleh pola pikir penyelenggara pelayanan publik yang sejatinya dituntut untuk lebih dinamis (melalui jalur maupun kebijakan yang adaptif), sehingga dapat terwujud pelayanan publik yang prima dan berkualitas sebagaimana diharapkan oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan yang mana hal dapat terwujud jika pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang sampai saat ini masih ditemukan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, serta pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja (profesionalisme dan akuntabilitas). Selain itu, masih diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya, sampai dengan tahun 2023, masih ditemukan berbagai permasalahan pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta itu sendiri, yaitu:

(1) Waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan keluhan masih terhitung lama, hal tersebut dikarenakan proses validasi yang cukup panjang dan memakan waktu.
(2) *Nomor telepon online* (pengaduan) yang disediakan tidak bisa dihubungi.
(3) Pungutan uang jasa yang diminta masih terhitung besar.
(4) Masih kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, pemberian bimbingan, pengawasan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan terkait layanan publik.
(5) Meningkatnya indeks kerawanan keamanan yang disebabkan oleh konflik antar masyarakat dan kriminalitas.

Oleh karena itu, untuk merespon permasalahan pelayanan publik tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu dituntut untuk terus berjalan secara dinamis (pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif) dan ditantang untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat juga menjadi potensi kekuatan atau tantangan dalam pembangunan di DKI Jakarta. DKI

Jakarta pasca pemindahan ibukota akan dikembangkan menjadi kota ekonomi-bisnis berskala global yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mewujudkan kebahagiaan bagi warganya. Konsep Jakarta 4.0 merupakan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku *collaborator* dan masyarakat selaku *co-creator* bersama-sama saling berkolaborasi untuk menghasilkan inovasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan kota dan meningkatkan kualitas kehidupan. Dalam langkah menuju Jakarta 4.0, kebutuhan akan data yang akuntabel, berkualitas, dan mudah diakses merupakan hal mendesak yang diperlukan bagi seluruh pelaksana dan mitra pembangunan di instansi pusat maupun daerah dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan berbasis bukti *(evidence-based policy)*. Perbaikan tata kelola data pemerintah penting untuk mendukung Transformasi Digital dalam bentuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Statistik Nasional (SSN) seiring peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menghadapi tantangan di era disrupsi. Semangat inilah yang mendasari penetapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Gambar 4.6
Keterhubungan Ruang Lingkup SPBE dengan Ruang Lingkup SDI



Sumber: Perpres Nomor 39 Tahun 2019, (2024)

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, dijelaskan bahwa terdapat empat tujuan utama ditetapkannya Kebijakan Satu Data Indonesia. Pertama, Kebijakan Satu Data Indonesia memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data. Satu Data Indonesia juga diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Satu Data Indonesia dapat mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, serta kebijakan Satu Data Indonesia ditetapkan untuk mendukung Sistem Statistik Nasional. Dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan empat prinsip Satu Data Indonesia, meliputi:

a. Data harus memenuhi Standar Data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
b. Data harus memiliki Metadata, yaitu informasi terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan isi dan sumber data untuk mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan;

c. Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, yaitu memiliki kemampuan dipertukar atau bagi-pakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi; dan
d. Data harus menggunakan Kode Referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.

Berdasarkan amanat pada Pasal 21 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjamanatkan penyusunan regulasi di seluruh Pemerintah Daerah baik tingkat Povinsi/ Kabupaten/ Kota berupa instrumen Peraturan, berupa Peraturan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup Instansi Daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki instrumen Peraturan berupa Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Selain diterbitkan pula Keputusan Gubernur yang menetapkan Daftar Data Daerah untuk menjamin ketersediaan data Pemerintah yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan baik oleh Instansi Pemerintah, akademisi maupun masyarakat umum. Penyelenggara SDI Tingkat Provinsi DKI Jakarta terdiri dari pembina data, walidata, walidata pendukung dan produsen data. Dalam mendukung komunikasi dan koordinasi penyelenggara SDI tingkat provinsi dibentuk forum SDI tingkat provinsi. Forum SDI terdiri dari pembina data, walidata dan walidata pendukung, serta dalam menjalankan tugasnya dapat menyertakan produsen data. Forum SDI tingkat provinsi berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaran SDI tingkat provinsi dan melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

Berdasakan berbagai kondisi dan tantangan di atas, tata kelola pemerintahan dijadikan sebagai isu strategis utama Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 dengan fokus utama, yaitu: (1) Transformasi dan Digitalisasi; (2) Layanan Publik; (3) Penggunaan TIK; serta (4) Iklim Riset dan Inovasi.

4.4.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan reses. Hal ini sesuai dengan Pasal 348 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa DPRD berhak untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikirannya untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. Pokok-pokok pikiran DPRD itu sendiri dalam proses perencanaan pembangunan bertujuan untuk:

a. Memberikan bahan, arahan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA,PPAS, RKA OPD, dan RAPBD;
c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi melalui perencanaan dan penganggaran APBD;
d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD;
e. Menjamin terwujudnya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD; dan
f. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan prioritas pembangunan tahun 2025. Adapun penjabaran pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan isu prioritas RPD 2023-2026 dan isu prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta

Isu Prioritas RPD Tahun 2023-2026	Isu Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
(6)	(7)	(8)
Ketahanan Terhadap Bencana	Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	1. Permohonan pembangunan saluran air (drainase), khususnya untuk daerah yang belum memiliki saluran air dan kawasan yang berpotensi tinggi banjir. 2. Permohonan Pemeliharaan saluran air (drainase), khususnya pada saluran air yang tersumbat dan rusak berat untuk penanggulangan banjir. 3. Permohonan pembangunan dan peningkatan tanggul, turap, dan sheet pile pada aliran sungai untuk mencegah luapan sungai yang dapat mengakibatkan potensi banjir. 4. Permohonan pembangunan dan peningkatan situ, waduk, dan embung sebagai salah satu infrastruktur penampungan limbahan air sungai untuk pencegahan luapan sungai yang dapat mengakibatkan potensi banjir; 5. Permohonan penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk mengurangi dampak bencana banjir. 6. Permohonan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan jalan; 7. Peningkatan pelayanan transportasi publik untuk mengurangi ketergantungan mobilitas dengan kendaraan pribadi; 8. Permohonan penerangan rambu lalu lintas untuk memberikan kenyamanan berkendara dan mengurangi kemacetan; 9. Penertiban parkir liar kendaraan yang menghambat mobilitas perjalanan.
Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas		
Ketahanan Ekonomi Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	1. Permohonan bantuan dana untuk kegiatan UMKM yang berdampak pada akselerasi pertumbuhan dan kemandirian ekonomi masyarakat; 2. Permohonan pengembangan koperasi dan UMKM sebagai wadah masyarakat berusaha yang dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat; 3. Permohonan pengembangan kawasan wisata tematik untuk daya Tarik pariwisata lokal untuk peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; 4. Permohonan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan UMKM untuk menciptakan produk unggul dan berdaya saing.
Pemerataan Pembangunan	Kesejahteraan Masyarakat	1. Permohonan pemerataan bantuan pendidikan dan bantuan jaminan sosial kepada masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran pokok masyarakat; 2. Permohonan untuk membuat sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat miskin yang membutuhkan;
Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara		

Isu Prioritas RPD Tahun 2023-2026	Isu Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
(1)	(2)	(3)
		3. Permohonan pemerintah pelatihan kerja bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan daya saing kerja yang berdampak kepada pendapatan masyarakat; 4. Permohonan keterbukaan akses informasi terkait lowongan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; 5. Permohonan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga miskin di setiap wilayah sebagai upaya penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan; 6. Permohonan pemerintah program pasar murah di setiap wilayah untuk menurunkan beban pengeluaran pokok masyarakat; 7. Permohonan penyediaan peralatan dan perlengkapan layanan Kesehatan sebagai respons cepat penanganan stunting; 8. Permohonan pemerintah pembangunan fasilitas kesehatan serta sarana prasarana penunjang untuk mempermudah layanan kesehatan sebagai upaya pencegahan penurunan stunting melalui infrastruktur; 9. Permohonan bantuan obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk penanganan stunting dan pemenuhan gizi anak; 10. Permohonan kemudahan akses kesehatan dengan mengakomodasikan BPJS sebagai sarana jaminan kesehatan untuk penurunan stunting; 11. Peningkatan kebutuhan ambulans sebagai layanan kesehatan bergerak untuk percepatan penurunan stunting.
Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	1. Permohonan untuk melakukan transparansi pada setiap program kerja khususnya pada aspek sosial sehingga menciptakan kebijakan yang akuntabel dan tepat sasaran; 2. Permohonan kemudahan pembuatan sertifikat lahan menggunakan sistem digitalisasi; 3. Perluasan sosialisasi KTP digital untuk mempermudah administrasi masyarakat; 4. Permohonan kemudahan layanan pengajuan kartu kuning yang dikhususkan oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagai tanda masyarakat pencari kerja menggunakan teknologi digital.

Sumber: Rekapitulasi Hasil Reses DPRD Tahun 2023 (diolah), 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa aspirasi masyarakat yang terangkum dalam pokok-pokok pikiran DPRD memiliki keselarasan dengan isu prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa isu prioritas pembangunan yang sampai dengan tahun 2025 masih menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih menjadi isu yang diprioritaskan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, pokok-pokok pikiran DPRD, selanjutnya akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam merumuskan prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 beserta fokus pembangunan dan program pendukung.

4.5 Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.5.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah tersebut, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Selanjutnya, dalam membangun fondasi pemerataan kewilayahan, dibutuhkan pula intervensi kebijakan berbasis pulau melalui penyiapan tema pembangunan wilayah sesuai dengan keunggulan daerahnya masing-masing. Kebijakan tersebut kemudian didetailkan sampai level provinsi dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah melalui pelaksanaan delapan Prioritas Nasional. Implementasi Prioritas Nasional didukung pula oleh penerapan beberapa kebijakan umum yang berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah, serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Selain itu, sebagai upaya mengurangi kesenjangan wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya, pembangunan diarahkan pada penguatan intervensi pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi sesuai karakteristik wilayah, serta peningkatan pengelolaan urbanisasi, perkotaan, dan pusat pertumbuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Tabel 4.18
Kebijakan Umum yang Mendukung Implementasi Prioritas Nasional Tahun 2025

Fokus/ Kebijakan Umum	Keterangan
(1)	(2)
Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah	
Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah	Berfokus pada penuntasan rencana tata ruang wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta integrasi Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission
Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Berfokus pada pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan
Penataan Otonomi Daerah	Berfokus pada penguatan harmonisasi regulasi pusat-daerah dan kebijakan kerja sama multi aktor; peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah)
Penyediaan Data dan Informasi Geospasial Dasar serta Tematik	Berfokus pada penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, serta didukung dengan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatannya
Penguatan Fondasi Keuangan Daerah	Berfokus pada penguatan fondasi keuangan daerah melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah,

Fokus/ Kebijakan Umum	Keterangan
(1)	(2)
	peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah
Percepatan Reforma Agraria	Berfokus pada percepatan reforma agraria, penuntasan sertipikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanah aktif positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital
Infrastruktur dan Layanan Dasar	
Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun	Berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA), SMP/MTs/sederajat, dan SMA/MA/sederajat diarahkan pada provinsi dengan tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah
Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Berfokus pada peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
Peningkatan Akses Rumah Tangga Terhadap Hunian	Berfokus pada peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
Mencantumkan Pemerataan Pelayanan Ketenagalistrikan	Berfokus pada penuntasan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan termasuk melalui penyediaan bantuan dan subsidi tenaga listrik tepat sasaran
Pengembangan Konektivitas Dasar	Berfokus pada pengembangan konektivitas dasar (komersial dan non komersial) serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Transportasi
Peningkatan Ketahanan Sumber Daya Air Berbasis Alam (*Nature-Based Solution*)	Berfokus pada peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam (*nature-based solution*) melalui peningkatan infrastruktur tampungan air, penyediaan pasokan air, dan pengelolaan risiko daya rusak air
Menyediakan Sarana Publik dan Hunian Berketahanan Bencana	Berfokus pada penguatan sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana
Pemantapan Konektivitas Digital	Berfokus pada pemantapan konektivitas digital, perluasan jangkauan layanan komunikasi, dan peningkatan literasi digital
Reformasi Pengelolaan Sampah	Berfokus pada reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular
Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi	Berfokus pada pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim
Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi	
Peningkatan Kemandirian Perdesaan Berkelanjutan	Berfokus pada peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, serta pembangunan kawasan perdesaan
Pembangunan Kawasan Perbatasan	Berfokus pada stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi tata kelola pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan

Poksi/ Kebijakan Umum	Keterangan
(1)	(2)
Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Berfokus pada pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan
Percepatan Pembangunan Daerah Lambat Tumbuh	Berfokus pada percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh yang terdiri dari daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang ditorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri, dengan fokus pada peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola pembangunan, serta peningkatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
Pengelolaan Pusat Pertumbuhan	
Pengelolaan Urbanisasi	Berfokus pada pengelolaan urbanisasi melalui pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang berkelanjutan dan didukung oleh konektivitas yang memadai dan kelembagaan yang adaptif
Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru	Berfokus pada pengembangan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi keunggulan daerah melalui pengelolaan sumber daya alam, agropolitan, wisata alam dan budaya, serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting
Pemantauan dan Pemanfaatan Proyek Strategis Nasional	Berfokus pada pemantauan dan pemanfaatan proyek strategis nasional yang tersebar kawasan melalui percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, evaluasi dan penyiapan carry over proyek strategis nasional serta penguatan kerja sama pengelolaan proyek strategis nasional

(Sumber: Keputusan KSP Tahun 2023, [2024])

Selain kebijakan umum sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.12 di atas, serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Pulau Jawa di tahun 2025 untuk menjadi pulau "Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan" juga terdapat intervensi-intervensi spesifik yang akan diimplementasikan pada setiap provinsi untuk mendukung setiap prioritas nasional. Adapun intervensi pembangunan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.19
***Highlight* Indikasi Intervensi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025**

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi
(1)	(2)
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1. Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat 2. Pengantan kesetaraan masyarakat atas informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada	1. Insentif guna mendorong competitiveness dan peningkatan investasi skala global dalam sektor perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, jasa

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi
(1)	(2)
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	informasi dan komunikasi, real estate, jasa pendidikan dan jasa kesehatan 2. Penguatan Pangkalan Utama Angkatan Laut Jakarta dalam rangka penguatan pengelolaan maritim terhadap Jakarta 3. Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan 4. Fasilitasi business matchmaking startup digital 5. Fasilitasi digital technopreneur 6. Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian 7. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu serta pembangunan tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengentaskan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/ New Priok Eastern Access 2. Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman 3. Penguatan destinasi regeneratif Greater Jakarta 4. Penguatan ekosistem film, animasi, virtual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemanfaat ekonomi kreatif 5. Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan daerah dengan penguatan tata kelola 6. Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim 7. Pembangunan JSS (Jakarta Sewerage System) 8. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan normalisasi pada Kali Ciliwung 9. Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, onkonefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 2. Pengembangan kapasitas, penguatan manajemen, dan peningkatan pelayanan kefarmasian pada fasilitas kesehatan rujukan di Kabupaten Administrasi Kep. Seribu 3. Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) dan sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/ sederajat 4. Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan diselaraskan untuk memberdaya potensi daerah setempat pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi
(1)	(2)
	5. Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi riset sains (science), teknologi (technology), teknik (engineering), seni (art), dan matematika (mathematics) unggulan bertaraf internasional pada Universitas Indonesia melalui proyek Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) "*Promoting Research and Innovation Through Modern and Efficient STP Project*" (PRIME STeP) 6. Pembangunan kualitas keluarga 7. Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang 8. Fasilitasi literasi digital
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi 2. Pengembangan industri alat angkut termasuk *electric vehicle* dan kedirgantaraan 3. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok 4. Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan kawasan perkotaan Wilayah Metropolitan Jakarta 2. Peremajaan kota (*urban renewal*) secara inklusif dan terpadu dalam rangka menyediakan kota tanpa permukiman kumuh 3. Pengembangan transportasi publik perkotaan Wilayah Metropolitan Jakarta yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan Transit Oriented Development, antara lain melalui perluasan jaringan BRT terintegrasi, peningkatan layanan KA komuter, pengembangan LRT Jakarta, serta pengembangan MRT Jakarta Utara-Selatan dan MRT Timur-Barat
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1. Penataan dan penyempurnaan regulasi dan kelembagaan otonomi khusus Jakarta guna mendukung perwujudan visi Jakarta sebagai kota global 2. Revisi dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan Wilayah Metropolitan Jakarta
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1. Penguatan identitas Jakarta sebagai kota kosmopolitan budaya melalui pemanfaatan urban heritage dan penyelenggaraan ajang kebudayaan berskala internasional 2. Peningkatan pengelolaan kualitas udara melalui pengendalian pencemaran udara di Kota Metropolitan Jakarta 3. Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, (2024)

4.5.2 Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/ tonggak pencapaian suatu target pembangunan. Prioritas pembangunan disusun dengan mempertimbangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Rumusan prioritas pembangunan daerah dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program beserta kebutuhan pembiayaannya. Tolok ukur kinerja dan kebutuhan pembiayaan prioritas pembangunan nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan pagu. Oleh karena itu, prioritas pembangunan beserta program pendukungnya, idealnya disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, visi dan misi Kepala Daerah, arah pembangunan daerah di setiap tahunnya, pengembangan sektor/bidang unggulan daerah, serta permasalahan dan isu strategis daerah. Prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 disusun untuk menjawab 4 (empat) isu strategis pembangunan sebagaimana telah dirumuskan pada bagian sebelumnya, yaitu: (1) kualitas lingkungan dan infrastruktur kota; (2) pertumbuhan ekonomi; (3) kesejahteraan masyarakat; (4) tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, setiap prioritas pembangunan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan fokus utama pembangunan di tahun 2025 yang perumusannya selain mempertimbangkan isu strategis pembangunan juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2023. Adapun rumusan prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.20
Rumusan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Isu Prioritas RPD Tahun 2023-2026	Isu Pembangunan Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)
Ketahanan Terhadap Bencana	Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	**Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota** dengan fokus utama, yaitu: 1. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik 2. Penanggulangan Banjir 3. Perbaikan Kualitas Lingkungan 4. Penanganan Sampah 5. Penerapan Energi Baru Terbarukan 6. Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum 7. Ketahanan Bencana 8. Peningkatan Kualitas Udara 9. Peningkatan Akses Hunian Layak
Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas		
Ketahanan Ekonomi Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi** dengan fokus utama, yaitu: 1. Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalisation*) 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi 3. Peningkatan Investasi Daerah 4. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction*

Isu Prioritas RPD Tahun 2023-2026	Isu Pembangunan Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)
		5. Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Pemerataan Pembangunan	Kesejahteraan Masyarakat	**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat** dengan fokus utama, yaitu: 1. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi 2. Percepatan Penuntasan dan Pencegahan Stunting 3. Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan 4. Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial 5. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan 6. Penguatan Ketahanan Pangan
Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara		
Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan	**Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif** dengan fokus utama, yaitu: 1. Transformasi dan Digitalisasi 2. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik 3. Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif 4. Penciptaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas

Sumber: Olahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2024

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, 4 (empat) prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota;
b. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi;
c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; dan
d. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif.

Empat prioritas pembangunan tersebut diharapkan dapat secara langsung menjawab isu prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025. Selain itu, 4 (empat) prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud juga diharapkan dapat mendukung secara langsung ketercapaian 4 (empat) dimensi, 4 (empat) tujuan, dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 untuk periode tahun 2025, serta menjadi langkah awal untuk menuju Jakarta sebagai Kota Global. Selanjutnya, untuk mendukung ketercapaian target dimensi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025, serta sebagai langkah awal menuju Jakarta sebagai Kota Global, setiap prioritas pembangunan memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai komponen tersebut. Adapun keterkaitan antara prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 dengan parameter Kota Global, dimensi, tujuan, dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 4.21
Keterkaitan Dimensi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Parameter Kota Global	Dimensi/Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(3)	(4)	(5)	(6)
1. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi Secara Global 2. Kapasitas Riset dan Inovasi yang Baik dan Mumpuni 3. Ruang yang Nyaman untuk Dihuni 4. Menarik Wisatawan untuk Berkunjung 5. Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Berkelanjutan 6. Aksesibilitas yang Terkoneksi Secara Intra dan Inter Kota	*Built Environment* Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berkarakteran dan Berkelanjutan	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	**Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota** dengan fokus utama, yaitu: 1. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik 2. Penanggulangan Banjir 3. Perbaikan Kualitas Lingkungan 4. Penanganan Sampah 5. Penerapan Energi Baru Terbarukan 6. Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum 7. Ketahanan Bencana 8. Peningkatan Kualitas Udara 9. Peningkatan Akses Hunian Layak
		Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	
		Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	
		Terciptanya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	
	Economic Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi** dengan fokus utama, yaitu: 1. Transformasi Ekonomi (Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalisasi) 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi 3. Peningkatan Investasi Daerah 4. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui Cultural Interaction 5. Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja
		Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	
		Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	
		Pengurangan Kesenjangan	

Parameter Kota Global	Dimensi/Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
		Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat** dengan fokus utama, yaitu: 1. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi 2. Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting 3. Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan 4. Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial 5. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan 6. Penguatan Ketahanan Pangan
	Human Pembangunan Manusia Maknai yang Berkesetaraan	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	
		Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	
		Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	
		Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	**Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif** dengan fokus utama, yaitu: 1. Transformasi dan Digitalisasi 2. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik 3. Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif 4. Penyediaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas
	Governance Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2024

Adapun penjabaran untuk masing-masing prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya, suatu pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek mulai dari potensi yang dimiliki wilayah setempat sampai kepada kondisi lingkungan yang ada, baik fisik (tanah, air, udara), biotik (flora, fauna), serta kultur (budaya, interaksi antarmanusia). Penelitian dan pengkajian yang mendalam terhadap semua aspek yang saling berkaitan menjadi penting sebelum sebuah pembangunan dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan yang tidak memiliki konsep dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan.

Kondisi kualitas lingkungan juga akan terus menurun jika sebuah pembangunan tidak ditimbangi dengan konsep perencanaan pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh adalah terjadinya penebalan UHIm yang sering melanda kota-kota besar saat ini. Kondisi tersebut merupakan dampak dari pembangunan yang kurang terkontrol dan tidak memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan sudah menjadi salah satu pendekatan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta saat ini. Hal tersebut dikarenakan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi telah menyebabkan perkembangan dan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta tumbuh sangat pesat utamanya untuk memenuhi standar infrastruktur dan layanan dasar agar dapat berdiri sejajar dengan kota global lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang lebih inklusif, non-diskriminatif, serta berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan berkualitas yang dimaksud mencakup akses air bersih, sanitasi yang layak, dan permukiman layak huni. Upaya konservasi dan pengelolaan air secara berkelanjutan dilakukan dengan merehabilitasi sumber daya air, meminimalkan kebocoran air, mendorong penggunaan kembali air, dan menambah tempat penyimpanan dan penampungan air sebagai alternatif sumber air baku, dengan mempertimbangkan siklus air. Pada tahun 2023 akses layanan sumber air minum layak di Jakarta telah mencapai 99,42%, namun demikian, untuk akses air minum perpipaan baru mencapai 65,85%, dengan tingkat kebocoran sebesar 46,67% NRW (non-revenue water). Tingkat kebocoran air tersebut memberikan gambaran bahwa dalam satu tahun Provinsi DKI Jakarta telah kehilangan sebanyak 46,67% air.

Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan akses air minum perpipaan hingga 89,02% dan menurunkan tingkat kebocoran NRW menjadi 40%; diharapkan pada tahun 2030 akses ini dapat mencapai target 100% sebagaimana amanat *Sustainable Development Goals* (SDGs). Upaya yang akan dilaksanakan antara lain melalui penurunan NRW baik fisik maupun komersial, pembangunan SPAM Regional (Jatiluhur, Karian- Serpong, Buaran III, dan lainnya), pembangunan dan peningkatan SPAM komunal (Penanggrahan, Ciliwung, Cilandak, Hutan Kota, Taman Kota, dan lainnya), serta peningkatan tata kelola air di Jakarta. Perhatian tersendiri juga diberikan kepada penyediaan layanan air bersih di daerah krisis air seperti kampung prioritas (diantaranya Kawa Timur, Guji Baru, Kali Sekretaris, Blok Empang, Enceng, dan Kerang Hijau) melalui pemberian subsidi yang memperhatikan keterjangkauan masyarakat dan kesanggan daerah. Prioritas peningkatan layanan akses air bersih lainnya yaitu wilayah Kepulauan Seribu, khususnya pulau-pulau berpenduduk yang akan ditingkatkan kapasitas pengolahan air berbasis dengan teknologi yang tidak terbatas pada teknologi *sea water reverse osmosis* (SWRO), tetapi juga disertai peningkatan tata kelola dan alih kelola SWRO tersebut oleh PAM Jaya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengupayakan peningkatan sanitasi layak sebagai bentuk pemenuhan pelayanan dasar melalui peningkatan pengelolaan sektor air limbah dan persampahan. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan cakupan layanan air limbah menjadi 24,176% pada tahun 2026, diantaranya melalui akselerasi penetapan dan implementasi kebijakan pengelolaan limbah domestik, pembangunan SPALD komunal, peningkatan tata kelola dan alih kelola SPALD komunal berikut dengan kepastian tarifnya, subsidi pengolahan air limbah diantaranya revitalisasi tangki septik dalam rangka pengurangan buang air besar sembarangan (BABS), penyelesaian pembangunan Jakarta *Sewerage System* (JSS). Selain penguatan sanitasi layak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendorong peningkatan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan mengubah sampah menjadi energi alternatif. Belum optimalnya pengurangan sampah di sumber dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah menyebabkan masih tingginya timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini mengakibatkan volume sampah yang harus diolah TPST Bantargebang melebihi kapasitas tampung. Upaya penyelesaian permasalahan tersebut terbagi menjadi dua strategi yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%.

Upaya pengurangan sampah diantaranya melalui peningkatan kampanye Jakarta Sadar Sampah, kolaborasi pemahelix pengurangan sampah, optimalisasi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan, penyaluran makanan berlebih dari horeka (hotel restoran katering), optimalisasi bank sampah, dan monitoring aliran sampah disetiap titik hingga TPS/TPA/TPST. Sedangkan upaya penanganan sampah diantaranya melalui penanganan sampah rumah tangga terjadwal di seluruh RW, peningkatan penanganan sampah organik di pasar tradisional, pelayanan pengelolaan sampah pada kawasan mandiri sebanyak 80% sampai dengan tahun 2026, pembangunan dan pengoperasian saringan sampah di perbatasan wilayah Jakarta, serta optimalisasi TPST Bantargebang melalui implementasi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), *refuse derived fuel* (RDF) *plant* dan *landfill mining* guna meningkatkan usia pakai TPST Bantargebang. Diharapkan sampai tahun 2026 tingkat pengelolaan sampah TPST Bantargebang secara bertahap dapat meningkat menjadi sebesar 2.200 ton/hari, dengan *output landfill mining* berupa kompos termanfaatkan dan tersetap sebesar 30%.

Dalam rangka penyediaan hunian layak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan. Hal tersebut merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan akses bagi semua terkait perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, serta mendukung perwujudan hak atas perumahan dengan memperhatikan kebutuhan warga yang berada dalam situasi rentan dan kelompok masyarakat dengan keterbatasan daya beli. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam peningkatan hunian layak yaitu melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang terpelihara pada kawasan kumuh, serta tata kelola rusunawa dan rusunami. Saat ini, tingkat keterhunian unit rumah susun telah mencapai 85,2% dengan tingkat kepuasan kepuasan layanan sebesar 80,1%. Pada tahun 2026 ditargetkan tingkat keterhunian sebesar 98,1% dengan kepuasan layanan sebesar 84%. Maraknya pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, utamanya pembangunan untuk permukiman, menjadikan penataan kawasan kumuh perkotaan juga menjadi salah satu isu prioritas terkait permukiman. Pada tahun 2023 masih terdapat 280 RW kumuh di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2026, persentase luas kawasan permukiman kumuh ditargetkan berkurang menjadi 2,26%.

Tingkat urbanisasi yang tinggi di Provinsi DKI Jakarta juga menjadikan pola pergerakan yang tidak efisien dan pembangunan kota menjadi *car-oriented*, sehingga untuk beraktivitas sehari-hari warga menghabiskan banyak waktu untuk bermobilisasi untuk mencapai pusat-pusat aktivitas. Untuk mengurai kemacetan tersebut Pemerintah menggagas transformasi secara menyeluruh melalui pergeseran paradigma penataan ruang yang lebih berorientasi transit dan selaras dengan rencana pengembangan sistem transportasi, penyediaan infrastruktur transportasi umum terintegrasi, yang mudah diakses, aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk semua, serta pembangunan infrastruktur yang mendorong active mobility melalui penyediaan fasilitas pejalan kaki, lajur sepeda, dan prasarana lainnya yang mendorong warga melakukan perjalanan tanpa menggunakan kendaraan bermotor. Pemerintah juga merestrukturisasi hierarki prioritas pengguna jalan yang menempatkan pejalan kaki dan pesepeda pada prioritas utama, diikuti dengan angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan, dan kendaraan pribadi pada prioritas terakhir.

Konsep ruang kota berbasis transit menjadi salah satu tujuan jangka panjang penataan ruang di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana termuat dalam rancangan RTRW Jakarta 2040 dan penjabarannya dalam RDTR Jakarta 2022-2026 secara berkala akan ditinjau kembali. Secara lebih spesifik tujuan tersebut didukung oleh kebijakan dan strategi di berbagai sektor untuk mencapai 70% pemusatan kegiatan dan penduduk di sekitar titik transit (70% *people near transit*), 55% perjalanan penduduk menggunakan

transportasi publik (*public transport mode-share*), dan lebih dari 95% penduduk DKI Jakarta terlayani jangkauan rute angkutan umum yang terintegrasi. Akselerasi perwujudan kota berorientasi transit juga dilaksanakan melalui penerapan sistem pusat-pusat pelayanan pada simpul-simpul transportasi yang dapat dikembangkan menjadi titik-titik kawasan transit *oriented development* (TOD). Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga secara konsisten memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan ruang serta implementasi program dan kegiatan sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam RDTR dan PRK untuk seluruh kawasan TOD dan kawasan prioritas.

Sejalan dengan upaya penataan ruang, pengembangan sistem transportasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kota transit. Berdasarkan data Dinas Perhubungan, penggunaan transportasi publik (*public transport mode-share*) baru mencapai 14,76%, angka ini masih jauh dari target jangka panjang Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2026, penggunaan transportasi publik ditargetkan mencapai 33,01%. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penerapan *transportation demand management* (TDM) melalui *push and pull strategy*. *Push strategy* merupakan kebijakan pembatasan ruang gerak bagi kendaraan pribadi, yang dilakukan dengan pembatasan volume penggunaan kendaraan pribadi melalui pemberlakuan kebijakan ganjil-genap, rencana operasional jalan berbayar elektronik atau *electronic road pricing* (ERP), dan pemutakhiran regulasi perparkiran serta diiringi dengan pembangunan fasilitas *park and ride* yang terintegrasi dengan moda transportasi publik, serta kolaborasi dengan para pengelola parkir swasta. Sedangkan *pull strategy* merupakan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum yang salah satunya adalah dengan menciptakan layanan transportasi terintegrasi melalui program Jak Lingko.

Maraknya pembangunan dan masih minimnya penggunaan transportasi publik telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta. Perbaikan kualitas lingkungan dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya secara efisien, yang mana pengendalian di sektor bangunan memiliki kontribusi yang cukup signifikan, terutama terkait efisiensi konsumsi air dan listrik, penambahan ruang hijau privat, serta manajemen limbah, sampah, dan pengendalian banjir. Hal ini diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah dan swasta, yaitu dengan mendorong *retrofitting* bangunan sesuai dengan prinsip bangunan gedung hijau, pemasangan PLTS atap, serta pembentukan kampung iklim, sekaligus pengembangan pusat konsultasi warga untuk memudahkan penyampaian informasi, publikasi, dan *knowledge sharing*. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen untuk memenuhi kaidah bangunan hijau (*green building*) pada bangunan aset Pemerintah utamanya gedung kantor, rumah susun, sekolah, rumah sakit, dan bangunan lainnya. Strategi lain yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengurangi emisi karbon dan memperbaiki kualitas lingkungan yaitu melalui sektor energi dan ketenagalistrikan. Upaya tersebut antara lain pemanfaatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) melalui PLTS dan PLTSa, efisiensi energi serta penggantian bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, konversi transportasi dari BBM ke kendaraan listrik, audit energi pada bangunan gedung Pemerintah, serta menyiapkan sarana dan prasarana kendaraan listrik.

Penurunan kualitas lingkungan dan kondisi dimana Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang sebagian kawasannya memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berada pada muara daerah aliran sungai, serta dilalui oleh 17 sungai, menjadikan Provinsi DKI Jakarta sampai dengan saat ini masih terus dihadapkan pada kerentanan kebencanaan yang kompleks, seperti banjir, penurunan muka tanah, gempa bumi, kebakaran, dan kerawanan sosial lainnya. Dengan berbagai kerentanan tersebut, maka stabilitas dan ketahanan kota menjadi hal yang perlu untuk diwujudkan. Ketahanan kota dapat diartikan sebagai adanya kapasitas individu, komunitas, swasta dan sistem di dalam kota untuk bersiap, beradaptasi, bertahan, dan menjadi lebih kuat menghadapi berbagai jenis tekanan dan guncangan yang dialami. Untuk mengurangi potensi dampak dan meningkatkan ketahanan Provinsi DKI Jakarta terhadap bencana, upaya-upaya

pengelolaan pengurangan risiko bencana menjadi fokus utama dalam hal ini. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2008, pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan perencanaan dan pemantauan risiko, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, dan penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Dalam hal penanganan banjir di Provinsi DKI Jakarta, tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton atau *sheetpile*. Air yang mengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta dapat ditahan lebih lama melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta. Fungsi waduk kedepan juga bukan hanya sekadar sebagai waduk pengendali banjir atau waduk retensi saja, namun akan dimanfaatkan atau di kelola menjadi sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, pintu air, situ dan waduk juga dijadikan sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan banjir. Selanjutnya, dalam hal pengendalian penurunan muka tanah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mengendalikan dan mengurangi ekstraksi air tanah melalui program konservasi air tanah dan mitigasi penurunan muka tanah. Adapun upaya yang dilakukan untuk menjalankan komitmen tersebut antara lain dengan menginplementasikan zona bebas air tanah, mengendalikan penggunaan air tanah melalui instrumen pajak, perizinan dan penegakan hukum, penerapan kebijakan terkait sistem monitoring penggunaan air tanah, menyediakan alat pemantau penurunan muka tanah untuk memudahkan pengukuran dan evaluasi.

Selain kondisi geografis, kepadatan penduduk menjadi faktor dengan pengaruh besar terhadap terjadinya bencana. Tingginya jumlah kepadatan penduduk di Jakarta menimbulkan berbagai potensi permasalahan seperti kebakaran dan kegagalan teknologi berupa runtuhnya bangunan. Bencana kebakaran umumnya terjadi di permukiman padat dengan kondisi bangunan yang tidak tertata dengan baik. Banyak permukiman yang dibangun dengan desain dan material yang tidak memperhatikan faktor kenyamanan dan keselamatan, sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran. Penyebab utama kebakaran yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta biasanya berasal dari arus pendek listrik, sedangkan penyebab lainnya adalah kelalaian kompor, kelalaian peralatan penerangan yang mudah terbakar, dan api rokok. Munculnya epidemi penyakit dan konflik sosial di Provinsi DKI Jakarta juga dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Penduduk yang padat akan menimbulkan tingginya frekuensi interaksi dan mobilitas antar individu pada suatu wilayah, sehingga sangat mempengaruhi penyebaran penyakit pada bencana epidemi penyakit. Kepadatan penduduk juga mempengaruhi penyebaran informasi yang dapat memprovokasi terjadinya konflik sosial.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mendukung prioritas pembangunan terkait "Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota" dirumuskan berbagai program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 sebagai berikut:

1) Program Penyelenggaraan Jalan.
2) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
4) Program Pengelolaan Pelayaran.
5) Program Pengelolaan Perkeretaapian.
6) Program Pengelolaan Penyeberangan.
7) Program Penataguanaan Tanah.
8) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
9) Program Kawasan Permukiman.
10) Program Pengembangan Perumahan.

11) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
12) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
13) Program Penataan Bangunan Gedung.
14) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
15) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
16) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
17) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
18) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
19) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
20) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
21) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
22) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
23) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
24) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
25) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
26) Program Pengelolaan Hutan.
27) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
28) Program Pengelolaan Energi Terbarukan.
29) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
30) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
31) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
32) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
33) Program Penanggulangan Bencana.
34) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
35) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.

h. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan pembangunan perkotaan harus mampu menciptakan peluang ekonomi serta dapat memberikan pemasukan bagi daerah. Kawasan perkotaan memiliki potensi untuk mewujudkan produktivitas yang tinggi, efisiensi sumber daya, kegiatan yang bernilai tambah, menggerakan ekonomi lokal, dan memperhatikan kontribusi ekonomi informal, sekaligus mendukung transisi berkelanjutan menuju ekonomi formal. Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pusat ekonomi dan bisnis global memiliki peluang mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan kebijakan pengembangan sektor usaha yang tepat. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen membangun praktik industri berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular, perdagangan yang kompetitif, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan bisnis dan inovasi berbasis pengalaman dan nilai tambah seperti sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sektor perindustrian menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta, karena mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah dan lapangan kerja, serta peningkatan PDRB. BPS mencatat sektor industri pengolahan sampai dengan triwulan I tahun 2024 sudah berkontribusi sebesar 11,63% terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta. Sasaran pembangunan industri di Provinsi DKI Jakarta, yaitu meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri, meningkatkan ekspor produk industri, afirmasi kepada industri kecil dan industri

menengah, serta menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan melalui pembangunan industri hijau (*green industry*). Strategi industri hijau yang dapat diterapkan antara lain regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan, dan bahan baku ramah lingkungan. Peningkatan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui pelatihan dan peningkatan omset IKM melalui pendampingan, pemasaran, serta pendaftaran sertifikasi halal dan HKI juga menjadi salah satu komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan IKM. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan pengendalian izin usaha industri yang diselenggarakan dalam rangka mendorong pelaku industri untuk tertib perizinan.

Selain sektor perindustrian, stabilitas laju perekonomian Provinsi DKI Jakarta juga sangat didukung oleh peran sektor perdagangan. Sebagai pusat perdagangan di Indonesia, sektor ini merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 17,91% pada triwulan I tahun 2024. Pemerintah memberikan perhatian khusus untuk terus memaksimalkan potensi perdagangan dengan langkah-langkah diantaranya memastikan keterjangkauan kebutuhan barang pokok dan barang penting melalui pengendalian harga, meningkatkan operasi pasar dan pemantauan serta pelaporan harga, pengembangan ekspor produk dalam negeri baik melalui pelatihan maupun fasilitasi pada kegiatan promosi dagang, dan perlindungan konsumen melalui pengawasan barang dan jasa beredar serta tertib niaga. Sedangkan untuk meningkatkan pertumbuhan perniagaan, upaya yang dilaksanakan antara lain, yaitu alih perdagangan konvensional menjadi perdagangan elektronik melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan perdagangan komoditi yang memiliki nilai komponen lokal tinggi.

Pada sektor pertanian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pertumbuhan praktik pertanian perkotaan atau *urban agriculture* yang bertujuan selain memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari, juga memberikan manfaat lainnya seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan sosial. Berdasarkan Desain Besar Pertanian Perkotaan Tahun 2008-2030, pengembangan pertanian bukan hanya berbasis lahan seperti sawah dan kebun tetapi juga berbasis ruang yang meliputi lahan-lahan kosong yang belum terpakai, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pekarangan rumah, gang, gedung, lahan rumah susun, lahan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), sekolah, lahan laut, dan lainnya. Pada tahun 2026 diharapkan terwujud 35% ruang terbuka hijau produktif, 25% peningkatan hasil produksi, sertifikasi 700 produk, dan pusat pembelajaran pertanian di 5 wilayah. Selain sektor pertanian, potensi basis komoditas dan produk unggulan sektor peternakan dapat juga meningkatkan komoditas pangan sekaligus nilai tambah ekonomi. Terdapat beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar), penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pasar untuk peternak.

Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat memiliki berkontribusi besar bagi PDRB Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya, salah satu *gap* (tantangan) yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta sebagai Kota Global adalah terkait pariwisata yang sampai dengan saat ini belum optimal dalam menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke DKI Jakarta. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata di Provinsi DKI Jakarta difokuskan untuk pengembangan destinasi wisata urban, penguatan wisata MICE, pemasaran pariwisata baik di dalam maupun luar negeri. Sedangkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menumbuhkan ekonomi kreatif, yaitu melalui penyusunan *Grand Design* Ekonomi Kreatif, membangun zona ekonomi kreatif Jakarta, direktori ekonomi kreatif, penyelenggaraan inkubator industri pariwisata, penyelenggaraan *event* lomba/tarian dan *event* binaan, serta fasilitasi pendaftaran HKI. Strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis big data.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada hakekatnya memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pembangunan suatu wilayah. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membawa perubahan terhadap proporsi kebutuhan SDM di setiap sektor pekerjaan. Sehingga untuk meminimalkan disrupsi tersebut, dibutuhkan tenaga kerja terampil dengan produktivitas dan adaptabilitas yang tinggi untuk dapat bersaing dalam pasar kerja yang kompetitif. Tantangan utama dunia ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta saat ini yaitu adanya bonus demografi penduduk usia produktif yang jumlahnya lebih besar dari penduduk usia tidak produktif, dampak pandemi yang mengakibatkan gelombang PHK, permintaan dan produksi barang yang turun, dan otomasi pekerjaan. Dalam rangka menjawab tantangan yang ada, sekaligus peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja, upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain: (1) Mengembangkan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan; (2) Transformasi Pusat Pelatihan Kerja; (3) *Link and Match* Ketenagakerjaan; (4) Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja, (5) Pengembangan Talenta Muda; (6) Perluasan Pasar Kerja Dalam Negeri; dan (7) Reformasi Pengawasan.

Selain produktivitas dan adaptabilitas tenaga kerja, untuk mengurangi potensi peningkatan pengangguran terbuka, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah melalui pembangunan kewirausahaan. Adapun fokus kebijakan pada tahun 2025, yaitu melanjutkan penciptaan wirausaha yang kreatif dan produktif melalui gerakan kemasyarakatan pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT), yang dilaksanakan juga melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan/atau pihak lainnya. Selanjutnya, dalam rangka mendukung ekosistem PKT secara berkelanjutan, maka perlu dikembangkan ruang-ruang usaha untuk mempromosikan dan memasarkan produk yang dihasilkan. Dengan semakin tingginya aktivitas sosial dan kegiatan masyarakat di area publik, menimbulkan *demand* akan pemenuhan kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh produk UMKM. Untuk memfasilitasi hal tersebut dilaksanakan pendirian ruang usaha di area publik sesuai dengan standar yang berlaku, revitalisasi lokasi binaan dan lokasi sementara dengan menerapkan CHSE, dan penataan pedagang kaki lima (PKL) berlandaskan Masterplan Penataan PKL di Provinsi DKI Jakarta. Dengan pola pengaturan dan pengelolaan yang profesional nilai dari ruang dimaksud dapat ditingkatkan menjadi kawasan UMKM yang tidak hanya bernilai ekonomi, namun juga bernilai estetis.

Disamping UMKM, pengembangan koperasi juga menjadi komitmen dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk memperkokoh ekonomi kerakyatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdimensi keadilan. Koperasi pada hakekatnya dapat berpotensi dalam memberikan dampak signifikan dalam memunculkan dan mengembangkan ekonomi rakyat. Upaya yang dilaksanakan di sektor perkoperasian diantaranya adalah: (1) penyuluhan koperasi kepada masyarakat; (2) pembinaan koperasi; (3) fasilitasi pameran bagi anggota koperasi; (4) fasilitasi akta pendirian koperasi; (5) revitalisasi koperasi binaan provinsi; (6) fasilitasi klinik konsultasi koperasi; (7) peningkatan kapasitas SDM koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian; (8) peningkatan kepatuhan koperasi melalui pengawasan dan pemeriksaan koperasi; (9) pemberdayaan dan perlindungan koperasi guna terciptanya peningkatan volume usaha koperasi; (10) perluasan usaha koperasi; serta (11) transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi digital.

Untuk mendukung berbagai upaya di atas, Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan daya saingnya terhadap kota-kota lain di Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan competitiveness dan menyelesaikan permasalahan perkotaan adalah melalui kegiatan penelitian, kajian ataupun pengembangan. Penelitian dan pengembangan (*research and development*) mempunyai peran penting dalam mendorong kemajuan suatu wilayah dan negara. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat direkomendasikan untuk mengatasi masalah di berbagai sektor. Oleh karena itu, kegiatan kajian dan litbang sangat penting dilakukan sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu kebijakan. Kemajuan teknologi

dan inovasi daerah perlu dimbangi dengan pemanfaatan local wisdom, yang akan memperkaya dan memberi jiwa kepada kebijakan prioritas yang akan dilaksanakan. Peran warisan budaya juga sangat penting dalam merehabilitasi, revitalisasi, dan menghidupkan aktivitas di kawasan perkotaan.

Aktivasi kawasan perkotaan antara lain dapat dilakukan dengan revitalisasi, aktivasi, dan pengembangan pusat seni dan budaya baru Jakarta, baik yang melestarikan seni budaya jakat betawi atau yang memfasilitasi seni dan budaya lainnya. Selanjutnya sebagai cermin dari identitas Jakarta sebagai *melting pot* kebudayaan nasional, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghadirkan pusat-pusat kesenian yang merupakan perwakilan dari berbagai jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Upaya pendayagunaan dan apresiasi terhadap warisan budaya secara berkelanjutan juga dilaksanakan melalui revitalisasi dan aktivasi cagar budaya. Perbaikan infrastruktur kebudayaan kemudian perlu dilanjutkan dengan pemberian dukungan terhadap acara atau festival yang mampu menambah daya saing Jakarta di bidang wisata, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan sepanjang tahun. Adapun berdasarkan uraian di atas, untuk mendukung prioritas pembangunan terkait "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi" diturunkan berbagai program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
2) Program Pemasaran Pariwisata.
3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
6) Program: Peayediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
7) Program: Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
9) Program Penyuluhan Pertanian.
10) Program Pertanian dan Pendaftaran Perusahaan.
11) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
12) Program Pengembangan Ekspor.
13) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
14) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
15) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
16) Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
17) Program Perencanaan Tenaga Kerja.
18) Program: Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
19) Program Penempatan Tenaga Kerja.
20) Program Hubungan Industrial.
21) Program Pengawasan Ketenagakerjaan.
22) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
23) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
24) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
25) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
26) Program Pengembangan UMKM.
27) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
28) Program Promosi Penanaman Modal.
29) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
30) Program Pengembangan Kebudayaan.
31) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
32) Program Pengelolaan Permuseuman.
33) Program Pembinaan Perpustakaan.

34) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
35) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
36) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
37) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
38) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
39) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mengakhiri segala bentuk dan dimensi kemiskinan dan menjadikan Provinsi DKI Jakarta kota inklusif, dengan menurunkan ketimpangan yang diukur melalui perhitungan gini rasio. Upaya Pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui berbagai program seperti pemberian bantuan tunai/non-tunai serta bantuan pengembangan ekonomi sehingga tingkat konsumsi penduduk miskin dapat terjaga stabilitasnya. Korelasi antara ketimpangan yang meningkat dan tingkat kemiskinan yang perlahan mulai turun menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan ketimpangan yang terus meningkat, artinya gap antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas semakin tinggi. Mengurangi pendapatan pada masyarakat kelas atas bukan menjadi solusi yang benar, namun sangat dimungkinkan untuk menjaga masyarakat kelas bawah/ kelompok miskin dan rentan untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan berbagai program pemerintah dan atau program yang melibatkan swasta.

Membangun skema perlindungan sosial yang lebih baik dan bersifat universal menjadi salah satu tantangan bagi Provinsi DKI Jakarta. Tujuan utama dari perlindungan sosial adalah mencegah risiko yang dialami penduduk hingga dapat terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan, meningkatkan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, serta memungkinkan kelompok miskin dan rentan untuk memiliki standar hidup yang bermartabat agar kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Salah satu kebutuhan dasar yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah adalah kebutuhan akan pangan. Sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab dalam menjamin ketersediaan pangan hingga tingkat perseorangan, yang tidak hanya mencakup kuantitas melainkan juga kualitas pangan. Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan melakukan pengawasan untuk menjamin keamanan pangan dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan. Melalui peningkatan dan pengawasan mutu pangan, diyakini hasil tanaman pangan dan hortikultura 90% baik/aman konsumsi, hasil perikanan diyakini 95% baik/aman konsumsi dan produk hewan (kesmavet) diyakini 95% baik aman konsumsi. Adapun upaya-upaya peningkatan ketahanan pangan lain yang akan dilakukan Pemerintah yaitu dengan menyusun peta jalan pangan Provinsi DKI Jakarta, pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan, pengawasan keamanan pangan terpadu dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani, nelayan dan peternak hewan, dan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang unit usahanya bergerak di bidang pangan untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga pangan.

Selain mengakhiri segala bentuk dan dimensi kemiskinan, untuk menjadi kota inklusif dalam rangka mencapai Jakarta sebagai Kota Global, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen untuk menjamin pemerataan ketersediaan pelayanan publik

bagi setiap masyarakat. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud utamanya dilakukan dengan menjamin edukasi pembelajaran sepanjang hayat serta perbaikan kesehatan perkotaan. Pembangunan pendidikan merupakan pilar utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kesempatan pendidikan bagi semua warganya tanpa terkecuali dengan setara, berkualitas, dan berkelanjutan. Pendidikan yang berkelanjutan adalah sebuah konsep *life-long learning* yang tidak hanya berhenti pada pendidikan formal, namun merupakan proses pembelajaran yang dapat dilakukan sepanjang hidup tanpa dibatasi oleh usia. Adapun konsep pendidikan berkelanjutan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui beberapa upaya, yaitu peningkatan akses pendidikan di semua jenjang melalui KJP Plus dan KJMU, rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana pendidikan, penguatan pendidikan vokasi berbasis kerjasama dunia usaha dan dunia industri, peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan akses pendidikan usia dini, serta penyelenggaraan sekolah kolaborasi yang didukung dengan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, perbaikan kesehatan perkotaan dikembangkan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya kota Jakarta, baik fisik maupun non fisik. Dalam rangka pengembangan kualitas layanan kesehatan perkotaan, akses universal terhadap layanan kesehatan yang holistik, berkualitas, dan berkelanjutan ditingkatkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan. Untuk menciptakan generasi emas sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan intervensi dalam meningkatkan derajat kesehatan pada berbagai siklus kehidupan. Di mulai dari remaja putri yang sehat bebas anemia, skrining kesehatan bagi calon pengantin, kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin, sampai pada periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) yang merupakan simpul kritis sebagai awal terjadinya pertumbuhan stunting, yang akan berdampak jangka panjang hingga berulang dalam siklus kehidupan. Intervensi dalam rangka percepatan penurunan stunting berupa intervensi sensitif (70%) dari sektor di luar kesehatan dan spesifik (30%) dari sektor kesehatan. Pada tahun 2023, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) DKI Jakarta mencapai 17,6%. Ditargetkan pada 2026, prevalensi stunting pada balita diharapkan turun menjadi sebesar 12,2%. Kemudian, berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya dalam pengendalian penyakit sebagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatannya.

Peta jalan eliminasi TB di Indonesia, sesuai dengan kesepakatan global, Pemerintah menetapkan target insiden TB turun 50% pada tahun 2025 (165 per 100.000 penduduk) menjadi 80% pada tahun 2030 (65 per 100.000 penduduk). Untuk mencapai eliminasi TB pada tahun 2030, masih ada beberapa target yang harus dicapai seperti angka penemuan kasus yang diprediksi masih akan meningkat hingga 2025 dan target enrollment 100% serta keberhasilan pengobatan di atas 90%. Upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan capaian tersebut, yaitu: 1) Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah untuk mendukung percepatan eliminasi TB; 2) Peningkatan akses layanan TB bermutu dan berpihak pada pasien; 3) Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TB serta pengendalian infeksi; 4) Pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis, dan tatalaksana TB; 5) Peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multi-sektor lainnya dalam eliminasi TB; dan 6) Penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan. Sedangkan, untuk mengendalikan penyakit menular yang ada di Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah penjangkauan populasi beresiko melalui koordinasi lintas sektor dan program, serta edukasi aktif tentang HIV dan AIDS kepada masyarakat. Di samping itu, penguatan program pengendalian HIV dan AIDS juga terus dilakukan dengan tujuan untuk: 1) Menurunkan hingga menidadakan infeksi baru; 2) Menurunkan hingga menidadakan kematian terkait AIDS; 3) Menurunkan stigma dan diskriminasi.

Terobosan dalam pengembangan layanan kesehatan juga diperlukan guna meningkatkan kualitas dan harapan hidup warga Jakarta, di antaranya melalui transformasi pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, digitalisasi pelayanan kesehatan (e-kesehatan), serta peningkatan layanan promotif dan preventif, tanpa mengabaikan layanan kuratif dan rehabilitatif. Upaya perbaikan kesehatan perkotaan perlu didukung oleh penguatan sektor penunjang lain seperti peningkatan peran dan fungsi keluarga, pembangunan kependudukan, serta penyediaan fasilitas dan aktivitas yang dapat membangun pola hidup masyarakat yang lebih sehat. Selanjutnya, dalam upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan berketahanan, telah dirancang penyelenggaraan pelayanan keluarga satu pintu yang dioperasionalisasikan melalui Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA), yang merupakan pusat informasi dan koordinasi layanan kesejahteraan dan ketahanan keluarga berbasis digital yang dilengkapi dukungan data yang dikumpulkan oleh Tim Penggerak PKK melalui kader Dasa Wisma. Melalui PUSPA, masyarakat dapat mengakses data, informasi, dan edukasi digital yang terintegrasi, serta pilihan konten lokal dan aktivitas virtual yang ramah anak dan keluarga. Pusat Pelayanan Keluarga juga akan menghadirkan sarana konseling secara online dan offline bagi keluarga (ibu, balita, remaja, lansia) maupun korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya perbaikan kesehatan perkotaan perlu didukung oleh penguatan sektor lain yang dapat menunjang, seperti peningkatan peran dan fungsi keluarga, pembangunan kependudukan, serta penyediaan fasilitas dan aktivitas yang dapat membangun pola hidup masyarakat yang lebih sehat. Sehat menurut WHO adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya diintervensi dari perspektif medis belaka, melainkan bersifat multi-perspektif, antara lain melalui psikologis dan olahraga.

Berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat, pembangunan responsif gender menjadi bagian tidak terpisahkan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan responsif gender merupakan pembangunan yang menciptakan keadilan dan pemerataan bagi seluruh penduduk. Sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jakarta yang berada di angka 94,63. Meskipun berada di atas rata-rata nasional tetapi masih memunjukkan bahwa manfaat dan hasil pembangunan untuk perempuan masih di bawah dari laki-laki. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan, dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Selain itu kesenjangan berbasis gender juga dapat terlihat dari isu kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Jakarta yang layaknya fenomena gunung es. Kesetaraan gender dalam relasi keluarga merupakan salah satu pondasi mewujudkan ketahanan keluarga masa kini. Untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan diperlukan adanya kolaborasi secara berkelanjutan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat, media massa, dan dunia usaha.

Dalam upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan berketahanan, telah dirancang penyelenggaraan pelayanan keluarga satu pintu yang dioperasionalisasikan melalui PUSPA (Pusat Pelayanan Keluarga), yang merupakan pusat informasi dan koordinasi layanan kesejahteraan dan ketahanan keluarga (center of excellence in family happiness) berbasis digital yang dilengkapi dukungan data yang dikumpulkan oleh Tim Penggerak PKK melalui kader Dasa Wisma. Melalui PUSPA, masyarakat Jakarta dapat mengakses data, informasi, dan edukasi digital yang terintegrasi, serta pilihan konten lokal dan aktivitas virtual yang ramah anak dan keluarga. Pusat Pelayanan Keluarga juga akan menghadirkan sarana konseling secara online dan offline bagi keluarga (ibu, balita, remaja dan lansia) maupun korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun berdasarkan uraian di atas, untuk mendukung prioritas pembangunan terkait "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" dirumuskan berbagai program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Sosial.
2) Program Rehabilitasi Sosial.
3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4) Program Penanganan Bencana.
5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
6) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
7) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
8) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
9) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
10) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
11) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
12) Program Pengendalian Penduduk.
13) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
14) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
15) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
16) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
17) Program Pengembangan Daya Saing Kelembagaan.
18) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
19) Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender.
20) Program Perlindungan Perempuan.
21) Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
22) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
23) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
24) Program Perlindungan Khusus Anak.
25) Program Pengelolaan Pendidikan.

d. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian negara, merefleksikan bangsa Indonesia yang multi etnik, multi agama, multi ras, dan multi golongan. Kondisi ini menjadikan Provinsi DKI Jakarta rentan terhadap konflik. Dalam upaya menjaga kebhinekaan serta proses demokrasi yang kondusif di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan suatu penguatan nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan untuk masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya membangun toleransi dan kerukunan masyarakat multikultural melalui pembinaan ideologi, pembinaan kerukunan kemasyarakatan dan pembinaan kewaspadaan sehingga terwujud masyarakat yang tenteram dan bebas dari segala ancaman. Pembinaan ideologi, pembinaan kerukunan kemasyarakatan dan kewaspadaan masyarakat dilaktikan dalam bentuk penyampaian materi kepada masyarakat dengan target 80.000 orang mendapatkan pemahaman dengan tingkat pemahaman meningkat menjadi 52%.

Dalam mengelola situasi keagamaan yang sangat beragam, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki peran besar dalam upaya memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dan akan terus berupaya mewujudkan interaksi antar umat beragama yang harmonis melalui serangkaian tugas pembinaan dan pengawasan bidang mental spiritual, memberikan perhatian dan kesempatan yang sama kepada seluruh lembaga keagamaan yang mengurusi rumah ibadah dengan mengedepankan asas keadilan, pemberian hibah untuk bantuan operasional termasuk insentif dan fasilitasi perizinan tempat ibadah, dengan tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan Provinsi DKI Jakarta sebagai kota heterogen, inklusif, rukun, dan damai, Pemerintah juga memfasilitasi pelaksanaan festival keagamaan sebagai penyemai simpul persaudaraan antar umat beragama.

Selain itu, dalam rangka penguatan kapasitas legislatif dalam menerusakan aspirasi masyarakat Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong pengesahan peraturan perundangan yang telah menjadi prioritas baik di pusat maupun provinsi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan yang diukur melalui prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR/DPD/DPRD Provinsi (RDP umum, seminar, uji publik, sosialisasi, kunjungan kerja, dan lainnya). Aspirasi pada kebijakan eksekutif maupun masukan pada pembentukan peraturan perundang-undangan ditargetkan menjadi sebesar 63,75 persen pada tahun 2026. Pada akhirnya diharapkan hasil penilaian terhadap Indeks Demokrasi yang menggambarkan tingkat perkembangan demokrasi di Provinsi DKI Jakarta dapat meningkat menjadi 77,57 pada tahun 2026.

Selanjutnya, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga menjadi tolok ukur penilaian yang cukup penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan, IPM menjadi salah satu tolok ukur bagi instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Seluruh instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik kepada masyarakat menjadikan nilai IKM sebagai parameter untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Pengukuran yang berkesinambungan untuk mengetahui kinerja pelayanan dan untuk memperoleh aspek pelayanan mana yang dianggap perlu oleh masyarakat dan menjadi prioritas guna memperbaiki kualitas layanan. Upaya peningkatan pelayanan publik tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diwujudkan dengan membangun sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan dan manajemen pemerintahan. Khusus untuk pelayanan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyederhanakan prosedur perizinan, melakukan percepatan waktu proses perizinan, sampai melakukan automasi (elektronifikasi) perizinan maupun non perizinan. Seluruh perizinan ditargetkan 100% berbasis elektronik (online) yang didalamnya mencakup penyederhanaan persyaratan, prosedur, dan birokrasi menjadi lebih ringkas sampai izin diterbitkan.

Terkait pelayanan administrasi kependudukan, meliputi dokumen pendaftaran penduduk (KTP-el, KK, KIA) dan dokumen pencatatan sipil (Akte Kelahiran, Akta Kematian, Akte Perkawinan, Akta Perceraian). Pelayanan administrasi kependudukan telah dilaksanakan secara online melalui aplikasi Alpukat Betawi untuk memudahkan warga dalam mengakses layanan tersebut. Di masa yang akan datang, pelayanan dengan menggunakan aplikasi online akan lebih ditingkatkan. Selain itu, penggunaan mobil keliling untuk pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan pelaporan kelahiran akan tetap dilaksanakan. Berikut layanan administrasi kependudukan lainnya yang akan tetap dilaksanakan kedepannya, antara lain: 1) SIMPATIK DUKCAPIL (Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan 3 Instansi, yaitu: Dinas Dukcapil, Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan), 2) Pelayanan Pencatatan Kawin Massal, 3) Layanan PeDeKaTe (Layanan Pencatatan Perkawinan bekerja sama dengan rumah ibadah), 4) Layanan administrasi kependudukan melalui *Whatsapp, drive thru*, dan jemput bola.

Selanjutnya, akuntabilitas adalah salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara yang juga penting untuk diperhatikan oleh pemerintah selain transformasi layanan publik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), merupakan hal yang mutlak dikedepankan utamanya untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. AKIP juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pemerintahan diharapkan fokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi DKI menargetkan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebesar 90,5 atau mendapat predikat AA.

Salah satu transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dalam hal pengelolaan keuangan

daerah. Keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel ditandai dengan laporan keuangan daerah yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Opini Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit oleh BPK RI selama lima tahun berturut-turut. Sejalan dengan capaian tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk tetap mempertahankan predikat WTP di tahun 2023-2026 mendatang. Adapun berdasarkan uraian di atas, untuk mendukung prioritas pembangunan terkait "Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif" dirumuskan berbagai program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025 sebagai berikut:

1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
7) Program Pendaftaran Penduduk.
8) Program Pencatatan Sipil.
9) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
10) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
11) Program Pelayanan Penanaman Modal.
12) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
13) Program Pengelolaan Arsip.
14) Program Pengelolaan Kecamatan.
15) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
16) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
17) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
18) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
19) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
20) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
21) Program Penataan Organisasi.
22) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
23) Program Perekonomian dan Pembangunan.
24) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
25) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
26) Program Penyelenggaraan Pengawasan.
27) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
28) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.
29) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
30) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
31) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
32) Program Kepegawaian Daerah.
33) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tabel 4.22
Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi Secara Global 2. Kapasitas Riset dan Inovasi yang Baik dan Menerus 3. Ruang yang Nyaman untuk Dihuni 4. Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Berkelanjutan 5. Aksesibilitas yang Terkoneksi Secara Intra dan Inter Kota 6. Menarik Wisatawan untuk Berkunjung	***Built Environment***: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	1. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	1.1 Optimalisasi kapasitas sistem penanganan genangan/banjir 1.2 Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan cutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau 1.3 Evaluasi tata ruang dalam mengatasi tertib pertanahan 1.4 Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan 1.5 Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya 1.6 Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air limbah 1.7 Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum	**Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota** dengan fokus utama, yaitu: • Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik • Penanggulangan Banjir • Perbaikan Kualitas Lingkungan • Penanganan Sampah • Penerapan Energi Baru Terbarukan • Penyediaan Air Bersih dan Air Minum • Ketahanan Bencana • Peningkatan Kualitas Udara • Peningkatan Akses Hunian Layak
		2. Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	2.1 Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan hijau dan rumah ramah disabilitas 2.2 Penguatgunaan upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan dan aturan 2.3 Penurunan beban pencemaran lingkungan 2.4 Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan cutupan hijau sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau 2.5 Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi	

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025:
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.6 Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha 2.7 Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 2.8 Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat 2.9 Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap 2.10 Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan 2.11 Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 2.12 Pembangunan / Penataan / Pengkajian Hutan 2.13 Inventarisasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku 2.14 Pemberian pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan tentang kehutanan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan SDM Dinas 2.15 Inventarisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS 2.16 Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan 2.17 Peningkatan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan	

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025:
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	
		3. Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	3.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3.2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 3.3 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3.4 Program Penanggulangan Bencana 3.5 Program Pencegahan, Penanggulangan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 3.6 Program Pengelolaan Aspek Kegelingan	
		4. Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	4.1 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bina marga 4.2 Peningkatan kualitas penataan ruang 4.3 Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi 4.4 Peningkatan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengelolaan badan usaha angkutan perairan 4.5 Perumusan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian	
	Ekonomi Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan.	5. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	5.1 Peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja 5.2 Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan keperawatan 5.3 Penguatan SDM pengelola dan pengawas keperawatan	**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi** dengan fokus utama, yaitu: • Transformasi Ekonomi (Green Economy, Ifter

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5.4 Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan kewirausahaan, pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Economy, Gig Economy, Digitalization) • Peningkatan Daya Saing Ekonomi • Peningkatan Investasi Daerah • Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui Cultural Interaction • Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja
		6. Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	6.1 Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal 6.2 Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal 6.3 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal 6.4 Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif 6.5 Penguatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan cagar budaya 6.6 Penguatan peran dan tata kelola permuseuman 6.7 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya literasi 6.8 Penderasan, pengelolaan, preservasi, penyelamatdirian, dan/atau akuisisi naskah kuno 6.9 Penguatan kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha 6.10 Penguatan tata kelola inovasi daerah	

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		7. Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	7.1 Peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan produk, dan daya tarik pariwisata 7.2 Peningkatan pemasaran dan informasi pariwisata secara sinergis, intensif, inovatif, dan interaktif 7.3 Peningkatan kerja sama kelembagaan secara profesional, efektif, efisien, produktif, serta pemberdayaan, penguatan dukungan, dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif 7.4 Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 7.5 Peningkatan produksi pertanian, peternakan,susu, daging, olahan hasil pertanian peternakan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming 7.6 Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui *Online Single Submission Risk Based Approached* (OSS-RBA) 7.7 Pelaksanaan operasi pasar, pemantauan dan pelaporan harga 7.8 Peningkatan ekspor dan pengendalian impor 7.9 Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga 7.10 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 7.11 Peningkatan produktivitas industri dan IKM	
		8. Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan	8.1 Peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial	**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025:
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	8.2 Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 8.3 Pemberian Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tepat sasaran kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 8.4 Peningkatan bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi korban bencana alam dan sosial 8.5 Peningkatan jumlah kecamatan yang tahan pangan 8.6 Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, produksi, dan distribusi/ pemasaran 8.7 Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan, hasil pertanian, perikanan dan peternakan 8.8 Peningkatan partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan kewirausahaan terpadu (Jalapreneur)	dengan fokus utama, yaitu: • Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi • Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting • Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan • Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial • Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan • Penguatan Ketahanan Pangan
	Bumnis Pembangunan Manusia Modern yang Berkesetaraan	9. Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	9.1 Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang	
		10. Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	10.1 Implementasi transformasi pelayanan kesehatan yang adaptif dan terintegrasi 10.2 Pemerataan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan optimalisasi implementasi Assymetry	

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025:
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			10.3 Pemerataan dan peningkatan kualitas produk sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan keamanan makanan dan minuman	
			10.4 Pemerataan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	
			10.5 Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan tenaga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan merata	
			10.6 Penguatan pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat	
			10.7 Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan	
			10.8 Peningkatan daya saing olahraga	
			10.9 Pembentukan anggota pramuka yang berjiwa patriotik, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup melalui peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi kepramukaan	
		11. Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	11.1 Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	
			11.2 Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk TPPO	
			11.3 Peningkatan kualitas keluarga dalam perwujudan kesetaraan gender dan hak anak	
			11.4 Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu	
			11.5 Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang pemenuhan hak anak pada lembaga/ organisasi/ kelompok/ stakeholder	

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025:
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			11.5 Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang perlindungan bagi kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (ABPK)	
	Governance Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	12 Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinnekaan Masyarakat	12.1 Peningkatan kualitas layanan kepada anggota dewan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 12.2 Penguatan ideologi pancasila 12.3 Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi 12.4 Peningkatan pemberdayaan ormas 12.5 Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama 12.6 Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial di masyarakat	**Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif** dengan fokus utama, yaitu: • Transformasi dan Digitalisasi • Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik • Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif • Penciptaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas
		13 Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	13.1 Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil 13.2 Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan penyajian profil kependudukan 13.3 Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan	
		14 Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	14.1 Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik 14.2 Peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi 14.3 Peningkatan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan di daerah 14.4 Peningkatan manajemen keamanan informasi	
		15 Terwujudnya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	15.1 Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	

Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan Tahun 2025:
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			15.2 Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang-Undangan dan advokasi hukum 15.3 Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan 15.4 Percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) 15.5 Peningkatan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam meningkatkan kapabilitas APIP (v.4	
		16.Terkelolanya Keuangan Daerah Yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	16.1 Pengembangan sistem informasi serta perbaikan standar pelayanan pengadaan barang/jasa 16.2 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 16.3 Penyusunan dan pengelolaan standar harga satuan barang milik daerah 16.4 Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	
		17.Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	17.1 Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN 17.2 Peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia	

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (Revisi), 2024

4.5.3 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SPPN), proses perencanaan dan penganggaran diharapkan memiliki sinergitas, baik Pusat, Daerah, maupun Pusat dengan Daerah. Sinergitas sebagaimana dimaksud mengandung arti bahwa Prioritas Pembangunan perlu dijabarkan ke dalam perencanaan menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir yang dilaksanakan melalui keterpaduan para pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Adapun upaya untuk membangun sinergitas tersebut, didasarkan pada 2 (dua) pendekatan, yaitu sinergitas horizontal dan sinergitas vertikal. Sinergitas horizontal merupakan keterpaduan antara upaya peningkatan daya beli, partisipasi sekolah, dan kesehatan. Sedangkan, sinergitas vertikal merupakan keterpaduan strategis antara kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran harus mempersiapkan pelaksanaan dan mensinergikan capaian prioritas sasaran nasional dengan program-program pembangunan daerah serta melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

4.2.4.1 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Dokumen Rancangan RKP Tahun 2025 merupakan salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Dijadikannya acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta memberikan makna bahwa perlu adanya penyelarasan sasaran, prioritas, dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta dengan agenda, sasaran, fokus utama pengembangan wilayah, serta kebijakan nasional lainnya. Sebagaimana diketahui Provinsi DKI Jakarta memiliki 17 sasaran pembangunan untuk jangka menengah yang akan dilaksanakan di setiap tahunnya. Adapun penjelasan keterkaitan antara sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan sasaran prioritas nasional (asta cita), diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.23
Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta

Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran RPD DKI Jakarta 2023-2026	
(1)	(2)	(3)	
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Indeks Demokrasi Indonesia	12.	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
		3.	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,	*Asia Power Index (Military Capability)*		-
	Asia Power Index (Diplomatic Influence)		-
	Prevalensi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	12.	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	3.	Pengurangan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial

Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran RPD DKI Jakarta 2023-2026	
(1)	(2)	(3)	
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Indeks Ketahanan Energi	1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
		3.	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
		3.	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial
	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	14.	Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas
	Indeks Ekonomi Hijau	1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
		2.	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
		2.	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.
	Timbulan sampah tereduksi di fasilitas pengolahan sampah (%)	1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
	Persentase Penurunan Emisi GRK • Tahunan (%) • Kumulatif (%)	1.	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota
Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
	Rasio Kewirausahaan (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.

Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran RPD DKI Jakarta 2023-2026	
(1)	(2)	(3)	
serta Mengembangkan Agroindustri (industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
	Rasio PDB Pariwisata (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
	Devisa Pariwisata (miliar USD)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
		8.	Menguatnya Daya tiang Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi
	Aset Perbankan/PDB (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Aset Asuransi/PDB (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Total Kredit/PDB (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Inklusi Keuangan (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Hasil Pembelajaran		
	Rata-Rata Nilai PISA • Membaca • Matematika • Sains	9.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (tahun)	9.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	9.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	9.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua

Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran RPD DKI Jakarta 2023-2026	
(1)	(2)	(3)	
			Inovasi Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	9.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua diantari Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
	Tingkat Penguasaan Iptek: Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) Peringkat Indeks Inovasi Global	8.	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
	Usia Harapan Hidup (tahun)	10.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
	Kesehatan Ibu dan Anak: Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	10.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	10.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	10.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	11.	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	11.	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah
	Biaya Logistik (% PDB)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi Pemerataan	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	3.	Pengurangan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial
		7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja

Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran RPD DKI Jakarta 2023-2026	
(1)	(2)	(3)	
Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	5.	Pengurangan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial
		7.	Peningkatan Keselamatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	5.	Pengurangan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial
		7.	Peningkatan Keselamatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Persentase desa mandiri (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Pengelolaan	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Indeks Integritas Nasional	17.	Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur
	Indeks Materi Hukum	17.	Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur
	Indeks Pelayanan Publik	4.	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit
		8.	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi
		15.	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
		14.	Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas
		16.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah
		16.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel
		17.	Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	13.	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
		14.	Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas

Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran RPD DKI Jakarta 2023-2026	
(1)	(2)	(3)	
	Indeks Persepsi Korupsi	15.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah.
		16.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel
		17.	Tersedianya Penyelenggara, Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur
	Indeks Pembangunan Hukum	12.	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
	Tingkat Inflasi (%)	6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
Meningkatnya Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	12.	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
		8.	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	12.	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
		8.	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	3.	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota.
		5.	Pengurangan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, (2023) (telah disesuaikan)

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan 17 (tujuh belas) Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Selain keterkaitan antara sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah juga diharapkan dapat dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional pada periode yang sama.

Tabel 4.24
Keterkaitan Antara Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi/ Tujuan	Isu Strategis RPD Tahun 2023-2026	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila;	1. Ekonomi yang Mapan dan	*Built Environment*	Ketahanan Terhadap Bencana	Peningkatan Kualitas

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi/ Tujuan	Isu Strategis RPD Tahun 2023-2026	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Bersumberdaya Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru 3. Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Menyediakan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agroindustri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan	Terkoneksi Secara Global 2. Kepusatan Riset dan Inovasi yang Baik dan Massif 3. Ruang yang Nyaman untuk Dihuni 4. Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Berkelanjuta 5. Aksesibilitas yang Terkoneksi Secara Intra dan Inter Kota 6. Menarik Wisatawan untuk Berkunjung	Terwujudnya Pegembangan Kota yang Berkelanjutan dan Berkelanjutan	Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas	Lingkungan dan Infrastruktur Kota dengan fokus utama, yaitu: 1. Penanganan Kemacetan 2. Penanggulangan Banjir 3. Peningkatan Layanan Transportasi Publik 4. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Net Zero Emission) 5. Tata Kelola Air Bersih dan Air Minum 6. Ketahanan Bencana 7. Pengelolaan Limbah dan Sampah 8. Peningkatan Kualitas Udara 9. Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak
		Ekonomi Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Ketahanan Ekonomi Inklusif	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dengan fokus utama, yaitu: 1. Transformasi Ekonomi (Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalisasi) 2. Pengembangan Riset dan Inovasi 3. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui Cultural Interaction 4. Peningkatan Daya Tarik Iklim Investasi 5. Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi/ Tujuan	Isu Strategis RPD Tahun 2023-2026	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan Disabilitas 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan fokus utama, yaitu: 1. Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting 2. Optimalisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan 3. Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial 4. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan 5. Penguatan Ketahanan Pangan
		Human Pembangunan Manusia Maju yang Berkesetaraan	Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara	
		Governance Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dengan fokus utama, yaitu: 1. Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik 2. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik 3. Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif

Sumber: Dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2023-2026, Badan Perencanaan Provinsi DKI Jakarta, 2024

Sebagaimana tabel 4.13 di atas, dapat terlihat bahwa prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 memiliki keterhubungan dengan Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rancangan RKP Tahun 2025. Adapun kemudian, keterkaitan antara Prioritas Nasional Tahun 2025, Parameter Kota Global, dengan Dimensi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Prioritas, dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 terlihat pada tabel 4.23 di bawah.

Tabel 4.25
Keterkaitan antara Prioritas Nasional Tahun 2025, Parameter Kota Global, dengan Dimensi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Prioritas, dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi secara Global	***Economic*** Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	-	Program Hubungan Industrial
					-	Program Penempatan Tenaga Kerja
		Human Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	-	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi secara Global 2. Ruang yang Nyaman untuk Dihuni 3. Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Berkelanjutan	***Built Environment*** Terwujudnya Kegunaan Kota yang Berkesehatan dan Berkelanjutan	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	Peningkatan Kualitas Udara	Program Penataan Bangunan Gedung
						Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					Penanganan Sampah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
						Program Pengelolaan Persampahan
					Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon		Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Program Pengelolaan Energi Terbarukan
					Perbaikan Kualitas Lingkungan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
				Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Transformasi Ekonomi (Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
					-	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Economic Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi		Peningkatan Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
						Program Promosi Penanaman Modal
			Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah		Peningkatan Daya Saing Ekonomi -	Program Penyuluhan Pertanian
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
						Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
						Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Pengurangan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan Ketahanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
						Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengalaman dan Nilai Tambah			Kesehatan Masyarakat Veteriner
						Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	Perbaikan Kualitas Lingkungan	
				-	-	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Built Environment Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan	1. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi secara Global 2. Menarik Wisatawan untuk Berkunjung 3. Aksesibilitas yang Terkoneksi secara Intra dan Inter Kota	***Economic*** Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction*	Program Pemasaran Pariwisata
						Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja		Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
						Program Pengembangan UMKM
			Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah		Peningkatan Daya Saing Ekonomi	Program Pengembangan Ekspor
						Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	-	-	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Built Environment Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
					Transformasi Ekonomi (Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalisasi)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	Penanggulangan Banjir	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
			Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas			Program Pengelolaan Pelayanan

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit		Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik	Program Pengelolaan Perkeretapian
						Program Penyelenggaraan Jalan
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota		Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
			Terwujudnya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit		-	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan	1. Ekonomi yang Maju dan Terkoneksi secara Global 2. Kapasitas Riset dan Inovasi Baik dan Merata	***Human*** Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
						Program Pengembangan Data Sang Kesehatan
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Diseasi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Ruang yang Nyaman untuk Dihuni					Daya Manusia Kesehatan
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
					Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
					Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
					Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi		Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	Program Pembinaan Perpustakaan

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat			Program Pengelolaan Pendidikan
			Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	-	-	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
				-	-	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
				-	-	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
				-	-	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
				-	-	Program Perlindungan Khusus Anak
				-	-	Program Perlindungan Perempuan
			Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perlintasan	-	-	Program Pengendalian Penduduk
		Ekonomi				Program Pelatihan Kerja dan

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Diseasi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja
						Program Penempatan Tenaga Kerja
			Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Penciptaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
				-	-	Program Rehabilitasi Sosial
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi secara Global	***Economic*** Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Membangun dari Desa dan dari	1. Ekonomi yang Mapan dan	***Built Environment***	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan			Program Kawasan Permukiman

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Terkoneksi secara Global 2. Ruang yang Nyaman untuk Dihuni	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berkelanjutan	Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	Peningkatan Akses Hunian Layak	Program Penatagunaan Tanah Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Economic Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Pengurangan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Rehabilitasi Sosial
					Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting	
Memperkuat Reformasi Politik Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi secara Global	***Human*** Pembangunan Manusia Maju yang Berkesetaraan	Mengentasnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
					-	Program Pembinaan Dan Pengembangan Kebangsaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
					-	Program Peningkatan Peran Partai Politik

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Built Environment Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota		Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit		Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon		-	Program Penataan Bangunan Gedung
		Economic Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi		-	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		Governance Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen	Terkelolanya Keuangan Daerah Yang Sehat, Transparan dan Akuntabel		Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pemerintahan Berintegritas			Kemudahan Layanan Publik	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat			Program Pelayanan Penanaman Modal
						Program Pencatatan Sipil
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
						Program Pendaftaran Penduduk
			Terwujudnya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah			Program Penyelenggaraan Pengawasan
						Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					-	Program Penataan Organisasi

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					-	Program Perekonomian dan Pembangunan
			Terwujudnya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur		-	Program Kepegawaian Daerah
			Terwujudnya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	-	-	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
				-	-	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
					Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	
				-	-	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
				-	-	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				-	-	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1. Menarik Wisatawan untuk Berkunjung 2. Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Berkelanjutan	***Economic*** Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction*	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
						Program Pengelolaan Permuseuman
						Program Pengembangan Kebudayaan
				-	-	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
			Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	Ketahanan Bencana	Program Penanganan Bencana
		Built Environment Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon		Perbaikan Kualitas Lingkungan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Lingkungan Hidup (PPLH)
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
						Program Pengelolaan Hutan
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota		Ketahanan Bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik	Program Penanggulangan Bencana
					Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	
			Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	Perbaikan Kualitas Lingkungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
					Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik	

Prioritas Nasional	Parameter Kota Global	Dimensi / Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Fokus Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Human Pembangunan Manusia Modern yang Berkesetaraan	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinnekaan Masyarakat	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	-	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Sumber: 1. RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (Update), 2024
2. Dokumen Perencanaan SKPD Tahun 2023, 2024 (Update)
3. Hasil Kajian Bappeda Provinsi DKI Jakarta terhadap Kota Global, 2024 (Olah)

4.2.4.2 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Pengarusutamaan Pembangunan Nasional dengan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

a. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan gender dan inklusif dengan memberikan kesempatan kepada perempuan dan laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses dan kontrol agar mampu berpartisipasi secara bermakna, dan memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah dimandatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut dilaksanakan melalui pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUGIS). PUGIS merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi sosial melalui integrasi perspektif gender dan perspektif inklusi sosial ke dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.

Strategi PUGIS juga menjadi bagian penting dari penerapan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan kerangka kerja logis, di mana perspektif gender dan perspektif inklusi sosial diintegrasikan ke dalam Prioritas Nasional, serta tercerminkan dalam berbagai program/kegiatan/rincian output di kementerian/lembaga terkait. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dilaksanakan sejalan dengan etika, moral, nilai budaya yang positif, serta norma agama, yang berlaku dan dianut secara luas oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian target dan indikator penurunan ketimpangan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan dari kekerasan, setiap kementerian/lembaga mengintegrasikan perspektif gender dengan mengacu pada program kerja terkait serta menyusun *Gender Action Budget* (GAB) dan melakukan penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) secara konsisten. Hal tersebut juga dilakukan untuk pencapaian target dan indikator peningkatan kualitas penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta kelompok rentan lainnya di setiap kementerian/lembaga.

b. Pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pemerintah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dengan mengintegrasikan 124 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan pencapaian target TPB tersebut secara khusus dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengarusutamakan dan menggunakan sasaran dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 serta menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029.

Pemerintah baik pusat dan daerah mendorong, memfasilitasi dan bekerja sama dengan aktor nonpemerintah yaitu masyarakat sipil, mitra pembangunan, filantropi, pelaku usaha, dan perguruan tinggi untuk menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah mengembangkan dan membentuk *platform* SDGs *centers*, menciptakan SDGs taksonomi, adopsi pelaporan hijau, rencana bangun dan piloting antarkota/kabupaten dengan kota mitra negara lain, advokasi, publikasi dan berbagi pengetahuan, dan keterlibatan inisiatif global dan regional. Pendanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak hanya oleh pemerintah, namun didukung oleh nonpemerintah dengan membentuk dan meningkatkan mekanisme pendanaan inovatif, yaitu pendanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berasal dari nonpemerintah, maupun pendanaan gabungan dari pemerintah dan nonpemerintah. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melibatkan masyarakat sipil, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi. Penguatan data memanfaatkan

sistem satu data dan penguatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk menyelaraskan rencana Pembangunan daerah dengan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun kemudian, percepatan capaian target TPB dapat terlaksana apabila terdapat komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memformulasikan kebijakan yang terarah. Komitmen sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan adanya Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah, rencana aksi tersebut menjadi landasan utama untuk koordinasi di tingkat pusat dengan para stakeholders nasional maupun daerah. Dokumen Rencana Aksi Daerah dijadikan sebagai salah satu pedoman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan prioritas pembangunan di setiap tahunnya. Keterkaitan antara beberapa target TPB dengan program prioritas DKI Jakarta tahun 2025 tersampaikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.26
Sandingan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (*Mainstreaming*) Pembangunan Nasional Tahun 2025

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
Pengarusutamaan Gender & Inklusi Sosial	
Memberikan kesempatan kepada perempuan dan laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam meningkatkan akses dan kontrol agar mampu berpartisipasi secara bermakna, dan memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan pembangunan.	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 2. Program Perlindungan Perempuan. 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). 6. Program Perlindungan Khusus Anak. 7. Program Pemberdayaan Sosial. 8. Program Rehabilitasi Sosial. 9. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 10. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	
Goal 1 Tanpa Kemiskinan Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 1.1** Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari. • **Target 1.2** Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi. • **Target 1.3** Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2. Program Pengelolaan Kota Administrasi. 3. Program Penempatan Tenaga Kerja. 4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). 5. Program Pengelolaan Pendidikan. 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 8. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. 9. Program Pengendalian Penduduk. 10. Program Pembinaan Keluarga

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. • **Target 1.4** Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. • **Target 1.5** Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Berencana (KB). 11. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. 13. Program Rehabilitasi Sosial. 14. Program Hubungan Industrial. 15. Program Pengembangan Perumahan. 16. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). 17. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 18. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 19. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian. 20. Program Perlindungan Perempuan. 21. Program Penanganan Bencana. 22. Program Penanggulangan Bencana. 23. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. 24. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. 25. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Goal 2 Tanpa Kelaparan Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 2.1** Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. • **Target 2.2** Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. • **Target 2.3** Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan. 3. Program Pengendalian Penduduk. 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. 5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. 7. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. 8. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). 10. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. 11. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian. • **Target 2.4** Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. • **Target 2.5** Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan di anekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian. • **Target 2.c** Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.	12. Program Penyuluhan Pertanian. 13. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. 14. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
Goal 3 Kehidupan Sehat & Sejahtera Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia . Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 3.1** Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. • **Target 3.2** Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian	1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. 4. Program Pengendalian Penduduk. 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). 6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. • **Target 3.3** Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. • **Target 3.4** Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. • **Target 3.5** Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. • **Target 3.7** Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. • **Target 3.8** Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. • **Target 3.b** Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the *Doha Declaration* tentang the *TRIPS Agreement and Public Health*, yang mengakui hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kelenturan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. • **Target 3.c** Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang.	7. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. 8. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.	
Goal 4 Pendidikan Berkualitas Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 4.1** Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. • **Target 4.2** Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. • **Target 4.3** Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. • **Target 4.4** Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. • **Target 4.5** Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat pendudukasli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. • **Target 4.6** Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. • **Target 4.a** Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang	1. Program Pengelolaan Pendidikan. 2. Program Pengendalian Penduduk. 3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. 4. Program Pembinaan Perpustakaan. 5. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. 6. Program Pengelolaan Arsip. 7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. • **Target 4.c** Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	
Goal 5 Kesetaraan Gender Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 5.3** Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. • **Target 5.5** Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. • **Target 5.6** Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revu dari konferensi-konferensi tersebut. • **Target 5.a** Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional. • **Target 5.b** Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	1. Program Perlindungan Perempuan. 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). 3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 4. Program Perlindungan Khusus Anak. 5. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah. 6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. 7. Program Pengembangan Perumahan. 8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. 9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. 10. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. 11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. 12. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
Goal 6 Air Bersih & Sanitasi Layak Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu:	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
• **Target 6.1** Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. • **Target 6.2** Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. • **Target 6.6** Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 4. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian. 5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. 8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. 10. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). 11. Program Pengelolaan Hutan. 12. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Goal 7 Energi Bersih & Terjangkau Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 7.1** Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. 2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan.
Goal 8 Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 8.1** Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. • **Target 8.2** Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	1. Program Pengembangan Ekspor. 2. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. 3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. 5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. 6. Program Pemasaran Pariwisata. 7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. 9. Program Perekonomian dan Pembangunan. 10. Program Pemberdayaan Lembaga

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
• **Target 8.3** Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. • **Target 8.5** Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. • **Target 8.6** Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. • **Target 8.7** Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan perdagangan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya. • **Target 8.9** Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. 11. Program Perencanaan Tenaga Kerja. 12. Program Penempatan Tenaga Kerja. 13. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 14. Program Hubungan Industrial. 15. Program Pengawasan Ketenagakerjaan. 16. Program Pengelolaan Pelayaran. 17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. 18. Program Promosi Penanaman Modal. 19. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 20. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. 21. Program Pelayanan Penanaman Modal. 22. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 23. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. 24. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. 25. Program Pengembangan UMKM. 26. Program Pemanan dan Pendaftaran Perusahaan. 27. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
Goal 9 Industri, Inovasi & Infrastruktur Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 9.1** Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. • **Target 9.2** Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional.	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 2. Program Pengelolaan Pelayaran. 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. 4. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. 5. Program Penyelenggaraan Jalan. 6. Program Pengelolaan Perkeretapian.

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang;	
Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 10.1** Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 3. Program Penempatan Tenaga Kerja. 4. Program Hubungan Industrial. 5. Program Pengelolaan Kota Administrasi. 6. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. 7. Program Rehabilitasi Sosial. 8. Program Perlindungan Perempuan. 9. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. 10. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan. 11. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
Goal 11 Kota & Permukiman Yang Berkelanjutan Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 11.1** Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. • **Target 11.2** Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. • **Target 11.4** Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. • **Target 11.5** Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang	1. Program Pengembangan Perumahan. 2. Program Kawasan Permukiman. 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). 4. Program Penyelenggaraan Jalan. 5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 6. Program Pengelolaan Pelayanan. 7. Program Pengembangan Kebudayaan. 8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. 9. Program Pengelolaan Pemakaman. 10. Program Penanggulangan Bencana. 11. Program Penanganan Bencana. 12. Program Pengelolaan Kecamatan. 13. Program Rehabilitasi Sosial. 14. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. 15. Program Pengelolaan Persampahan. 16. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). 17. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. 18. Program Penataan Bangunan Gedung. 19. Program Pengelolaan Perkeretapian. 20. Program Penatagunaan Tanah.

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. • **Target 11.6** Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. • **Target 11.7** Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau, terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas. • **Target 11.a** Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah. • **Target 11.b** Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030. • **Target 11.c** Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tanggoh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	
Goal 12 Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 12.4** Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan	1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). 2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. 3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. 4. Program Pengelolaan Persampahan. 5. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. • **Target 12.5** Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. • **Target 12.8** Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	
Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 13.1** Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. • **Target 13.2** Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. • **Target 13.3** Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.	1. Program Penanggulangan Bencana. 2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 3. Program Rehabilitasi Sosial. 4. Program Penanganan Bencana. 5. Program Pengembangan Perumahan. 6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. 8. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
Goal 14 Ekosistem Lautan Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 14.5** Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. • **Target 14.6** Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur	1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. 4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 7. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization. • **Target 14.b** Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	
Goal 15 Ekosistem Daratan Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 15.1** Pada tahun 2020, menjamin kelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	1. Program Pengelolaan Hutan. 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 16.1** Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. • **Target 16.2** Mengakhiri perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. • **Target 16.3** Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. • **Target 16.5** Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 2. Program Perlindungan Khusus Anak. 3. Program Perlindungan Perempuan. 4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. 6. Program Penyelenggaraan Pengawasan. 7. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. 8. Program Pengelolaan Kota Administrasi. 9. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan. 10. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. 11. Program Penataan Organisasi. 12. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. 13. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2025
(1)	(2)
• **Target 16.6** Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. • **Target 16.7** Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. • **Target 16.9** Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. • **Target 16.10** Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. • **Target 16.b** Menggalakkan dan mengakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. 14. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 15. Program Pendaftaran Penduduk. 16. Program Pencatatan Sipil. 17. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 18. Program Pengelolaan Profil Kependudukan. 19. Program Pengendalian Penduduk. 20. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. 21. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • **Target 17.1** Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. • **Target 17.11** Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020. • **Target 17.17** Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. • **Target 17.19** Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto; dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Program Pengembangan Ekspor. 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 5. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah. 6. Program Pendaftaran Penduduk. 7. Program Pencatatan Sipil. 8. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 9. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Sumber: Hasil Olahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.6 Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 (lima) wilayah Kota dan 1 (satu) Kabupaten. Masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Daya saing kota/ kabupaten dapat optimal jika masing-masing wilayah fokus membangun pada potensi keunggulannya. Selain itu, keberhasilan pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 yang diturunkan ke dalam 4 (empat) prioritas pembangunan, akan optimal apabila setiap wilayah secara langsung mendukung prioritas pembangunan tersebut.

a. Jakarta Barat

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota
   (a) Rekayasa Lalu Lintas
      (1) Sistem satu arah/ pengalihan jalan alternatif dari Jl. Puri Kencana melalui Jl. Kencana Indah dan Jl. Kembang Indah ke arah Meruya, Kembangan
      (2) Pengaturan arus lalu lintas dari utara dan selatan karena penyempitan jalan (*bottleneck*) di Kembang Kerep Kuku Macan, Kecamatan Kembangan.
   (b) Penertiban Parkir Liar
   (c) Penyesuaian Trase Jalan
   (d) Pembukaan Portal
   (e) Pembangunan/ Revitalisasi JPO di Slipi Petemburan
   (f) Revitalisasi Sarpras Pengendali Banjir
      (1) Penambahan Kapasitas Kolam Olakan Pompa Pnb. Bojong – Rawa Buaya
      (2) Revitalisasi Pompa Mobile menjadi Pompa Stasioner di Tanjung Duren
      (3) Revitalisasi Pompa Mobile menjadi Pompa Stasioner di Jl. Pedongkelan Raya (pertemuan Kali Apuran dengan Cengkareng Drain)
      (4) Perkuatan tebing kali/ *sheet pile* Kali Sekretaris (Jl. Gili Sampeng – Jl. Arjuna Selatan) sepanjang 200m.
   (g) Normalisasi Saluran
      (1) Normalisasi Kali Semongol
      (2) Normalisasi Kali Anak Flamboyan
      (3) Pembuatan Sodetan Kali Gendong
   (h) Pemeliharaan Rutin Kali/ Saluran
   (i) Perbaikan Saluran
   (j) Refungsi Saluran
   (k) Penanganan Sampah Kali
   (l) Implementasi Pergub Nomor 77 Tahun 2020 dengan pembentukan dan pendampingan bank sampah sebanyak 1.060 BSU
   (m) Peningkatan pengurangan sampah di sumber sebesar 30% (sesuai Pergub Nomor 108 Tahun 2019)
   (n) Peningkatan TPS yang berkonsep 3R sebanyak 4 lokasi antara lain Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kelurahan Kalideres, Kelurahan Tegal Alur, dan Kelurahan Sukabumi Selatan dan Pembangunan TPS 3R di Pesakih Rusun Daan Mogot
   (o) Bekerja sama dengan pihak swasta untuk menjadikan wilayah Jakarta Barat bebas dari buang air sembarangan.
   (p) Pelaksanaan *Collaborative Implementation Program* (CIP) di 17 Lokasi RW Kumuh antara Lain:
      (1) Kelurahan Kamal 4 RW
      (2) Kelurahan Tegal Alur 1 RW
      (3) Kelurahan Semanan 2 RW
      (4) Kelurahan Cengkareng Timur 2 RW
      (5) Kelurahan Cengkareng Barat 4 RW
      (6) Kelurahan Rawa Buaya 2 RW
      (7) Kelurahan Kota Bambu Selatan 1 RW

(8) Kelurahan Kapuk 1 RW

(p) Pembangunan RTH sebanyak 3 lokasi antara lain Taman Ratu Kembang, Taman Hutan Kota Nusantara (THKN) dan Taman Sensori sisi Selatan

(q) Penghijauan di lokasi Penataan Kawasan wilayah Jakarta Barat

2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
   (a) Pelaksanaan pelatihan dengan memprioritaskan masyarakat miskin menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
   (b) Pelatihan Softskill dan Pelatihan Hardskill, antara lain:
      (1) Pelatihan Manajemen usaha dan pemasaran dengan profesional
      (2) Pelatihan bidang Kuliner, Fashion; Kerajinan; Tata Rias;
   (c) Service AC; Ekonomi Kreatif; Olahan Hasil Perikanan, Pertanian, Peternakan; Budidaya Perikanan dan Budidaya pertanian perkotaan; serta pelatihan mengemudi dan satpam
   (d) Peningkatan akses pasar dan literasi digital bagi pelaku UMKM
   (e) Peningkatan promosi pariwisata dengan penyelenggaraan atraksi ruang publik, kolaborasi media dan influencer.
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
   (a) Alokasi revitalisasi tangki septik dan MCK komunal
   (b) Peningkatan Pelayanan Posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan Balita
   (c) Pembangunan IPAL
   (d) Melanjutkan Penanaman cabai dan *urban farming*
   (e) Fasilitasi penyediaan sembako murah
   (f) Pemberian bibit ikan kepada Masyarakat dan Gerakan Makan Ikan
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif
   (a) Penguatan jaringan internet (bandwidth) serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi
   (b) Peningkatan kualitas SDM (aparatur, RT/RW dan Masyarakat) dalam literasi digital
   (c) Kolaborasi dengan pihak swasta (CSR).

b. Jakarta Utara

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota
   (a) Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD dalam rangka penanggulangan banjir rob di pesisir utara Jakarta
   (b) Pembangunan Turap Kali Cakung Lama, Pegangsaan Dua dalam rangka penanggulangan banjir di Kelapa Gading dan Cilincing
   (c) Perbaikan Jalan di sepanjang jalan akses Marunda
2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
   (a) Pembangunan Icon Pengembangan Kawasan Bersejarah dalam rangka peningkatan daya tarik wisata
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
   (a) Perluasan ruang beberapa Puskesmas Kecamatan
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif
   (a) Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara di Jalan Yos Sudarso.

c. Jakarta Pusat

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota
   (a) Penanggulangan Banjir
      (1) Pembangunan saluran drainase di 22 lokasi
      (2) Pembangunan 5 (lima) unit pintu air
      (3) Pemeliharaan rutin saluran dan drainase
      (4) Pemeliharaan dan perbaikan pompa stasioner
      (5) Penempatan pompa mobile di lokasi rawan genangan
      (6) Pengerukan Kali Sentiong, Kali Banjir Kanal Barat, dan Anak Kali Ciliwung

(7) Penanganan jaringan utilitas (kabel) di dalam saluran yang menjadi penyebab genangan/banjir di Jalan Medan Merdeka Selatan

(b) Peningkatan Pengelolaan Sampah
(1) Pengelolaan Sampah Kawasan Mandiri di 135 lokasi
(2) Pembatasan Timbulan Sampah
(3) Pengelolaan Sampah RW sebanyak 195 RPS RW
(4) TPS 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) di 4 (empat) lokasi
(5) Bank Sampah, terdiri dari 385 Bank Sampah dan 1 (satu) Bank Sampah Induk
(6) Program Kampung Iklim di 84 RW
(7) Program Adiwiyata di 98 sekolah

(c) Peningkatan program penghijauan kota

(d) Pembangunan dan/atau pemeliharaan fasum dan fasos di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran (eks Bandar Udara Kemayoran)

2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

(a) Revitalisasi Pasar Serdang dan Pasar Gardu Asam

(b) Pengembangan Ekonomi Kreatif
(1) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kemitraan seperti kompetisi musik dan lomba short film
(2) Pembinaan kewirausahaan peserta Jakpreneur dan UKM (pelatihan *soft skill* bersama kolaborator)
(3) Pelatihan ekonomi kreatif seperti pelatihan pembuatan logo dan desain kemasan
(4) Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif di ruang publik dan destinasi wisata
(5) Fasilitasi pendaftaran sertifikat halal, izin edar MD EPOM, desain kemasan, dan Hak Merk

(c) Pengembangan Pariwisata
(1) Pengembangan Kawasan Juanda-Pecenongan-Pasar Baru sebagai Kawasan Wisata Heritage-Religi, Kuliner, dan Belanja
(2) Penyelenggaraan Green Tourism Festival
(3) Promosi destinasi wisata unggulan dengan melibatkan media dan influencer
(4) Promosi pariwisata melalui penyelenggaraan atraksi di ruang publik, kalender event, dan kemitraan dengan pelaku/komunitas seni
(5) Peningkatan kualitas layanan pariwisata melalui pembinaan kelompok sadar wisata

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

(a) Penurunan Stunting
(1) Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi, terutama di kelurahan yang menjadi lokus utama
(2) Pelaksanaan program Jakarta Beraksi dengan mengikutsertakan dunia usaha/lembaga melalui CSR

(b) Peningkatan Layanan Kesehatan
(1) Pengadaan lahan Puskesmas Kelurahan Cumung Sahari Selatan
(2) Pembangunan 10 Puskesmas Pembantu

(c) Penanggulangan Kemiskinan
(1) Peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat
(2) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
(3) Peningkatan kualitas permukiman kumuh

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif

(a) Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik
(1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, cepat, dan mudah
(2) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM
(3) Penyediaan sarana prasarana gedung pelayanan publik yang nyaman dan aman sesuai standar
(4) Kolaborasi dengan pihak swasta/masyarakat melalui CSR

d. Jakarta Selatan

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota
   (a) Penanganan Genangan / Banjir
      (1) Pembangunan Embung Dharmajaya di Kemang Utara IX
      (2) Peninggian Turap di sisi samping SDN 01 Petukangan Selatan
      (3) Pembuatan *Jacking* Cilandak KKO menuju Kali Krukut
      (4) Pembuatan *Connecting* Saluran di gang Asem dan depan Depdiknas ke *Jacking*
      (5) Normalisasi dan Penurapan Kali Mati dan Kali Kalibata serta Penurapan lanjutan Kali Mampang
      (6) Penataan Kawasan Rawa Lindung
      (7) Penurapan dan Pembangunan Rumah Pompa di Komplek Pondok Karya
      (8) Pembuatan Saluran Air di Jalan Haji Nawi Raya dan Fatmawati Raya
      (9) Pembebasan lahan untuk Pembuatan Embung Kali Uangan
   (b) Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau
      (1) Pembangunan RTH Taman RC Veteran Kelurahan Bintaro dan RTH Taman Jalan Wika Kelurahan Srengseng Sawah
      (2) Penataan RTH Taman Tanjung Kelurahan Tanjung Barat dan RTH Taman Bendi Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
      (3) Penataan RTH Taman Walikota, Bangka Raya, dan Taman Barat Bintaro
   (c) Penataan Kawasan
      (1) Revitalisasi Kawasan Blok M
      (2) Penataan Kawasan Hijau Terpadu Srengseng Sawah
      (3) Penataan Trotoar sepanjang koridor Jalan RC Veteran Bintaro
      (4) Penataan Trotoar di Jalan Wijaya II dan Jalan Darmawangsa Raya
      (5) Penataan Totoar di Jalan Iskandar Muda dan Jalan Ciputat Raya
      (6) Pemeliharaan Trotoar di Jalan Kahfi II
      (7) Penataan Kawasan sepanjang Jalan Tebet Barat Dalam Raya
      (8) Penataan Kawasan Jalan Senayan Kelurahan Rawa Barat
   (d) Penanganan Kemacetan
      (1) Pelebaran Jalan Ciledug Raya di depan Universitas Budi Luhur
      (2) Pelebaran jalan dan perbaikan radius tikungan di Jalan Fonda Baru, Cilandak Barat
      (3) Pembuatan Layhay di depan Taman Komplek Brimob Pasar Minggu, Pejaten Barat
      (4) Pembuatan JPO di depan SMK Al Falah Jalan Mampang Prapatan Raya
      (5) Penyusunan Kajian Jalan Layang Non Tol Mampang (Koridor Kuningan-Ragunan)
2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
   (a) Penanganan Stunting
      (1) Kelas pemberian makanan bayi dan anak
      (2) Pemberian TTD Remaja dan pemeriksaan HB
      (3) Pemberian kolam gizi (bak fiber)
      (4) Kampung gizi dengan YMB PLN
      (5) Deshat X Jakber
      (6) Kunjungan balita stunting
      (7) Gerakan Gemar Makan Ikan
      (8) Peningkatan Sanitasi Lingkungan
      (9) Kelompok Peduli Gizi
   (b) Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan
      (1) Pembangunan Puskesmas Pembantu Kebon Baru, Karet Kuningan, Cipete Utara, Kebayoran Lama Selatan, dan Jati Padang
      (2) Rehab Total Puskesmas Pembantu Mentang Dalam
      (3) Rehab Total Puskesmas Pembantu Pondok Pinang
      (4) Pembangunan Puskesmas Kebayoran Lama dan Puskesmas Pembantu Cipedak
      (5) Pemindahan lokasi Puskesmas Pembantu Cilandak Barat

(c) Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
(1) Rehab Total Gedung SDN Cipulir 11, Cilandak Barat 08, Gandaria Selatan 03 Pagi, Lebak Bulus 04, Cipete Utara 01, Tebet Timur 07, dan Setiabudi 01
(2) Rehab Total Gedung SMPN 115, SMPN 15, dan SMPN 58
(3) Rehab Total Gedung SMKN 37
(4) Pembangunan SMP Negeri di Kelurahan Pasar Minggu

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif
(a) Pembuatan Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan Lenteng Agung
(b) Relokasi Kantor Lurah Tegal Parang.

e. Jakarta Timur

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota
(a) Pengendalian Banjir
(1) Pembangunan Waduk Dato Tonggara Kecamatan Kramat Jati
(2) Pembangunan Waduk Giri Kencana Kecamatan Cipayung
(3) Pembangunan Embung Mini, Normalisasi Kali Mati, dan Pembuatan Pintu Air Kali Mati di RW 11 Kelurahan Bidara Cina
(4) Pembangunan Embung di Gang Atom RW 05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas
(5) Penurapan Kali Cipinang Jalan Puskesmas RW 01 dan RW 03 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas
(6) Penurapan Kali Baru di HEK dan Jalan Haji Hanjun Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Kramat Jati
(7) Pengerukan berkala waduk/ setu/ embung
(8) Pembangunan saluran Phb dan saluran mikro
(9) Pembangunan/peningkatan pintu air, rumah posa, dan unit pompa
(10) Pembangunan sumur resapan
(11) Optimalisasi ruang biru pada RTH dengan membangun bioswale dan rain garden
(b) Penataan Kawasan
(1) Penataan fungsi koridor jalan dan mempertegas batas GSJ dan GSB
(2) Peningkatan estetika kawasan dengan penambahan *street furniture*
(c) Revitalisasi Terminal Bus Pinang Ranti
(d) Pembangunan 4 lempati JPO di Jalan H. Bokir bin Djiun, Transit Hub, Stasiun LRT Taman Mini, dan Asrama Haji
2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
(a) Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
(1) Pelaksanaan Job Fair
(2) Pelatihan keterampilan kerja
(3) Pelatihan kerja berbasis kompetensi
(4) Pelatihan bagi peserta Jakpreneur
(5) Pelatihan bagi pelaku industri kecil dan menengah
(6) Pendampingan bagi Tenaga Kerja Mandiri
(7) Optimalisasi promosi dan pemasaran produk unggulan daerah
(b) Penambahan Rute JakLingko dari Pondok Rangon sampai halte bus Pinang Ranti melewati RSKD Cipayung
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
(a) Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan
(1) Pembangunan Puskesmas Pembantu Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit
(2) Pembangunan Puskesmas Pembantu Cipayung
(b) Pembangunan Sarana Prasaran Pendidikan
(1) Pembangunan SMPN di Kelurahan Jatinegara Kaum
(2) Pembangunan SMPN di Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung
(3) Pembangunan SMPN di Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar
(4) Pembangunan SMPN dan SMAN di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung

(c) Percepatan Penuntasan Stunting
(1) Pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting
(2) Memaksimalkan fungsi Posyandu dalam deteksi dini tumbuh kembang balita
(3) Peningkatan wawasan kepada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, pekerja wanita, dan ibu menyusui
(4) Peningkatan peran Orang Tua Asuh Stunting
(5) Penyediaan PMT AS SD dan TK/PAUD
(6) Mendorong rujukan ke Rumah Sakit bagi balita stunting
(7) Penataan RW kumuh dan pembuatan WC komunal
(d) Penguatan Ketahanan Pangan
(1) Menggiatkan kelompok-kelompok tani skala kelurahan
(2) Pengembangan pangan lokal
(3) Pemeliharaan bibit ikan
(4) Peningkatan *urban farming*
(5) Penanaman cabai dan bawang di lahan-lahan fasos fasum, kantor kelurahan dan kecamatan, rumah warga, serta tempat ibadah
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif

f. Kepulauan Seribu

Prioritas Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota
(a) Peningkatan sarana prasarana transportasi laut
(1) Revitalisasi pelabuhan dan dermaga
(2) Pemenuhan kebutuhan angkutan perairan antar pulau
(b) Pembangunan Rumah Susun di Area Hexagon Pulau Panggang
(c) Peningkatan kapasitas dan kualitas produksi SWRO
(d) Penanganan Sampah
(1) Pengadaan Kapal Conveyor
(2) Pembangunan TPS dan pengolahan sampah non konvensional
(3) Pengembangan pulau khusus penanganan sampah
2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
(a) Perikanan dan Kelautan
(1) Pembangunan tempat pelelangan ikan terpadu
(2) Revitalisasi Pulau Tidung Kecil menjadi Eko Agro Mina Wisata
(b) Pembangunan jaringan kabel laut di pulau-pulau resort
(c) Pembangunan/Penyediaan SPBU di Kepulauan Seribu
(d) Pariwisata
(1) Pengembangan spot wisata di setiap pulau permukiman
(2) Pengembangan obyek wisata cagar budaya
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
(a) Peningkatan Layanan Kesehatan
(1) Peningkatan status RSUD Tipe D ke Tipe C
(2) Optimalisasi Rumah Sakit Kepulauan Seribu, khususnya peningkatan layanan kamar operasi serta ICU dan NICCU
(3) Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di RSUD Kepulauan Seribu
(4) Pembangunan Poskes di Pulau Pari
(b) Peningkatan Layanan Pendidikan
(1) Pembentukan jurusan SMK sesuai kebutuhan
(2) Pengadaan tempat praktik docking kapal sebagai sarana pelatihan SMKN 61
(c) Penyediaan lahan pemakaman di Pulau Panjang dan Pulau Karya
(d) Penguatan Ketahanan Pangan (*Food Security*) melalui riset dan teknologi
(e) Pemuda dan Olahraga
(1) Pembangunan GOR di Pulau Panjang dan Pulau Tidung Kecil
(2) Pembangunan Floating Sports Tourism
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana kerja dan pendanaan daerah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas aspirasi masyarakat melalui Musrenbang, hasil reses, usulan langsung masyarakat, dan rencana kerja perangkat daerah.

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2025 membahas substansi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Hal ini direncang untuk mendukung terwujudnya capaian rencana strategis, prioritas pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah, maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 disusun berdasarkan proses teknokratik, politik, atas bawah (top-down), dan bawah atas (bottom up) dengan memperhatikan dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat melalui kegiatan Musrenbang maupun penjaringan pokok-pokok pikiran DPRD, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

Perumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 juga memperhatikan tema pembangunan tahun 2025 yaitu **"Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan"** dengan prioritas pembangunan daerah difokuskan pada Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif. Penetapan target dan pagu indikatif terhadap program dan kegiatan selanjutnya diarahkan sedemikian rupa untuk mendukung seluruh prioritas pembangunan tahun 2025.

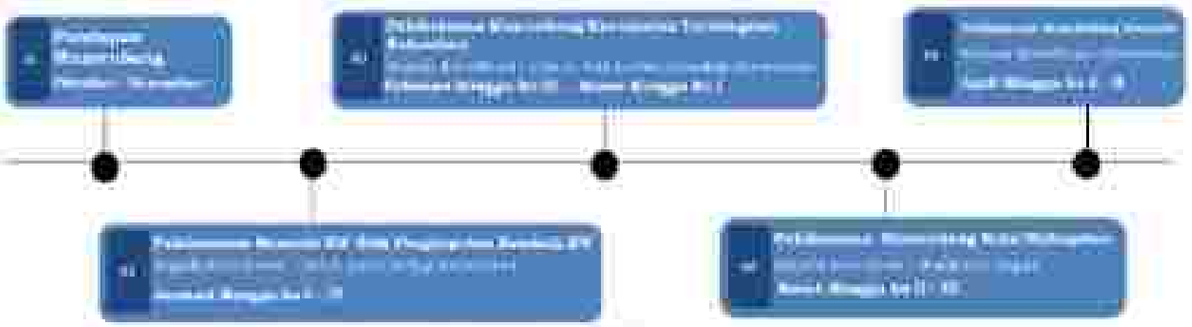
Bab ini menjabarkan penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2025 dengan mengakomodir aspirasi masyarakat yang diperoleh dari kegiatan Musrenbang dan usulan langsung masyarakat selaku proses bawah-atas (bottom-up) serta reses DPRD selaku proses politik. Penyerapan aspirasi masyarakat memberikan usulan-usulan yang menjadi salah satu dasar penyusunan Rencana Kerja yang diakomodir ke dalam rencana kerja pemerintah daerah beserta pendanaannya yang dapat memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat.

5.1 Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang

Pasal 1 Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan suatu kegiatan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Tujuan pelaksanaan Musrenbang adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan PD/UKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk Renja Perangkat Daerah Provinsi, dan hasil Musrenbang RKPD Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di kecamatan untuk Renja Perangkat Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pada penyusunan RKPD Tahun 2025, proses partisipatif (bottom-up) dilakukan melalui kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari Pra Musrenbang Kelurahan (reabuk RW), Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, hingga Musrenbang Provinsi. Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024 mengacu pada Instruksi Gubernur Nomor e-0003 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Musrenbang dan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Administrasi Jakarta Tahun 2025. Lebih lanjut jadwal pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024 berdasarkan Instruksi Gubernur dimaksud, adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1
Timeline Kegiatan Musrenbang Tahun 2024



Sumber: Instruksi Gubernur Nomor 4/2023 Tahun 2023

Pada gambar 5.1 di atas, terlihat tahapan kegiatan Musrenbang Tahun 2024 beserta waktu pelaksanaannya. Kegiatan Musrenbang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari Rembuk Rukun Warga (RW) yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan serta menentukan kegiatan yang akan diprioritaskan berdasarkan kesepakatan dilingkungan RW. Masukan usulan kegiatan dari Rembuk RW ini selanjutnya akan divalidasi secara berjenjang dan akan diakomodasi menjadi kegiatan dalam Rencana Kerja PD/UKPD pada dokumen RKPD tahun 2025. Kegiatan Rembuk RW ini dilakukan pada 2.721 RW yang tersebar di 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi. Seluruh RW menghasilkan usulan kegiatan yang kemudian akan di respons dan divalidasi lebih lanjut sesuai prioritas yang diajukan pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Lebih lanjut terhadap hasil rekapitulasi usulan fase Rembuk RW hingga Musrenbang Kecamatan terintegrasi Musrenbang Kelurahan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Usulan Awal Fase Rembuk RW hingga Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2024

Wilayah	Jumlah RW yang Mengikuti Rembuk	Usulan RW			Telah Diseleksi	Verifikasi Kelurahan	Verifikasi Kecamatan
		Barang	Fisik	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kota Administrasi Jakarta Barat	383	334	1.957	2.291	1.957	1.803	1.774
Kota Administrasi Jakarta Pusat	449	379	1.072	1.451	1.068	1.190	1.143
Kota Administrasi Jakarta Selatan	585	441	1.892	2.333	1.892	1.971	1.940
Kota Administrasi Jakarta Timur	574	611	2.465	3.076	2.465	2.325	2.465
Kota Administrasi Jakarta Utara	706	438	1.455	1.893	1.453	1.302	1.181
Kabupaten Administrasi Kep. Seribu	24	29	63	92	63	78	78
TOTAL	**2.721**	**2.232**	**8.904**	**11.136**	**8.900**	**8.769**	**8.581**

Sumber: e-Musrenbang, 2024 (diolah)

Selama kegiatan Musrenbang tahun 2024 telah terkumpul sebanyak 11.136 usulan pada tahapan rembuk RW. Seluruh usulan kegiatan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu barang dan fisik. Usulan dengan kategori barang merupakan kategori yang mengakomodasi usulan dengan pengajuan barang seperti alat kebersihan, peralatan

penunjang kegiatan masyarakat, serta peralatan keagamaan. Usulan berbentuk barang pada Musrenbang tahun 2024 sebanyak 2.232 usulan. Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi wilayah dengan usulan berbentuk barang terbanyak dengan 611 usulan.

Selain usulan berbentuk barang, usulan fisik juga menjadi salah satu kategori pada usulan Musrenbang tahun 2024. Usulan fisik bersifat pembangunan maupun perbaikan fasilitas publik seperti perbaikan jalan, perbaikan drainase, pembangunan balai warga, serta pembangunan sarana prasarana olahraga. Pada Musrenbang tahun 2024 usulan dengan kategori fisik terdapat 8.904 usulan. Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi wilayah dengan usulan kategori fisik terbanyak yaitu sebesar 2.465 usulan. Dalam mengakomodasi usulan dengan kategori fisik ini perlu adanya survei lapangan terlebih dahulu sebelum divalidasi pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Pelaksanaan survei lapangan tersebut bertujuan untuk melihat kondisi langsung terhadap usulan yang diajukan dan menilai apakah layak untuk diakomodasi oleh pemerintah daerah ataupun tidak. Pelaksanaan survei dilakukan dengan melibatkan tim teknis dari setiap PD/UKPD tujuan yang nantinya akan menentukan kelayakan usulan tersebut untuk diakomodasi. Dari total 8.904 usulan yang bersifat fisik, terdapat 4 (empat) usulan yang belum dilakukan survei oleh tim teknis PD/UKPD tujuan. Data usulan rembuk RW yang masuk dan sudah dilakukan survei teknis, selanjutnya direspons lebih lanjut melalui sidang kelompok Musrenbang Kecamatan (tingkat Kelurahan) dan menghasilkan data usulan kegiatan yang terverifikasi sebanyak 8.769 usulan. Usulan tersebut merupakan usulan yang layak dilanjutkan di tingkat Kelurahan sebelum nantinya akan diajukan pada tingkat Kecamatan.

Selanjutnya pada tingkat Kecamatan, seluruh usulan yang sudah divalidasi pada tingkat Kelurahan kemudian dibahas kembali pada Musrenbang tingkat Kecamatan dan akan ditentukan 3 (tiga) prioritas usulan di setiap RW. Pada Musrenbang tingkat Kecamatan ini terdapat 8.581 usulan yang berhasil diverifikasi dan siap untuk ditentukan prioritasnya serta telah ditentukannya waktu pengakomodasian pada tahun anggaran yang telah direncanakan. Lebih lanjut terhadap kategori tahun pengakomodasian setiap usulan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.2
Rekapitulasi Usulan Musrenbang Menurut Kategori Waktu Pengakomodasian

Wilayah	Usulan Rembuk RW					Total
	Tidak Lolos Survei	Belum Dapat Diakomodasi	Diakomodasi Tahun 2024	Diakomodasi Tahun 2025	Diakomodasi Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Administrasi Jakarta Barat	317	368	38	1.348	0	1.774
Kota Administrasi Jakarta Pusat	308	241	117	785	0	1.143
Kota Administrasi Jakarta Selatan	393	459	28	1.452	0	1.940
Kota Administrasi Jakarta Timur	511	557	497	1.411	0	2.465
Kota Administrasi Jakarta Utara	712	210	59	919	2	1.181
Kabupaten Administrasi Kep. Seribu	14	20	8	30	0	78
TOTAL	**2.585**	**1.875**	**738**	**6.966**	**2**	**8.581**

Sumber : Musrenbang, 2024 (diolah)

Usulan rembuk RW yang telah dilakukan verifikasi pada Musrenbang Kecamatan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu tidak lolos survei, usulan belum dapat diakomodasi pada APBD, dan usulan dapat diakomodasi dengan APBD. Kategori usulan yang tidak lolos survei terdapat 2.555 usulan. Sementara itu, usulan yang belum dapat diakomodasi pada APBD Provinsi DKI Jakarta mencapai 1.875 usulan. Hal tersebut dikarenakan pada saat tahap rembuk RW usulan yang belum dapat diakomodasikan tidak menjadi prioritas utama pada setiap wilayahnya. Walaupun usulan belum dapat diakomodasi pada kegiatan Musrenbang, terdapat kegiatan lainnya yang bisa menjadi kesempatan masyarakat dalam menyampaikan usulannya yaitu melalui kegiatan Usulan langsung Masyarakat tahun 2024.

Selain usulan Musrenbang yang belum dapat terakomodasi, terdapat kategori lainnya yang memungkinkan usulan Musrenbang diakomodasi dengan APBD. Pada kategori ini akan dilakukan pengakomodasian pada 3 (tiga) waktu anggaran berbeda dengan menyesuaikan anggaran serta prioritas yang telah ditentukan bersama. Terdapat 738 usulan yang dapat diakomodasi pada APBD tahun 2024. Pada APBD 2024 ini merupakan waktu anggaran yang sedang berjalan sehingga usulan yang masuk pada waktu anggaran tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2024 hingga selesai masa waktu anggaran pada akhir tahun 2024. Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi wilayah dengan usulan Musrenbang yang akan diakomodasikan pada APBD tahun 2024 terbanyak dengan 497 usulan. Selain pada APBD tahun 2024, usulan Musrenbang akan diakomodasi pada APBD tahun 2025. Pada tahun tersebut jumlah usulan Musrenbang yang akan diakomodasi sebesar 5.966 usulan dan menjadi waktu anggaran APBD dengan pengakomodasian usulan Musrenbang terbanyak. Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan jumlah usulan Musrenbang terbanyak pada APBD tahun 2025 yaitu sebesar 1.453 usulan. Terakhir terdapat usulan Musrenbang yang akan direncanakan untuk diakomodasi pada APBD tahun 2026. Terdapat 2 (dua) usulan Musrenbang yang direncanakan yang berlokasi pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pada RKPD Tahun 2025, usulan Musrenbang yang diakomodasi ke dalam rencana kerja PD/UKPD adalah usulan yang akan diakomodasi pada anggaran APBD Tahun 2025, yaitu sebanyak 5.966 usulan. Selanjutnya telah dilakukan penelaahan oleh PD/UKPD tujuan sesuai dengan pokok permasalahan dan permohonan di setiap usulan. Penelaahan yang dilakukan oleh PD/UKPD berupa penolakan dan penerimaan suatu usulan untuk nantinya akan dimasukkan ke dalam Renja Tahun 2025. Penelaahan ini mempertimbangkan banyak hal, termasuk skala prioritas pembangunan daerah yang menjadi tujuan perencanaan pembangunan tahun 2025. Skala prioritas ini memastikan bahwa usulan-usulan yang dipilih adalah yang paling relevan dan mendesak untuk pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap usulan yang diterima harus memenuhi kriteria tertentu yang sejalan dengan tujuan pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Lebih lanjut dengan data usulan Musrenbang yang terakomodasi dan belum terakomodasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rekapitulasi Usulan Awal Fase Rembuk RW hingga Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2024

Wilayah	Jumlah RW yang Mengikuti Rembuk	Usulan Terakomodasi	%	Usulan Belum Terakomodasi	%	Total	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(7)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kota Administrasi Jakarta Barat	383	968	71,81	380	28,19	1.348	22,59
Kota Administrasi Jakarta Pusat	449	766	97,58	19	2,42	785	13,16
Kota Administrasi Jakarta Selatan	583	1.169	80,49	284	19,55	1.453	24,35

Wilayah	Jumlah RW yang Mengikuti Musrenbang	Usulan Terakomodasi	%	Usulan Belum Terakomodasi	%	Total	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3/7)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kota Administrasi Jakarta Timur	574	1.358	96,24	53	3,76	1.411	23,65
Kota Administrasi Jakarta Utara	706	702	76,39	217	23,61	919	15,40
Kabupaten Administrasi Kep. Seribu	24	18	30,00	35	70,00	50	0,84
TOTAL	**2.721**	**4.978**	**83,44**	**988**	**16,56**	**5.966**	**100**

Sumber: e-Musrenbang, 2024 (Diolah)

Usulan Musrenbang yang berpotensi untuk diakomodasi pada anggaran APBD Tahun 2025 sebanyak 5.966 usulan. Namun, seluruh usulan tersebut akan dilakukan penyaringan terlebih dahulu oleh PD/UKPD tujuan dengan mempertimbangkan kebutuhan, ketersediaan anggara, kemudahan pelaksanaan dilapangan, serta prioritas pembangunan daerah. Dari 5.966 usulan Musrenbang, terdapat 4.978 usulan (83,44%) yang dapat diakomodasi pada anggaran APBD Tahun 2025. Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi wilayah dengan capaian usulan Musrenbang yang dapat terakomodasi paling banyak dengan capaian sebesar 1.358 usulan (96,24%) dari jumlah usulan Musrenbang di wilayah tersebut. Sementara itu, Kabupaten Administrasi Jakarta Utara menjadi wilayah dengan usulan Musrenbang yang terakomodasi paling sedikit dengan capaian sebanyak 15 (30,00%) dari total jumlah usulan pada wilayah tersebut.

Usulan Musrenbang yang berhasil terakomodasi melalui anggaran APBD 2025 yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 mencapai 4.978 usulan. Setiap usulan Musrenbang yang berhasil terakomodasi memiliki pembahasan yang berbeda-beda sesuai dengan permasalahan dan permohonan yang ada di masyarakat. Usulan-usulan tersebut timbul dari berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari.

Dari 4.978 usulan yang diterima, terdapat lima pokok permasalahan utama yang menjadi dasar munculnya usulan-usulan ini. Kelima pokok permasalahan tersebut mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat yang mendesak untuk segera ditangani. Dengan memahami pokok permasalahan ini, pemerintah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran dan efektif. Kelima pokok permasalahan dan permohonan tersebut juga mendukung prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025. Lebih lanjut terhadap pokok permasalahan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rekapitulasi Pokok Permasalahan Usulan musrenbang yang Terintegrasi dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah		Fokus Prioritas Pembangunan Daerah		Pokok Permasalahan	Usulan Terakomodasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	1	**Fokus 1:** Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik	Infrastruktur Jalan	2.123
				Infrastruktur Konektivitas	701
		2	**Fokus 2:** Penanggulangan Banjir	-	-
		3	**Fokus 3:** Perbaikan Kualitas Lingkungan	-	-
		4	**Fokus 4:** Penanganan Sampah	Penyediaan barang untuk Kebersihan Kota	1.318

Prioritas Pembangunan Daerah		Fokus Prioritas Pembangunan Daerah		Pokok Permasalahan	Dasar Terakomodasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5	**Fokus 5:** Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT)	-	-
		6	**Fokus 6:** Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum	-	-
		7	**Fokus 7:** Ketahanan Bencana	-	-
		8	**Fokus 8:** Peningkatan Kualitas Udara	-	-
		9	**Fokus 9:** Peningkatan Akses Hunian Layak	Infrastruktur Kawasan Permukiman	42
b.	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	1	**Fokus 1:** Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization*)	-	-
		2	**Fokus 2:** Peningkatan Daya Saing Ekonomi	-	-
		3	**Fokus 3:** Peningkatan Investasi Daerah	-	-
		4	**Fokus 4:** Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction*	-	-
		5	**Fokus 5:** Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelatihan Ketenagakerjaan	23
				Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Masyarakat	14
				Pelatihan Kewirausahaan	3
c.	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1	**Fokus 1:** Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi	-	-
		2	**Fokus 2:** Penerapan Pencegahan dan Penegakan Stunting	-	-
		3	**Fokus 3:** Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	-	-
		4	**Fokus 4:** Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial	Penyediaan Barang untuk Kesehatan Masyarakat	416
		5	**Fokus 5:** Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	Penyediaan Barang untuk Sarana Pendidikan dan Kebudayaan	420
		6	**Fokus 6:** Penguatan Ketahanan Pangan	-	-
d.	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	1	**Fokus 1:** Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-
		2	**Fokus 2:** Peningkatan Kualitas, Akuntabilitas, dan Kemudahan Layanan Publik	-	-

Prioritas Pembangunan Daerah		Fokus Prioritas Pembangunan Daerah		Pokok Permasalahan	Usulan Terakomodasi
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)
		3	**Fokus 3:** Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif	-	-
		4	**Fokus 4:** Penciptaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas	-	-
TOTAL					**4.978**

Sumber: Hasil Input Rancangan Akhir Kerja PD, 2024 (Diolah)

Pokok permasalahan dari usulan Musrenbang menjadi salah satu faktor dalam langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas untuk rencana kegiatan pembangunan kelurahan. Usulan tersebut akan diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah DKI Jakarta dari mulai tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan. Usulan Musrenbang dengan pokok permasalahan yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota menjadi usulan Musrenbang dengan capaian terbanyak yaitu 4.142 usulan. Sementara itu, penanganan kemacetan yang merupakan fokus prioritas pembangunan memiliki pokok permasalahan terkait infrastruktur jalan dan infrastruktur konektivitas yang mendapati usulan langsung masyarakat sebanyak 2.824 usulan dan menjadi fokus prioritas pembangunan daerah dengan capaian usulan langsung masyarakat terbanyak.

5.2 Aspirasi Masyarakat Melalui Reses DPRD

Dalam Pasal 348 Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa DPRD berhak untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikirannya untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat pada masa reses. Pokok-pokok pikiran ini diperoleh dari hasil pelaksanaan reses yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada setiap tahun sesuai dengan Pasal 125 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kontribusi pokok-pokok pikiran dari usulan hasil reses sidang DPRD untuk penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 merupakan salah satu proses dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berdasarkan aspek politik. Usulan reses yang telah dilakukan sidang paripurna DPRD akan diakomodasikan pada RKPD di tahun selanjutnya. Usulan hasil reses yang akan diakomodasi melalui Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah pada RKPD Tahun 2025 meliputi usulan hasil reses periode I, II, dan III Tahun 2023 serta usulan hasil reses periode I Tahun 2024. Pengakomodasian usulan hasil reses selesai pada periode I tahun 2024 dikarenakan periode tersebut merupakan periode terakhir anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut terkait hasil usulan reses DPRD pada tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut.

5.2.1 Reses DPRD Tahun 2023

Terhadap reses DPRD yang dilaksanakan tahun 2023 telah dilakukan penelaahan tahap akhir yaitu dengan menetapkan usulan hasil reses yang dapat terakomodasi dan belum dapat terakomodasi pada RKPD tahun 2025. Berdasarkan data usulan hasil reses terdapat 15.527 usulan reses di tahun 2023 yang terdiri dari 3 (tiga) masa reses. Lebih lanjut terkait data setiap periode masa reses tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

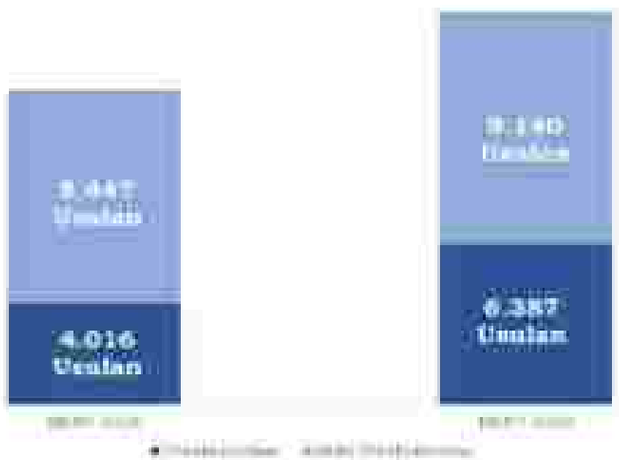
Tabel 5.5
Rekapitulasi Resea DPRD Menurut Periode Masa Resea Tahun 2023

Periode Masa Resea	Terakomodasi	%	%	Belum Terakomodasi	%	%	Total	%
(a)	(b)	(c)	(d) = (b) : (e)	(d)	(e)	(f) = (d) : (e)	(g)	(h)
Masa Reses I	2.792	42,9	42,5	3.713	40,6	57,5	6.457	41,5
Masa Reses II	1.369	21,6	42	1.888	20,6	58	3.257	21,0
Masa Reses III	2.276	35,6	39,2	3.537	38,7	60,8	5.813	37,4
TOTAL	**6.387**	**100**	**41,1**	**9.140**	**100**	**58,7**	**15.527**	**100**

Sumber: Hasil Penelaahan Tahap III Resea Tahun 2023, 2024 (diolah)

Usulan hasil reses DPRD tahun 2023 yang terakomodasi dalam RKPD Tahun 2025 sebanyak 6.387 usulan (41,1%) dari total keseluruhan usulan reses. Sementara itu, usulan yang belum terakomodasi berjumlah 9.140 usulan (58,7%) dari total keseluruhan usulan reses. Data ini menunjukkan bahwa usulan reses yang belum dapat terakomodasi lebih besar dibandingkan dengan usulan reses yang dapat terakomodasi. Walaupun usulan reses yang belum terakomodasi mendominasi jumlah usulan reses, terdapat tren kenaikan positif dalam jumlah usulan yang masuk pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka melalui reses DPRD, serta menunjukkan bahwa semakin banyak permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang diidentifikasi dan disampaikan kepada pemerintah. analisis terhadap data usulan yang terakomodasi dan belum terakomodasi dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai prioritas dan tantangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Usulan yang terakomodasi mencerminkan fokus dan prioritas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, sedangkan usulan yang belum terakomodasi mungkin memerlukan strategi dan sumber daya tambahan untuk diimplementasikan di masa mendatang. Lebih lanjut untuk data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 5.1
Perbandingan Jumlah Usulan Hasil Reses DPRD pada RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025



Sumber: Hasil Penelaahan Tahap III Resea Tahun 2023, 2024 (diolah)

Usulan hasil reses yang terakomodasi pada RKPD tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding usulan hasil reses pada RKPD Tahun 2024. Terlihat pada gambar 5.1 diatas, pada RKPD Tahun 2024 usulan hasil reses yang terakomodasi sebanyak 4.016 usulan (32,2%) dari total hasil usulan reses sebanyak 12.463 usulan. Selain itu, pada RKPD Tahun 2025 usulan hasil reses yang dapat terakomodasi sebanyak 6.387 usulan (41,1%) dari total hasil usulan reses sebanyak 15.527 usulan. Hal ini menggambarkan adanya kenaikan usulan yang terakomodasi pada RKPD Tahun 2025 sebanyak 693 usulan (8,9%).

Tingginya usulan reses pada setiap periode merupakan hasil aspirasi masyarakat dari Kota/Kabupaten yang berbeda. Setiap Kota/Kabupaten terdapat anggota DPRD dengan kewenangan untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang akan tertuang pada Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada tahun 2025. Lebih lanjut terkait jumlah usulan pada setiap wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.6
Rekapitulasi Reses DPRD Menurut Wilayah Tahun 2023

Wilayah	Terakomodasi	%	Belum Terakomodasi	%	Total	%
(a)	(b)	(c) = (b) / (e)	(d)	(e) = (d) / (e)	(e)	(f)
Kota Administrasi Jakarta Barat	1.051	8,1	1.775	11,4	3.026	19,5
Kota Administrasi Jakarta Pusat	940	6,1	1.070	6,9	2.010	13
Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.124	7,2	1.430	9,2	2.554	16,4
Kota Administrasi Jakarta Timur	2.247	14,5	3.521	22,7	5.768	37,1
Kota Administrasi Jakarta Utara	792	5,1	1.289	8,3	2.081	13,4
Kabupaten Administrasi Kep. Seribu	27	0,2	55	0,4	82	0,5
TOTAL	**6.387**	**41,1**	**9.140**	**58,9**	**15.527**	**100**

Sumber: Hasil Pendataan Tahap III Reses Tahun 2023-2024 (diolah)

Berdasarkan tabel 5.2 di atas, dari 15.527 usulan hasil reses, Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah usulan hasil reses terbanyak yaitu sejumlah 5.768 usulan (37,1%). Tingginya usulan hasil reses pada Kota Administrasi Jakarta Timur tidak selaras dengan tingginya usulan hasil reses yang terakomodasi, total usulan hasil reses yang terakomodasi pada Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar 2.247 usulan (14,5%). Sementara itu, usulan hasil reses yang belum dapat terakomodasi sebanyak 3.521 usulan (22,7%) dari total keseluruhan usulan hasil reses di Kota Administrasi Jakarta Timur. Jumlah Kecamatan yang banyak serta jumlah penduduk yang besar menjadi faktor utama tingginya usulan hasil reses di wilayah tersebut. Namun tingginya usulan hasil reses pada Kota Administrasi Jakarta Timur menyebabkan ketimpangan jumlah usulan hasil reses pada wilayah lainnya.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi wilayah yang memiliki usulan hasil reses paling sedikit jika dibandingkan dengan wilayah lainnya yaitu sejumlah 82 usulan (0,5%). Total usulan hasil reses yang dapat terakomodasi pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 27 usulan (0,2%) dan yang belum dapat terakomodasi sebanyak 55 usulan (0,6%). Dari data tersebut menggambarkan terdapat selisih sebesar 15.545 usulan dari Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai wilayah dengan usulan terbanyak dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai wilayah dengan usulan hasil reses paling sedikit.

Usulan hasil reses yang belum dapat terakomodasi memiliki faktor yang menjadi penyebab usulan hasil reses tersebut tertolak. Terdapat 11 pertimbangan yang berhasil diidentifikasi dari setiap usulan hasil reses dan menyebabkan usulan reses belum dapat terakomodasi. Melalui analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor ini, diharapkan akan tercapai pemahaman yang lebih baik tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam proses akomodasi usulan reses. Dengan demikian, hal tersebut memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari mekanisme reses DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta memastikan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan dan pembangunan. Berikut merupakan pertimbangan reses yang belum dapat terakomodasi:

Tabel 5.7
Rekapitulasi Reses DPRD Menurut Penyebab usulan Tertolak Tahun 2023

No	Penyebab Usulan Tertolak/ Belum Dapat Diakomodir	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum dapat diakomodir karena diperlukan koordinasi dengan instansi lain	1.947	21,30
2	Belum dapat diakomodir karena tidak dapat dilaksanakan secara teknis	1.657	18,10
3	Belum dapat diakomodir karena lokasi usulan tidak jelas	980	10,7
4	Belum dapat diakomodir karena terkendala status aset	397	4,30
5	Belum dapat diakomodir dan diarahkan melalui pendanaan swadaya masyarakat	254	2,80
6	Belum dapat diakomodir karena tidak sinkron antara permasalahan dan usulan kegiatan	153	1,70
7	Belum dapat diakomodir karena kondisi eksisting masih layak	132	1,40
8	Belum dapat diakomodir dan diarahkan melalui pendanaan CSR	119	1,30
9	Belum dapat diakomodir karena persyaratan tidak lengkap	101	1,10
10	Belum dapat diakomodir karena tidak adanya kurikulum dimaksud	18	0,20
11	Lainnya	3.382	37,00
TOTAL		**9.140**	**100**

Sumber: Hasil Pembahasan Tahap III Reses Tahun 2023, 2024 (diolah)

Usulan reses yang sudah dilakukan penelaahan oleh PD/UKPD tujuan menghasilkan alasan untuk usulan yang belum dapat terakomodasi pada RKPD Tahun 2025. Banyaknya penyebab usulan yang belum dapat terakomodasi telah dilakukan pengelompokkan dan menghasilkan 11 penyebab dengan konteks permasalahan yang berbeda. Perlu dilakukan koordinasi dengan instansi lain menjadi penyebab terbanyak mana usulan belum dapat terakomodasi. Total usulan dengan penyebab tersebut sebanyak 1.947 usulan (21,30%) dari total keseluruhan usulan yang belum terakomodasi. Penyebab tersebut dikarenakan masih banyak usulan reses yang merupakan kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain sehingga perlu adanya koordinasi dengan pemerintah setempat dalam mengakomodasi usulan reses lebih lanjut.

Selain penyebab usulan belum dapat terakomodasi, terdapat pula usulan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain. Terdapat 119 usulan (1,30%) yang diarahkan melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan 254 usulan (2,80%) yang diarahkan melalui pendanaan swadaya masyarakat. Hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat usulan yang bisa terakomodasi melalui kegiatan lainnya sehingga tidak hanya mengandalkan anggaran APBD saja namun dapat diakomodasi melalui swadaya masyarakat dan peran stakeholders terkait. Namun demikian hal tersebut harus melihat permasalahan dari setiap usulan reses yang diajukan dan selanjutnya akan menyesuaikan kemampuan setiap PD/UKPD dalam mengakomodasi setiap usulan reses.

Walaupun usulan reses yang belum terakomodasi lebih banyak dibandingkan dengan yang terakomodasi, penyerapan terhadap usulan reses yang terakomodasi tetap harus dilakukan pada RKPD Tahun 2025. Dalam mengakomodasi usulan reses perlu melihat pokok permasalahan dan permohonan yang diajukan masyarakat melalui DPRD. Setiap usulan reses memiliki pembedaan pokok permasalahan dan permohonan yang berbeda. Setelah dilakukan klasifikasi, terdapat 128 pokok permasalahan dan permohonan. Lebih lanjut terhadap rekapitulasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.8
Rekapitulasi Pokok Permasalahan dan Permohonan Usulan Reses Tahun 2023 yang Terintegrasi dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah		Fokus Prioritas Pembangunan Daerah		Pokok Permasalahan	Usulan Tambahan/Alokasi
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)
e.	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	1	**Fokus 1:** Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik	Peningkatan Sarana Prasarana dan Layanan Transportasi Umum	18
		2	**Fokus 2:** Penanggulangan Banjir	Pembangunan/Peningkatan saluran air (drainase)	54
				Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Tanggul/ Sheet Pile/ Turap	13
				Pemeliharaan/perbaikan saluran air (drainase)	153
				Penanggulan dari Pengendalian Banjir	11
				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Penanganan Banjir	1
		3	**Fokus 3:** Perbaikan Kualitas Lingkungan	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	25
		4	**Fokus 4:** Penanganan Sampah	Pelatihan Pengelolaan Sampah	5
				Pembangunan/ Peningkatan Bank Sampah	8
				Penanganan dan Penanggulangan Sampah	44
				Pencemaran Lingkungan Hidup	3
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Lingkungan	25
				Pembangunan/Pemeliharaan Instasi Pengolahan Air Limbah	27
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Lingkungan	22
		5	**Fokus 5:** Penetapan Energi Baru Terbarukan (EBT)	-	-
		6	**Fokus 6:** Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum	-	-
		7	**Fokus 7:** Ketahanan Bencana	Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2
				Penyediaan Sarana Prasarana Kebencanaan	13
				Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	54
				Pencegahan dan Mitigasi Bencana/Wabah	10
		8	**Fokus 8:** Peningkatan Kualitas Udara	-	-
		9	**Fokus 9:** Peningkatan Akses Rumah Layak	Fasilitas Penunjang Rumah Susun (Fasusum dan Rusunawa)	26

Prioritas Pembangunan Daerah		Fokus Prioritas Pembangunan Daerah		Pokok Permasalahan	Usulan Tanggapan
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)
				Pembangunan Permukiman Kolinyat	1
b	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	1	**Fokus 1:** Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Digi Economy, Digitalization*)	-	-
		2	**Fokus 2:** Peningkatan Daya Beli Ekonomi	Pelatihan/ Pendampingan Keterampilan	33
				Pengembangan Koperasi dan UMKM	52
		3	**Fokus 3:** Peningkatan Investasi Daerah	-	-
		4	**Fokus 4:** Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction*	-	-
		5	**Fokus 5:** Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Akses Lapangan Pekerjaan	141
				Pelatihan Kerja bagi warga	134
c	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1	**Fokus 1:** Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi	-	-
		2	**Fokus 2:** Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting	-	-
		3	**Fokus 3:** Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	-	-
		4	**Fokus 4:** Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial	Akses Jaminan Kesehatan/ Sosial	276
				Layanan Pencegahan Penyakit di Masyarakat	6
				Pelayanan Kesehatan	19
				Penyediaan Obat-obatan kesehatan	5
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kesehatan	33
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Pendukung	28
		5	**Fokus 5:** Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	Akses Bantuan Pendidikan	309
				Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD/TK	1
				Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dan Menengah	
				Pembangunan Sarana Perpustakaan	37
				Pembangunan/Perbaikan sekolah	48
				Bantuan Tebus Ijazah	87
				Peningkatan Kesejahteraan Guru/Tenaga Pendidik	21

Prioritas Pembangunan Daerah		Fokus Prioritas Pembangunan Daerah		Pokok Permasalahan	Usulan Terakomodasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE)	4
				Perbaikan Prasarana Sekolah	6
		6	**Fokus 6:** Penguatan Ketahanan Pangan	Program Pasar Murah	13
				Subsidi Pangan	56
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	1	**Fokus 1:** Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	Pelayanan Kependudukan	12
		2	**Fokus 2:** Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik	Pengawasan/ Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	2
				Keterbukaan Informasi Program dan Kegiatan Pemerintah	4
				Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	9
				Pelayanan Prasarana	2
				Pelayanan Publik	17
		3	**Fokus 3:** Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif	-	-
		4	**Fokus 4:** Penciptaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas	-	-
TOTAL					**1.892**

Sumber: Hasil Penelaahan Tahap III Reses Tahun 2023, 2024 (diolah)

Pokok permasalahan dan permohonan dari usulan reses menjadi salah satu faktor pendukung untuk mengakomodasi Prioritas Pembangunan Daerah 2025. Dari total 4 prioritas pembangunan daerah dengan 24 fokus. Dari 128 permasalahan dan permohonan, terdapat usulan reses yang menyasar 13 fokus prioritas pembangunan daerah. Peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi fokus prioritas pembangunan daerah dengan usulan reses terbanyak yaitu mencapai 516 usulan yang terbagi menjadi 9 pokok permasalahan dan permohonan masyarakat. Usulan terkait permohonan akses bantuan pendidikan menjadi usulan reses dengan capaian terbanyak yaitu sejumlah 309 usulan. Hal tersebut menggambarkan bahwa kemudahan akses pendidikan menjadi suatu harapan masyarakat untuk diberikan bantuan melalui pemerintah daerah.

Setiap usulan reses yang terakomodasi akan ditangani oleh PD/UKPD sesuai dengan pokok permasalahan dan permohonan yang diajukan. Terdapat 461 PD/UKPD yang akan mengakomodasi 6.387 usulan pada RKPD Tahun 2025. Daftar PD/UKPD dengan jumlah usulan reses terbanyak dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.9
Rekapitulasi Reses DPRD Menurut PD/UKPD Tujuan Tahun 2023

No	PD/UKPD	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Sosial	615	9,6
2	Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan	580	9,1
3	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur	330	5,1
4	Dinas Pendidikan	263	4,1
5	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan	174	2,7
6	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat	161	2,5

No	PD/UKPD	Jumlah	%
(a)	(b)	(c)	(d)
7	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Timur	160	2,5
8	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur	143	2,2
9	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur	136	2,1
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM	112	1,76
11	Lainnya	3.771	57,9
TOTAL		**6.387**	**100**

Sumber: Hasil Pembahasan Tahap III Reses Tahun 2023, 2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5.9 di atas, Dinas Sosial menjadi perangkat daerah dengan usulan reses tahun 2023 terbanyak yang diakomodasi. Total usulan pada Dinas Sosial sejumlah 615 usulan (9,6%) dari total keseluruhan usulan reses yang terakomodasi. Dinas Sosial memiliki tugas pokok pekerjaan berupa membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang sosial.

5.2.2 Reses DPRD Tahun 2024

Selain usulan reses DPRD tahun 2023 yang akan diakomodasi pada RKPD Tahun 2025, usulan reses pada tahun 2024 juga akan diakomodasi secara bersamaan. Reses tahun 2024 yang akan diakomodasi pada RKPD Tahun 2025 hanya masa reses I yang dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2024 dan telah diperjuangkan. Hal tersebut dikarenakan masa kerja anggota DPRD akan berakhir pada pertengahan tahun 2024, sehingga kegiatan reses pada tahun 2024 untuk anggota DPRD dengan masa jabatan 2019-2024 hanya sampai masa reses I sesuai dengan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD Provinsi, masa reses ditiadakan.

Jumlah usulan hasil reses DPRD masa reses I tahun 2024 sebanyak 7.332 yang meliputi 1.027 usulan saran, 981 usulan tanggapan, dan 5.324 usulan kegiatan. Dari total usulan reses tersebut, kategori usulan kegiatan menjadi kategori yang akan ditindaklanjuti dengan penganggaran apabila diakomodasi pada RKPD Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan usulan kegiatan merupakan usulan yang bersifat kegiatan ataupun bantuan dari pemerintah daerah, sedangkan untuk usulan saran dan usulan tanggapan merupakan suatu usulan perbaikan terhadap perencanaan dan kebijakan pemerintah daerah yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan perencanaan di masa yang akan datang. Adapun usulan reses masa reses I tahun 2024 kategori usulan kegiatan yang sudah dilakukan penelaahan sebagai berikut:

Tabel 5.10
Rekapitulasi Reses DPRD Masa Reses I Tahun 2024

Periode Masa Reses	Terakomodasi	%	Belum Terakomodasi	%	Total	%
(a)	(b)	(c)	(e) = (b) / (d)	(f)	(d)	(g)
Masa Reses I	1.916	35,98	3.408	60,24	5.324	100

Sumber: Hasil Pembahasan Tahap III Reses I Tahun 2024, 2024 (diolah)

Pada masa reses I tahun 2024, usulan reses yang terakomodasi sebanyak 1.916 usulan (35,98%), sementara usulan yang belum terakomodasi sebanyak 3.408 usulan (64,02%) dari total keseluruhan usulan reses. Data ini menunjukkan bahwa lebih banyak usulan reses tahun 2024 yang belum dapat terakomodasi. Namun demikian, usulan yang belum terakomodasi tidak akan hilang. Usulan-usulan ini akan masuk ke dalam bank data dan dapat diajukan kembali pada RKPD di tahun mendatang.

Usulan reses tahun 2024 yang telah terkumpul berasal dari 5 (lima) kota dan 1 (satu) kabupaten yang berbeda. Setiap Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi memiliki anggota DPRD yang bertugas untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kewenangan ini memungkinkan anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan reses guna menyerap aspirasi masyarakat secara efektif. Lebih lanjut terhadap data usulan reses pada setiap wilayah sebagai berikut:

Tabel 5.11
Rekapitulasi Reses DPRD masa reses I Menurut Wilayah Tahun 2024

Wilayah	Terakomodasi	%	Belum Terakomodasi	%	Total	%
(1)	(2)	(3) = (2) / (6)	(4)	(5) = (4) / (6)	(6)	(7)
Kota Administrasi Jakarta Barat	426	42,69	572	57,31	998	18,74
Kota Administrasi Jakarta Pusat	300	31,81	643	68,19	943	17,71
Kota Administrasi Jakarta Selatan	468	35,21	861	64,79	1329	24,96
Kota Administrasi Jakarta Timur	424	38,48	772	64,86	1196	22,46
Kota Administrasi Jakarta Utara	289	34,53	548	65,47	837	15,72
Kabupaten Administrasi Kep. Seribu	9	42,86	12	57,14	21	0,39
TOTAL	**1.916**		**3.408**		**5.324**	**100**

Sumber: Hasil Pembahasan Tahap III Reses I Tahun 2024, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel 5.11 di atas, dari total 7.332 usulan terdapat sebaran usulan hasil reses dari 5 (lima) Kota dan 1 (satu) Kabupaten. Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi wilayah yang memiliki jumlah usulan terbanyak dengan 1.329 usulan (24,96%) dari total keseluruhan usulan reses dengan tingkat akomodasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi yang terbesar dengan capaian sejumlah 468 usulan (35,21%) dari total usulan pada wilayah tersebut. Namun di sisi lain, terdapat wilayah dengan usulan reses paling sedikit, yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan hasil reses hanya berjumlah 21 usulan (0,39%) dari total keseluruhan usulan reses dengan ketercapaian usulan reses yang terakomodasi sebanyak 9 (42,86%) dari total usulan reses pada wilayah tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di atas, tercatat sebanyak 3.408 usulan reses belum dapat terakomodasi pada RKPD Tahun 2025. PD/UKPD tujuan yang melakukan penelaahan terhadap setiap usulan reses memiliki alasan dan pertimbangan untuk tidak mengakomodasi usulan tersebut. Lebih lanjut terkait penyebab usulan yang belum dapat terakomodasi dapat dilihat pada Tabel 5.12 sebagai berikut:

Tabel 5.12
Rekapitulasi Reses DPRD Menurut Penyebab usulan Tertolak Tahun 2024

No.	Penyebab Usulan Tertolak/Belum Dapat Terakomodasi	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Usulan perlu dilakukan survei lapangan terlebih dahulu	699	19,91
2	Usulan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat	357	10,46
3	Lokasi usulan tidak jelas	108	3,17
4	Duplikasi Usulan	101	2,96
5	Terkendala status aset	72	2,11
6	Isi usulan tidak spesifik	67	1,97
7	Diarahkan melalui pendekatan swadaya masyarakat	62	1,83
8	Tidak sinkron antara permasalahan dan usulan kegiatan	59	1,73
9	Diakomodir dengan APBD pada tahun berjalan	57	1,67

No	Penyebab Usulan Tertolak/Belum Dapat Terakomodasi	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Persyaratan tidak lengkap	34	1,88
11	Terkendala masalah teknis lapangan	20	0,59
12	Diarahkan melalui pendanaan CSR	12	0,35
13	Membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain	7	0,21
14	Kondisi eksisting masih lahan	3	0,09
15	Akan direncanakan diakomodir pada perencanaan tahun berikutnya	470	13,79
16	Tidak ada kurikulum dimaksud	238	6,90
17	Lainnya	1.729	36,73
TOTAL		3.408	100

Sumber: Hasil Pembahasan Tahap III Reses I Tahun 2024, 2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5.12 di atas, penyebab usulan yang belum dapat terakomodasi telah dilakukan pengelompokkan dan menghasilkan 17 penyebab dengan konteks permasalahan yang berbeda. Perlu dilakukan survei lapangan menjadi penyebab terbanyak suatu usulan belum dapat terakomodasi dengan total usulan sebanyak 699 usulan (19,91%) dari total keseluruhan usulan yang belum terakomodasi. Selain itu pada reses kali ini masih banyak usulan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga tidak dapat dikerjakan oleh Pemerintah Daerah. Total usulan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat sebanyak 357 usulan (10,48%) dari total usulan yang belum dapat terakomodasi.

Selain penyebab usulan belum dapat terakomodasi, terdapat pula usulan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain. Terdapat 12 usulan (0,35%) yang diarahkan melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat usulan yang bisa terakomodasi melalui sumber pendanaan lain, sehingga tidak hanya mengandalkan anggaran APBD. Namun demikian hal tersebut harus melihat permasalahan dari setiap usulan reses yang diajukan dan selanjutnya akan menyesuaikan kemampuan setiap PD/UKPD dalam mengakomodasi setiap usulan reses.

Seluruh usulan hasil reses yang masuk pada masa reses I tahun 2024 memiliki pembahasan dan permohonan yang berbeda sesuai dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD. Setelah dilakukan klasifikasi, terdapat 69 permasalahan dan permohonan yang berbeda. Dari permasalahan dan permohonan tersebut, sebanyak 43 permasalahan dan permohonan dari 1.231 usulan masuk ke dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2025. Setiap usulan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat di berbagai bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Proses klasifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap usulan mendapatkan perhatian yang sesuai dan diprioritaskan berdasarkan urgensinya. Lebih lanjut terhadap rekapitulasi tersebut dapat dilihat pada tabel 5.13 berikut:

Tabel 5.13
Rekapitulasi Pokok Permasalahan dan Permohonan Usulan Reses Tahun 2024 yang Terintegrasi dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah		Fokus Prioritas Pembangunan Daerah		Pokok Permasalahan	Usulan Terakomodasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	1	**Fokus 1:** Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik	Peningkatan Sarana Prasarana dan Layanan Transportasi Umum	5
		2	**Fokus 2:** Penanggulangan Banjir	Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Situ/ Waduk/ Embung	1
				Pembangunan/Peningkatan saluran air (drainase)	7

Prioritas Pembangunan Daerah		Fokus Prioritas Pembangunan Daerah		Pokok Permasalahan	Usulan Terakumodasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Tanggul/ Sheet Pile/ Turap	5
				Pemeliharaan/perbaikan saluran air (drainase)	67
				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Penanganan Banjir	2
		3	**Fokus 3:** Perbaikan Kualitas Lingkungan	Operasional PPSU (Penanganan Prasarana & Sarana Umum)	4
				Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	4
				Pembangunan/ Peningkatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	1
		4	**Fokus 4:** Penanganan Sampah	Pembangunan/ Peningkatan Bank Sampah	6
				Penanganan dan Penanggulangan Sampah	54
				Pencemaran Lingkungan Hidup	2
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Lingkungan	2
		5	**Fokus 5:** Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT)	-	-
		6	**Fokus 6:** Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum	-	-
		7	**Fokus 7:** Kebakaran Bencana	Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran dan Pemadaman	1
				Penyediaan Sarana Prasarana Kebencanaan	6
				Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	17
		8	**Fokus 8:** Peningkatan Kualitas Udara	-	-
		9	**Fokus 9:** Peningkatan Akses Hunian Layak	Fasilitas Penunjang Rumah Susun (Rusunawa dan Rusunawa)	4
b	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	1	**Fokus 1:** Transformasi Ekonomi (Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalisation)	-	-
		2	**Fokus 2:** Peningkatan Daya Saing Ekonomi	Pelatihan/ Pendampingan Kewirausahaan	41
				Pengembangan Koperasi dan UMKM	38
		3	**Fokus 3:** Peningkatan Investasi Daerah	-	-
		4	**Fokus 4:** Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	-	-

Prioritas Pembangunan Daerah		Fokus Prioritas Pembangunan Daerah		Pokok Permasalahan	Usulan Terakumodasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Melalui Cultural Interaction		
		5	**Fokus 5:** Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Akses Lapangan Pekerjaan	109
				Pelatihan Kerja bagi warga	91
				Pelatihan Satuan Pengamanan	1
c	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1	**Fokus 1:** Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi	-	-
		2	**Fokus 2:** Percepatan Penanganan dan Pencegahan Stunting	-	-
		3	**Fokus 3:** Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	-	-
		4	**Fokus 4:** Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial	Akses Jaminan Kesehatan/ Sosial	214
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang	3
				Layanan Pencegahan Penyakit di Masyarakat	4
				Penyediaan Obat-obatan Kesehatan	7
				Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Layanan Kesehatan	28
		5	**Fokus 5:** Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	Akses Bantuan Pendidikan	378
				Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD/TK	9
				Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dan Menengah	7
				Pembangunan Sarana Perpustakaan	2
				Pembangunan/Perbaikan Sekolah	15
				Pengadaan Sarana Perpustakaan	9
				Peningkatan Kesejahteraan Guru/Tenaga Pendidik	3
				Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Minat Baca Warga	1
				Penyediaan Alat Penaga Edukasi (APE)	16
				Perbaikan Manajemen Sekolah	51
		6	**Fokus 6:** Penguatan Ketahanan Pangan	Program Pasar Murah	2
d	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	1	**Fokus 1:** Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	Keterbukaan Informasi Program dan Kegiatan Pemerintahan	1
		2	**Fokus 2:** Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan	Pengawasan/ Pengawalan Aspirasi Masyarakat	2
				Peningkatan Pelayanan Publik	16

Prioritas Pembangunan Daerah		Fokus Prioritas Pembangunan Daerah		Pokok Permasalahan	Usulan Terakomodasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kemudahan Layanan Publik		
		3	**Fokus 3:** Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif	-	-
		4	**Fokus 4:** Penciptaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas	-	-
TOTAL					**1.231**

Sumber: Hasil Pembahasan Tahap II Reses I Tahun 2024, 2024 (diolah)

Pokok permasalahan dan permohonan dari usulan reses menjadi salah satu faktor pendukung untuk mengakselerasi Prioritas pembangunan Daerah 2025 yang terdiri dari 4 (empat) prioritas pembangunan daerah dengan 24 fokus pembangunan. Dari 69 permasalahan dan permohonan, terdapat usulan reses yang menyasar 13 (tiga belas) fokus prioritas pembangunan daerah. Peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi fokus prioritas pembangunan daerah dengan usulan reses terbanyak yaitu mencapai 470 usulan yang terbagi menjadi 18 (sepuluh) pokok permasalahan dan permohonan masyarakat. Usulan terkait permohonan akses bantuan pendidikan menjadi usulan reses dengan capaian terbanyak yaitu sejumlah 375 usulan. Hal tersebut menggambarkan bahwa kemudahan akses pendidikan merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Setiap usulan reses yang terakomodasi selanjutnya akan dikerjakan oleh setiap PD/UKPD tujuan pada rencana kerja tahun 2025 sesuai dengan pokok permasalahan dan permohonan yang diajukan. Terdapat 125 PD/UKPD yang akan mengakomodasi 1.916 usulan yang terakomodasi pada RKPD Tahun 2025. Lebih lanjut terkait daftar PD/UKPD dengan jumlah usulan reses terbanyak dapat dilihat pada Tabel 5.14sebagai berikut.

Tabel 5.14
Rekapitulasi Reses DPRD Menurut PD/UKPD Tujuan Tahun 2024

No	PD/UKPD	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pusat Pelayanan Pendanaan Personil dan Operasional Pendidikan	373	19,47
2	Dinas Sosial	199	10,39
3	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur	103	5,37
4	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan	87	4,54
5	Dinas Pendidikan	70	3,65
6	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat	61	3,18
7	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat	60	3,13
8	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur	51	2,66
9	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transnagrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan	48	2,51
10	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	43	2,24
11	Lainnya	823	41,23
TOTAL		**1.916**	**100**

Sumber: Hasil Pembahasan Tahap II Reses I Tahun 2024, 2024 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 5.14 di atas, Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) menjadi UKPD dengan usulan reses yang akan diakomodasi terbanyak pada tahun 2025. Total usulan reses untuk P4OP sejumlah 373 usulan (19,47%) dari total keseluruhan usulan reses yang terakomodasi. Perangkat daerah tersebut memiliki tugas pokok yaitu layanan bantuan pendanaan pendidikan untuk aspek operasional sekolah maupun layanan bantuan pendanaan pendidikan seperti beasiswa bagi siswa.

5.3 Usulan Langsung Masyarakat

Proses partisipatif (bottom-up) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 melibatkan beberapa proses, salah satunya adalah musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Namun, dalam kegiatan Musrenbang tidak semua usulan kegiatan dapat terakomodasi oleh pemerintah daerah. Hasil dari usulan kegiatan yang tertolak pada Musrenbang dapat diajukan kembali melalui usulan langsung. Dalam proses ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan usulan yang telah ditolak langsung kepada perangkat daerah terkait. Perangkat daerah kemudian akan merespons usulan tersebut dan menentukan kelayakan usulan untuk dapat diakomodasi.

Pada tahun 2024, usulan langsung masyarakat berhasil terkumpul sebanyak 705 usulan. Seluruh usulan langsung masyarakat tersebut telah direspons oleh PD/UKPD tujuan dan menghasilkan usulan langsung masyarakat yang dapat terakomodasi dan belum dapat terakomodasi pada RKPD Tahun 2025. Lebih lanjut terhadap data tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.15 sebagai berikut:

Tabel 5.15
Rekapitulasi Usulan Langsung yang Terakomodasi dan Belum Terakomodasi
Tahun 2024

Wilayah	Usulan Terakomodasi	%	Usulan Belum Terakomodasi	%	Menunggu TL	Total	%
(1)	(2)	(3)=(2)/(7)	(4)	(5)=(4)/(7)	(6)	(7)	(8)
Kota Administrasi Jakarta Barat	98	35,51	162	58,70	16	276	39,15
Kota Administrasi Jakarta Pusat	24	29,63	57	70,37	-	81	11,49
Kota Administrasi Jakarta Selatan	32	43,84	41	56,16	-	73	10,35
Kota Administrasi Jakarta Timur	1	33,33	2	66,67	-	3	0,43
Kota Administrasi Jakarta Utara	9	39,13	12	52,17	2	23	3,26
Kabupaten Administrasi Kep. Seribu	55	22,09	193	77,51	1	249	35,32
TOTAL	**219**	**31,1**	**467**	**66,2**	**19**	**706**	**100**

Sumber: Hasil Input Rekonsiliasi Akhir Kerja PD, 2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5.15 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah usulan langsung masyarakat terbanyak berada di Jakarta Barat yang mencapai 276 usulan (39,15%) dari total keseluruhan jumlah usulan langsung. Selain menjadi wilayah dengan usulan langsung terbanyak, capaian usulan langsung yang dapat terakomodasi pada RKPD Tahun 2025 di Kota Administrasi Jakarta Barat juga menjadi yang tertinggi. Total terdapat 98 usulan langsung (35,51%) dari 276 usulan yang akan diakomodasi pada tahun 2025. Sedangkan jumlah usulan langsung masyarakat yang terakomodasi paling sedikit berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan hanya 3 (tiga) usulan (0,43) dari total keseluruhan usulan langsung dan yang berhasil terakomodasi hanya 1 (satu) usulan (33,33%).

Usulan langsung masyarakat yang berhasil terakomodasi pada RKPD Tahun 2025 mencapai 219 usulan. Setiap usulan langsung yang berhasil terakomodasi memiliki isi usulan yang berbeda pada setiap usulannya. Isi usulan tersebut berisi dari permasalahan dan permohonan yang ada di masyarakat. Dari 219 usulan terdapat 9 (sembilan) pokok permasalahan dan permohonan yang menjadi dasar timbulnya suatu usulan langsung masyarakat. Lebih lanjut terhadap pokok permasalahan dan permohonan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.16
Rekapitulasi Pokok Permasalahan dan Permohonan Usulan Langsung yang Terintegrasi dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah		Fokus Prioritas Pembangunan Daerah		Pokok Permasalahan	Usulan Terakomodasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota	1	**Fokus 1:** Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik	Infrastruktur Jalan	44
				Infrastruktur Konektivitas	20
		2	**Fokus 2:** Penanggulangan Banjir	-	-
		3	**Fokus 3:** Perbaikan Kualitas Lingkungan	-	-
		4	**Fokus 4:** Penanganan Sampah	Penyediaan barang untuk Keberalihan Kota	18
		5	**Fokus 5:** Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT)	-	-
		6	**Fokus 6:** Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum	-	-
		7	**Fokus 7:** Pelaksanaan Pencegahan	-	-
		8	**Fokus 8:** Peningkatan Kualitas Udara	-	-
		9	**Fokus 9:** Peningkatan Akses Hunian Layak	Infrastruktur Kawasan Permukiman	42
9	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	1	**Fokus 1:** Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Digi Economy, Digitalization*)	-	-
		2	**Fokus 2:** Peningkatan Daya Saing Ekonomi	-	-
		3	**Fokus 3:** Peningkatan Investasi Daerah	-	-
		4	**Fokus 4:** Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction*	-	-

Prioritas Pembangunan Daerah		Fokus Prioritas Pembangunan Daerah		Pokok Permasalahan	Usulan Terbanyak/Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5	**Fokus 5:** Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelatihan Ketenagakerjaan	23
				Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Masyarakat	14
				Pelatihan Kewirausahaan	5
c	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1	**Fokus 1:** Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi	-	-
		2	**Fokus 2:** Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting	-	-
		3	**Fokus 3:** Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	-	-
		4	**Fokus 4:** Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial	Penyediaan Barang untuk Kesehatan Masyarakat	33
		5	**Fokus 5:** Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	Penyediaan Barang untuk Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	18
		6	**Fokus 6:** Penguatan Ketahanan Pangan	-	-
d	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	1	**Fokus 1:** Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-
		2	**Fokus 2:** Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik	-	-
		3	**Fokus 3:** Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif	-	-
		4	**Fokus 4:** Penciptaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas	-	-
TOTAL					**219**

Sumber: Hasil Input Kesimpulan Akhir Kerja FD, 2024 (diolah)

Pokok permasalahan dan permohonan dari usulan langsung masyarakat menjadi faktor pendukung untuk mengakselerasi Prioritas Pembangunan Daerah 2025. Usulan langsung masyarakat dengan pokok permasalahan yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota menjadi usulan langsung dengan capaian terbanyak yaitu 124 usulan. Semantara itu, peningkatan kualitas dan cakupan transportasi publik menjadi fokus pembangunan yang mendapati usulan langsung masyarakat dengan jumlah usulan sebanyak 64 usulan dan menjadi fokus prioritas pembangunan daerah dengan capaian usulan langsung terbanyak.

5.4 Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pendanaan)

5.4.1 Rekapitulasi Renja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan atas unsur kekhususan dalam menunjang Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki otonomi hanya pada tingkat provinsi, sehingga kota dan kabupaten bersifat administratif dan merupakan kesatuan dengan provinsi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta Pada tahun 2025, unsur kekhususan Provinsi DKI Jakarta tetap ada namun bergeser fungsinya dari daerah khusus ibukota menjadi daerah khusus yang berfungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan sebagai kota global.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan terhadap urusan pemerintahan daerah pada RKPD Tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan urusan pemerintahan daerah dengan penjaberan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah dan merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar memiliki persentase alokasi pagu indikatif terbesar dengan persentase sebesar 58,14% dari total pagu indikatif belanja daerah pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan komposisi pada masing-masing bidang urusan sebagai berikut:

Tabel 5.17
Penyelenggaraan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Kode	Bidang Urusan	Pagu Indikatif (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	17.604.505.965.853	23,31%
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	10.607.041.735.334	14,05%
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.734.878.095.426	12,89%
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.502.986.313.857	1,99%
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2.816.146.037.707	3,73%
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.638.260.527.265	2,17%

Sumber: Hasil Input, 2024 (Diolah)

Bidang Urusan Pemerintahan pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Alokasi pagu indikatif untuk Bidang Urusan Pemerintahan pada Bidang Pendidikan sebesar 23,31% sehingga telah memenuhi alokasi minimal 20% dari belanja daerah. Sedangkan alokasi pagu indikatif untuk Bidang Urusan Pemerintahan pada Bidang Kesehatan sebesar 14,05% dan telah memenuhi alokasi minimal 10% dari belanja daerah selain belanja pegawai. Bidang Urusan Pemerintahan pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang

Urusan Pemerintahan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan alokasi pagu indikatif masing-masing sebesar 12,89% dan 1,99% dalam rangka dukungan terhadap peningkatan belanja infrastruktur pelayanan publik.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, memiliki persentase alokasi pagu indikatif sebesar 23,25% dari total pagu indikatif belanja daerah pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan komposisi pada masing-masing bidang urusan sebagai berikut:

Tabel 5.18
Penyelenggaraan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Kode	Bidang Urusan	Pagu Indikatif (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	468,874,343,341	0.62%
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30,076,303,587	0.04%
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	1,032,492,510,131	1.37%
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1,074,100,000	0.00%
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	4,601,930,144,979	6.09%
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	391,382,260,797	0.52%
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	472,576,489,587	0.63%
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	209,639,274,945	0.28%
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	6,572,974,051,063	8.70%
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	821,305,646,513	1.09%
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	259,207,038,611	0.34%
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	822,333,381,965	1.09%
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1,103,267,369,525	1.46%
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	9,643,146,692	0.01%
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	21,242,473,734	0.03%
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	474,030,775,506	0.63%
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	79,139,069,043	0.10%
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	188,499,768,383	0.24%

Sumber: Hasil Input, 2024 (Modelo)

Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan memiliki persentase alokasi pagu indikatif terbesar, yakni sebesar 8,70%. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup memiliki persentase alokasi pagu indikatif sebesar 6,09% dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan hidup dan upaya menangani persampahan di Jakarta. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pangan juga menjadi prioritas dalam rangka menjaga ketahanan pangan serta dalam rangka menjaga tingkat inflasi bahan pangan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, memiliki persentase alokasi pagu indikatif sebesar 1,67% dari total pagu indikatif belanja daerah pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan komposisi pada masing-masing bidang urusan sebagai berikut:

Tabel 5.19
Urusan Pemerintahan Pilihan

Kode	Bidang Urusan	Pagu Indikatif (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	44.882,467,491	0.06%
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	489,014,819,302	0.65%
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	51,878,464,205	0.07%
3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	462,186,523,651	0.61%
3.29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	81,225,271,667	0.11%
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	80,756,062,617	0.11%
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	51,904,304,628	0.07%

Sumber: Hasil Input, 2024 (diolah)

Dari 7 (tujuh) Bidang Urusan Pemerintahan Pilihan, Bidang Urusan Pemerintahan pada Bidang Pariwisata dan Bidang Urusan Pemerintahan pada Bidang Kehutanan memperoleh persentase pagu indikatif tertinggi dengan masing-masing memiliki alokasi sebesar 0,65% dan 0,61%.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan memiliki persentase alokasi pagu indikatif sebesar 3,13% dari total pagu indikatif belanja daerah pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan komposisi pada masing-masing bidang urusan sebagai berikut:

Tabel 5.20
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Kode	Bidang Urusan	Pagu Indikatif (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
4.01	Sekretariat Daerah	1.574,235,881,713	2.09%
4.02	Sekretariat DPRD	789,706,286,753	1.04%

Sumber: Hasil Input, 2024 (diolah)

Unsur Pendukung Bidang Sekretariat Daerah merupakan unsur pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 10 (sepuluh) Biro Sekretariat Daerah dengan persentase alokasi pagu indikatif sebesar 2,08%. Sedangkan Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung DPRD, yang memiliki persentase alokasi pagu indikatif sebesar 1,04%.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan memiliki persentase alokasi pagu indikatif sebesar 5,58% dari total pagu indikatif belanja daerah pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan komposisi pada masing-masing bidang urusan sebagai berikut:

Tabel 5.21
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Kode	Bidang Urusan	Pagu Indikatif (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01	Perencanaan	181,300,667,709	0.24%
5.02	Keuangan	3,670,726,102,374	4.86%
5.03	Kepegawaian	227,553,580,933	0.30%

Kode	Bidang Urusan	Pagu Indikatif (Rp)	Persentase Belanja (%)
(a)	(b)	(c)	(d)
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	124,209,317,173	0.16%
5.05	Penelitian dan Pengembangan	18,548,286,777	0.02%

Sumber: Hasil Input, 2024 (diolah)

Dari 6 (enam) Bidang Unsur Penunjang, Urusan Keuangan menjadi unsur penunjang yang memiliki persentase alokasi pagu indikatif tertinggi, yakni sebesar 4,86% dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan memiliki persentase alokasi pagu indikatif sebesar 0,46% dari total pagu indikatif belanja daerah pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 5.22
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Kode	Bidang Urusan	Pagu Indikatif (Rp)	Persentase Belanja (%)
(a)	(b)	(c)	(d)
6.01	Inspektorat Daerah	349,214,662,034	0.46%

Sumber: Hasil Input, 2024 (diolah)

Inspektorat Daerah sebagai Unsur Pengawasan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Alokasi pagu indikatif untuk Unsur Pengawasan sebesar 0,46% sehingga telah memenuhi alokasi minimal 0,30% dari belanja daerah.

g. Unsur Kewilayahan memiliki persentase alokasi pagu indikatif sebesar 4,19% dari total pagu indikatif belanja daerah sebagaimana pada Tabel 5.23 sebagai berikut:

Tabel 5.23
Unsur Kewilayahan

Kode	Bidang Urusan	Pagu Indikatif (Rp)	Persentase Belanja (%)
(a)	(b)	(c)	(d)
7.01	Kecamatan Administrasi	3,160,368,448,746	4.19%

Sumber: Hasil Input, 2024 (diolah)

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan dalam menjalankan otonomi daerah yang hanya terdapat pada tingkat provinsi.

h. Unsur Kekhususan memiliki persentase alokasi pagu indikatif sebesar 1,67% dari total pagu indikatif belanja daerah pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 (lima) Kota Administratif dan 1 (satu) Kabupaten Administratif, dengan komposisi pada masing-masing bidang urusan sebagai berikut:

Tabel 5. 24
Unsur Kekhususan

Kode	Bidang Urusan	Pagu Indikatif (Rp)	Persentase Belanja (%)
(a)	(b)	(c)	(d)
7.02	Kota Administrasi	2,393,505,226,911	3.17%
7.03	Kabupaten Administrasi	150,984,889,746	0.20%

Sumber: Hasil Input, 2024 (diolah)

1. Unsur Pemerintahan Umum memiliki persentase alokasi pagu indikatif sebesar 0,21% dari total pagu indikatif belanja daerah pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 5. 25
Unsur Pemerintahan Umum

Kode	Bidang Urusan	Pagu Indikatif (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01	Kesatuan Bangsa Politik	156,356,974,235	0.21%

Sumber: Hasil Input, 2024 (Diolah)

5.4.2 Rekapitulasi Renja berdasarkan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang telah diubah terakhir melalui Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas serta Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, terdapat 42 Perangkat Daerah yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Sesuai ketentuan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 dan RKPD Tahun 2025.

Penyusunan kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan, Subkegiatan, Serta Indikator Subkegiatan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 telah mengikuti ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan perubahkirannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-1317 Tahun 2023.

Dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disusun oleh Perangkat Daerah telah mencakup pula 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan rekapitulasi sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 10 Biro Sekretariat Daerah. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Sekretariat Daerah melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
(2) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
(3) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
(4) Program Penataan Organisasi;
(5) Program Kesejahteraan Rakyat;
(6) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan; dan
(7) Program Perekonomian dan Pembangunan.

Terdapat 26 Kegiatan, serta 143 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp1.428.688.981.545 atau 1,89% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Implementasi UU DKJ dalam pelayanan publik Pemerintah menuju Kota Global;
(3) Pengurusan Perkara di Pengadilan;
(4) Harmonisasi Produk Hukum Daerah;

(5) Pengelolaan JDIH;
(6) Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
(7) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi;
(8) Penyelarasan, Sinkronisasi dan Harmonisasi Ketatalaksanaan;
(9) Belanja Wajib dan Mengikat;
(10) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri;
(11) Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri;
(12) Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum;
(13) Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah;
(14) Perumusan Kebijakan Perekonomian dan Keuangan;
(15) Pemantauan Implementasi program dan kegiatan bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup (fasilitasi dan *deborlienecking*);
(16) Perumusan Kebijakan Kesehatan, PPAPP, Sosial dan Pemuda Olahraga;
(17) Perumusan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan;
(18) Fasilitasi Kelembagaan Mental Spiritual; dan
(19) Fasilitas Penyelenggaraan Haji Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD merupakan pelaksana Unsur Penidukung Urusan Pemerintahan. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan
(2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Terdapat 19 Kegiatan, serta 62 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp785.706.285.753 atau 1,04% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Pelaksanaan Reses;
(3) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD; dan
(4) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli.

c. Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Inspektorat melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
(2) Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
(3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Terdapat 10 Kegiatan, serta 96 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp349.214.662.054 atau 0,46% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Pengawasan Kinerja dan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah;
(3) Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Wilayah; dan
(4) Pembinaan dan Pengawasan Kinerja.

d. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Pendidikan melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pengelolaan Pendidikan; dan
(2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 14 Kegiatan, serta 993 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp17.604.005.565.855 atau 23,31% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan);
(3) Uji Kompetensi Guru;
(4) Bantuan Sosial Pendidikan;
(5) Bahan Ajar dan Praktik;
(6) Kebutuhan Asrama Sekolah;
(7) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
(8) Peningkatan Kompetensi Peserta Didik;
(9) Sertifikasi/Uji Kompetensi Keahlian Peserta Didik;
(10) Peningkatan Sistem Layanan Pendidikan;
(11) Pembangunan dan Rehab Sekolah;
(12) Mebel Sekolah;
(13) Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik;
(14) Penyediaan BOP (Biaya Operasional Pendidikan); dan
(15) Pemberian Makan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).

e. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Kesehatan melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
(2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
(4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
(5) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

Terdapat 27 Kegiatan, serta 2039 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp10.607.041.735.334 atau 14,05% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting;
(3) SPM Kesehatan;
(4) Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
(5) Pengembangan RSUD;
(6) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit;
(7) Pembangunan/Rehab Total Puskesmas;
(8) Perencanaan X-1 Pembangunan Pos Kesehatan;
(9) Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan;
(10) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pembangunan RSUD;
(11) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan;
(12) Pemeliharaan Alat Kesehatan; dan
(13) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

f. Dinas Bina Marga

Dinas Bina Marga merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Bina Marga melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;

(2) Program Penyelenggaraan Jalan; dan

(3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 7 Kegiatan, serta 80 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp3.114.606.841.538 atau 4,12% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;

(2) Pembangunan/peningkatan jalan (pembangunan jalan di provinsi DKI Jakarta, Peningkatan Jalur Transjakarta dan *missing link*);

(3) Pembangunan Simpang Tak Sebidang pada lokasi Jl. Latumenten, Jl. Bintaro-Puspita, dan Jl. Panjang;

(4) Pengadaan Tanah antara lain untuk Jl. Tembus Bekasi Raya- Rusun Pulogebang (Rusun Rawa Bebek), Jl. Tembus Jalan Raya Bekasi - Jl. Irigasi (Rusun Ujung Menteng), Jl. Tembus Rorotan - Tol Cakung Cilincing (Rorotan - Marunda) dan Pendukung Pembangunan Simpang Tak Sebidang;

(5) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan, Jembatan, Underpass, Flyover dan Trotoar;

(6) Pembangunan/Peningkatan Trotoar terintegrasi Utilitas antara lain di Jl. Manggа Besar dan Sekitarnya (Jl. Mangga Besar segmen Barat, Jl. Mangga Besar segmen Timur), Kawasan Blok M Lanjutan (Jl. Palatehan I, Jl. Palatehan sisi Terminal Blok M);

(7) Pembangunan Utilitas terintegrasi Trotoar;

(8) Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);

(9) Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota, termasuk Peningkatan Kualitas Pencahayaan Simpang Susun Semanggi;

(10) Pemenuhan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU);

(11) Pemeliharaan Berkala, Rutin Jalan, Jalan Lingkungan, Jembatan dan Trotoar di 5 wilayah Kota Administrasi;

(12) Pembangunan/Peningkatan Jalan di Kota Administrasi;

(13) Pembangunan/peningkatan Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Pusat antara lain di Kawasan Roxy dan Sekitarnya, Kawasan Tanah Abang dan Sekitarnya;

(14) Pembangunan/peningkatan Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Utara antara lain di Jl. Terusan Bandengan dan Jl. Jembatan Tiga Raya;

(15) Pembangunan/peningkatan Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Barat antara lain di Jl. Meruya Ilir-Jl. Meruya Utara dan Jl. Rawa Belong;

(16) Pembangunan/peningkatan Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara lain di Jl. Wijaya II dan Jl. Darmawangsa Raya;

(17) Pembangunan/peningkatan Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Timur antara lain di Jl. Pondok Kelapa Raya (lanjutan), Jl. Raya Pondok Gede dan Jl. Pahlawan Revolusi; dan

(18) Aspirasi Masyarakat untuk Pembangunan/ Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota di Kota Administrasi.

g. Dinas Sumber Daya Air

Dinas Sumber Daya Air merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Sumber Daya Air melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;

(2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;

(3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;

(4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

(5) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); dan

(6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 12 Kegiatan, serta 129 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp5.390.381.540.821 atau 7,14% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Pengadaan Tanah Sumber Daya Air Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai, Embung/Waduk, dan Pengolahan Air Limbah/MCK;
(3) Pembangunan Polder/Kolam Retensi antara lain Pompa Bulak Cabe, Pompa Kayu Putih, Pompa Cempaka Putih, Polder Greenville (Pompa Mangga Raya), Polder Cengkareng Kalideres, dan Pompa Rawa Terate;
(4) Pembangunan Waduk/Situ/Embung dan Bangunan Kelengkapannya antara lain Waduk Cilandak Pondok Labu dan Embung Kebagusan;
(5) Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai antara lain Kali Kamal/Semongol, Kali Cakung Lama (Pegangsaan Dua), Kali Jatikramat, Kali Grogol, dan Kawasan Fatmawati R. Nawi;
(6) Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Infrastruktur Pengendali Banjir Pesisir Pantai Tahap I (antara lain Muara Angke sisi Utara – Timur, Kali Blencong) dan Tahap III (antara lain Muara Angke sisi Timur, dan Nizam Zachman);
(7) Pembangunan *Breakwater*/ Tanggul/ Bangunan Pengaman Pantai Lainnya antara lain Kalibaru Cilincing dan Pulau Onrust;
(8) Pembangunan *Jakarta Sewerage Development Project* (JSDP) Zona 1;
(9) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala Permukiman di Provinsi DKI Jakarta antara lain Tiper Asri, Penjaringan, Taman Jagakarsa, Kawasan Kota Tua, Kawasan Waduk Sunter Selatan Sisi Barat dan Kali Sentiong;
(10) Subsidi Air Bersih untuk Daerah Krisis Air dan Kepulauan Seribu serta Subsidi Revitalisasi dan/atau Rehabilitasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (Tangki Septik);
(11) Pembangunan Saluran, Saluran PHB;
(12) Peningkatan Pompa Pengendali Banjir;
(13) Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir;
(14) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase;
(15) Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir;
(16) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
(17) Peningkatan SPALD/ Pengelolaan Sub Sistem Pengolahan Setempat; dan
(18) Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air (IPA).

h. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Penataan Bangunan Gedung;
(2) Program Penatagunaan Tanah;
(3) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
(4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 13 Kegiatan, serta 144 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp1.262.219.467.991 atau 1,67% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Perencanaan dan Kajian Daya Dukung Penataan Ruang untuk Penyusunan Panduan Rancang Kawasan (PRK) TOD;

(3) Penyelenggaraan Perizinan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Layak Fungsi (SLF), dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
(4) Dukungan Implementasi Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Gedung Ramah Disabilitas;
(5) Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Gedung
(6) Pendataan dan Penyelesaian Administrasi Pertanahan;
(7) Perencanaan Pembangunan Gedung Pemda;
(8) Pengembangan dan Optimasi Pemanfaatan Sistem Jakarta Satu;
(9) Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan;
(10) Pembangunan Gedung Pemda, antara lain: Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru, Gedung Kantor Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Markas Komando Satpol PP, Gedung Kantor dan Lab PPKUKM, serta Gedung Parkir KDO Kawasan Jatibaru;
(11) Perencanaan dan Kajian Daya Dukung Penataan Ruang untuk Penataan Kawasan; dan
(12) Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Gedung.

i. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Kawasan Permukiman;
(2) Program Pengembangan Perumahan;
(3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan
(4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 10 Kegiatan, serta 208 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp1.502.986.313.857 atau 1,99% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Pembangunan Rumah Susun Yos Sudarso dan Rumah Susun Kalibaru, serta Perencanaan Rumah Susun Muara Angke;
(3) Pengembangan Instrumen Pendukung Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman;
(4) Pemeliharaan Berkala Rusun dan Penyediaan Prasarana Sarana Rusun;
(5) Pengembangan dan Optimasi Pemanfaatan Sistem SIRUKIM;
(6) Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun I s.d. VIII;
(7) Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Layanan BLUD;
(8) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kota dan Kabupaten Administrasi; dan
(9) Pengendalian Perumahan di Kota Administrasi.

j. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
(2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 11 Kegiatan, serta 165 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp1.430.233.306.698 atau 1,89% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat; dan
(2) Pemenuhan SPM sub-urusan Trantibumlinmas.

k. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; dan
(2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 14 Kegiatan, serta 237 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp1.288.954.479.535 atau 1,71% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat; dan
(2) Pemenuhan SPM sub-urusan kebakaran.

l. Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Sosial melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pemberdayaan Sosial;
(2) Program Penanganan Bencana;
(3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
(4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
(5) Program Rehabilitasi Sosial.

Terdapat 19 Kegiatan, serta 670 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp1.638.048.515.379 atau 2,17% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Rehab Berat Gedung Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung;
(3) Pembangunan Gedung Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
(4) Rehab Berat Gedung Panti Sosial Trauma Wardha (PSTW) Budi Mulia 4;
(5) Penanganan Bencana;
(6) Penjangkauan PPKS dan Pemulangan Orang Terlantar;
(7) Dana Operasional Karang Taruna;
(8) Pelaksanaan Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kewirausahaan Terpadu;
(9) Layanan SPM Panti; dan
(10) Optimalisasi pengelolaan DTKS.

m. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Hubungan Industrial;
(2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
(3) Program Penempatan Tenaga Kerja;
(4) Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
(5) Program Pengelolaan Energi Terbarukan;
(6) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;

(7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
(8) Program Perencanaan Tenaga Kerja.

Terdapat 22 Kegiatan, serta 319 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp510.499.530.914 atau 0,68% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas;
(3) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);
(4) Pembangunan PLTS pada Gedung Pemprov lingkup Provinsi DKI Jakarta;
(5) Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik;
(6) Audit Energi Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
(7) Pelatihan Keterampilan Kerja;
(8) Pelatihan Keterampilan Kerja Las;
(9) Pelatihan Keterampilan Kerja Industri;
(10) Pelatihan Kompetensi SNI dan Penerapan K3;
(11) Pelatihan Peningkatan Produktivitas; dan
(12) Pemberitakan Tenaga Kerja Mandiri.

n. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
(2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
(3) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
(4) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha);
(5) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
(6) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
(7) Program Pengendalian Penduduk;
(8) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
(9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
(10) Program Perlindungan Khusus Anak; dan
(11) Program Perlindungan Perempuan.

Terdapat 29 Kegiatan, serta 409 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp712.512.068.079 atau 0,94% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;
(3) Peningkatan Kapasitas Pendamping Jakpreneur;
(4) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
(5) Penguatan Kader PKK Provinsi dan Kota dalam Percepatan Penurunan Stunting;
(6) Pembinaan Poljanal Posyandu Tingkat Provinsi;
(7) Pengumpulan dan Pengolahan Data Keluarga Berisiko Stunting;
(8) Fasilitasi Audit Stunting;

(9) Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Capaian Operasionalisasi pada Strategi Nasional dan rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB;

(10) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;

(11) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan;

(12) Pencegahan kekerasan terhadap anak;

(13) Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat;

(14) Pelatihan Teknis BKB HI dan Pencegahan Stunting bagi Pengelola dan Pelaksana Program; dan

(15) Survey penghidupan hidup anak dan perempuan.

o. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pangan, Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dan Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pertanian. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Penanganan Kerawanan Pangan;

(2) Program Pengawasan Keamanan Pangan;

(3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

(4) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

(5) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

(6) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;

(7) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;

(8) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

(9) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

(10) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;

(11) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

(12) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;

(13) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; dan

(14) Program Penyuluhan Pertanian.

Terdapat 35 Kegiatan, serta 262 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp1.129.251.431.827 atau 1,50% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;

(2) Pelaksanaan Transplantasi Karang;

(3) Pengembangan Pertanian Perkotaan (Urban Farming) lingkup Provinsi dan Kota;

(4) Pengembangan Agroeduwisata;Penyediaan Sarana Budidaya Perikanan;

(5) Revitalisasi Prasarana Elektrikal Pasar Grosir Muara Angke;

(6) Pembibitan Karang;

(7) Peningkatan Layanan Umum Daerah;

(8) Pembudidayaan Budidaya Sayuran dan Buah buahan melalui Hidroponik;

(9) Pengadaan Bahan Kimia dan Media Laboratorium;

(10) Safari Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN); dan

(11) Pemberdayaan Kelompok Nelayan Di Wilayah Kepulauan Seribu.

p. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PplH);
(2) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
(3) Program Pengelolaan Persampahan;
(4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
(5) Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
(6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
(7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
(8) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Terdapat 17 Kegiatan, serta 204 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp3.475.943.703.372 atau 4,60% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana sarana pengelolaan dan pengangkutan sampah;
(3) Perbaikan kualitas lingkungan hidup antara lain melalui pelaksanaan uji emisi, pemantauan kualitas lingkungan hidup, dan penyediaan pemantau kualitas udara perkotaan;
(4) Pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup;
(5) Pertuasan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
(6) Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK);
(7) Pengelolaan Limbah B3;
(8) Perbaikan kualitas lingkungan hidup antara lain melalui pengelolaan dan pemeliharaan laboratorium untuk pemantauan kualitas lingkungan
(9) Pengadaan peralatan dan pendukung layanan laboratorium;
(10) Pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah (RDF/LM Bantargebang, RDF Rorotan, IPAS, PLTSa, dan JRC Pesanggrahan);
(11) Penanganan sampah di TPST Bantargebang termasuk untuk rehabilitasi IPAS, penurapan kali, pemeliharaan jalan operasional, pengolahan air sampah/lindi dan laboratorium, serta antisipasi potensi kebakaran;
(12) Pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana sarana penanganan dan pengangkutan sampah pada Badan Air, antara lain saringan sampah Kali Ciliwung (TB Simatupang);
(13) Peningkatan dan pemeliharaan TPS menjadi TPS-3R; dan
(14) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah di sumber antara lain melalui BPSSW, pembinaan bank sampah, dan pengembangan bio konversi maggot/BSF.

q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pencatatan Sipil;
(2) Program Pendaftaran Penduduk;
(3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
(4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan; dan
(5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 19 Kegiatan, serta 189 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp391.382.260.797 atau 0,52% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(3) Pengelolaan Perangkat Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
(4) Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pelaporan Data Administrasi Kependudukan.

r. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Perhubungan. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Perhubungan melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pengelolaan Pelayaran;
(2) Program Pengelolaan Perkeretaapian;
(3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
(4) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Terdapat 20 Kegiatan, serta 358 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp6.572.974.051.065 atau 8,70% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi;
(3) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan MRT;
(4) Pemenuhan Fasilitas Kepelabuhanan;
(5) Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway;
(6) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum;
(7) Penyediaan Prasarana Lalu Lintas dalam rangka Mendukung Penataan Kawasan;
(8) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal;
(9) Pelayanan Angkutan Bus Sekolah;
(10) Penyediaan Listrik *Traffic Light* dan Perangkat Pendukungnya se-Jakarta;
(11) Penyediaan Jaringan Komunikasi ITS;
(12) Peningkatan Layanan Umum Daerah;
(13) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
(14) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
(15) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
(16) Pelayanan Angkutan Perairan;
(17) Penyelenggaraan *Command Center*;
(18) Penyediaan Jaringan;
(19) Revitalisasi Pelabuhan;
(20) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan;
(21) Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota Administrasi;
(22) Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway;
(23) Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway;
(24) Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas Di Non Koridor Busway;
(25) Perawatan dan Pemeliharaan Dermaga;
(26) Pendalaman Kolam Labuh dan Alur Masuk; dan
(27) Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

s. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Urusan Bidang

Pemerintahan Bidang Statistik, dan Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Persandian. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
(2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
(3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
(4) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi; dan
(5) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Terdapat 11 Kegiatan, serta 127 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp852.191.466.730 atau 1,13% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Penyelenggaraan Komunikasi dan Layanan Informasi Publik;
(3) Penyediaan Infrastruktur TIK;
(4) Penyelenggaraan Statistik dan Persandian Daerah;
(5) Pengelolaan Pengembangan Produk, Layanan dan Kemitraan Jakarta Smart City;
(6) Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
(7) Penyelenggaraan Jaringan Intra dan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Penanaman Modal. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pelayanan Penanaman Modal;
(2) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
(3) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
(4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
(5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
(6) Program Promosi Penanaman Modal.

Terdapat 13 Kegiatan, serta 115 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp822.533.381.963 atau 1,09% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Penyusunan Strategi Penanaman Modal (Investment Project Ready to Over, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan Peta Potensi Investasi);
(3) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal (Jakarta Investment Festival) dan Fasilitasi Kerjasama Investasi (Development Brief);
(4) Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Sarana/Prasarana Teknologi Informasi Pelayanan Publik; dan
(5) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Keliling di Kepulauan Seribu.

u. Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
(2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
(3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan; dan
(4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 16 Kegiatan, serta 283 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp1.100.692.779.715 atau 1,46% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Pembinaan atlet PORI dan PPLM;
(3) Pembangunan gelanggang remaja kecamatan;
(4) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga single-event/ multi-event dan berjenjang;
(5) Pengiriman atlet pada event/kejuaraan;
(6) Kegiatan Kepemudaan & Keprramukaan;
(7) Pemasalan olahraga (senam rutin);
(8) Operasional Layanan Gelanggang;
(9) Peralatan olahraga dan perbaikan lapangan sesuai aspirasi masyarakat; dan
(10) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kota Administrasi.

v. Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Kebudayaan. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Kebudayaan melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
(2) Program Pengelolaan Permuseuman;
(3) Program Pengembangan Kebudayaan; dan
(4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 12 Kegiatan, serta 263 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp474.030.775.586 atau 0,63% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
(3) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya;
(4) Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman;
(5) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
(6) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasana Kebudayaan;
(7) Misi Seni Budaya di Dalam dan Luar Negeri;
(8) Penguatan Kemitraan Kebudayaan;
(9) Pengelolaan Koleksi Museum;
(10) Penyelenggaraan Kegiatan Interaktif dan Program Publik Museum;
(11) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Penunjang Museum;
(12) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum;
(13) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Pusat Konservasi Cagar Budaya;
(14) Pelindungan dan Pengembangan Cagar Budaya;
(15) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu;
(16) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di TIM;
(17) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung;
(18) Pengembangan dan Apresiasi Seni;
(19) Festival Taman Ismail Marzuki;
(20) Peningkatan Wawasan dan Keterampilan Kesenian;
(21) Penelitian dan Produksi Pengetahuan Kesenian;
(22) Seminar dan Penghargaan Akademi Jakarta;
(23) Kegiatan Planetarium dan Observatorium Jakarta;
(24) Pengembangan Aktivitas Pergelaran Kesenian dan Produk Budaya Tradisional Betawi;

(25) Kegiatan Interaktif dan Pemeliharaan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi;

(26) Pengelolaan Museum Betawi;

(27) Pementasan Rutin WOB dan Sandiwara Miss Tjitjih;

(28) Pelindungan Bangunan Cagar Budaya;

(29) Pengelolaan Koleksi Museum Benyamin Suaeb;

(30) Pemeliharaan Rutin Gedung Kesenian Jakarta, Gedung Kesenian Miss Tjitjih, Gedung Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;

(31) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan ng Wayang Orang Bharata, dan Gedung Balai Budaya Condet; dan

(32) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan.

w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Kearsipan. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;

(2) Program Pembinaan Perpustakaan;

(3) Program Pengelolaan Arsip; dan

(4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 15 Kegiatan, serta 186 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp261.012.262.534 atau 0,35% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;

(2) Koleksi Buku Perpustakaan;

(3) Pojok Baca Masyarakat;

(4) Sarana Prasarana Perpustakaan;

(5) Sarana Prasarana Arsip;

(6) Peningkatan literasi baca; dan

(7) Pengembangan aplikasi perpustakaan dan arsip.

x. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pariwisata. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pemasaran Pariwisata;

(2) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;

(3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

(4) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; dan

(5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 19 Kegiatan, serta 240 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp489.014.819.302 atau 0,65% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;

(2) Penyelenggaraan event untuk peningkatan daya tarik wisata Jakarta;

(3) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri;

(4) Promosi MICE Jakarta;

(5) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif;

(6) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 2025 – 2045;

(7) Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual;
(8) Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
(9) Sertifikasi Tenaga Kerja Industri profesi pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
(10) Pengaitaan dan Pemaliharaan Bangunan dan Tugu serta Kawasan; dan
(11) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif.

y. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Kehutanan. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
(2) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan;
(3) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
(4) Program Pengelolaan Hutan;
(5) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati); dan
(6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 14 Kegiatan, serta 124 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp1.561.493.026.034 atau 2,07% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
(3) RTH Taman, diantaranya di Jamboree Jakarta Timur, Penggilingan Jakarta Timur, Kahfi Jakarta Selatan;
(4) RTH Hutan Kota, diantaranya di Bambu Wulung Jakarta Timur, Palem Jakarta Selatan, Pinang Kalijati Jakarta Selatan;
(5) RTH Makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Srengseng Sawah;
(6) Penataan RTH;
(7) RTH Hutan Kota, diantaranya di Angke Kapuk Jakarta Utara dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Pondok Pinang Jakarta Selatan;
(8) RTH Makam, diantaranya di TPU Semper Jakarta Utara, TPU Cijantung Jakarta Timur, dan TPU Bantar Jati Jakarta Barat;
(9) RTH Jalur Hijau, diantaranya di bawah Tol Becakayu Jakarta Timur dan Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan;
(10) Peningkatan kualitas pelayanan pemakaman antara lain layanan ambulans dan pemulasaraan jenazah;
(11) Operasional dan pemeliharaan RTH dan ornamen keindahan kota;
(12) Optimalisasi operasi dan peningkatan layanan umum daerah (BLUD);
(13) Penataan/ Rehab Sarana dan Prasarana Kawasan Taman Margasatwa Ragunan (TMR);
(14) Pengadaan Makanan dan Obat Satwa TMR;
(15) Pembangunan RTH di Kebun Bibit Jl. Sirsak Ujung;
(16) Pembangunan RTH Taman di Rorotan, Jl. Jogja Raya, Jl. Ratu Kembaja, Jl. RC. Veteran Raya, dan Jl. Wika, Jl. Pratama, dan Gg. Masjid Pulogebang;
(17) Pembangunan RTH Jalur Hijau Median Jl. Yos Sudarso;
(18) Penataan RTH Kebun Bibit, diantaranya di Asalih, Jalan Sirsak, dan Margasatwa 45;
(19) Perbanyakan tanaman dan penunjangnya;
(20) Penataan RTH Taman, diantaranya di Petamburan, Cilincing, Budi Mulia, Asrama, Flamboyan Kebon Jeruk, DPR Pulmerah, Tanjung Duren Utara, Taman Tanjung, Taman Bendi, Taman Seno, Viaduct, Cempaka, dan Jati Cimel;
(21) Penataan RTH Makam di TPU Karet Bivak, TPU Tegal Alur Islam, dan TPU Kawa Kopi; dan

(22) Penataan RTH Jalur Hijau di Jl. Jati Pinggir Petamburan, Jl. Jampea, Jl. Hadiah Utama Jelambar (lanjutan), Kupingan Pemuda (Lanjutan), dan FO Kampung Melayu.

z. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas PPKUKM merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Perdagangan, Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Perindustrian, dan Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
(2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
(3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
(4) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
(5) Program Pengembangan Ekspor;
(6) Program Pengembangan UMKM;
(7) Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
(8) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
(9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
(10) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
(11) Program Pertanian dan Pendaftaran Perusahaan;
(12) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; da
(13) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Terdapat 20 Kegiatan, serta 216 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp394.867.424.656 atau 0,52% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Penyelenggaraan Bazar UMKM;
(3) Partisipasi Pameran Dalam dan Luar Negeri;
(4) Business Matching P3DN;
(5) Penyelenggaraan Pasar Murah;
(6) Pendampingan Industri Kreatif dan Digital;
(7) Pendampingan Peningkatan Mutu dan Kualitas Produk Ekspor;
(8) Pengembangan Layanan Pengujian;
(9) Peningkatan Layanan Umum Daerah;
(10) Penumbuhan Wirausaha Industri Baru; dan
(11) Pembinaan Kewirausahaan UKM.

aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
(2) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
(3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
(4) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
(5) Program Riset dan Inovasi Daerah.

Terdapat 21 Kegiatan, serta 166 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp200.046.964.485 atau 0,26% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;

(2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah;
(3) Pelaksanaan Musrenbang;
(4) Pengembangan Riset dan Inovasi menuju Kota Global; dan
(5) Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan.

bb. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
(2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
(3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 15 Kegiatan, serta 116 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp1.899.884.006.770 atau 2,52% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
(3) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
(4) Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
(5) Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah;
(6) Belanja Tidak Terduga;
(7) Pengelolaan Pinjaman Program PEN;
(8) Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Perangkat TIK SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah;
(9) Penyusunan Standar Harga; dan
(10) Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah lingkup Kota/Kabupaten Administrasi.

cc. Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
(2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 7 (tujuh) Kegiatan, serta 70 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp1.436.796.445.111 atau 1,90% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Penagihan Pajak Daerah;
(3) Pengembangan Transformasi Digital Pendapatan Daerah;
(4) Penyebarluasan Informasi Kewajiban Pajak Daerah;
(5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
(6) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
(7) Pembangunan Gedung UPPPD dan Perbaikan Gedung SAMSAT; dan
(8) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

dd. Badan Pengelolaan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Aset Daerah merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Badan Pengelolaan Aset Daerah melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
(2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 10 Kegiatan, serta 138 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp334.045.651.493 atau 0,44% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:
(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Pengamanan Barang Milik Daerah (Pendataan, Sertifikasi, dan Asuransi);
(3) Penilaian Barang Milik Daerah;
(4) Optimalisasi Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
(5) Pengadaan Kendaraan Dinas;
(6) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Barang Milik Daerah;
(7) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;
(8) Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
(9) Pengamanan Barang Milik Daerah (Sertifikasi, Pemagaran, dan Penyediaan Papan Nama); dan
(10) Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

ee. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan program sebagai berikut:
(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
(2) Program Perekonomian dan Pembangunan.

Terdapat 6 (enam) Kegiatan, serta 15 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp41.657.269.007 atau 0,06% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:
(1) Belanja Wajib dan Mengikat; dan
(2) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.

ff. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa:

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan program sebagai berikut:
(1) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
(2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 8 (delapan) Kegiatan, serta 22 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp183.869.631.161 atau 0,14% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:
(1) Belanja Wajib dan Mengikat; dan
(2) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.

gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan program sebagai berikut:
(1) Program Kepegawaian Daerah;
(2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
(3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 11 Kegiatan, serta 30 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp142.577.737.103 atau 0,19% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Penyelenggaraan Diklat Manajerial dan Teknis lainnya;
(3) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi;
(4) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
(5) Pengembangan Kompetensi Teknis, Pemerintahan dan Sosial Kultural; dan
(6) Pengiriman Kediklatan.

hh. Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Kepegawaian Daerah; dan
(2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 10 Kegiatan, serta 100 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp209.156.460.975 atau 0,28% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Rekrutmen CASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
(3) Pengelolaan Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN;
(4) Uji Kompetensi Pegawai dan Pengelolaan Assessment Center;
(5) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian;
(6) Fasilitasi Lembaga KORPRI;
(7) Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah / Pelantikan; dan
(8) Pelayanan dan Pembekalan Pegawai Yang Akan Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).

ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Penanggulangan Bencana; dan
(2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 11 Kegiatan, serta 33 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp96.956.251.474 atau 0,13% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan;
(3) Pemenuhan SPM sub-urusan bencana; dan
(4) Pengelolaan Sistem Informasi Kebencanaan.

jj. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
(2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
(3) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

(4) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

(5) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik; dan

(6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 13 Kegiatan, serta 187 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp156.356.974.255 atau 0,21% dari total pagu belanja daerah. Prioritas belanja antara lain Belanja Wajib dan Mengikat.

kk. Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan pelaksana Unsur Kekhususan Kota Administrasi. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Kota Administrasi Jakarta Pusat melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

(3) Program Pengelolaan Kecamatan;

(4) Program Pengelolaan Kota Administrasi; dan

(5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 14 Kegiatan, serta 1507 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp850.338.239.219 atau 1,13% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;

(2) Rehab Gedung Kantor/Rudin Lurah/Camat; dan

(3) Percepatanan Penurunan dan Pencegahan Stunting.

ll. Kota Administrasi Jakarta Utara

Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan pelaksana Unsur Kekhususan Kota Administrasi. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

(3) Program Pengelolaan Kecamatan;

(4) Program Pengelolaan Kota Administrasi; dan

(5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 14 Kegiatan, serta 1093 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp918.344.120.591 atau 1,22% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;

(2) Rehab Gedung Kantor/Rudin Lurah/Camat; dan

(3) Percepatanan Penurunan dan Pencegahan Stunting.

mm. Kota Administrasi Jakarta Barat

Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan pelaksana Unsur Kekhususan Kota Administrasi. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

(3) Program Pengelolaan Kecamatan;

(4) Program Pengelolaan Kota Administrasi; dan

(5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 14 Kegiatan, serta 1775 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp1.120.531.121.741 atau 1,48% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Rehab Gedung Kantor/Sudin Lurah/Camat; dan
(3) Percepatanan Penurunan dan Penegahan Stunting.

nn. Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan pelaksana Unsur Kekhususan Kota Administrasi. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Kota Administrasi Jakarta Selatan melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
(3) Program Pengelolaan Kecamatan;
(4) Program Pengelolaan Kota Administrasi; dan
(5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 14 Kegiatan, serta 2146 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp1.255.214.562.716 atau 1,66% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Rehab Gedung Kantor/Sudin Lurah/Camat; dan
(3) Percepatanan Penurunan dan Penegahan Stunting.

oo. Kota Administrasi Jakarta Timur

Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan pelaksana Unsur Kekhususan Kota Administrasi. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
(3) Program Pengelolaan Kecamatan;
(4) Program Pengelolaan Kota Administrasi; dan
(5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terdapat 15 Kegiatan, serta 2108 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp1.357.604.063.278 atau 1,80% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;
(2) Rehab Gedung Kantor/Sudin Lurah/Camat; dan
(3) Percepatanan Penurunan dan Penegahan Stunting.

pp. **Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu**

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan pelaksana Unsur Kekhususan Kabupaten Administrasi. Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan program sebagai berikut:

(1) Program Kepegawaian Daerah;
(2) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
(3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
(4) Program Pembinaan Perpustakaan;
(5) Program Penanganan Bencana;
(6) Program Pengelolaan Arsip;
(7) Program Pengelolaan Keselamatan Hayati (Kehati);
(8) Program Pengelolaan Kecamatan;

(9) Program Pengelolaan Kota Administrasi;

(10) Program Pengembangan Daya Saing Kelautan;

(11) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;

(12) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;

(13) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan;

(14) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan

(15) Program Penyelenggaraan Jalan.

Terdapat 32 Kegiatan, serta 294 Subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 240,593,735,706 atau 0.32% dari total pagu belanja daerah.

Prioritas belanja antara lain:

(1) Belanja Wajib dan Mengikat;

(2) Rehab Gedung Kantor/Rudin Lurah/Camat dan Gedung SKKT;

(3) Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

(4) Penataan RTH Makam; dan

(5) Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting.

5.4.3 Rekapitulasi Renja berdasarkan Prioritas Nasional (Asta Cita)

Alokasi anggaran belanja daerah tahun 2025 untuk mendukung Prioritas Nasional (Asta Cita) sebesar Rp.37,23 Triliun atau 49% dari Belanja Daerah, meliputi :

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;

b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;

c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;

d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;

e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;

f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;

g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan

h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Lebih lanjut terhadap alokasi anggaran belanja daerah tahun 2025 dalam mendukung Asta Cita dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.26
Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 yang Mendukung Asta Cita

Kode	Prioritas Nasional	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	8.960.130.430

Kode	Prioritas Nasional	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Ekonomi Maju Berbasis Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	8.888.419.791.822
1.3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agroindustri Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	11.333.512.981.279
1.4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	14.674.603.436.251
1.5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	15.366.401.134
1.6	Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2.334.787.898.282
1.7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	2.669.216.429.545
1.8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	2.698.693.458.870

Sumber: Hasil Input, 2024 (Sintaks)

5.4.4 Rekapitulasi Renja berdasarkan Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah

Terdapat 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah di Tahun 2025 dengan alokasi anggaran Rp 34,75 Triliun atau 46% dari Belanja Daerah, meliputi:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota, dengan fokus:

1) Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik, antara lain:
- peningkatan rasio masyarakat yang menggunakan transportasi publik;
- memperpendek waktu yang dibutuhkan masyarakat dalam melakukan perjalanan dari dan menuju pusat-pusat aktivitas/kegiatan;
- penambahan opsi moda transportasi; dan
- peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik.

2) Penanggulangan Banjir, antara lain:
- pengurangan titik lokasi rawan banjir dan penduduk terdampak;
- pengurangan waktu genangan;
- peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pengendali banjir; dan
- implementasi manajemen dan konservasi air.

3) Perbaikan Kualitas Lingkungan, antara lain:
- peningkatan rasio ruang terbuka hijau dan ruang perkotaan yang dapat diakses oleh publik;
- peningkatan kebersihan dan kesarian kota; dan
- peningkatan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan, baik pada kawasan darat maupun perairan dan kepulauan Jakarta.

4) Penanganan Sampah, antara lain:
- peningkatan akses masyarakat/rumah tangga yang terlayani infrastruktur penanganan sampah; dan
- peningkatan persentase daur ulang sampah.

5) Penerapan Energi Baru Terbarukan, antara lain:
   - perluasan penggunaan energi baru terbarukan terhadap pelayanan dan infrastruktur kota; dan
   - peningkatan jumlah produksi energi baru terbarukan.
6) Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum, antara lain:
   - peningkatan akses masyarakat/rumah tangga yang terlayani infrastruktur air bersih, air minum, dan sanitasi; dan
   - peningkatan kualitas produksi air bersih dan air minum.
7) Ketahanan Bencana, antara lain:
   - penguatan ketahanan bencana dengan penerapan strategi mitigasi, adaptasi penanggulangan bencana; dan
   - penanganan dampak bencana.
8) Peningkatan Kualitas Udara, antara lain:
   - peningkatan *Air Quality Index* (AQI);
   - pengurangan sumber-sumber emisi dan polusi; dan
   - penerapan upaya-upaya dalam rangka menurunkan suhu perkotaan.
9) Peningkatan Akses Hunian Layak, antara lain:
   peningkatan ketersediaan perumahan terjangkau untuk MBR sebagai upaya percepatan penanganan kawasan kumuh.

Tabel 5. 27
Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota

Kode	Bidang Urusan	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.1	Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik	7.927.109.035.063
1.2	Penanggulangan Banjir	3.068.785.920.269
1.3	Perbaikan Kualitas Lingkungan	1.302.296.006.893
1.4	Penanganan Sampah	2.926.012.967.385
1.5	Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT)	22.467.703.734
1.6	Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum	67.396.929.677
1.7	Ketahanan Bencana	1.043.657.607.632
1.8	Peningkatan Kualitas Udara	40.034.553.764
1.9	Peningkatan Akses Hunian Layak	3.979.787.345

Sumber: Hasil Input, 2024 (diolah)

b. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, dengan fokus :

1) Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, City Economy, Digitalization*), antara lain:
   - penciptaan roda perekonomian baru dengan memanfaatkan potensi, fasilitas, dan infrastruktur kota, antara lain: pengelolaan ruang laut dan pesisir;
   - penerapan prinsip pengurangan risiko terhadap lingkungan;
   - penyediaan sarana yang mendukung fleksibilitas kerja; dan
   - transformasi kegiatan ekonomi melalui penerapan teknologi digital.
2) Peningkatan Daya Saing Ekonomi, antara lain:
   - praktik industri berkelanjutan yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular, perdagangan yang kompetitif dan menganjlat potensi lokal; dan
   - penciptaan lingkungan yang mendukung pengembangan bisnis berbasis pengalaman dan nilai tambah.

3) Peningkatan Investasi Daerah, antara lain:
   - peningkatan kemudahan dan perizinan berusaha; dan
   - peningkatan promosi proyek pembangunan sebagai upaya alternatif pendapatan lainnya.
4) Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction*, antara lain:
   - revitalisasi situs budaya dan sejarah untuk promosi warisan kota sebagai tujuan wisata yang dinamis;
   - kolaborasi bersama *stakeholder* untuk menghidupkan *event-event* pariwisata yang berkualitas;
   - pembentukan konsep pariwisata terintegrasi melalui optimalisasi potensi wisata perkotaan; dan
   - peningkatan perpaduan budaya dan ekonomi kreatif melalui fasilitas-fasilitas yang mendorong interaksi komunitas.
5) Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja, antara lain:
   - peningkatan kesempatan kerja melalui penciptaan lingkungan yang mendukung bagi penyerapan tenaga kerja; dan
   - peningkatan kapasitas SDM sesuai keahlian dan kebutuhan pasar kerja, baik formal maupun informal.

Tabel 5.28
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Kode	Bidang Urusan	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)
2.1	Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalisasi*)	4.583.814.653
2.2	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	128.407.225.854
2.3	Peningkatan Investasi Daerah	18.408.778.488
2.4	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction*	407.333.649.338
2.5	Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja	183.220.605.399

Sumber: Hasil Input, 2024 (diolah)

c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dengan fokus:

1) Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi, antara lain:
   - peningkatan jumlah penduduk dengan gelar akademis.
2) Percepatan Penuntasan dan Pencegahan Stunting, antara lain:
   - penurunan angka prevalensi stunting;
   - monitoring perkembangan dan perbaikan gizi anak mulai usia dini, ibu mengandung, dan calon pengantin; dan
   - peningkatan intervensi sensitif melalui perbaikan kualitas lingkungan dan akses layanan dasar.
3) Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan, antara lain melalui:
   - peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan-kegiatan padat karya; dan
   - penurunan beban pengeluaran masyarakat melalui subsidi dan bantuan sosial dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat.
4) Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial, antara lain melalui:
   - peningkatan ketepatan sasaran penerima jaminan kesehatan dan jaminan sosial pada masyarakat Jakarta.
5) Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, antara lain:
   - peningkatan akses pendidikan di semua jenjang;

- peningkatan sarana prasarana pendidikan;
- penguatan pendidikan vokasi berbasis kerja sama dunia usaha dan industri; dan
- peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

6) Penguatan Ketahanan Pangan, antara lain melalui :
- penguatan kemandirian pangan melalui pemanfaatan lahan non produktif menjadi produktif di perkotaan maupun berbasis pesisir dan kepulauan; dan
- peningkatan produksi pangan berbasis masyarakat.

Tabel 5.29
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kode	Bidang Urusan	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)
3.2	Percepatan Penurunanan dan Pencegahan Stunting	1.877.627.395.993
3.3	Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1.336.317.114.806
3.4	Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial	1.741.499.476.274
3.5	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	9.636.666.679.117
3.6	Penguatan Ketahanan Pangan	804.271.023.063

Sumber: Hasil Input, 2024 (diolah)

d. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, dengan fokus:

1) Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik, antara lain:
- peningkatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang mengintegrasikan seluruh layanan publik.

2) Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik, antara lain:
- peningkatan pelayanan publik berfokus pada peningkatan kapasitas SDM pelayan publik, sarana dan prasarana layanan publik;
- penyederhanaan proses birokrasi; dan
- peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.

3) Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif, antara lain:
- peningkatan pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan dengan mengembangkan platform layanan digital; dan
- peningkatan sarana prasarana (jaringan komunikasi) dalam mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif.

4) Penciptaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas, antara lain:
- pemanfaatan riset dan inovasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tabel 5. 30
Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif

Kode	Bidang Urusan	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)
4.1	Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	304.467.881.662
4.2	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik	806.399.173.805
4.2	Penggunaan TIK dalam mendorong Jakarta Menjadi Kota Kreatif	254.408.805.321

Sumber: Hasil Input, 2024 (diolah)

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas capaian dan proyeksi terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Target kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2025 mengacu pada hasil capaian kinerja tahun 2024 serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis yang terjadi saat ini. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah itu sendiri merupakan capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome pembangunan daerah setiap tahunnya. Capaian indikator sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Oleh karena itu, setiap daerah diharapkan dapat menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar kondisi kinerja pembangunan daerah yang diinginkan pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah dapat tercapai.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran, serta tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Selain berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah, indikator kinerja juga dapat memberikan gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan diukur ketercapaiannya pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin terjaganya aspek akuntabilitas pencapaian kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa kinerja diukur dengan indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah suatu daerah.

Perkembangan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diawali sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah untuk menggambarkan kinerja kepala daerah, IKU perangkat daerah untuk menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah yang kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebanyak 26 IKU dan 236 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan IKU oleh pemerintah daerah merupakan amanat Peraturan Menteri PAN-RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pasal 3 yang menyebutkan bahwa "Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing". Dua tujuan penetapan IKU di lingkungan instansi pemerintah adalah: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Target IKU Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 telah tercantum dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026, yang mana target tersebut telah disesuaikan

berdasarkan kondisi serta kemampuan DKI Jakarta. IKU digunakan instansi pemerintah untuk perencanaan jangka menengah dan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan pengendalian kinerja. Dalam pelaksanaanya, instansi pemerintah diamanatkan untuk melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, target serta capaian kinerja untuk setiap indikator sangat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, utamanya untuk target kinerja tahun berjalan yang targetnya lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD TW I Tahun 2024, masih ditemukan target kinerja tahun berjalan yang targetnya lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Pada kolom Realisasi 2023 pada Tabel 6.1 di bawah, terdapat 13 indikator sasaran yang realisasi capaiannya telah mendekati dan/atau melebihi target di tahun 2024. Kondisi tersebut mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, bahwa pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan masih belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikarenakan penetapan target kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, dan dalam rangka mendorong ketercapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, telah ditetapkan Keputusan Gubernur DKI Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 pada Bulan No. 2024. Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud, mengatur target indikator sasaran baru (target yang sudah mempertimbangkan realisasi kinerja tahun 2023) untuk tahun 2024. Keputusan Gubernur tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang menginstruksikan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian target kinerja IKU. Adapun IKU Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1
Target dan Realisasi TW I Tahun 2024 Indikator Kinerja Utama Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2023	Target 2024		Target 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	67,6*	N/A	66	71	67
2	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7,18**	N/A	7,61	-	7,93
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,11***	83,55	81,77	83,33	81,99
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,54**	82,67	83	-	84
5	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	Persen	68,76***	77,24	69,34	77,24	69,94
6	Persentase Penjelajah Penduduk Menggunakan	Persen	14,76***	18,88	20,97	-	21,87

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2023	Target 2024		Target 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Moda Transportasi Publik						
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54,43***	54,57	55,43	-	55,93
8	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	18,5****	25,4	20	25,4	29,5
9	Indeks Sanitasi	Indeks	60,43***	61,31	59,66	-	59,16
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,35***	4,96	5,40 - 6,20	4,8	5,60 - 6,40
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,51***	6,53	7,51	6,53	7,61
12	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,67***	4,44	3,79	-	3,35
13	Rasio Gini	Koefisien	0,411***	0,431	0,410	-	0,410
14	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	1,37***	0,57	0,88	0,5	0,83
15	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,962***	3,97	3,98	4,01	4,01
16	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,12***	12,39	12,16	-	12,18
17	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,01***	75,81	73,32	75,81	73,42
18	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	16,8***	17,6	13,2	-	12,7
19	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,84***	95,24	95,14	-	95,24
20	Indeks Demokrasi	Indeks	76,07**	82,13	77,07	82,13	77,32
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,3***	91,70	88,6	91,08	88,7
22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,47***	4,21	3,50	4,21	3,97
23	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	80,1 (A)***	81,06 (A)	84 (A)	-	BT (A)
24	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	68,7	76,96	73	-	80
25	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP**	WTP	WTP	-	WTP
26	Indeks Sistem Merit	Indeks	310,5***	335,5	335,5	350,5	335,5

Catatan: * Kondisi tahun 2021
** Kondisi tahun 2022
*** Kondisi tahun 2023
**** Kondisi tahun 2022

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (2024); Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kriteria TPP I Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta (2024)

Terdapat 13 indikator sasaran Provinsi DKI Jakarta mengalami penyesuaian target capaian di tahun 2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 6.1 di atas. Dari 13 indikator sasaran, target tahun 2024 di 8 (delapan) indikator sasaran disamakan dengan realisasi target kinerja di tahun 2023 dan 1 (satu) indikator sasaran targetnya ditetapkan melebihi realisasi target kinerja di tahun 2023, yaitu Indeks Daya Saing Daerah. Penyesuaian target tersebut telah ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Forum Asisten Sekretaris Daerah serta koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku koordinator utama.

6.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang menjadi salah satu indikator IKU, merupakan indikator yang disusun berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah, sehingga dalam pelaksanaannya IKK disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Adapun capaian setiap IKK yang nantinya disusun dalam Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) bertujuan untuk melihat seberapa jauh suatu daerah mampu melaksanakan urusan yang telah didelegasikan oleh Pemerintah Pusat. IKK di Provinsi DKI Jakarta disebut sebagai Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:

1. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**
   Tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah, tidak terkecuali Provinsi DKI Jakarta. Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada hakekatnya harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Aspek Kesejahteraan Masyarakat dalam IKK Provinsi DKI Jakarta menganalisis kinerja yang dilakukan terhadap beberapa indikator, yaitu Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, IPM, dan TPT.
2. **Aspek Daya Saing Daerah**
   Daya saing menjadi isu utama dalam pembangunan daerah, begitu pula dengan Provinsi DKI Jakarta "Berdaya Saing Global" menjadi visi jangka panjang Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005 – 2025. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, kota, daerah, wilayah atau negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Aspek Daya Saing Daerah dalam IKK Provinsi DKI Jakarta menganalisis kinerja yang dilakukan terhadap beberapa indikator, yaitu Realisasi Nilai Investasi, Nilai Aspek Ekosistem Inovasi, dan Nilai Budaya Literasi.
3. **Aspek Pelayanan Umum**
   Pelayanan umum menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahkan perannya menjadi cukup besar karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, Aspek Pelayanan Umum dalam IKK Provinsi DKI Jakarta menganalisis kinerja terhadap beberapa indikator yang terbagi ke dalam 8 (delapan) kategori, yaitu indikator terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan, Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Pemerintahan Umum, dan Urusan Kewilayahan.

Adapun penetapan IKK atau Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pusat	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPJP)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1.	Pertumbuhan PDRB	Persen	2,66	4,96	5,4 - 6,2	4,8	5,6 - 6,4
2.	Laju Inflasi	Persen	1,23	2,08	2,5 ± 1	-	2,5 ± 1
3.	Rasio Gini	Koefisien	0,411	0,431	0,411	-	0,41
4.	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,67	4,44	4,13	3,79	3,25
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,11	83,05	81,55	83,55	81,89
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,51	6,53	6,21	6,33	7,61
B.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1.	Realisasi Nilai Investasi	Triliun Rp	108,3	-**	114	186,7	126
2.	Nilai Pilar Kapasitas Inovasi	Nilai	4,189	-**	4,19	4,2	4,21
3.	Nilai Budaya Literasi	Nilai	71,2	-**	71,3	71,4	71,5
C.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1.	**PENDIDIKAN**						
1.1	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persen	80,97	72,3	100	-	100
1.2	Jumlah Anak Usia 4-18 (tidak/belum pernah bersekolah) yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persen	38,82	68,87	100	-	100
1.3	Tingkat Pengangguran Lulusan SMK	Persen	22,34	83,07	30	91,59	45
1.4	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	56,38	72,37	100	-	100
1.5	Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	99,1	98,83	100	-	100
1.6	Persentase guru profesional	Persen	86,3	87,49	87,4	88,5	88,6
1.7	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persen	72,16	82,84	72,37	72,56	72,75
1.8	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) minimum kompetensi minimum	Nilai	67,33	81,95	68,78	69,93	71,09

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)
1.9	Persentase sesuai dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Nilai	60,17	63,24	61,33	62,5	63,67
2	KESEHATAN						
2.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	0	3	3	-	4
2.2	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Persen	100	100	100	-	100
2.3	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar	Persen	0	67	67	-	100
2.4	Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	0	100	100	-	100
2.5	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,49	0,6	0,58	0,58	0,61
2.6	Angka Kematian Bayi (AKB)	Rate	16,49	43,56	15	14	12
2.7	Angka Kematian Neonatal (AKN)	Rate	1,33	2,6	1,31	1,3	1,29
2.8	Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persen	0	100	100	-	100
2.9	Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan	Persen	100	109	100	-	100
2.10	Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)	Persen	0	56,33	20	40	60
2.11	Persentase Pemenuhan Standar Pemberdayaan, Rehabilitasi, dan/atau	Persen	100	92,47	100	-	100

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)
	Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya						
2.12	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	98,59	98,56	98	-	98
2.13	Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan	Persen	0	100	100	-	100
2.14	Rata Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)	Persen	0	82,84	60	-	65
2.15	Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan	Persen	0	97,22	85	89	100
2.16	Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berjenjang Nasional	Persen	0	50	50	60	70
2.17	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	Persen	39	40	40	45	50
2.18	Persentase Sarana Alat Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan Cara Pengelolaan dan Distribusi Alat Kesehatan yang Baik	Persen	0	44,61	40	45	50
2.19	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar	Persen	67	68,5	67	69	71
2.20	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Persen	65,87	94,88	60	62	65
2.21	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Penimbangan Pelayanan	Unit	0	115	44	88	132

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
3.1	Peningkatan kapasitas tampungan air	m^3	1.510.000.000	269.355	233.600	682000	1.883.600
3.2	Persentase luas saluran/sistem polder yang tertangani	Persen	10,83	1,36	1,36	8,78	0,78
3.3	Persentase Penduduk di Kepulauan Seribu yang bebas dari stunting	Persen	82	68,99	58,2	64,4	88,6
3.4	Persentase penghargaan tanggul kritis di muara baru dan pantai Jakarta	Persen	37	32,61	42	47	52
3.5	Jumlah kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi	liter/detik	21.034	20.836,36	21.482	22984	24.285
3.6	Jumlah debit air limbah yang terolah	m^3/hari	1.285	2.768,80	1.395,60	1370	1.452,70
3.7	Persentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	Persen	85	87,12	88	87	88
3.8	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan	Persen	0	100	95	97	98
3.9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	Indeks	0	4	4	-	4
3.10	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan	Indeks	0	4	4	-	4
3.11	Persentase ketersediaan panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit	Persen	0	91,6	90	-	90
3.12	Persentase penyelenggaraan penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu	Persen	90	97,5	90	-	90

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
4.1	% Unit Rumah Layak yang Terbangun	Persen	0,59	1,32	1,32	1,55	1,79
4.2	% Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Terselenggara	Persen	80,28	81,17	80,94	81,83	84,04
4.3	% PSU Kawasan Permukiman yang ditinggalkan	Persen	5,15	1,327	6,96	9,67	12,38
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
5.1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/ Perkada terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	93,92	94,33	94	94,5	95
5.2	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persen	0,7	0,855	0,84	0,92	1
5.3	Persentase penanganan yang dilaksanakan pada pasca bencana	Persen	100	100	100	-	100
5.4	Persentase pengunjung terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	Persen	100	100	100	-	100
5.5	Persentase Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kebakaran dan Penyelamatan Berbasis	persen	51	61,16	53	55	57
6.	SOSIAL						
6.1	Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Memberikan Pemberdayaan Sosial	Persen	0	79,17	79,3	79,8	80
6.2	Indeks Penegakan HAM Pelaksanaan Sosial	Indeks	0	99,925	100	-	100
6.3	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan	Persen	0	98,78	100	-	100

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)
	Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran)						
8.4	Indeks Penanganan (IPS) Penanganan Bencana	Indeks	0	93,89	100	-	100
8.5	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	100	85	-	85
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
1.	**TENAGA KERJA**						
1.1	Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja	Persen	70	97,95	70	-	70
1.2	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Persen	80	80,99	80	-	80
1.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	385.756.547	400.700.909	399.714.112	403.712.253	407.748.366
1.4	Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan	Persen	85	87,9	87	90	93
1.5	Persentase Tenaga Kerja Mandiri yang berwirausaha, berdaya saing dan Berkelanjutan	Persen	85	90	90	-	90
1.6	Persentase perusahaan yang menerapkan sarana-sarana hubungan industrial	Persen	65	65,47	67,5	70	72,5
1.7	Persentase perusahaan yang memenuhi norma ketenagakerjaan	Persen	80	97	80	-	80
2.	**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
2.1	Persentase OPD dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Persen	80	97	70	75	80
2.2	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	99,3	100	100	-	100
2.3	Persentase pembinaan kepada perempuan dan anak dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga	Persen	0	15	15	20	25

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
2.4	Persentase keluarga yang ditintervensi pemerolehan kesetaraan gender dan anak	Persen	0	100	100	-	100
2.5	Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	60	79,62	60	60	70
2.6	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/ Kota Layak Anak	Persen	0	80	75	77	79
3.	**PANGAN**						
3.1	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	100	100	100	-	100
3.2	Persentase Wilayah Tahan Pangan	Persen	95,45	100	95,45	-	97,72
3.3	Persentase Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya	Persen	99,93	99,94	99,8	-	99,9
4.	**PERTANAHAN**						
4.1	Terselesaikannya tidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan pertahanan di kawasan pemukiman	Persen	0	10	10	10	20
5.	**LINGKUNGAN HIDUP**						
5.1	Peningkatan Inspeksi sistem penanganan pencemaran	sistem	200	3.159	2.710	2750	2.800
5.2	Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan	Persen	0	9,00	1	9	11
5.3	Persentase Dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan tepat waktu	Persen	100	100	100	-	100
5.4	Persentase parameter yang	Persen	73	73,28	74	76,3	77

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)
	memenuhi baku mutu						
5.5	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Pemenuhan Indeks Ruang Terbuka Hijau	Persen	100	100	100	-	100
5.6	Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola	Ton	53	89,88	61	63	69
5.7	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Persen	9	25,57	13	12,5	13
5.8	Jumlah peristiwa yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional	Lokasi	38	46	45	50	54
5.9	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat untuk keterbukaan	Persen	100	100	100	-	100
	Persentase Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	100	100	100	-	100
6.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
6.1	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	99	99,93	99	-	99
6.2	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	99	99,99	99,1	99	99,8
6.3	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	86,71	115,6	89,25	92,86	96,43
6.4	Persentase terwujudnya profil kependudukan	Persen	100	100	100	-	100
7.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
7.1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	90	95,218	91,79	93,83	95,5
8.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						
8.1	Persentase keluarga yang terdata melalui Cerik Jakarta yang	Persen	87	97,88	90	92	93

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)
	berhasil ditumbuhkan						
8.2	Persentase Masyarakat (Keluarga) yang mengetahui informasi program Bangga Kencana dengan cara mengetahui/mendengar/ melihat pesan/ informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan Petugas	Persen	53,6	78,19	56,1	58,6	61,1
8.3	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	14,8	11,7	14,3	13,8	13,3
8.4	Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	Persen	57,16	60,2	58,03	58,99	59,66
8.5	Age Specific Fertility Rate kelompok umur 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	21,85	17,4	21,35	20,85	20,35
8.6	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	tahun	21,7	23,8	22,1	22,5	22,9
9.	**PERHUBUNGAN**						
9.1	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	Penumpang per hari	2.672.975	4.102.277	3.497.155	2972800	4.150.857
9.2	Indeks kelaikan kendaraan angkutan umum per tahun	Indeks	4,42	0	1,61	1,49	1,37
9.3	Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang diberlakukan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk	km/jam	25	26	28	27	28
9.4	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Pelabuhan	1	3	3	1	4
9.5	Persentase bobot usaha angkutan perairan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	28,8	40	40	49,62	60,98

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)
9.6	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan perbatasapian provinsi	Rekomendasi	0	2	2	-	2
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
10.1	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	100	100	-	100
10.2	Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	Perangkat Daerah	51	51	51	-	51
11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
11.1	Persentase Koperasi Aktif yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persen	54	57	57	60	63
11.2	Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persen	40	60	60	60	65
11.3	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	-25	4,62	2	-	3
11.4	Persentase Koperasi konvensional yang bertransformasi digital (modern)	Persen	0,46	0,335	0,47	0,48	0,49
11.5	Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri	Persen	2,19	3,09	2,5	3	3,5
11.6	Persentase UMKM yang terdigitalisasi	Persen	49,7	91,2	70	80	90
12.	PENANAMAN MODAL						
12.1	Nilai komitmen investasi	Nilai	0	72,82	72,5	75	77,5
12.2	Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BUMD, BUMD, dan Swasta	Persen	100	100	100	-	100
12.3	Persentase pengurusan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	Persen	0	100	100	-	100
12.4	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	59	103	80	75	85
12.5	Persentase pemanfaatan izin tepat waktu	Persen	100	100	100	-	100
12.6	Indeks Kepuasan Layanan Pengaduan Sarana Prasarana	Indeks	86	92,29	87	88	89

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Penelitian dan pengembangan						
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
13.1	Persentase Pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditekuninya	Persen	47	59	59	-	59
13.2	Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditekuninya Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	80	65	65	70
13.3	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	Persen	93	96,3	93	93	91
13.4	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	100	75	80	85
13.5	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	Persen	1,67	2,02	2,02	2,18	2,33
13.6	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	8	4,5	0	5,5
14.	STATISTIK						
14.1	Persentase Penyusunan Data Prioritas	Persen	100	100	100	-	100
15.	PERSANDIAN						
15.1	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	98	100	98	-	98
16.	KEBUDAYAAN						
16.1	Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intangible Culture Assets menurut UNESCO	Persen	8,3	8,75	8,64	8,59	9,43

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)
16.2	Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta	Persen	39,64	44,9	41,5	46,8	44,62
16.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya	Persen	5,5	24,55	24,55	24,7	24,99
17.	**PERPUSTAKAAN**						
17.1	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persen	24,5	34,5	24,8	28	28,23
17.2	Rasio keterwakilan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0543	0,0605	0,0588	0,0629	0,0647
17.3	Rasio keterwakilan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0001	0,000498	0,0003	0,0004	0,0005
17.4	Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	Persen	4,9	8,14	5,4	9,9	10,6
17.5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	72,31	72,68	72,61	72,91	73,21
17.6	Persentase Peningkatan Kemanfaatan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	13,34	13,5	14	14,5
17.7	Persentase Capaian Naskah Kompen Karya Cetak dan Karya Rekam yang Menjadi Koleksi Daerah	Persen	0	26,79	25	27,5	30
17.8	Persentase Capaian Naskah Kuno Milik Daerah Yang Diselamatkan	Persen	0	10	10	20	30
18.	**KEARSIPAN**						
18.1	Persentase Ketersediaan Arsip Inaktif Layak	Persen	31,92	37,87	36,93	39,26	42,43
18.2	Persentase lembaga [OPD,BUMD] yang mengelola arsip sesuai dengan SKPK	Persen	59	61,11	61,11	74,07	87,03
18.3	Persentase Ketersediaan Arsip Statis Layak Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	25,03	25	30	40

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)
URUSAN PILIHAN							
1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1.1	Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut	Persen	0	18,49	18,46	18,49	18,52
1.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	115.775	191.352,0 8	100.000	120107	122.509
1.3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3746,72	4.931,03	4,435	4496	4.543
1.4	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persen	69	82	70	71	72
1.5	Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	7.310	24.859,18	14.885,27	15331,8	15.791,75
1.6	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/ Tahun	43,9	46,61	47	46	47,2
2.	PARIWISATA						
2.1	Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan	Usaha Pariwisata	14.345	16.735	16.345	17345	18.345
2.2	Jumlah Pengeluaran Event	Orang	87.693	6.830.186	296.050	304008	313.292
2.3	Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata	Nilai	0	85,83	70	75	80
2.4	Jumlah Pengunjung E-Tourism	Pengunjung Website dan Medsos	2.945.967	8.810.924	3.322.725	3219410	3.312.899
2.5	Nilai Ketertarikan Masyarakat terhadap Pariwisata DKI Jakarta	Nilai	0	93,3	70	79	80
2.6	Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya	Produk	100	267	250	450	650
2.7	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	Orang	3.888	6.888	4.888	5488	6.288
3.	PERTANIAN						
3.1	Persentase Pertumbuhan Ekspor Pertanian	Persen	45	69,2	50	-	50
3.2	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	Persen	45	38,33	50	55	60

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)
3.3	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	Persen	55.5	90	65	70	75
3.4	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies)	Persen	100	100	100	-	100
3.5	Persentase Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persen	65	88.6	65	70	70
3.6	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	0	30	5	-	5
3.7	Persentase Area Lahan yang Terkonsolidi	Persen	85	85	85	-	85
3.8	Persentase Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan	Persen	0	3,55	2,5	-	2,5
3.9	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	Persen	80	100	80	-	80
4.	**KEHUTANAN**						
4.1	Persentase luas hutan yang dikelola	Persen	100	100	100	-	100
4.2	Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Persen	0	100	90	-	90
4.3	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	Persen	0	81,34	80	-	80
4.4	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	Lokasi	0	1	1	2	2
5.	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						
5.1	Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan RLTH	Ton CO2	345.92	810,79	567,84	262.944	1073,84
5.2	Rasio elektrifikasi di Kepulauan Seribu	Persen	100	100	100	-	100
5.3	Persentase Pembangunan	Persen	0	10,5	10	30	60

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)
	Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik						
5.4	Persentase pembangkit dan instalasi ketenagalistrikan yang wajib dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memiliki Sertifikat Laik Operasi	Persen	60	107	60	-	60
5.5	Persentase pemanfaatan pemanfaatan air tanah	Persen	100	100	100	-	100
6.	**PERDAGANGAN**						
6.1	Persentase Pemanfaatan IRA	Persen	55,38	60	60	-	62
6.2	Persentase verifikasi permohonan Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan melalui *Online Single Submission Risk Based Approached* (OSS-RBA)	Persen	0	77	70	-	80
6.6	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Nilai	14	14	14	-	14
6.4	Nilai ekspor non migas DKI Jakarta	USD	11.203. 720.000	12.085. 650.000	11.427. 794.400	11.562. 100.000	11.857. 498.057
6.5	Persentase inisiasi/temuan instrumen yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	-	100
6.6	Persentase produk hasil uji yang sesuai standar mutu SNI atau standar teknis lainnya	Persen	76	55,24	80	83	82
6.7	Persentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Utera Uteng	Persen	100	100	100	-	100
6.8	Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya	Persen	15	56	20	30	40
7.	**PERINDUSTRIAN**						
7.1	Persentase Peningkatan Omset Industri Kecil dan Menengah	Persen	2	9,500	3,5	4	4,5
7.2	Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya	Persen	0	83,72	50	55	60

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)
7.3	Persentase Indeks Tertib Peralatan	Persen	50	55	55	60	65
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN							
1.	**PERENCANAAN**						
1.1	Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	0	87,22	75	80	85
1.2	Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	0	88,46	75	80	85
1.3	Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	0	97,05	75	80	85
1.4	Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	0	97,5	75	80	85
2.	**KEUANGAN**						
2.1	Persentase Akurasi dan Penyelesaian Dokumen APBD	Persen	100	100	100	-	100
2.2	Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD	Persen	100	100	100	-	100
2.3	Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	Persen	100	100	100	-	100
2.4	Persentase Penyelesaian Penyusunan Standar Harga tepat waktu	Persen	100	100	100	-	100
2.5	Persentase pemanfaatan BMD	Persen	0	10	10	15	20
2.6	Indeks Kepatuhan Tertib Aset	Indeks	0	4	4	-	4
2.7	Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset	Persen	100	100	100	-	100
2.8	Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	Persen	97,83	101,25	100	-	100

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)
2.9.	Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	Persen	80,56	100	100	-	100
3.	**KEPEGAWAIAN**						
3.1	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit	Nilai	110	110	110	-	110
3.2	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit	Nilai	17,5	37,5	25	37,5	25
3.3	Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit	Nilai	42,03	52,5	30,03	59,53	59,53
3.4	Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit	Nilai	110	112,5	110	112,5	110
3.5	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi	Indeks	0	3,5	3	-	4
3.6	Persentase Pegawai Tugas Belajar yang lulus tepat waktu	Persen	80	100	80	100	90
4.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						
4.1	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	Nilai	6	8	6	-	6
4.2	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	Nilai	10	10	10	-	10
4.3	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan	Nilai	7,5	10	7,5	-	7,5
4.4	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	Nilai	7,5	10	7,5	-	7,5

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.5	Persentase Diklat yang dilaksanakan BPSDM sesuai dengan kebutuhan	Persen	0	74,58	60	62	64
5.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
5.1	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persen	0	40	40	60	80
URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN							
1	SEKRETARIAT DAERAH						
1.1	Persentase pengadaan Barang/Jasa tepat waktu	Persen	80	82,39	82,5	85	87,5
1.2	Persentase Perjak Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan	Persen	100	**	100	-	100
1.3	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	7,03	N/A	7,16	7,2	7,24
1.4	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	11,83	N/A	12,11	12,12	12,13
1.5	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Manajemen Perubahan	Nilai	4,82	N/A	4,83	4,85	4,86
1.6	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	Persen	100	100	100	-	80
1.7	Persentase Penanganan Perkara Litigasi yang diselesaikan	Persen	100	100	100	-	100
1.8	Persentase Penanganan Perkara Non Litigasi yang diselesaikan	Persen	100	100	100	-	100
1.9	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	Nilai	88	91	91	93	93
1.10	Persentase Kebijakan sesuai dengan perattivan	Persen	100	100	100	-	100

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(10)
2.	SEKRETARIAT DPRD						
2.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Indeks	4	4	4	-	4
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
1.	INSPEKTORAT DAERAH						
1.1	Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan Eksternal	Persen	86	91	91	92	95
1.2	Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai	2	N/A	3,25	3,3	3,75
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
1.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1.1	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	50	90,5	90,5	91	91,5
1.2	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	50	90,5	90,5	-	91,5
1.3	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik	Persen	50	90,5	90,5	91	91,5
1.4	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	50	90,5	90,5	91	91,5
1.5	Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	Persen	50	90,5	90,5	91	91,5
1.6	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait	Persen	50	90,5	90,5	91	91,5

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pemda	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Realisasi 2023	2024		Target Tahun 2025 (RPD)
					Target RPD	Target Penyesuaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						
1.7	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	Persen	50	52,5	50,5	31	51,5
1.8	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	50	50,5	50,5	-	51,5
URUSAN KEWILAYAHAN							
I	KECAMATAN ADMINISTRASI						
1.1	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan PKDM)	Indeks	4	4	4	-	4
1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSV	Indeks	4	4	4	-	4
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PEK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Indeks	4	4	4	-	4
1.4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	4	-	4

Catatan: *Indikator sasaran tidak memiliki target di TW I tahun 2024
**Indikator sasaran tidak memiliki realisasi di TW I tahun 2024
***Capaian progres dijumlahkan

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026; Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi TW I Tahun 2024; Laporan Evaluasi Pelaporan Kinerja TW I Tahun 2024 (2024)

Berdasarkan tabel 6.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2023, capaian kinerja untuk 142 indikator telah melebihi besaran target untuk tahun 2024. Oleh karena itu, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam rangka menindaklanjuti hasil LHE AKIP Tahun 2023 dan sebagai upaya meningkatkan capaian Nilai AKIP Tahun 2024, seluruh Kepala Perangkat Daerah diinstruksikan untuk melakukan penyesuaian target kinerja indikator sasaran (Instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024). Adapun sebanyak 142 indikator dari 236 indikator sasaran mengalami penyesuaian target kinerja untuk tahun 2024 sebagaimana amanat Inseksda Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024. Dari 3 (tiga) aspek pembangunan daerah, indikator sasaran yang mengalami penyesuaian hanya tersebar di 2 (dua) aspek, yaitu Aspek Daya Saing Daerah dan Aspek Pelayanan Umum. Pada Aspek Daya Saing Daerah, seluruh indikator

sasaran mengalami penyesuaian target kinerja, sedangkan pada Aspek Pelayanan Umum, dari 8 (delapan) bidang urusan sebanyak 4 (empat) bidang urusan mengalami penyesuaian target kinerja di beberapa indikator sasaran, yaitu:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar:
   Dari 6 (enam) bidang urusan pada Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, terdapat 1 (satu) bidang urusan, yaitu Perumahan yang seluruh indikator sasarannya mengalami penyesuaian target kinerja di tahun 2024.
b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar:
   Dari 18 bidang urusan pada Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, terdapat 6 (enam) bidang urusan yang seluruh indikator sasarannya mengalami penyesuaian target tahun 2024, yaitu Pertanahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan.
c. Urusan Pilihan:
   Dari 7 (tujuh) bidang urusan pada Urusan Pilihan, terdapat 3 (tiga) bidang urusan, yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, dan Perindustrian yang seluruh indikator sasarannya mengalami penyesuaian target kinerja di tahun 2024.
d. Urusan Penunjang Pemerintahan:
   Dari 5 (lima) bidang urusan pada Urusan Penunjang Pemerintahan, terdapat 1 (satu) bidang urusan, yaitu Perencanaan yang seluruh indikator sasarannya mengalami penyesuaian target kinerja di tahun 2024.

6.3 Sinergitas Pembangunan Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N), proses perencanaan dan penganggaran diharapkan memiliki sinergitas, baik Pusat, Daerah, maupun Pusat dengan Daerah. Sinergitas sebagaimana dimaksud mengandung arti bahwa Prioritas Pembangunan perlu dijabarkan ke dalam perencanaan menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir yang dilaksanakan melalui keterpaduan para pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Adapun upaya untuk membangun sinergitas tersebut, didasarkan pada 2 (dua) pendekatan, yaitu sinergitas horizontal dan sinergitas vertikal. Sinergitas horizontal merupakan keterpaduan antara upaya peningkatan daya beli, partisipasi sekolah, dan kesehatan. Sedangkan, sinergitas vertikal merupakan keterpaduan strategis antara kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran harus mempersiapkan pelaksanaan dan menyinergikan capaian prioritas sasaran nasional dengan program-program pembangunan daerah serta melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Proses koordinasi antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga, kemudian dijelaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang pelaksanaan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) merupakan salah satu bentuk rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Salah satu tujuan pelaksanaan rapat koordinasi teknis tersebut adalah sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta pembangunan antar Daerah (Pasal 308 huruf a). Rakortekrenbang dilaksanakan melalui koordinasi bersama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Pelaksanaan Rakortekrenbang ditunjukan untuk menghasilkan suatu kesepakatan antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga terkait rancana target kinerja sasaran, program pembangunan, serta faktor pendorong dan penghambat dalam target kinerja sasaran tersebut. Hasil kesepakatan pembahasan dalam Rakortekrenbang sebagaimana amanat

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dituangkan ke dalam Berita Acara kesepakatan. Adapun hasil kesepakatan pembahasan target indikator makro pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3
Hasil Kesepakatan Pembahasan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah

No	Indikator Makro	Sasaran Awal RKP 2025: untuk Agregat Nasional	Sasaran Awal RKP 2025: untuk Provinsi	Sasaran RPJMD Provinsi 2025	Sasaran Awal RKPD Provinsi 2025	Hasil Kesepakatan Rakortek 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PDRB per Kapita	61.96 – 62.08	354,13 – 355,12	0	0	354,13 – 355,12
2.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	19,34	12,31 – 12,37	0	0	11,87
3.	Tingkat Kemiskinan	6,0 – 7,0	1,39 – 1,89	3,35	3,25	3,55 – 3,85
4.	Rasio Gini	0,379 – 0,382	0,429-0,430	0,41	0,41	0,429 – 0,430
5.	Kontribusi PDRB Pariwisata	0	16,19	0	0	16,52
6.	Indeks Modal Manusia	0	0	0	0	0,62
7.	Indikator Blue Economy Indeks (IBEI)	0	26,9	0	0	26,9
8.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	0	8,21	0	0	14,65
9.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	43,19	62,71	0	0	62,71
10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,50 – 5,60	4,98 – 5,23	5,60 – 6,40	5,60 – 6,40	4,98 – 5,21
11.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	22	27	0	0	27
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,80 – 5,00	5,34 – 5,92	7,61	7,61	5,34 – 6,40
13.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,50	50,38	0	0	50,38
14.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0	3,09	0	0	4,89
15.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	0	2266,08	0	0	1,0 juta
16.	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	7,92	1,41	0	0	1,41
17.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1	7,75	0	0	7,69
18.	Ekspor Barang dan Jasa	26,0	13,4	0	0	18,51

No	Indikator Makro	Sasaran Awal RKP 2025 untuk Agregat Nasional	Sasaran Awal RKP 2025 untuk Provinsi	Sasaran RPJMD Provinsi 2025	Sasaran Awal RKPD Provinsi 2025	Hasil Kesepakatan Rakortek 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	N/A	9,46	0	0	9,46
20.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,8	34,5	0	0	34,5
21.	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	0	70	0	0	70
22.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,68	4,09	0	0	4,05
23.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	5,12	4,49	0	0	4,35
24.	Indeks Integritas Nasional	74,52	76,82	0	0	76,82
25.	Indeks Demokrasi Indonesia	83,05	80,01 - 100	0	0	83,00 – 87,39
26.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,5	1,3	0	0	1,5
27.	Tingkat Inflasi	1,5 – 3,5	2,1 – 3,4	2,5 +/- 1	2,5 +/- 1	2,5 +/- 1
28.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	70,29	42,36 – 42,48	0	0	42,51 – 42,89
29.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,43	0,31 – 0,50	0	0	0,31 – 0,50
30.	Konsumsi Listrik per Kapita	1.356	6.279	0	0	Dibahas Lebih Lanjut
31.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	7,21	1,99	0	0	1,99

Sumber: Berita Acara Hasil Kesepakatan Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

Terdapat 31 target indikator makro pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang dibahas dalam forum Rakortekrenbang tahun 2024. Dari 31 target indikator tersebut, sebanyak 16 target indikator hasil forum Rakortekrenbang disepakati berbeda dari target sasaran awal sebagaimana tercantum dalam dokumen RKP tahun 2025, serta 1 (satu) target indikator, yaitu Konsumsi Listrik per Kapita, masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Selanjutnya, selain penyelarasan terhadap target indikator makro pembangunan, dalam forum Rakortekrenbang terdapat desk urusan yang membahas dan menyepakati target kinerja per masing-masing urusan pemerintahan daerah. Urusan sebagaimana dimaksud sesuai dengan daftar urusan pemerintahan daerah pada UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok urusan pemerintahan daerah, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang terdiri atas 6 (enam) urusan, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yang terdiri dari 16 urusan, dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri dari 8 (delapan) urusan. Sebagaimana Berita Acara Hasil Pembahasan Desk Urusan forum Rakortekrenbang, diketahui bahwa tidak seluruh target indikator urusan mencapai kesepakatan. Untuk target indikator urusan yang belum mencapai kesepakatan, maka target tersebut akan dibahas lebih lanjut pada forum-forum pasca pelaksanaan Rakortekrenbang, antara lain forum fasilitasi rancangan RPJPD dan forum penyusunan RPJMD. Selanjutnya, untuk target indikator urusan yang sampai dengan dokumen RKPD tahun 2025 ini diterapkan masih belum mendapatkan hasil

kesepakatan, maka target indikator tersebut akan ditetapkan kemudian melalui Peraturan atau SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta setelah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Adapun hasil pembahasan target indikator untuk setiap urusan pemerintahan daerah tahun 2025 di Provinsi DKI Jakarta, dapat dilihat lebih detail pada tabel sebagaimana berikut.

a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

(1) Pendidikan

Tabel 6.4
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	%	100
		2	Nilai kelulusan SMPLB	Nilai	79,81
		3	Nilai kelulusan SMALB	Nilai	79,36
		4	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%	100
		5	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	82,97
		6	Nilai kelulusan SMALB	Nilai	79,93
		7	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	%	100
		8	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	37,21
		9	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,21
		10	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,46
		11	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	92,46
		12	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	%	86,31
		13	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,73
		14	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	-
		15	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	60,06
		16	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65,58
		17	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	76,26

No	Outcome Prioritas		Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		18	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	45,47
		19	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	%	100
		20	Nilai inklusivitas SMPLB	Nilai	73,36
		21	Nilai kesetaraan SMA	Nilai	88,79
		22	Nilai kesetaraan SMK	Nilai	84,86
		23	Nilai kesetaraan SDLB	Nilai	-
		24	Nilai kesetaraan SMPLB	Nilai	83,65
		25	Nilai kebinekaan SMA	Nilai	82,34
		26	Nilai kebinekaan SMK	Nilai	77,74
		27	Nilai kebinekaan SDLB	Nilai	76,4
		28	Nilai kebinekaan SMALB	Nilai	79,16
		29	Nilai inklusivitas SMA	Nilai	65,08
		30	Nilai inklusivitas SMK	Nilai	63,54
		31	Nilai inklusivitas SDLB	Nilai	64,04

Sumber: Diolah Antara Hasil Kesepakatan Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(2) Kesehatan

Tabel 6.5
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Outcome Prioritas		Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
a	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1	Penerimaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berada Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100
		2	Penerimaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100
b	Penurunan Prevalensi Stunting (Lintas K/L)	1	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	%	12,7
c	Keberhasilan Pengobatan TB (TBC Sucses Rate)	1	Penemuan Kasus TBC	%	90
d	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	30
e	Ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	1	Persentase (sasaran) dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	%	100
f	Rumah Sakit dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna	1	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	82,14

No	Outcome Prioritas	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rekonsiliasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1 Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar	%	100

Sumber: Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Rekonsiliasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 6.6
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rekonsiliasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a	Meningkatkan Ketahanan Air Nasional	1 Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	Km	4,6
		2 Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	m³/ detik	0,3
		3 Luas layanan irigasi multifungsi/as yang dibangun dan/ atau ditingkatkan padi dan non padi	Ha	0
		4 Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dipodernisasi	Ha.	0
b	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	1 Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	0
		2 Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	0
		3 Penetapan RTRW	Perda/ Perkada	0
		4 Penetapan RDTR	Perda/ Perkada	1
c	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi	1
		2 Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	0
d	Meningkatnya konektivitas wilayah	1 Persentase kondisi mantap jalan provinsi	%	97,3
e	Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah	1 Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang	375
		2 Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	50
		3 Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	70
		4 Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi	%	60
		5 Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	%	70
		6 Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/ teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	50
f	Mewujudkan Ketahanan Energi, Air	1 Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	81,95

No	Outcome Prioritas		Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rekortekrenbang
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	dan Ketersediaan Pangan	2	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	81,95
9	Terselenggaranya Bangunan Gedung yang Tertib dan Andal	1	Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	%	100
11	Lingkungan Hidup Berkualitas	1	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	31
		2	Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	0,1
		3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	%	22,73
1	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap hunian dengan ketahanan bangunan lantai, lantai, dinding	1	Persentase kab/kot yang menerbitkan persetujuan bangunan gedung (%)	%	-

Sumber : Buku Jasa Hasil Kegiatan Rekortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 6.7
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No	Outcome Prioritas		Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rekortekrenbang
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
a	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Presentase	40,36

Sumber : Buku Jasa Hasil Kegiatan Rekortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 6.8
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Outcome Prioritas		Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rekortekrenbang
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
a	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	1	Persentase penanganan penanganan pasca bencana	%	100
		2	Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat	Dokumen	1
		3	Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima SPM, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan penanggulangan/ gladi	Dokumen	1

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortek triwulan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi		
		4	Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya	%	30
		5	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100
		6	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan ditetapkan sah/legal	%	100
		7	Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana	Daerah	-
		8	Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Provinsi	-
		9	Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengoperasionalan penguranagan risiko bencana	Provinsi	-
b	Meningkatnya pelayanan trantibum yang terintegrasi	1	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	Daerah	7
		2	Terwujudnya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"	Daerah	7
c	Meningkatnya pelayanan kebakaran yang terintegrasi	1	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar"	Daerah	7
d	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	1	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100
		2	Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat	Dokumen	1
		3	Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data sasaran penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan penyegaran/ gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi	Dokumen	1
		4	Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya	%	30
		5	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100
		6	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan ditetapkan sah/legal	%	100

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Bakorteknolang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		7	Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana	Daerah	-
		8	Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Provinsi	-
		9	Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	Provinsi	-
e	Meningkatnya pelayanan trantibum yang terintegrasi	1	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	Daerah	-
		2	Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"	Daerah	7
f	Meningkatnya pelayanan kebakaran yang terintegrasi	1	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar	Daerah	-

Sumber: Berita Acara Hasil Kesepakatan Bakorteknolang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (2024)

(6) Sosial

Tabel 6.9
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Sosial Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Bakorteknolang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	1	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
		2	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
		3	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
		4	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
		5	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
b	Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Pengentasan Kemiskinan	1	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100
c	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Kesejahteraan Sosial	1	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100

No	Outcome Prioritas		Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		2	Persentase (%) EDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100
d	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin dan Rentan	1	Jumlah PM yang Meningkat Pendapatannya	Orang	1743
e	Berkurang Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1	Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100

Sumber: Berita Acara Hasil Rangkaian Rakorrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

(1) Tenaga Kerja

Tabel 6.10
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025

No.	Outcome Prioritas		Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	1	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	80
		2	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	70
B	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	1	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	Laporan	2
		2	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	Orang	5500
		3	Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	Orang	450000
		4	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	32100
		5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	%	80
C	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	1	Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online	Perusahaan	2520
		2	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	126000
		3	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	1096850

No.	Outcome Prioritas	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D	Meningkatnya pemanfaatan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	1 Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD	%	25

Sumber: Berita Acara Hasil Kesepakatan Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 6.11
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	1 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100
		2 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	75
B	Menurunnya ketimpangan gender, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, meningkatnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,24
		2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,30
		3 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100
C	Meningkatnya kualitas dan efektivitas pengelenggaraan PUG & KPA dalam pembangunan di daerah	1 Provinsi Layak Anak (Provila)	Nilai	100
		2 Nilai Pengarusutamaan Gender Ekspreya	Nilai	801
		3 Persentase ARG	%	10

Sumber: Berita Acara Hasil Kesepakatan Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(3) Pangan

Tabel 6.12
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Pangan Tahun 2025

No.	Outcome Prioritas	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	1 Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	-
B	Terwujudnya keterjangan pangan dan gizi	1 Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	0

No.	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
C	Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1	Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan	%	6
D	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	1	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	93,3
E	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan	1	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	99,8

Sumber: Bunda Arsip Hasil Kompilasi Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(4) Pertanahan

Tabel 6.13
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Pertanahan Tahun 2025

No.	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
A	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	1	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	1500
		2	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang Tanah	9

Sumber: Bunda Arsip Hasil Kompilasi Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(5) Lingkungan Hidup

Tabel 6.14
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025

No.	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
A	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0,618
B	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	75
C	Peningkatan Penurunan Emisi GRK	1	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	25,4
D	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	51,39

Sumber: Bunda Arsip Hasil Kompilasi Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 6.15
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No.	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
A	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100
		2	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17th	%	99,5
		3	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100
		4	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan	%	100
		5	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	%	99
B	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	1	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	30
C	Terpenuhinya Data Kependudukan yang terintegrasi antar lembaga	1	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen	2

Sumber : Berita Acara Hasil Kesepakatan Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 6.16
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64,61
b	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak Per Wanita	2,10
		2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)	%	61,1
		3	Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	12
		4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,4

Sumber : Berita Acara Hasil Kesepakatan Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(8) Perhubungan

Tabel 6.17
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Perhubungan Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Terwujudnya Konektivitas Nasional	1	Kasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Kasio	0,5418
b	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	93,73
c	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	1	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Perusahaan	1
		2	Jumlah perlintasan Kereta Api yang Telah Ditangani Pada Jalan Provinsi	Unit	0
		3	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	Persentase	100

(9) Komunikasi dan Informatika

Tabel 6.18
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	1	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas KIM oleh Dinas Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM, Bimtek, pelatihan)	%	85
		2	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	%	95
		3	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Perода yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	%	85
		4	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	100
		5	Persentase angkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	75
b	Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan	1	Persentase Kota/Kabupaten yang berada pada Wilayah Provinsi yang mendapatkan evaluasi program Provinsi Cerdas (Smart Province)	%	100

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		2	Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province)	%	100
		3	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%	100
		4	Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	%	20
		5	Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100
		6	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100
		7	Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	20
		8	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	100
c	Meningkatkan literasi digital dan kemampuan digital mulai dari level pengguna hingga monitor secara menyeluruh	1	Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	100
		2	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	20

Sumber: Kerja Sama Hasil Kesepakatan Rakorekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(10)Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tabel 6.19
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern	1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	7
b	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	1	Pertumbuhan Wirausaha	%	5
		2	Jumlah Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke Formal	%	4
		3	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	4

Sumber: Kerja Sama Hasil Kesepakatan Rakorekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(11)Penanaman Modal

Tabel 6.20
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Penanaman Modal Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 (Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	1)	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	160,75

Sumber: Berita Acara Hasil Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(12)Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 6.21
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 (Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Nilai	1,20
b	Peningkatan partisipasi organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	41,38
c	Peningkatan prestasi olahraga	1	Peningkatan Prestasi Olahraga	Indeks	57,94
d	Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	%	74,68

Sumber: Berita Acara Hasil Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(13)Statistik

Tabel 6.22
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Statistik Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 (Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3,12

Sumber: Berita Acara Hasil Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(14)Persandian

Tabel 6.23
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Persandian Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Bakorteknaldag
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	1	Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi	Orang	3
		2	Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi	Orang	4
		3	Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	1
		4	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	40

Sumber: Berita Acara Hasil Kesepakatan Bakorteknaldag Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(15)Kebudayaan

Tabel 6.24
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Kebudayaan Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Bakorteknaldag
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Kelestarian Cagar Budaya	1	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	60
		2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni	%	1,37
		3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	73,36
		4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	14,36
		5	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	9,05
b	Pemajuan Kebudayaan	1	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,134
		2	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	49,5

Sumber: Berita Acara Hasil Kesepakatan Bakorteknaldag Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(16)Perpustakaan

Tabel 6.25
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Perpustakaan Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Bakorteknaldag
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Peningkatan kegemaran membaca masyarakat	1	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	Nilai	73,21

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
b	Pembangunan literasi masyarakat meningkat	1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Index	80,87

Sumber: Berita Acara Hasil Kesepakatan Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(17)Kearsipan

Tabel 6.26
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Kearsipan Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	91

Sumber: Berita Acara Hasil Kesepakatan Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

(1) Kelautan dan Perikanan

Tabel 6.27
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	1	Kawasan konservasi daerah yang operasional	Ha	200
b	Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab	1	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi)	Provinsi	1
c	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing	1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4543
		2	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	130000
		3	Produksi Garam	Ton	0
d	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang meningkat	1	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/ TH	47
e	Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif	1	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	-

Sumber: Berita Acara Hasil Kesepakatan Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(2) Pariwisata

Tabel 6.28
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Pariwisata Tahun 2025

No	Outcome Prioritas		Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
a	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	1	Rasio PDB Pariwisata	%	4,89
		2	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	34.010.518
		3	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	-

Sumber : Dinas Jakarta Hasil Evaluasi Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(3) Pertanian

Tabel 6.29
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Pertanian Tahun 2025

No	Outcome Prioritas		Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
a	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	1	Persentase wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	%	80,5
		2	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT tanaman perkebunan	%	-
		3	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	0
		4	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	90
		5	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	-
		6	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT tanaman hortikultura	%	0
		7	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT tanaman pangan	%	87
b	Meningkatnya Produksi Pertanian	1	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada	Ton	-
		2	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton	-
		3	Jumlah Produksi Telur	Ton	122
		4	Jumlah Produksi Susu	Ton	4006
		5	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, dll, babi)	Ton	28415
		6	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh	Ton	-
		7	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala	Ton	-
		8	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	-
		9	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	-
		10	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton	-

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		11	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	0,28
		12	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	1,67
		13	Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	Ton	-
		14	Jumlah Produksi Kedelai	Ton	-
		15	Jumlah Produksi Jagung	Ton	-
		16	Jumlah Produksi Padi	Ton	2951

Sumber: Berita Acara Hasil Rangkaian Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(4) Kehutanan

Tabel 6.30
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Kehutanan Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Peningkatan kewenangan usaha KUPS	1	Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial	Rupiah/ Kapita	-
b	Peningkatan kewenangan usaha IUPH	1	Nilai transaksi ekonomi IUPH	Rupiah/ Kapita	96.000.000
c	Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	1	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, Hkm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Ha	0
d	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	1	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	Unit	0
		2	Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya	Ha	20
		3	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Ha	2
e	Rehabilitasi hutan mangrove	1	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi	Ha	3

Sumber: Berita Acara Hasil Rangkaian Rakortekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 6.31
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teralisi Listrik	1	Rasio elektrifikasi	%	100
b	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	1	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%	0,9

c	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	1	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	%	100

Sumber : Buku Angka Hasil Pengolahan Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(6) Perdagangan

Tabel 6.32
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Perdagangan Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi	1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	6
b	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	1	Persentase keperuhan berusaha	%	100
c	Meningkatnya perlindungan konsumen di daerah	1	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100

Sumber : Buku Angka Hasil Pengolahan Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(7) Transmigrasi

Tabel 6.33
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	1	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index	46,10
		2	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Index	57,50

Sumber : Buku Angka Hasil Pengolahan Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

(8) Perindustrian

Tabel 6.34
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Perindustrian Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	4,9
b	Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	1	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Miliar	11
c	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	1	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang	0,566738

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
d	Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	7,7
e	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB	1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	12

Sumber: Bentuk Arsip Hasil Kompilasi Rakorentekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

d. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 6.35
Sinergi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Outcome Prioritas	Indikator		Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a	Meningkatnya kebebasan sipil dan hak-hak berpolitik bagi masyarakat	1	Indeks kinerja utama	Nilai	100
b	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	1	Indeks demokrasi Indonesia	%	100
c	Ditanganinya potensi konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1	Indeks kewaspadaan nasional	Provinsi	1
d	Meningkatnya kewaspadaan daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan nasional	1	Jumlah daerah yang melaksanakan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan	Nilai	100
e	Meningkatnya Implementasi Nilai-nilai Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	1		Provinsi	1

Sumber: Bentuk Arsip Hasil Kompilasi Rakorentekrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, (2024)

Selanjutnya, sebagaimana surat Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor B-08318/D.05/PP.06.02/05/2024 perihal Penutakhiran Target Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi Tahun 2025 dan 2045, disebutkan bahwa dalam rangka menindaklanjuti terbitnya hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang menghasilkan angka prevalensi stunting tahun 2023 sebesar 21,5% (dari 21,6% di tahun 2022), maka perlu dilakukan penutakhiran terhadap target penurunan prevalensi stunting yang akan dicantumkan ke dalam dokumen perencanaan, baik Pusat maupun Daerah. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khususnya untuk Pemerintah Daerah, yaitu:

a. Target prevalensi stunting nasional pada tahun 2025 mengalami perubahan dari sebesar 13,8% menjadi sebesar 18,8%. Penghitungan tersebut menggunakan pendekatan pencapaian target pada tahun 2045, yaitu sebesar 5% dengan skenario pengurangan jumlah stunting baru per tahunnya sebesar 25%.

b. Target prevalensi stunting di setiap provinsi, digunakan skenario adanya pengurangan jumlah stunting baru sebanyak 26% di setiap daerah. Mempertimbangkan kondisi

stunting daerah yang sangat beragam, maka diperoleh target prevalensi stunting yang berbeda antarprovinsi.

c. Pengurangan jumlah stunting baru setiap tahunnya yang digunakan sebagai pendekatan pemutakhiran target stunting, perlu menjadi perhatian bersama. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penguatan intervensi pencegahan terjadinya stunting dengan fokus pada intervensi 1000 hari pertama kehidupan (HPK) agar penurunan stunting dapat tercapai optimal.

Adapun pemutakhiran target prevalensi stunting Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2025 dan 2045 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.36
Pemutakhiran Target Prevalensi Stunting Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dan 2045

No	Outcome Prioritas	Indikator	Satuan	Usulan Target 2025	Target 2025 Hasil Rakortek	Target Hasil Pemutakhiran		
						Baseline (2024)	2025	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
a	Penurunan Prevalensi Stunting (Lintas K/L)	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	%	12,7	12,7	17,6	15,8	5,6

Sumber: Surat Kesepakatan BPS/Bappenas Nomor B-0611/D.03/PP.06.02/02/2024, (2024)

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB VII

PENUTUP

Tahun 2024 adalah momentum penting dalam perencanaan arah kebijakan, baik di Pusat maupun Daerah. Hal tersebut dikarenakan tahun 2025 merupakan tahun pertama periode pelaksanaan pembangunan jangka panjang dan menengah untuk meletakan fondasi transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai implikasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tetang Daerah Khusus Jakarta, serta berakhirnya periode dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, di tahun 2024 akan disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta secara bersamaan. Oleh karena itu, perencanaan arah kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud sudah harus mempertimbangkan posisi Jakarta ke depan, yaitu "Jakarta Sebagai Kota Global" untuk membawa Jakarta menjadi pusat perdagangan, pusat kegiatan berbagai layanan jasa termasuk layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.

Dalam perkembangannya selama lima dekade, Provinsi DKI Jakarta telah bertransformasi menjadi pusat kegiatan ekonomi terbesar di Indonesia. Capaian indikator makro pembangunan cenderung mengalami performa yang baik, terutama di bidang pertumbuhan ekonomi yang konsisten tumbuh di atas rata-rata nasional, PDRB per kapita tumbuh pesat, sektor tersier yang semakin dominan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta angka pengangguran yang terus mengalami penurunan. Ke depan, tahun 2025 pembangunan Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk penguatan ketahanan kota melalui pembangunan yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan Pertumbuhan Ekonomi diharapkan dapat tumbuh pada kisaran 4,98 – 5,23 persen, Tingkat Kemiskinan turun pada kisaran 3,55 – 3,85 persen, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran 5,54 – 6,40 persen, Indeks Rasio Gini yang diharapkan dapat tumbuh pada kisaran 0,425 – 0,430, Indeks Modal Usaha mencapai 0,62, serta Intensitas Emisi GRK diharapkan dapat mengalami penurunan mencapai 14,68 persen. Adapun tema pembangunan Provinsi DKI Jakarta dalam RKPD tahun 2025 adalah "Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan"

Perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 disusun berorientasi pada pendekatan *money follow program* dengan menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang diimplementasikan melalui beberapa hal:

a. Menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 4 (empat) tujuan, 17 (tujuh belas) sasaran, dan 108 (seratus delapan) strategi utama pembangunan daerah yang ada dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.
b. Menerapkan prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, diantaranya yaitu pencapaian target indikator makro pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2024, penyelesaian isu-isu komprehensif seperti kemiskinan dan stunting, dan penyelesaian isu strategis serta isu kewilayahan.
c. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
d. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain APBN, APBD Provinsi, CSR, KPBU, hibah, maupun sumber pendanaan lain yang sah untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah.
e. Melibatkan secara aktif *stakeholders* di luar pemerintahan (lima *stakeholders* utama, yaitu masyarakat, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan media) dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan menerapkan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

f. Memaksimalkan penerapan sistem informasi baik yang terkoneksi dengan Pemerintah Pusat maupun milik internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya sasaran dan kegiatan strategis pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 juga mengacu dan memperhatikan: (a) Prioritas Nasional dan pokok-pokok arah kebijakan nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2025; (b) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, isu, dan prioritas pembangunan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026; (c) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023; (d) Tantangan global, nasional, maupun tantangan kewilayahan; (e) Dokumen RTRW Provinsi DKI Jakarta; (f) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah serta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2025; dan (g) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)) dan (h) Pembangunan Rendah Karbon.

Mempertimbangkan beberapa hal di atas, 4 (empat) isu pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, yaitu: (a) Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota; (b) Pertumbuhan Ekonomi; (c) Kesejahteraan Masyarakat; dan (d) Tata Kelola Pemerintahan. Isu pembangunan tersebut merupakan satu kesatuan dari isu strategis Provinsi DKI Jakarta untuk jangka menengah (lima tahun) sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Adapun untuk menjawab 4 (empat) isu pembangunan, dirumuskan 4 (empat) prioritas pembangunan untuk tahun 2025, yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota, dengan fokus utama:
   (1) Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik
   (2) Penanggulangan Banjir
   (3) Perbaikan Kualitas Lingkungan
   (4) Penanganan Sampah
   (5) Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT)
   (6) Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum
   (7) Ketahanan Bencana
   (8) Peningkatan Kualitas Udara
   (9) Peningkatan Akses Hunian Layak
b. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, dengan fokus utama:
   (1) Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization*)
   (2) Peningkatan Daya Saing Ekonomi
   (3) Peningkatan Investasi Daerah
   (4) Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction*
   (5) Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja
c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dengan fokus utama:
   (1) Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi
   (2) Percepatan Penuntasan dan Pencegahan Stunting
   (3) Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan
   (4) Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial
   (5) Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan
   (6) Penguatan Ketahanan Pangan
d. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, dengan fokus utama:
   (1) Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik
   (2) Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik
   (3) Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta menjadi Kota Kreatif
   (4) Penciptaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas

Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud, selain diharapkan dapat secara langsung menjawab isu pembangunan, juga diharapkan dapat mendukung ketercapaian 4 (empat) dimensi, 4 (empat) tujuan, dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 serta menjadi langkah utama menuju Jakarta sebagai Kota Global. Keempat prioritas pembangunan tersebut didukung oleh 126 (seratus dua puluh enam) Program Prioritas,

yang mana setiap Program Prioritas memiliki sinkronisasi dengan 8 (delapan) Prioritas Nasional (Asta Cita), dengan rincian sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional 1: 3 program
b. Prioritas Nasional 2: 25 program
c. Prioritas Nasional 3: 25 program
d. Prioritas Nasional 4: 22 program
e. Prioritas Nasional 5: 1 program
f. Prioritas Nasional 6: 7 program
g. Prioritas Nasional 7: 26 program
h. Prioritas Nasional 8: 17 program

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2025, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Dalam menuju Jakarta menjadi Kota Global, RKPD Tahun 2025 menjadi wadah untuk meletakkan fondasi awal, sehingga perlu difokuskan untuk membenahi hal-hal fundamental, terutama pelayanan dasar dan penyelesaian isu strategis perkotaan;
b. Rancangan kegiatan dengan standar kota global perlu dilakukan telaah mendalam, sehingga benar-benar selektif dan output yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi;
c. Sinergi multipihak dan koordinasi efektif, antar pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, dan media dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan di berbagai sektor;
d. Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 memedomani Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025;
e. RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, serta Rancangan APBD Tahun 2025;
f. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai manfaat tinggi bagi masyarakat DKI Jakarta; dan
g. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.

Komitmen serta sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2025 menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berkemahanan, Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan di tahun 2025.

PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

bappeda

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

bappeda.jakarta.go.id

sekretariat.bappeda@jakarta.go.id

Bappeda Provinsi DKI Jakarta
Jl. Merdeka Selatan No.8-9 Gedung Blok G Lt. 2
Jakarta Pusat 10110